

UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

PENGANTAR REDAKSI

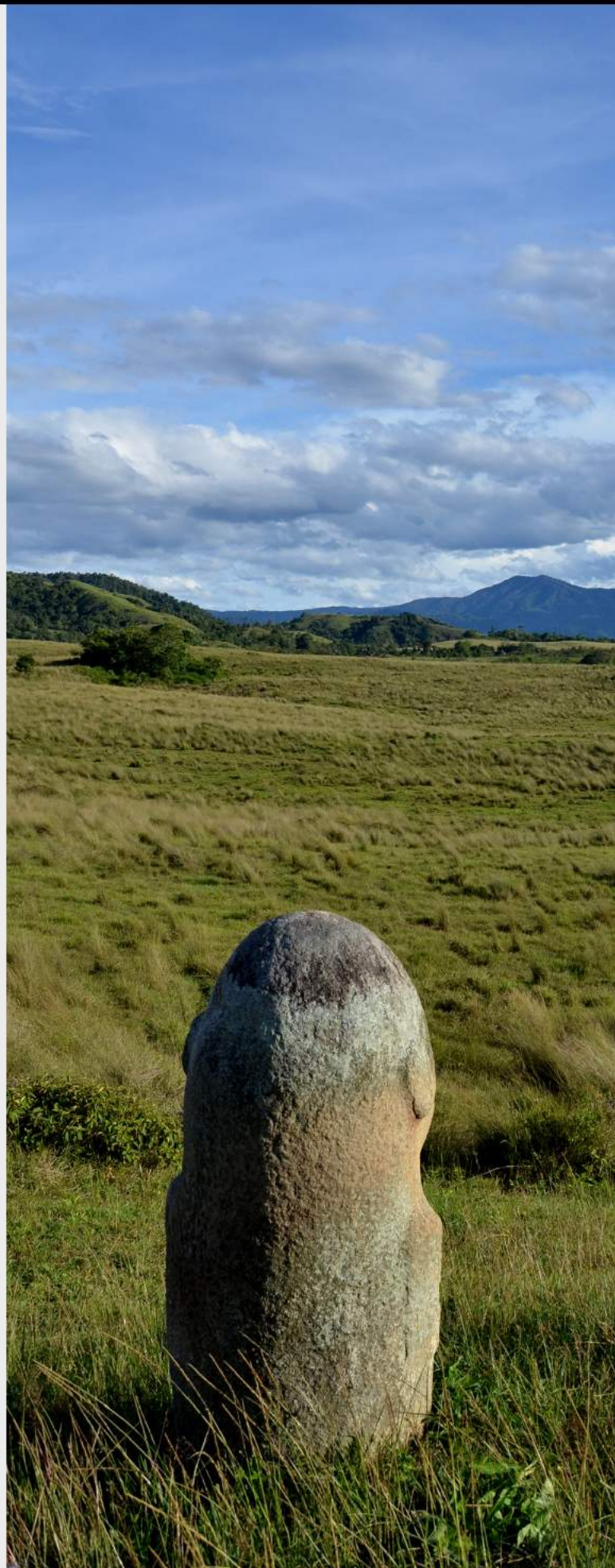
Buletin UMULOLO Vol VI No 01 Tahun 2017, yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, merupakan media informasi yang berupaya memberikan berbagai informasi tentang pelestarian Cagar Budaya sesuai amanah Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam edisi ini tulisan masih membahas dan memberikan secara umum tentang Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia. Diantaranya tulisan tentang Benteng Kastela yang mengangkat tema fungsi ruang wilayah benteng. Kemudian tulisan tentang Evaluasi Hasil Konservasi Lukisan pada Kawasan Gua Prasejarah Karts Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan. Selanjutnya tulisan tentang Tongkonan Sebagai Museum Budaya Toraja yang mengambil studi kasus Tongkonan Ke'te Kesu. Selanjutnya Dari Gua ke Rumah, Tradisi Cap Tangan di Sulawesi Selatan yang mendiskusikan tentang cap hand stancil yang ada di gua dan hand print yang ada di rumah. Dilanjutkan oleh tulisan mengenai Pengelolaan Konflik dalam Pelestarian Cagar Budaya. Selanjutnya Pelestarian Situs Kompleks Makam Belanda di Kabupaten Majene. Lalu ada Promosi Kebudayaan di kabupaten Gorontalo yang membahas perubahan metode dalam promosi cagar budaya. Selanjutnya tulisan tentang Inventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Buol yang mencoba menelusuri potensi-potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dengan terbitnya Bulletin UMULOLO ini dapat menambah referensi tentang pelestarian cagar budaya dan semoga bermanfaat bagi yang membaca.



Salam Budaya
Redaktur Bulletin UMULOLO
Faiz





Sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Pelestarian Cagar Budaya “Pendidikan Karakter Bangsa”



Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dengan wilayah kerja Suluttenggo memiliki peran untuk mewujudkan Pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya/situs, serta meningkatkan pendokumentasian untuk peningkatan mutu informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dalam pembangunan Lintas sektoral melalui:

1. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya
2. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
3. Pelaksanaan zonasi cagar Budaya
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
5. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya, melalui kajian revitalisasi, dan adaptasi
6. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya, dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tugasnya melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya di dalam program kerjanya masih dan lebih memfokuskan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan eksistensi kantor terutama sosialisasi kepada masyarakat luas, inventarisasi cagar budaya, serta melakukan berbagai kegiatan teknis lainnya termasuk penyampaian informasi kepada Dinas terkait dan Perda tentang pendaftaran Cagar Budaya

dan pembentukan tim ahli Cagar Budaya. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mempublikasikan kantor BPCB Gorontalo, sedangkan kegiatan inventarisasi dan kegiatan teknis lainnya seperti penyelamatan, pemugaran, pameran dan lain sebagainya dimaksudkan untuk menjangkau dan mendata potensi serta tindakan pelestarian cagar budaya yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Kegiatan penerbitan Buletin Umulolo merupakan salah satu publikasi terkait kantor maupun upaya-upaya pelestarian terhadap cagar budaya. Memasuki penerbitan Vol VI No 01 Tahun 2017, Buletin Umulolo menampilkan beberapa tulisan yang dirangkum oleh Unit Dokumentasi dan Publikasi. Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mendorong kepada semua staf agar meningkatkan semangat kerja dan dedikasinya dalam upaya pelestarian cagar budaya. Dalam edisi ini tulisan masih membahas berbagai hal secara umum tentang Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia, merangkum tulisan dari berbagai elemen baik itu dari akademisi dan orang-orang yang berkecimpun dalam pelestarian cagar budaya.

Kami berharap dari penerbitan bulletin ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta dapat menjadi salah satu media dalam pengenalan dan penyebar luasan informasi tentang pelestarian cagar budaya.

Sangat disadari bahwa penerbitan Buletin Umulolo ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan agar penerbitan di masa-masa mendatang lebih baik.

Gorontalo, November 2017
Kepala BPCB Gorontalo

Zakaria Kasimin
NIP. 196512101993031001

REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Balai Pelestarian Cagar
Cagar Budaya Gorontalo
Drs. Zakaria Kasimin

Pemimpin Redaksi

Faiz

Penyunting/Editor

Albertinus
Rosalina Rambung
Sri Suharjo

Desain Grafis

Andi Muliadi
Ajeng Wulandari
Fitra

Sekretariat

Nivia Oklisye
Hadi Saputro
Haerani Umar
I Ketut Sudarsa
Filya Polapa

KONTRIBUTOR

Tim BPCB Gorontalo

Staf BPCB Gorontalo

Muhammad Nur, MA

Dosen Jurusan Arkeologi Universi-
tas Hasanuddin

Yadi Muliadi, M.A

Dosen Jurusan Arkeologi Univer-
sitas Hasanuddin

Mubarak Andi Pemapng, M.A

Staf Balai Pelestarian Cagar
Budaya Sulawesi Selatan

Irwansayh B. Zese, S.S

Staf Balai Pelestarian Cagar
Budaya Maluku Utara

Iswadi, S.S

Staf Balai Pelestarian Cagar
Budaya Sulawesi Selatan

Yusriana, M.Hum

Staf Balai Pelestarian Cagar
Budaya Sulawesi Selatan

Yulianti Aliyah, M.Med Kom

Kasubag. Keuangan Perencanaan,
Dinas Kominfo Kab. Gorontalo

Nur Ihsan, M.Hum

Dosen Jurusan Arkeologi Univesi-
tas Halu Oleo



UMULOLO

Foto Sampul

Patung Loga
Volume VI
Tahun 2017

Segala materi dan isi dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak/menggandakan tanpa seizin Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo



Rumah Belanda/Controleur

Sajian Edisi Ini

6

Mengungkap Misteri Situs Leato, Gorontalo

20

Studi Keterawatan Cagar Budaya Waruga Nima Wanua

36

Dari Gua ke Rumah, Tradisi Cap Tangan di Sulawesi Selatan

45

Mengelola Konflik dalam Pelestarian Cagar Budaya

51

Tongkonan Sebagai Museum Budaya Toraja Studi Kasus: Tongkonan Ke'te Kesu Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan

65

Benteng Kastela "Riwayatmu Dulu dan Kini" Antara Perlindungan dan Ruang Hunian

70

Evaluasi Hasil Konservasi Lukisan Pada Kawasan Gua Prasejarah Karts Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan

84

Pelestarian Situs Kompleks Makam Belanda di Kabupaten Majene

93

Promosi Cagar Budaya di Kabupaten Gorontalo

100

Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

109

Pascaprosesualisme/Pascamodernisme?; Sebuah Kilas Balik Perdebatan Lama

MENGUNGKAP MISTERI SITUS LEATO, GORONTALO

Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo 2015 dan 2017

Sekilas Sejarah Perang Dunia Ke-2

Peristiwa Perang Dunia II di wilayah perairan laut Indonesia dapat dikatakan sebagai "arena pertarungan" kekuatan armada laut dua negara yakni angkatan perang Amerika Serikat dan angkatan perang Jepang. Peperangan ini kian populer dan dikenal sebagai Perang Pasifik atau Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya) sejak 8 Desember 1941. Saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. A.W.L. Tjarda van Starckenborgh di Batavia mengeluarkan maklumat perang terhadap Jepang, kemudian Jepang membalas maklumat perang tersebut tepat pada 1 Januari 1942 dengan menyatakan perang terhadap Amerika dan sekutunya.

Perang pasifik yang terjadi dalam kurun tahun 1942 hingga 1945 di Indonesia, secara tidak langsung memberikan dampak terhadap "kekacauan" jalur pelayaran dan perniagaan perusahaan maskapai pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), sekaligus menimbulkan kerugian perusahaan tersebut sejak didirikan tahun 1870 dengan melayani jalur pelayaran langsung dari Belanda ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Letak Kota Gorontalo yang berada di sebelah Utara Teluk Tomini, menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan berlabuhnya berbagai kapal uap yang dimiliki Hindia Belanda sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Perusahaan pelayaran Hindia Belanda yang hadir saat itu yakni Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau diakronimkan KPM. Jalur Pelayaran Teluk Tomini merupakan akses laut yang menghubungkan wilayah Gorontalo - Poso - Mapene - Gorontalo.

Kehadiran perusahaan pelayaran KPM milik Hindia Belanda di Gorontalo secara resmi dimulai saat dibukanya jalur pelayaran yang menghubungkan Gorontalo - Manado - Kema - Ternate serta kesepakatan kontrak pelayaran di Teluk Tomini dari Asisten Residen Sulawesi Tengah A.J.N Engelenberg pada tanggal 4 September 1888.

Dampak langsung perang pasifik di Gorontalo yakni pada 19 Januari 1942, saat itu pasukan Vernielingscorps membakar sebuah kapal milik KPM yang sedang berlabuh tidak jauh dari pangkalan Wedloop Societeit Gorontalo di dekat Pabean (sekarang pangkalan Pertamina). Vernielingscorps atau pasukan penghancur yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda melalui Asisten Residen Gorontalo yakni Beny Corn merupakan pasukan yang bertujuan untuk membunuh berbagai bangunan vital yang dimiliki Hindia Belanda saat Jepang berhasil menginvasi Manado pada 10 Januari 1942.

Potensi Cagar Budaya Bawah Air Indonesia

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (kini Departemen Kelautan dan Perikanan) telah menginventarisasi kapal karam atau kapal tenggelam sebelum Perang Dunia II. Setidaknya terdapat di 463 lokasi untuk periode antara tahun 1508 sampai 1878. Umumnya kapal karam tersebut adalah kapal dagang VOC, kapal Portugis, kapal Amerika, kapal Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, dan Asia (Cina, Jepang, Nusantara). Dari 463 lokasi itu baru 43 lokasi yang telah berhasil disurvei. Namun, hanya 10 lokasi yang benda muatannya telah diangkat. Ada sekitar 300.000 benda yang terangkat dari dasar laut dan kini tersimpan di gudang khusus Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Cileungsi, Bogor. Kesepuluh titik yang telah diangkat benda berharganya umumnya dari perairan Jawa dan Sumatera. Pengangkatan benda di perairan Jawa adalah di situs Blanakan, Kabupaten Subang, tahun 1998; Karangsong, Cirebon (2004); Karawang, Jabar, (2008); Pulau Karang Cina, Kepulauan Seribu, Jakarta; serta di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada 2008. Di perairan Sumatera, yang terlama dilakukan di Pulau Buaya, Kepulauan Riau, pada 1998. Selain itu, di Pulau Intan, di Selat Gelasa, Bangka Belitung; Teluk Sumpat di Tanjung Pinang; dan Karang Heluputan di Kepulauan Riau, tahun 2006.

Benda temuan serupa situs Karang Heluputan juga ditemukan di perairan Kepulauan Seribu, Bangka Belitung, Cirebon, dan Kalimantan Barat. Khusus di Kepulauan Seribu ditemukan 11.000 benda terbuat dari aneka logam, seperti emas, perak, perunggu, dan timah. Temuan-temuan itu diduga berasal dari abad ke-10 Masehi. Dari identifikasi sebagian badan kapal, kapal itu buatan Indonesia yang berlayar dari Ibu Kota Sriwijaya, Palembang, menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur.

Medio 2008 di Desa Punjulharjo, Rembang, Jawa Tengah, sejumlah warga menemukan perahu kuno yang relatif utuh, sekitar 1 km dari pantai. Perahu itu berukuran lebar 4 m dan panjang 15,60 m. Profesor Pierre-Yves Manguin, arkeolog maritim asal Prancis, yang diundang Balai Arkeologi Yogyakarta untuk meneliti perahu tersebut menyatakan, perahu Rembang berasal dari zaman peralihan Kerajaan Mataram Kuno ke Sriwijaya, periode antara tahun 670-780 Masehi. Teknologi pembuatan perahu menggunakan tambuktu atau balok tempat pasak yang diperkuat dengan ikatan tali ijuk. Di perahu itu ditemukan benda seperti tempurung kelapa, potongan tongkat, dan kepala arca perempuan Cina berdandan Jawa.

Diduga perahu itu merupakan perahu dagang antar pulau. Pada tahun 2008, sebuah perahu kuno ditemukan di Bengawan Solo, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur. Tahun 2010 ditemukan lagi tiga perahu kuno yang juga diperkirakan berusia ratusan tahun, di dasar sungai yang terletak di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu dan di Kecamatan Malo. Identifikasi awal menyatakan panjang perahu mencapai 30 m dengan lebar 4 m. Perahu tersebut lebih panjang dibandingkan dengan temuan perahu kuno pada 2006 di Desa Padang, Kecamatan Malo, yang diketahui asal Thailand buatan tahun 1312.

Ruang Lingkup Arkeologi Bawah Air

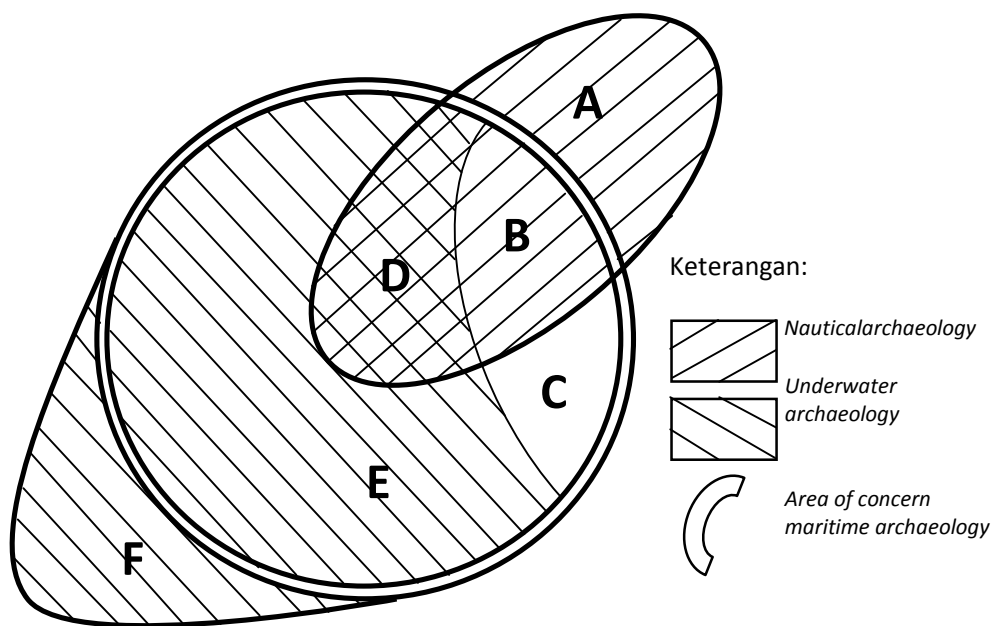
Penelitian ABA pertama kali dibicarakan pada 1936. Pada 1956 UNESCO baru mengeluarkan keputusan penting ABA, sekaligus melaksanakan berbagai ekspedisi. ABA yang termasuk dalam kajian Arkeologi Maritim (AM) masih merupakan bidang baru di Indonesia. Perkembangannya sangat lamban. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mulai menguji-coba kegiatan ABA pada 1981, bekerja sama dengan pasukan katak dari Armada RI Wilayah Timur. Banyak kendala menyebabkan ABA sulit terlaksana secara ideal di Indonesia. Kendala terbesar masalah tenaga, biaya, dan hukum laut. Sekadar gambaran, untuk penyelaman di laut dangkal (100-200 kaki atau 30-60 meter), dibutuhkan minimal empat orang bersertifikat. Untuk laut dalam, tentu lebih banyak lagi, termasuk besaran pengeluaran biaya.

Prinsip teori dan metodologi studi arkeologi di daratan memiliki banyak kesamaan tujuan secara umum dari penelitiannya dengan studi arkeologi bawah air. Perbedaan arkeologi di daratan dengan arkeologi bawah air terletak pada teknik dan peralatan penelitian yang digunakan mengingat temuannya berada didalam lingkungan air, sehingga studi arkeologi bawah air harus memiliki kemampuan menyelam bersertifikat, dan peralatan yang digunakan seluruhnya berorientasi pada lingkungan air dan menunjang setiap aktifitas di bawah air. Sementara dalam studi arkeologi bawah air yang dikemukakan oleh Keith Muckelroy (1978) menjelaskan melalui diagram dan ilustrasi ruang lingkup arkeologi maritim dan hubungannya dengan arkeologi pelayaran dan arkeologi bawah air dalam buku *Maritime Archaeology* sebagai berikut :

Penjelasan diagram melalui terjemahan bebas yang dikutip langsung dari Muckelroy yakni; Studi yang menjadi perhatian dalam buku *Maritime Archaeology* adalah yang terdapat pada diagram bulatan ganda diatas, dan tidak termasuk dalam bagian kecil dari setiap topik. Dalam kasus arkeologi pelayaran (nautical archaeology), kapal dan perahu yang ditemukan bukan dalam konteks maritim, khususnya temuan terkubur (area A). Pada kasus arkeologi bawah air, ditemukan pada situs yang tidak berkolerasi langsung dengan aktifitas kemaritiman, khususnya terendam pada suatu daratan kuno (area F). Namun hal tersebut diatas, hanyalah mencakup bagian studi terkecil dari pekerjaan bawah air; hal paling penting dalam peristiwa maritim dan merupakan bagian yang relevan antara studi teknologi kemaritiman (area D) serta aspek lain dari kebaharian (area E). Bagian tambahan lainnya, dikatakan bahwa bagaimana pun juga arkeologi maritim termasuk dalam studi situs yang tidak terendam dan hanya mencakup kajian yang berkolerasi dengan bukti dan aktifitas pelayaran, contohnya berupa perahu di pantai (area B), atau mengenai keseluruhan aktifitas maritim dimasa lalu, contohnya situs yang airnya kering (areas B dan C). Tetapi contoh dibagian akhir tersebut memang pada awalnya berada di bawah air, namun tidak ada salahnya jika hampir seluruh bukti tersebut harus berada pada situs yang terendam, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupan ini terbatas pada lingkungan bawah air dan menjadikannya salah satu ciri pokok dari sub-disiplin dalam ilmu ini (Muckelroy, 1978).

Berangkat dari Dugaan Masyarakat

Informasi yang berkembang di masyarakat luas menyebutkan, bahwa kapal yang terdapat di pantai Leato, Kota Gorontalo merupakan kapal kargo Jepang, bernama

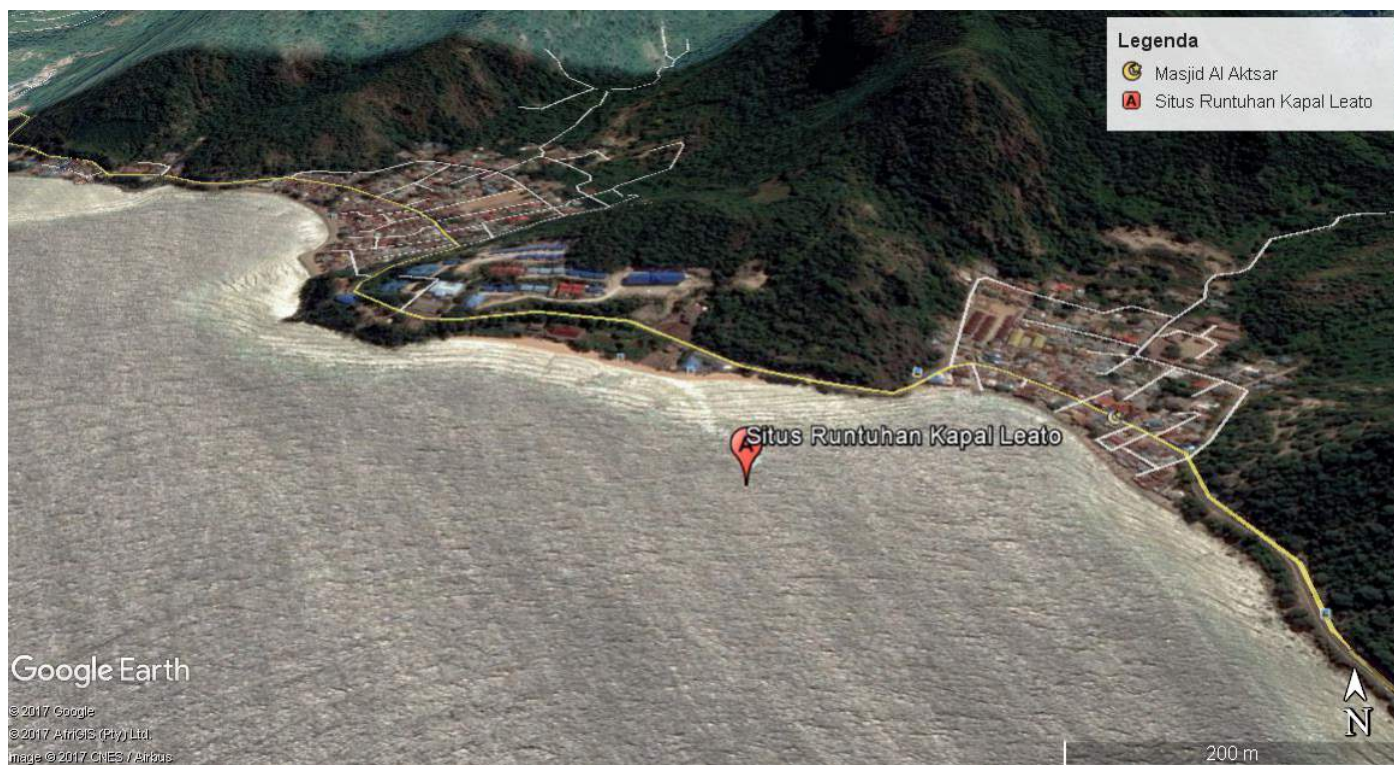


Ilustrasi diagram ruang lingkup arkeologi maritim dengan hubungan kajian arkeologi pelayaran dan arkeologi bawah air (Muckelroy, 1978: 9).

Kyosei Maru atau Kosei Maru yang tenggelam antara tahun 1957-1958 akibat kebakaran yang terjadi di kapal tersebut.

Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pemetaan dan Dokumentasi Potensi Cagar Budaya Bawah Air BPCB Gorontalo, kapal kargo Jepang bernama Kyosei Maru atau Kosei Maru tidak tenggelam di Gorontalo, melainkan

Dalam penyelaman yang di lokasi situs yang diduga runtuh kapal kargo Jepang memperlihatkan bahwa posisi reruntuhan kapal tersebut berada di tebing laut (continental slope) dengan posisi buritan sampai lambung (hull) kapal dalam kondisi terbalik yang melintang dari arah Barat Laut. Bagian geladak utama dalam kondisi pecah dan patah sampai dibagian haluan kapal yang melintang dari arah



Lokasi Situs runtuhan kapal di Leato, Kota Gorontalo. (Citra Digital: 2017).

tenggelam di wilayah kepulauan pasifik. Terdapat 2 nama kapal Kyosei Maru, Pertama adalah Kyosei Maru yang tenggelam sekitar tahun 1924 merupakan tipe kapal kargo uap dibuat pada tahun 1897 oleh perusahaan dari Sunderland, Inggris yakni Doxford and Sons Ltd. Kapal ini pertama digunakan oleh perusahaan Clan Line Steamers Ltd. - Cayzer, Irvine and Co Ltd. yang bemarkas di London dengan menggunakan nama kapal SS Clan Robertson dari periode 1897-1922. kemudian digunakan oleh Jepang pada periode 1922-1924 melalui Kyosei Kisen K.K. Kobe dan berganti nama menjadi Kyosei Maru. Kapal Kyosei Maru dilaporkan tenggelam dan kehilangan kontak pada tanggal 06 Januari 1924 di sekitar perairan pasifik.

Lokasi ditemukannya dugaan reruntuhan kapal kargo Jepang tersebut berada di titik koordinat Lintang Utara (LU) 00° 29' 08" – Bujur Timur (BT) 123° 04' 58,8". Secara administratif wilayah tersebut berada di wilayah Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif perairan di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango.

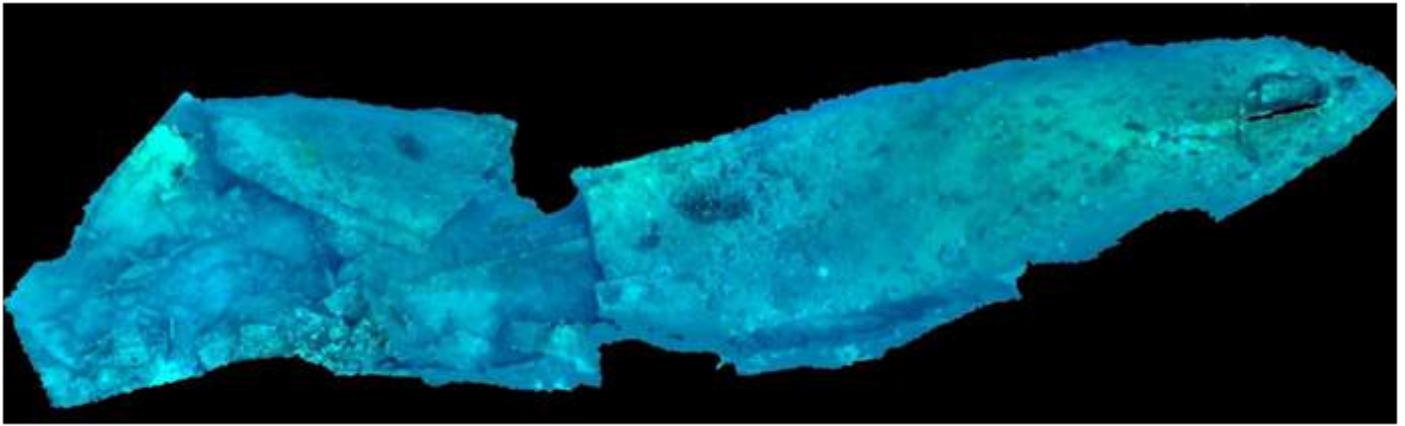
Setelah dipastikan bahwa lokasi tersebut merupakan dugaan reruntuhan kapal kargo Jepang, dengan melihat indikasi arkeologis yang secara fisik memiliki konstruksi kapal kargo berbahan besi.

Tenggara. Bentuk patahan lambung kapal terbagi menjadi tiga bagian, yakni patahan pertama terdiri dari bagian buritan kapal sampai lambung tengah, bentuk patahan kedua terdapat dibagian geladak utama kapal, dan bagian patahan yang ketiga terdapat dibagian haluan. Sedangkan disisi utara dan selatan terdapat beberapa bagian kapal sisa



Proses pengukuran reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang menggunakan sistem *baseline* sebagai tali referensi untuk memperoleh metrik kapal. (Dok. BPCB Gorontalo: 2015).

pecahan dan lepas di bagian konstruksi kapal, berupa tiang kapal sebanyak tiga buah yang melintang ke utara, bagian pecahan dinding lambung dan haluan kapal terletak di



Visual fotogrametri runtunan kapal yang diduga kapal kargo Jepang di Situs Leato, Kota Gorontalo. (BPCB Gorontalo: 2017).

sisi utara haluan serta sisi selatan lambung hingga bagian buritan kapal.

Hasil yang diperoleh secara keseluruhan reruntuhan kapal memiliki panjang mencapai 40 meter. Sementara bagian baling-baling kapal yang tersisa saat ini terlihat memiliki tiga helai daun dengan diameter 190 cm. Tiap helai daun baling-baling tersebut memiliki ukuran rata-rata 90 cm.

Pencatatan yang diperoleh dari hasil survei penyelaman di lokasi yang diduga reruntuhan kapal kargo Jepang, menunjukkan adanya indikasi merupakan tipe kapal yang memiliki fungsi sebagai kapal muatan atau kargo. Kapal berbahan besi karbon (carbon steel) tersebut memiliki metrik kapal mencapai 40 meter dengan lebar kapal mencapai 8 sampai 12 meter dan tinggi kapal yang diukur dari bagian dinding kapal yang terdapat di sisi Selatan mencapai 8 meter.

Keletakan reruntuhan badan kapal berada dibagian slope (tebing) pantai dengan posisi kemiringan $\pm 30^{\circ} - 45^{\circ}$. pada bagian buritan selain masih menyisakan propeller, dibagian belakang dengan kedalaman sekitar 38 meter terlihat bagian ruang belakang buritan dan beberapa bagian besi teralis yang mengalami kondisi kerusakan dan mengalami pengendapan lumpur. Bagian lambung kapal



Posisi dan kondisi *propeller* (baling-baling) yang masih dilengkapi dengan *propeller bracket*, *bulge keel* dan *stern tube*. (Dok. BPCB Gorontalo 2015).

memiliki bentuk huruf U dan memiliki bagian baling dengan sistem konstruksi mesin yang terdiri dari linggi buritan (stern frame), penyangga baling-baling (propeller bracket), kemudi kapal, dan tabung poros baling-baling (stern tube) serta dibagian penyangga baling-baling masih dilengkapi bagian lunas lambung (bulge keel).

Pada bagian Utara dan Selatan buritan kapal terdapat bagian-bagian kulit lambung dinding buritan kapal yang terlepas dan terendap serta berasosiasi dengan coral-coral baru di wilayah perairan tersebut. Sisi bagian kanan dan kiri merupakan kulit luar dari lambung kapal yang mengalami pecah dan menampakkan bagian-bagian konstruksi gading yang digunakan kapal tersebut. Selain menampakkan bagian konstruksi gading, bagian dalam lambung kapal pun memperlihatkan besi-besi ruang atau palka yang digunakan kapal tersebut.

Sejumlah sebaran temuan lainnya yang berada di sekitar reruntuhan kapal pun masih terlihat, berupa bagian kulit luar dari lambung kapal yang terlepas akibat adanya proses kerusakan yang dialami ketika mengalami karam di dasar laut.

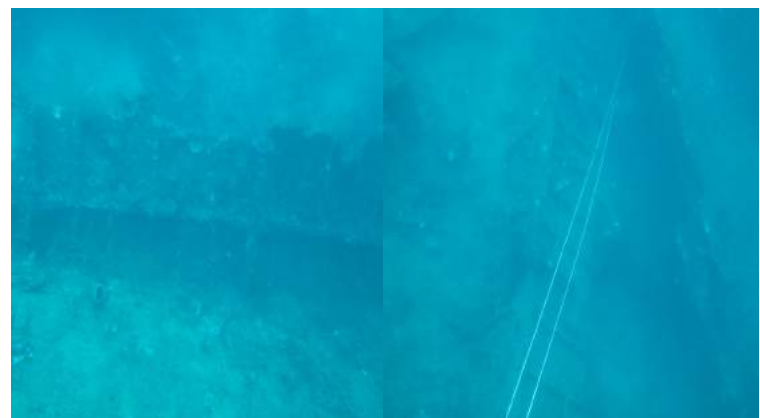


Foto kiri memperlihatkan bagian kulit lambung yang terlepas dari bagian alas kapal, dan foto kiri merupakan bagian besi palka yang menjadi konstruksi ruang kapal. (Dok. BPCB Gorontalo: 2015).

Geladak utama yang dijumpai, memiliki kondisi kerusakan yang terparah. Bagian geladak utama, terlihat patah/ pecah menjadi empat bagian yang merupakan bagian kulit lambung dan berbagai besi-besi palka yang mengalami kerusakan.

Haluan kapal pun mengalami hal yang serupa dengan geladak utama, kondisi yang rusak dan berada pada lokasi terdalam mencapai 54 meter. Pada bagian haluan ini di sisi kanan bagian depan terdapat sebuah jangkar kapal. Sementara disebelah kiri tepatnya arah Utara, terlihat sebaran temuan lainnya berupa kulit lambung bagian haluan, tiang-tiang kapal yang bulat dan dari bagian tiang kapal tersebut umumnya berbahan besi.

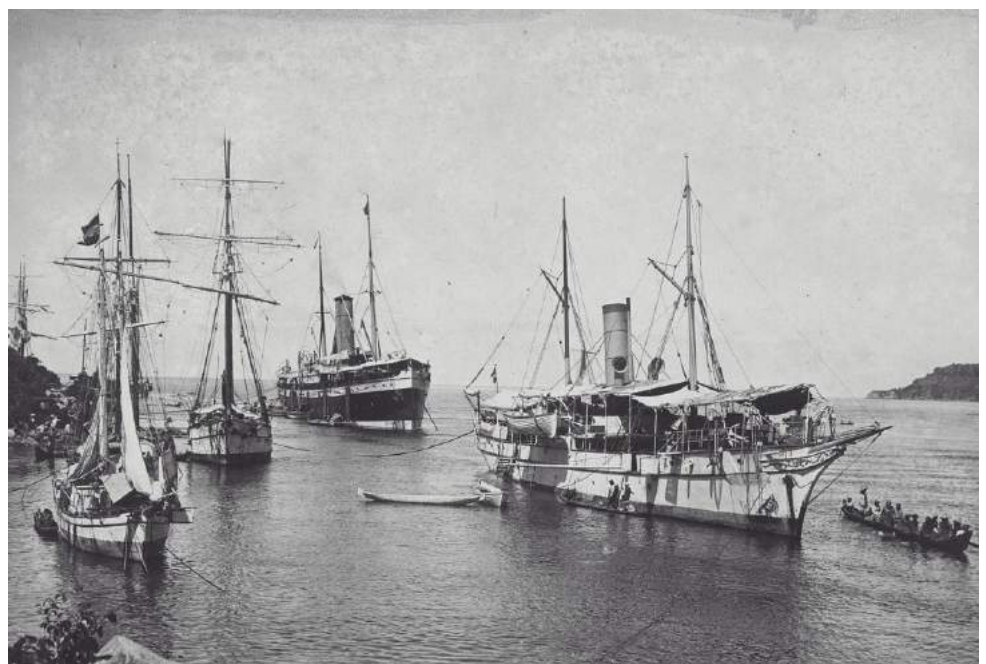
Mengungkap Fakta Archaeological – History

Bukti terkait melalui hasil artefaktual yang terdapat pada sebuah reruntuhan kapal yang diduga merupakan kargo Jepang tersebut secara pengamatan langsung memang cukup sulit untuk dikenali, sebab nama kapal atau emblem yang seringkali terdapat dibagian sisi depan anjungan atau bagian belakang buritan tidak ditemukan. Begitupun juga dengan upaya memperoleh sejumlah sebaran temuan atau yang diduga memiliki muatan kapal belum diperoleh. Namun secara literasi dan dokumentasi tentang jalur pelayaran dan perdagangan Gorontalo di masa lalu cukup menjadi dasar secara ilmiah, bahwa wilayah perairan tersebut memiliki potensi terdapat sebaran lokasi kapal-kapal karam yang berada pada kisaran waktu abad ke-18 sampai abad ke-19.

Rosenberg (1865) menyebutkan, bahwa ibukota Gorontalo berada didalam wilayah kerajaan yang dikuasai oleh jabatan asisten residen dan memiliki wewenang untuk menjadikannya sebagai salah satu pusat perdagangan untuk berbagai kapal uap dan menempatkan kapal perang untuk menghalau para perompak atau bajak laut di wilayah Teluk Tomini (Hal, 15). Di masa itu mulai terlihat peranan Gorontalo sebagai salah satu kota pelabuhan sekaligus menjadi wilayah transito yang cukup ramai di Indonesia (Hasanuddin, 2014). Kemudian hal ini didukung dengan letak geografis Gorontalo yang berada diantara dua perairan laut terbuka, yakni Laut Selat Sulawesi yang terletak di bagian Utara Gorontalo dan Perairan Teluk Tomini yang terletak di bagian Selatan Gorontalo atau tepatnya Teluk yang menghubungkan antara wilayah Kepulauan Tojo Una-una, Luwuk, Banggai, Parigi Moutong, dan Poso Pesisir di Sulawesi Tengah, wilayah pesisir selatan Bolaang Mongondow, pesisir Minahasa Tenggara, Minahasa, Bitung, dan Manado di Sulawesi Utara, hingga Teluk Tomini yang berbatasan langsung dengan Selat Maluku yang menghubungkan wilayah Ternate sebagai pusat perdagangan rempah yang tersohor pada masa kesultanan Ternate yang dijuluki sebagai penguasa 72 pulau

bernama Sultan Babbullah pada tahun 1570-1583. (Amal, 2001: Hal.34).

Aktifitas perniagaan dengan perdagangan maritim dilakukan di Gorontalo ikut mendorong perkembangan perniagaan dan pelabuhan yang berada di kawasan Teluk Tomini. Hasanuddin (2014) menyatakan, bahwa pada abad ke-16 kegiatan pelayaran niaga di kawasan Gorontalo dijalankan oleh para pedagang Bugis-Makassar dengan menggunakan perahu-perahu tradisional, bahkan beberapa diantaranya menggunakan kapal-kapal yang disewa para pedagang Cina untuk membawa komoditas perdagangan mereka ke negeri Cina. Bahkan kemajuan perdagangan maritim di Gorontalo ikut mendorong Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk mengambil alih jalur perniagaan tersebut dengan mengirimkan Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge dengan didampingi utusan kesultanan Ternate ke Gorontalo dan melakukan pertemuan dengan para Olongia (raja-raja/ pembesar) Gorontalo – Limboto pada tang 27 September 1677. Disebutkan pula, bahwa salah satu hasil pertemuan dari perjanjian yang dikemukakan Padtbrugge adalah meminta wilayah sungai Gorontalo harus dibuka untuk kepentingan pelayaran kapal-kapal VOC. Penguasaan sistem jalur perniagaan dan pelayaran yang dilakukan VOC tersebut secara langsung pun memberikan batasan bagi para penguasa di Gorontalo untuk mengatur politik dagang dan perekonomian di wilayahnya. Terutama di abad ke-18 VOC memonopoli komoditas emas dengan melarang aktifitas pelayaran dan perdagangan bagi orang-orang asing di sungai-sungai dan pelabuhan Gorontalo dan membangun sejumlah benteng di Kwandang (Fort Undango Ota Mas, Fort Oranje, dan Fort Sumalata). Kemudian di abad ke-19 pemerintah Belanda tertanggal 9 Januari 1828 meminta Jogugu Muhammad Iskandar Monoarfa melalui peraturan pelayaran tentang kapal-kapal yang mengalami kecelakaan di perairan



Gambar 1 Foto yang diperkirakan diambil sekitar 1900 sampai 1920 dengan memperlihatkan kapal-kapal uap Belanda yang berlabuh di pantai Gorontalo wilayah perairan Teluk Tomini. (Sumber: <http://tropenmuseum.nl>).

Gorontalo untuk memerintahkan penduduk memberikan bantuan bagi kapal-kapal yang mengalami karam, diantaranya kapal tersebut milik pemerintah Hindia Belanda dan kapal pribumi serta seluruh hasil muatannya wajib diamankan (Hasanuddin, 2014: 32-34). Dalam periode ini, kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 32 tanggal 27 April 1847 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendataan Kapal dan Perahu yang Berlabuh dan Berlayar di Wilayah Gorontalo, berdasarkan batas wilayah pelabuhan, kegiatan ekspor dan impor, dan pelayaran Niaga (Kartodirdjo, dkk, 1973 dalam Hasanuddin, 2014: 35). Melalui catatan itu Hasanuddin (2014) disebutkan bahwa terdapat dua jenis aktifitas pelayaran yakni pelayaran yang dilaksanakan di Kepulauan Hindia Belanda (kustvaart) dan aktifitas pelayaran ke pelabuhan asing (scheepvaart) (Hal. 35).

Kemudian melalui perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda meminta dilakukan negosiasi jalur pelayaran Teluk Tomini untuk menghubungkan wilayah Gorontalo – Poso – Mapene – Gorontalo dengan menggunakan perusahaan pelayaran Hindia Belanda, yakni Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Kehadiran perusahaan pelayaran Belanda merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi bagi perniagaan laut Teluk Tomini di pelabuhan Gorontalo dengan memperluas wilayah pelayanan pengiriman komoditas perdagangan bagi wilayah-wilayah kepulauan Hindia Belanda yang telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda (Campo, 2002: 73). Keberadaan perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij Hindia Belanda di Gorontalo secara resmi berada di Gorontalo pada tanggal 4 September 1888 dengan membuka jalur baru pelayaran yang menghubungkan Gorontalo – Manado – Kema – Ternate (Hasanuddin, 2014: 50) Disebutkan juga oleh Campo (2002), perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij menyepakati kontrak pelayanan pelayaran di Teluk Tomini dari Asisten Residen Sulawesi Tengah A.J.N. Engelenberg (Hal. 73).



Gambar 1 Foto yang diperkirakan diambil antara tahun 1900-1940, berupa Kapal Uap "S.S. Van Imhoff" yang berlabuh di Pelabuhan Gorontalo. (Sumber: <http://tropenmuseum.nl>).

Kedatangan kapal-kapal Belanda dengan tipe kapal uap di Gorontalo tidak terlepas dari peran perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij yang membuka akses jalur pelayaran di perairan Teluk Tomini. Kapal-kapal uap yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo umumnya mengangkut kopra, coklat, kopi, kayu cendana, damar, rotan, dan lilin sebagai komoditas ekspor perdagangan yang akan ditujukan atau didistribusikan oleh KPM menuju ke Makassar untuk diekspor ke Amerika dengan menggunakan kapal-kapal milik Silver JPL Klaveness, selain menjadi kapal pengangkut untuk komoditas perdagangan (kargo) kapal uap yang berlabuh di Gorontalo juga menjadi kapal angkutan untuk kepentingan Kantor Telegraf dan Pos Gorontalo serta angkutan penumpang sipil, sehingga memberikan akses komunikasi yang lebih terbuka (Hasanuddin, 2014:51).



Gambar 1 Sambutan kedatangan orang-orang Belanda dengan menggunakan kapal uap di Gorontalo oleh pemerintah Asisten Residen Gorontalo dengan angka tahun pengambilan foto tidak diketahui. (Sumber: <http://tropenmuseum.nl>).

Memasuki fase awal pecahnya Perang Dunia Ke-2 di Benua Eropa sejak tahun 1939 dan pada tanggal 8 Desember 1941 meluas menjadi perang pasifik atau disebut oleh Jepang Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya) yang saat itu Gubernur Jenderal Hindia Jhr. A.W.L. Tjarda van Starckenborgh di Batavia mengeluarkan maklumat perang terhadap Jepang. kemudian pada tanggal 1 Januari 1942 Jepang pun menyatakan perang terhadap Hindia Belanda setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Jepang kepada Hindia Belanda dan sekutunya ditolak (Himawan, Bantu, & Pribadi, 2010).

Sejak pecahnya perang pasifik di Indonesia dalam kurun waktu 1942 hingga 1945, yang akhirnya membuat berbagai jalur pelayaran dan perniagaan oleh perusahaan maskapai pelayaran Hindia Belanda Koninklijke Paketvaart Maatschappij menjadi terhenti. Catatan informasi yang dirilis www.theshiplist.com menyebutkan, bahwa peralihan pelayaran oleh perusahaan pelayaran KPM tersebut mengalami gangguan dan kerugian yang sangat besar sejak pecahnya perang dunia ke-2 setelah

perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1870 untuk melayani jalur pelayaran langsung untuk penumpang dari Belanda ke Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1948 perusahaan KPM Hindia Belanda mengatur kembali rute baru Afrika Selatan – Amerika Selatan, dan antara Belanda – Teluk Persia – India. Kemudian seiring pula dengan ditutupnya jalur pelayaran dan niaga oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957, yang masih menyisakan kapal penumpang untuk dialihkan menjadi layanan keliling dunia yakni Java – New York. Dan secara resmi seluruh perdagangan yang melalui jalur laut di Indonesia yang berada dibawah bendera perusahaan Belanda secara resmi dihentikan pada tahun 1960 dengan mengalihkannya ke Bombay, India sebagai jalur terakhirnya.

Vessel	Built	Years in Service	Tons
Celebes (1)	1884	1893 purchased from N.V. Stoomvaart Maats. Phoenix, Amsterdam, 1897 sold to N.V. Koninklijke Paketvaart Maats., Amsterdam.	2,321
Celebes (2)	1907	1918-1919 taken over by U.S. Shipping Board, 1926 sold to Vereenigde Nederlandsche Scheep. Maats., renamed Rijperkerk.	5,875
Celebes (3)	1943	completed by Germans as Navy supply ship, 1946 returned to Holland, 1966 sold to Peru renamed Paracas.	9,406

Tabel 1 Kapal Uap dan berat muatannya yang diberi nama Celebes untuk yang diduga melayani rute-rute di perairan Sulawesi. (Sumber: www.theshiplist.com, di akses tanggal 27 Desember 2015).

Vessel	Built	Years in Service	Tons
Balingkar	1921	ex- Werdenfels (Hansa Line), 1940 seized by Holland renamed Balingkar, 1942 torpedoed and sunk.	6,318
Berakit	1924	ex- Vogtland (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland renamed Berakit, 1943 torpedoed and sunk.	6,608
Fort Nassau	1943	ex- Cape Sable, 1943 purchased by Dutch Gov't from USA renamed Fort Nassau managed by Netherlands SS Co, 1946 sold to Royal Netherlands SS Co., Amsterdam renamed Delft.	5,301

Groote Beer	1944	ex- Costa Rica Victory, 1947 purchased by Dutch Gov't from USA for use as troopship, renamed Groote Beer managed by Netherlands SS Co., 1951 rebuilt as emigrant ship and transferred to Holland America Line.	7,630
Hugo de Groot	1944	ex- J. H. Drummond, 1943 purchased by Dutch Gov't from USA renamed Hugo de Groot managed by Netherlands SS Co., 1950 acquired by N.V. Reed-erij, Amsterdam renamed Amstelpark.	7,254
Jan Steen	1942	ex- Ocean Victory, 1943 purchased by Dutch Gov't from Ministry of War Transport, London renamed Jan Steen managed by Netherlands SS Co., 1946 acquired by N.V. Reederij, Amsterdam renamed Amstelveen.	7,148
Kentar	1920	ex- Naumburg (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland renamed Kentar, 1942 torpedoed and sunk; loss of 37 lives.	5,878
Mangkali-hat	1928	ex- Lindenfels (Hansa Line), 1940 seized by Holland renamed Mangkali-hat, 1943 torpedoed and sunk.	7,457
Mariso	1930	ex- Bitterfeld (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland re-named Mariso, 1943 torpedoed and sunk.	7,659
Mendanau	1922	ex- Cassel (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland re-named Mendanau, 1942 torpedoed and sunk.	6,047
Noesaniwi	1936	ex- Wuppertal (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland re-named Noesaniwi, 1946 transferred to Rotterdam Lloyd.	6,737

Sembilangan	1923	ex- Wasgenwald (Hamburg America Line), 1940 seized by Holland re-named Sembilangan, 1943 torpedoed and sunk; loss of 86 lives.	4,990
Terborch	1944	1944 purchased by Dutch Gov't from Ministry of War Transport, London, managed by Netherlands SS Co, 1946 sold to Holland America Line renamed Eemdijk.	9,894
Wangi Wangi	1926	ex- Franken (North German Lloyd), 1940 seized by Holland renamed Wangi Wangi, 1941 torpedoed and sunk.	7,789
Zuiderkruis	1944	ex- Cranston Victory, 1947 purchased by Dutch Gov't from USA for use as troopship, renamed Zuiderkruis managed by Netherlands SS Co., 1951 rebuilt as emigrant ship and transferred to Rotterdam Lloyd.	9,376

Tabel 2 Sejumlah nama kapal-kapal uap yang melayani jalur pelayaran di wilayah Asia dan salah satunya di perairan Sulawesi, Indonesia yang dikelola perusahaan Hindia Belanda selama dan setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-2. (Sumber: www.theshiplist.com, di akses tanggal 27 Desember 2015).

Seiring dengan pendudukan Jepang di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942 di Batavia, maka seluruh pasukan dan armada militer Jepang memperluas wilayah ekspansi terutama di Asia Tenggara. Ekspansi wilayah yang dilakukan Jepang tidak terlepas dari pesatnya pembangunan industri yang memberikan persoalan serius sehingga ikut mendorong kebutuhan sumberdaya alam dan wilayah pemasaran dari hasil industri (Himawan, Bantu, & Pribadi, 2010: 93).

Sementara itu, berbagai wawancara yang dilakukan secara acak dari masyarakat yang terkumpulkan dari survei bawah air di lokasi reruntuhan kapal karam yang diduga merupakan kapal kargo Jepang, menyebutkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal Jepang yang terbakar menjelang melepaskan jangkar kapal dan bertolak di tengah laut untuk melanjutkan pelayaran. Kapal tersebut disebutkan mengangkut berbagai muatan komoditas perdagangan, yakni rotan, kayu, kopra dan diduga pula memiliki muatan emas. Informasi masyarakat tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi reruntuhan kapal yang berada dikedalaman 38 sampai 54 meter tersebut diuji secara hipotetik dengan ketersediaan literasi yang

berkaitan dengan kapal-kapal yang digunakan sebagai kargo di masa pendudukan Jepang di Sulawesi.

Wilayah Gorontalo disebutkan oleh Apriyanto (2006), bahwa pengalihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang telah dimulai pada saat Jerman berhasil menduduki Belanda di Amsterdam 15 Mei 1940 yang secara tidak langsung memberikan kabar berita melalui radio-radio di seluruh pelosok Indonesia "Negeri Belanda Menyerah terhadap Jerman" hingga tersiar di Gorontalo (Hal, 128-130).

Pada 10 Januari 1942 Jepang berhasil mendaratkan pasukan penerjun payung di seputaran danau Tondano untuk merebut lapangan-lapangan terbang dan menduduki kota Manado. Menjelang kejatuhan pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya untuk wilayah Manado, maka melalui Residen Hirschman mengantisipasi invasi Jepang dengan menginstruksikan kepada Asisten Residen Gorontalo Corn untuk membentuk vernielingscorps atau pasukan penghancur yang ditugaskan untuk melakukan penghancuran bangunan-bangunan vital milik Hindia Belanda, diantaranya jembatan, gudang makanan, gudang atau pangkalan minyak, saluran irigasi, dan sebagainya yang dapat digunakan oleh armada militer Jepang ketika berhasil menguasai Gorontalo (Apriyanto, 2006: 139-141). Vernielingscorps yang dibentuk tersebut melakukan aksi pembumihangusan Gorontalo dengan menghancurkan dan membakar tujuh bangunan gudang kopra yang terletak di Pabean. Pada tanggal 19 Januari 1942 disebutkan pasukan penghancur pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo kembali melakukan pembakaran dan penghancuran di Pelabuhan Gorontalo dan Kwandang, kemudian membakar sebuah kapal K.M. Kololio serta bahan bakar yang tersimpan di Wedloop Societeit Gorontalo (WSG) dibuang ke laut didekat kampung Pabean (Hal, 146).

Didalam penyelaman tahun 2014 yang dilakukan oleh Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Balitbang Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menduga bahwa reruntuhan kapal tersebut merupakan kargo Jepang yang saat ini diduga memiliki 4 versi nama kapal, yakni Kaisumaru, Kaisei Maru, Kashi Maru, dan Kyosei Maru. Informasi ini pun didasari dari informasi yang diakui sebagai salah seorang saksi hidup dari peristiwa terbakarnya kapal tersebut sebelum akhirnya karam dan tenggelam di dasar laut pantai Leato, Gorontalo. Dalam kesaksian beberapa dikatakan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari masa perang dunia ke-2 (1942-1945), kemudian dikatakan pula bahwa kapal tersebut sebelum terbakar, terlebih dulu di bom oleh pasukan Nani Wartabone (tokoh/pahlawan yang dikenal sebagai pendeklarasi perjuangan patriotik dan heroisme 23 Januari 1942 di Gorontalo).

Jika mengacu pada penelusuran nama kapal yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelusuran dan identifikasi literasi berupa artikel online yang ditemukan di laman www.history.navy.mil tercatat sekitar 611 kapal-kapal

Date	Name of Vessel	Type of Vessel	Standard Tonnage	Location	Flag of Agent	Type of Agent	Assessment
<u>February 17, 1944</u>	TONAN MARU NO 3	Tanker	19,209	7-23N, 151-51E	United States	Navy Carrier-Based Aircraft	Sunk
...-22-....	KYOSEI MARU	Cargo	556	2-00S, 149-50E	United States	Surface Craft	Sunk

Tabel 3 Data rilis online kapal kargo Kyosei Maru milik armada laut Jepang yang diserang dan ditenggelamkan oleh Armada Militer Sekutu Amerika Serikat saat peristiwa Perang Dunia Ke-2.

(Sumber: www.history.navy.mil, diakses tanggal 20 Desember 2015).

Jepang yang dihancurkan atau diserang oleh pihak armada militer Amerika Serikat dalam peristiwa Perang Dunia Ke-2 dan dari banyaknya jumlah kapal tersebut, terdapat sebuah table sejumlah nama kapal dan jenis kapal yang dirilis melalui laman website tersebut menyebutkan daftar nama kapal Kyosei Maru yang tenggelam 22 Februari 1944, jenis kapal kargo, jumlah muatan standar kapal sebanyak 556 ton, koordinat kapal 2° .00” Lintang Selatan – 149° . 50” Bujur Timur, diserang oleh pihak Amerika Serikat, dan menyebabkan kapal tersebut mengalami kerusakan yang akhirnya karam dan tenggelam.

Hasil penelusuran dengan menyesuaikan titik koordinat yang diperoleh dari data tersebut dan ditelusuri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi peta digital Google Earth Pro, bahwa koordinat tersebut tidak sesuai dengan koordinat lokasi survei penyelaman reruntuhan kapal yang diduga merupakan kapal kargo Jepang di Leato Gorontalo. Bahkan lokasi koordinat tersebut jauh melenceng sampai ke wilayah kepulauan Pasifik.

Hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan, reruntuhan kapal tersebut dalam kondisi yang sangat rentan mengalami kerusakan bahkan musnah, disebabkan oleh faktor lingkungan bawah air yang dapat mempercepat proses kerusakan terhadap material besi yang digunakan pada reruntuhan kapal tersebut dan aktifitas manusia yang melakukan pencurian material besi untuk diperjualbelikan

oleh masyarakat atau pun oknum yang tidak bertanggung jawab.

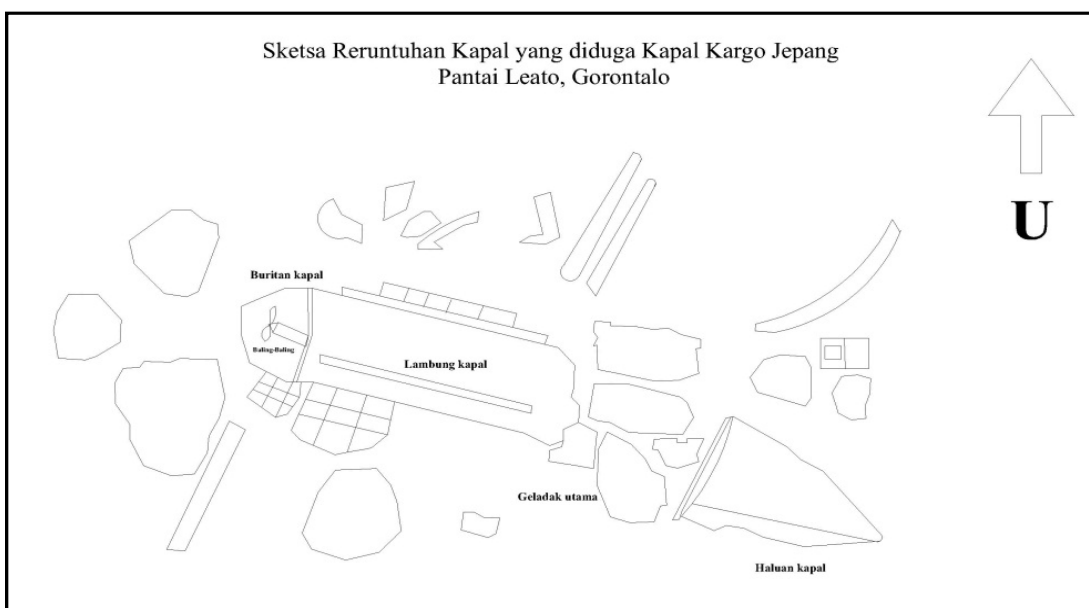
Secara dimensional yang dihasilkan dari perolehan data survei dilapangan, digambarkan melalui sketsa bahwa kapal tersebut menghadap kearah Tenggara atau diperkirakan kapal tersebut dalam posisi hendak meninggalkan pelabuhan Gorontalo dan bertolak ke perairan terbuka di wilayah Teluk Tomini.

Hipotesa ini diperkuat dengan terlihatnya posisi jangkar kapal yang sudah terangkat dan berada dibagianudukannya di depan haluan kapal.

Pembuktian reruntuhan kapal yang berada Leato, Gorontalo merupakan petunjuk awal, bahwa lokasi yang diduga merupakan kapal kargo Jepang tersebut dapat dikaji lebih mendalam khususnya dalam kajian arkeologi maritim dan prinsip didalam metodologi arkeologi bawah air. Dengan melakukan identifikasi temuan kapal dengan menelusuri data historis dan data arkeologis yang dilakukan, dapat memberikan sejumlah keterangan muasal dari reruntuhan kapal tersebut.

Potensi Situs Runtuhan Kapal Leato

Situs reruntuhan kapal yang berada di Leato, Gorontalo merupakan salah satu bentuk budaya bendawi atau hasil sejarah material dari sebuah peristiwa perang pasifik atau perang dunia ke-2 yang masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Keberadaan dan nama dari reruntuhan kapal yang hingga saat ini diduga merupakan kapal kargo Jepang, masih belum dapat dibuktikan secara ruang dan waktu. Kekurangan sumber sejarah menjadi permasalahan yang dihadapi untuk mengungkap fakta



Sketsa keletakan dan posisi reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang, Leato Gorontalo. (Dok. BPCB Gorontalo, 2015).

sejarah material yang berada dibalik reruntuhan kapal tersebut. Upaya pendekatan memperoleh data secara oral histori pun belum dapat mengungkap identitas dan peristiwa dibalik tenggelamnya kapal tersebut.

Secara konseptual cagar budaya bawah air adalah semua benda hasil budaya manusia yang asalnya ditemukan di bawah permukaan air baik di sungai, danau maupun lautan termasuk selat. Secara spesifik ilmu pengetahuan arkeologi yang mengkaji aktifitas manusia dikelompokkan kedalam istilah saintifik yakni arkeologi maritim, arkeologi navigasi, arkeologi perkapalan dan secara khusus didalam lingkup arkeologi maritim memiliki salah satu metode untuk mengungkap objek yang terpendam di bawah air diistilahkan sebagai arkeologi bawah air (*underwater archaeology*). Bentuk-bentuk hasil budaya bendawi dan material sejarah yang ditemukan dalam lingkup bawah air dapat berupa moda transportasi air seperti perahu atau kapal dengan ukuran kecil, sedang maupun besar. Disamping alat transportasi potensi cagar budaya bawah air juga mencakup muatan kapal yang dapat ditemukan secara bersama-sama atau berdiri sendiri. Muatan kapal dapat dipahami sebagai produk komoditas dari satu wilayah untuk didistribusikan ke wilayah lainnya menggunakan perahu atau kapal. Perpindahan komoditas dari satu wilayah ke wilayah lainnya dilatari oleh berbagai motivasi. Namun sayangnya dalam proses distribusi tersebut terkadang terjadi peristiwa yang menyebabkan karamnya kapal. Melalui perjalanan waktu proses deposisi dan mungkin taponomi terjadi di bawah air. Proses deposisi inilah yang kemudian membentuk situs-situs bawah air yang di dalamnya mengandung tinggalan materi bendawi baik budaya maupun sejarah yang sering juga disebut peninggalan bawah air.

Hal yang perlu disadari, bahwa upaya mengungkap identitas dan peristiwa dibalik tenggelamnya kapal di Leato, Gorontalo perlu dilakukan untuk dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat terutama bagi stakeholder yang memanfaatkan lokasi dan objek tersebut sebagai salah satu ruang destinasi wisata khususnya olahraga minat khusus yakni penyelaman rekreasi diperairan terbuka.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang yang ditemukan di wilayah perairan Teluk Tomini, pantai Leato, Gorontalo menyimpan sebuah bukti dari peristiwa sejarah perniagaan dan jalur pelayaran di Gorontalo sejak berdirinya perusahaan pelayaran KPM di Gorontalo sekitar tahun 1900 sampai dengan pecahnya perang pasifik dari tahun 1942 hingga 1945.

Maka untuk itu diperlukan upaya kajian awal terhadap identitas reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang tersebut dan informasi tersebut merupakan hal utama dari sebuah alur cerita didalam aspek sejarah dari kapal tersebut. Sementara pengetahuan teknologi dan konstruksi perkapalan yang digunakan di kapal tersebut merupakan atribut yang menyatu dari konteks sejarah dan ilmu pengetahuan pembangunan kapal yang telah dimiliki

pada masa itu. Jika kedua pencapaian aspek sejarah dan teknologi serta konstruksi kapal tersebut dapat diuraikan secara detail, maka upaya pelestarian untuk mencapai ke tahap usulan pendaftaran registrasi sebagai cagar budaya dapat dilakukan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan amanat terhadap apresiasi sebuah kekayaan budaya, yang merupakan sebuah hasil dari pemikiran untuk diwujudkan kedalam perlakuan manusia di masa sekarang dengan memberikan ruang interaksi dari hasil aktifitas manusia masa lalu melalui budaya bendawi yang ditinggalkannya. Upaya ini untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat ikut melestarikan kebudayaan bendawi tersebut secara bersama-sama, dan memberikan manfaat nilai penting terhadap aspek pengembangan bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berguna bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan di masyarakat.

Berbagai hal yang dianggap dapat memenuhi kriteria sebuah hasil budaya bendawi di masa lalu dalam syarat cagar budaya yang dimaksud dalam pasal 5, yakni meliputi; “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Melalui hasil survei reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang, dianggap memiliki dan memenuhi kriteria menjadi usulan cagar budaya di bawah air dengan objek budaya bendawi berupa reruntuhan kapal dan diperkirakan memiliki usia sekitar 73 (tujuh puluh tiga) tahun. Perkiraan usia reruntuhan kapal ini tidak terlepas dari konteks peristiwa kekalahan pemerintahan Hindia Belanda di Manado oleh serangan armada militer Jepang pada saat perang pasifik pada tahun 1942 dan berselang diikuti dengan peristiwa pembakaran kapal di pelabuhan Gorontalo oleh pasukan *Vernielingscorps* yang dibentuk pada masa Asisten Residen B. Corn. Dan jika diyakini bahwa objek reruntuhan kapal merupakan kapal kargo Jepang, maka konteks tersebut memiliki hubungan dengan serangan udara yang dilakukan angkatan udara Amerika Serikat melalui pesawat *NewBomber 25J Mitchells* yang dipiloti oleh 1st Lt Frederick W. Dick pada tanggal 16 September 1944 untuk melumpuhkan pusat gudang penyimpanan di kota Gorontalo yang telah dikuasai Jepang. Galdorisi menyebutkan didalam keterangan foto dalam artikel *The Air-Sea Battle Concept: Antecedents* yang dirilis pada tanggal 19 Juli 2013 melalui www.defensemmedianetwork.com, dan sebuah website www.pacificwrecks.com yang mengorganisir pencarian orang hilang dari korban perang pasifik dan perang Korea, menjelaskan bahwa serangan

udara tersebut bertujuan mengurangi pasokan musuh di barat daya wilayah pasifik. Pesawat udara yang melakukan pemboman di gudang penyimpanan Jepang tersebut memiliki nicknamed "Tondelayo/ Chow Hound", dan tercatat sebagai skuadron kelima dari armada angkatan udara Amerika Serikat dengan nomor seri 41-30669 yang berpangkalan di New Guinea. Skuadron udara Amerika Serikat yang dipusatkan di New Guinea merupakan salah satu pangkalan di kawasan pasifik, dan dikonsentrasikan khusus untuk mencegah suplai perbekalan Jepang lainnya yang berpusat di Pulau Sulawesi dan salah satunya di Gorontalo bekas kota pemerintahan di masa Hindia Belanda.

dijadikan statement atau kesimpulan terhadap identitas reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang.

Keterancaman yang berada disekitar reruntuhan kapal tersebut, dipengaruhi tiga faktor, diantaranya adalah Pertama), Faktor Lingkungan; kondisi reruntuhan kapal yang berada didalam air laut yang mengandung garam dapat mempercepat proses korosi atau karatan terhadap material besi konstruksi kapal yang digunakan. Kemudian material kapal dan bentuk fisik kapal pun memudahkan menjadi tempat bersintesa tumbuhan alga laut yang kemudian menjadi terumbu-terumbu baru, Kedua), Faktor Manusia; aktifitas penyelam dapat menjadi ancaman pelestarian reruntuhan kapal. Berbagai aktifitas yang ditimbulkan dari



Gambar (kiri) Foto berpose 1st Lt. Frederick W. Dick pilot pesawat *New Bomber 25J Mitchells (B-25J Mitchells)* nicknamed "Tondelayo/ Chow Hound" dan (kanan) serangan udara dari angkatan udara Amerika Serikat pada September 1944 dengan menggunakan pesawat *B-25J Mitchells* tepat diatas gudang perbekalan dan pasokan perang militer Jepang di Gorontalo. (Sumber: www.defensemianetwork.com & www.pacificwrecks.com)

Apabila literasi tersebut sesuai, maka dapat memenuhi kriteria usia sebagai usulan Cagar Budaya yakni berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun dalam kurun waktu di tahun 1944. Kemudian kriteria yang dapat menjadi salah satu usulan Cagar Budaya dari objek reruntuhan kapal tersebut, yakni "memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan".

Upaya pelestarian yang telah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, masih sebagai tahap awal didalam memperoleh data sementara yang dihasilkan kedalam bentuk pendokumentasian secara verbal maupun piktorial untuk mencegah terjadinya perubahan keaslian dari reruntuhan kapal. Penelusuran data sejarah yang diperoleh melalui arsip, jurnal, laporan hasil penelitian, e-dokumen yang telah dilakukan masih perlu dilakukan kajian mendalam, kemudian dikomparasikan dengan data bendawi terutama sebagai instrumen utama untuk

penyelam terutama ketika diperhadapkan dengan rasa penasaran terhadap objek yang diamati sehingga secara motorik berusaha untuk menyentuhnya; Buble atau gelembung oksigen yang dikeluarkan dari regulator/mouthfish penyelam ketika penyelam berada didalam ruangan reruntuhan kapal tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak langsung terhadap keletakan kapal; dan Pengrusakan atau pencurian material besi dan muatan kapal seringkali menjadi perhatian utama didalam upaya pelestarian berbagai situs arkeologi bawah air, sasaran pencurian muatan reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang tersebut sangat memungkinkan terjadi mengingat konstruksi kapal tersebut menggunakan material besi dan diduga masih memiliki muatan kapal, dan Ketiga), faktor cuaca atau iklim, pasang surutnya arus laut dapat menimbulkan perubahan terhadap letak reruntuhan kapal tersebut. Kondisi keletakan kapal yang berada di sisi tebing atau continental slope sangat memungkinkan reruntuhan kapal tersebut terlepas dari matriks, sehingga menyebabkan perubahan

keaslian dari situs reruntuhan kapal.

Keterlibatan masyarakat terutama berbagai stakeholder untuk mengupayakan pelestarian situs yang diduga reruntuhan kapal kargo Jepang tersebut sangat diperlukan. Prinsip-prinsip penyelaman di lokasi shipwreck tersebut perlu dijadikan regulasi berupa zonasi yang menunjang bagi pemanfaatan destinasi shipwreck. Informasi secara historis dan jalur atau tracking penyelaman berdasarkan kedalaman di reruntuhan kapal tersebut harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap situs reruntuhan kapal sekaligus untuk mempertimbangkan keselamatan penyelam.

Survei terhadap reruntuhan kapal yang diduga kargo milik Jepang yang telah dilakukan, merupakan awal kajian untuk mengungkap bukti secara arkeologi-sejarah (archaeological-history) terutama jalur pelayaran di Teluk Tomini pada masa Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang di Gorontalo pada tahun 1900 sampai 1945. Keberadaan kapal-kapal dengan teknologi uap dan konstruksi besi di Gorontalo tidak terlepas dari peranan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang membuka jalur pelayaran yang menghubungkan antara wilayah-wilayah yang menjadi pusat penghasil komoditas perdagangan rempah di wilayah Ternate dan Sulawesi sejak abad ke-18 sampai abad ke-19. Pendirian perusahaan pelayaran KPM pada tahun 1888 merupakan salah satu parameter menjadikan Gorontalo sebagai salah satu wilayah yang memiliki posisi yang strategis sebagai kota pelabuhan yang memberikan kontribusi terhadap komoditas perdagangan rempah dan jalur pelayaran di bagian utara Sulawesi serta penghubung antar daratan dan pulau-pulau penghasil rempah di sekitar Teluk Tomini.

Pecahnya peristiwa Perang Pasifik atau Dai Toa Senso (Asia Timur Raya) pada tahun 1942 yang kemudian mendesak pemerintahan Hindia Belanda di Gorontalo dibawah Asisten Residen B. Corn harus menyerahkan kekuasaannya kepada armada militer kekaisaran Jepang yang saat itu menyerukan perang terhadap Hindia Belanda dan sekutu Amerika Serikat dengan tujuan menguasai seluruh aset vital industri, perdagangan, dan pangkalan pertahanan militer yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo. Penghancuran aset vital yang dilakukan vernielingscorps yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda berupa pembakaran pelabuhan di Gorontalo dan Kwandang serta membakar sebuah kapal yang disebut Kapal Motor (K.M) Kololio dapat menjadi dasar penelusuran terhadap reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang di Leato, Gorontalo. Upaya serangan balik melalui udara oleh Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap Jepang pada tahun 1944 yang telah menguasai Gorontalo sebagai salah satu pangkalan pemasok bahan bakar dan berbagai hasil bumi lainnya juga menjadi salah satu petunjuk, bahwa reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang dengan identitas Kyosei Maru tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi serangan pesawat New Bomber 25J Mitchells yang memiliki nicknamed Tondelayo/ Chow

Hound sehingga menyebabkan kapal tersebut karam dan tenggelam di Leato, Gorontalo.

Tinjauan Nilai Penting

Penguatan informasi terhadap identitas dan peristiwa reruntuhan kapal yang ditemukan di Leato, Gorontalo merupakan faktor utama untuk menjelaskan tujuan pelestarian terhadap potensi cagar budaya bawah air yang terdapat dari bukti sejarah bendawi bawah air yang diduga kapal kargo Jepang tersebut. Pembuktian secara bendawi menunjukkan, bahwa perairan Teluk Tomini dan di sekitar perairan laut Gorontalo memiliki indikasi aktifitas pelayaran masa lalu berupa temuan reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang. Konstruksi kapal berbahan besi merupakan dasar utama untuk menelusuri data literatur, catatan pelayaran, dan arsip yang memiliki keterkaitan pelayaran dan perniagaan menggunakan kapal uap di Gorontalo. Perkembangan teknologi dan konstruksi kapal uap merupakan bagian dari kajian arkeologi navigasi dan perkapalan yang dapat memberikan kontribusi bagi peranan ilmu pengetahuan didalam ilmu pelayaran. Nilai historis yang terkandung dibalik reruntuhan kapal tersebut merupakan rekonstruksi peristiwa sejarah yang dapat menjelaskan, bahwa Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang melewati fase peralihan kekuasaan di masa pemerintahan Hindia Belanda kepada Jepang hingga menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Tinjauan Pelindungan dan Pelestarian

Pengawasan terhadap situs reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang sebagai salah satu potensi cagar budaya bawah air yang dimiliki Gorontalo, merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelindungan terhadap berbagai sebaran kapal karam beserta dengan muatannya yang memiliki nilai sejarah terutama bagi nilai penting ilmu pengetahuan dan sejarah masa lalu di Gorontalo. Aspek pelindungan merupakan bagian terkecil didalam mewujudkan upaya pelestarian terhadap potensi cagar budaya di situs reruntuhan kapal kargo yang diduga milik Jepang tersebut.

Adapun perlakuan terhadap reruntuhan kapal yang ditemukan di Leato, Gorontalo diperlukan peran aktif dari sejumlah stakeholder serta masyarakat untuk ikut bersama-sama melindungi situs kapal karam tersebut, terutama untuk mencegah terjadi perusakan dan pencurian benda-benda dari bahan material kapal beserta dengan upaya pencarian muatan kapal tersebut secara ilegal.

Secara teknis didalam mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengawasan terhadap pelestarian potensi cagar budaya diperlukan penanganan awal untuk melindungi situs reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang. Instansi pemerintah dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo hingga pelaksanaan survei bawah air yang

dilakukan di situs reruntuhan kapal tersebut telah berupaya melakukan pendokumentasian berupa perekaman data, dengan cara pendeskripsian, pengukuran, penggambaran, dan pemotretan secara aktual di lokasi tenggelamnya kapal untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dalam bentuk verbal, piktorial, serta visual. Pengumpulan data secara aktual ini dilakukan untuk mencegah kemusnahan data secara artifisial mengingat rawannya ancaman kerusakan yang disebabkan faktor alam dan lingkungan bawah air, dan faktor manusia. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, maupun kalangan akademis, pemerhati sejarah, komunitas selam, dan masyarakat secara luas pun sangat diperlukan untuk mengupayakan kajian dalam mengungkap identitas kapal dan data sejarah di masa lalu yang berkaitan dengan objek reruntuhan kapal, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat terhadap asumsi kapal tersebut sebagai kapal kargo milik Jepang. Dengan mengupayakan kajian; pendataan dan eksplorasi di situs reruntuhan kapal, ekskavasi penelitian dan penyelamatan bawah air, dan sosialisasi rancangan peraturan yang didalamnya diatur batasan atau zona inti yang berkaitan dengan area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari cagar budaya; zona penyangga sebagai ruang area yang dapat melindungi zona inti; zona pengembangan yang merupakan area yang nantinya akan diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan dan biota bawah air lainnya; dan zona penunjang yang merupakan ruang atau area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang yang bersifat publikasi dan informatif yang komersial dengan tetap memperhatikan kepentingan umum di masyarakat agar dapat memperoleh manfaat pendidikan terhadap situs reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang di Leato, Gorontalo. Jika hal tersebut dapat tercapai maka tahapan pelestarian di situs reruntuhan kapal tersebut dapat diperlakukan sebagaimana layaknya Cagar Budaya, sebelum reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang tersebut didaftarkan untuk memperoleh registrasi dan penetapan secara hukum yang didasari oleh Undang-undang Cagar Budaya.

Kegiatan survei bawah air di lokasi ditemukannya reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang di Leato, Jepang yang telah dilakukan merupakan tahap awal untuk memperoleh kondisi aktual terhadap tinggalan artifisial di bawah air. Hasil pengumpulan data yang diperoleh baik dilapangan maupun dalam tahap pengolahan data (analisis temuan kapal) masih dalam bentuk pendokumentasian secara verbal dan piktorial. Sementara dalam tahap analisis dan pencapaian eksplanasi (penjelasan) secara akademik untuk membuktikan keterkaitan literatur sejarah di masa pemerintahan Hindia Belanda dan peristiwa pendudukan Jepang pada masa pecahnya perang pasifik di Gorontalo dengan sejarah bendawi (situs reruntuhan kapal kargo) di Leato, Gorontalo masih minim terutama informasi yang dapat memberikan ciri khusus dari reruntuhan kapal, diantaranya; nama atau identitas kapal berbahan besi yang seringkali menggunakan nama atau nomor

dibagian haluan dan buritan di lambung kapal belum ditemukan, indikasi adanya muatan kapal yang berkaitan dengan konteks sejarah perdagangan dan pelayaran masa lalu belum teridentifikasi secara absolut, dan identifikasi terhadap bentuk visual (gambar) yang memberikan ciri khusus bentuk-bentuk kapal belum diperoleh secara utuh, terutama dibagian bangunan atas, anjungan dan ruang-ruang kabin awak kapal belum diketahui disebabkan kondisi reruntuhan kapal dalam posisi terbalik.

Keterbatasan itu pun tidak terlepas dari lokasi reruntuhan kapal yang berada dikedalaman 30 sampai 54 meter sebagai salah satu faktor utama dalam melaksanakan aktifitas pekerjaan secara maksimal di bawah air. Kemudian terbatasnya jam selam dan skill (pengalaman) bagi penyelam di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo memberikan batasan untuk melakukan penyelaman di laut dalam. Maka untuk tahapan selanjutnya diperlukan perencanaan kerja lanjutan untuk mengungkap pembuktian sejarah kapal dan mengupayakan pengelolaan pelestarian situs cagar budaya bawah air di lokasi reruntuhan kapal di Leato, Gorontalo tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait dari instant terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kota dan provinsi Gorontalo, akademisi, ahli cagar budaya/ peneliti, komunitas selam (POSSI Gorontalo, agen travel yang menyediakan dive shop di Gorontalo), dan masyarakat setempat.

Adapun rekomendasi atau saran kegiatan tahap selanjutnya untuk dapat melengkapi hasil data survei yang telah dilakukan, yaitu:

1. Kajian nilai sejarah yang dimiliki dari reruntuhan kapal yang saat ini masih diduga kargo Jepang, di Leato, Gorontalo.
2. Kajian terhadap satuan ruang geografis, identifikasi dan klasifikasi temuan serta muatan kapal di lokasi situs reruntuhan kapal yang diduga kargo Jepang, Leato, Gorontalo. Sehingga hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar untuk proses melakukan tahapan pengusulan penetapan cagar budaya bawah air.
3. Melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) akan nilai penting sejarah situs reruntuhan kapal di Leato, Gorontalo dan manfaat pelestariannya bagi kepentingan masyarakat serta sistem pengelolaannya baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Melakukan perlindungan cagar budaya di bawah air dengan objek reruntuhan kapal di Leato, Gorontalo dengan menetapkan batas-batas keluasaan dan pemanfaatan ruang dengan sistem zonasi dari hasil kajian.
5. Memberikan ruang pemanfaatan dan akses bagi masyarakat dan pengunjung cagar budaya bawah air untuk dapat menikmati lokasi cagar budaya bawah air tersebut sebagai ruang rekreatif dan edukatif untuk memberikan pemahaman terhadap nilai sejarah yang diperoleh dari situs reruntuhan kapal di Leato Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amal, M. Adnan. (2010). "Kepulauan Rempah-Rempah". Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950. Ed. Taufik Adnan Amal. Kepustakaan Populer Gramedia.

Campo, Joseph Norbert Frans Marie à. (2002). "Engines of Empire". Steamshipping and State Formation in Colonial Indonesia. Hilversum. Uitgeverij Verloren.

Faiz. (2015). "Museum Arkeologi Bawah Air Indonesia". (Studi Kasus: Sisa Kapal Karam Di Perairan Laut Jawa, Cirebon). Tesis. Departemen Arkeologi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. Depok.

Haga, B.J. (1981). "Lima Pahalaa". Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo. Jakarta. KITLV dan Djambatan.

Hasanuddin. (2014). "Pelayaran Dan Perdagangan Gorontalo Abad Ke-18 dan 19". Yogyakarta. Kepel Press.
Himawan Soetanto (et al). (2010). "Serangan Jepang ke Hindia Belanda Pada Masa Perang Dunia II 1942". Perebutan Wilayah Nanyo. Jakarta. Prenada Media Group

Joni Apriyanto. (2006). "Historiografi Gorontalo". Konflik Gorontalo-Hindia Belanda Periode 1856-1942. Gorontalo. UNG Press.

Muckelroy, Keith. (1978). "Maritime Archaeology". Cambridge University Press.

Mundardjito. (2007). "Paradigma dalam Arkeologi Maritim". Wacana.1.4: 1-20.

Rosenberg, C.B.H. von. (1865). "Reistogten In De Afdeeling Gorontalo". Gedaan Op Last Der Nederlandsch Indische Regering. Amsterdam. Frederik Muller.

Publikasi Elektronik

www.tropenmuseum.nl

www.theshiplist.com

www.history.navy.mil

www.defensemecanetwork.com

www.pacificwrecks.com

Nia Naelul Hasanah Ridwan. (et al). "Integrated Marine Archaeological Research on Japanese Shipwreck Site in Gorontalo Province, Indonesia". Email dari Kusbian. 9 Desember 2015.

Perundang-undangan

Direktorat Peninggalan Bawah Air. (2010). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Peninggalan Bawah Air. Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala. Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

----- (2012). Himpunan Data Cagar Budaya Bawah Air Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

STUDI KETERAWATAN CAGAR BUDAYA WARUGA NIMA WANUA

Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

A. PENGANTAR

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan, agama dan/kebudayaan melalui proses penetapan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; Bab I; Pasal 1 (1)). Karena Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan, maka dari itu pasti akan mengalami proses degradasi seperti halnya benda-benda lainnya, yang berujung pada kemusnahan.

Salah satu cagar budaya yang telah mengalami degradasi adalah Cagar Budaya Waruga Nima Wanua, terletak di Desa Woloan Satu, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Cagar Budaya ini merupakan kuburan kuno dari suku bangsa Nimahasa yang dikenal dengan istilah lokal Waruga. Berdasarkan hasil-hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di Sulawesi Utara menyebutkan bahwa Waruga sebagai salah satu peti kubur batu berkembang pada sejak masa prasejarah sampai awal abad 19. Dengan demikian keberadaan waruga di Nima Wanua sudah cukup tua, sehingga tidak mengherankan kalau banyak dari bahan waruga ini telah mengalami degradasi.

Proses degradasi pada cagar budaya dapat disebabkan oleh bahan pembuatnya dan usianya yang memang sudah tua. Dari sisi bahan pembuat cagar budaya memiliki pengaruh yang cukup besar atas berlangsungnya proses degradasi yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik mikro maupun lingkungan makro dimana cagar budaya tersebut berada. Sebagaimana diketahui sifat pembuat cagar budaya dapat berasal dari bahan organik seperti tulang kayu dan kertas, dan bahan nonorganik seperti batu, bata, kaca maupun logam yang pada hakekatnya berasal dari mineral alam yang pada akhirnya juga akan terurai oleh faktor lingkungan dan pada akhirnya akan kembali kepada alam. Sisi lainnya adalah usia dari cagar budaya tersebut minimal 50 tahun sebagaimana kriteria yang dipersyaratkan di dalam undang-undang. Harus diakui tidak mungkin membuat abadi sebuah benda di muka bumi ini termasuk dalam hal ini warisan cagar budaya, tetapi dengan mengingat nilai penting kehadirannya, maka cagar budaya perlu dilestarikan. Menurut Cleere dalam Kusumohartono (1993) secara garis

besar ada tiga mafaat pelestarian sumberdaya budaya yaitu untuk kepentingan akademik, kepentingan ideologik dan kepentingan ekonomik. Kemudian Kasnowihardjo (2001) menguraikan beberapa alasan mengapa sumberdaya budaya harus dilestarikan adalah antara lain karena sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), memiliki sifat yang unik terutama yang bersifat monumental dan tak bergerak karena mempunyai nilai tambah seperti potensi ekologis, arsitektonis, historis, ataupun geologis. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa selain itu sumberdaya arkeologi masih memiliki potensi yang lain seperti obyek penelitian dan keilmuan (scientific research), inspirasi seni (creative arts), pendidikan (education), pariwisata (recreation and tourism), fungsi simbolik kehidupan manusia (symbolic representation), alat legitimasi (legitimation of action), solidaritas sosial dan integrasi masyarakat (sosial solidarity and integration), dan fungsi ekonomi dan keuangan (monetary and economic gain). Selanjutnya Daud Aris Tanudirjo (2004) menjabarkan suatu konsep tersebut sebagai berikut ;

a. Nilai Penting Sejarah

Apabila peninggalan sejarah dan purbakala tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkait erat dengan tokoh-tokoh sejarah atau merupakan tinggalkan karya seorang tokoh terkemuka dalam bidang tertentu, atau menjadi bukti perkembangan dalam bidang tertentu seperti penemuan baru, penerapan teknologi baru dan perubahan social, ekonomi dan politik.

b. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Apabila tinggalkan budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Dimana bidang keilmuan tidak hanya mencakup ilmu social, tetapi juga berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Ilmu Arkeologi, mendeskripsi dan menjelaskan serta menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa atau proses-proses budaya masa lampau, termasuk di dalamnya pengujian teori, metode dan tehnik tertentu di bidang ini. Ilmu Antropologi untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang ini khususnya proses-proses perubahan budaya dalam jangka waktu panjang dalam proses adaptasi ekologi, termasuk evolusi ragawi (biological evolution and paleoantropology). Ilmu-ilmu social untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu social humaniora, terutama yang berkaitan dengan interaksi social, kekuasaan dan politik dan prosessosial lainnya. Arsitektur dan Teknik

Sipil untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang seni bangun, rancang-bangun dan susunan (konstruksi bangunan, termasuk kajian penerapan teknologi dan materi baru pada masa dibangun). Ilmu kebumian untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu kebumian (geologi, geomorfologi, geografi, geodesi) atau menjadi bukti peristiwa-peristiwa alam yang dikaji dalam ilmu ini. Ilmu Ilmu lainnya, mengandung informasi yang sangat khusus bagi kajian ilmu-ilmu tertentu yang belum disebutkan di atas. Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinannya mengandung informasi untuk suatu ilmu yang biasanya tidak bersinggungan sama-sekali dengan masa lampau, sehingga bersifat prediktif.

c. Nilai Penting Kebudayaan

Apabila tinggalan budaya tersebut mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya atau menjadi jati-diri (Cultural Identity) bangsa atau komunitas tertentu. Misalnya saja dari Nilai Etnik yang memberikan pemahaman latar belakang kehidupan social, sistim kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan jati-diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. Nilai Estetis, mempunyai kandungan unsure-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara, maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk juga keserasian antara bentang alam dan karya budaya (saujana budaya); menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan masa mendatang. Nilai Publik, juga berfungsi untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang keberadaan manusia masa lampau dan cara penelitiannya. Menyadarkan tentang keberadaan manusia sekarang, dan berpotensi atau telah menjadi sumberdaya yang dapat menambah penghasilan masyarakat, antara lain lewat pariwisata.

Pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Indonesia mempedomani UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dimana aktifitas pelestarian mencakup aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Salah satu tindakan perlindungan cagar budaya adalah melakukan pemeliharaan dengan cara perawatan. Penanganan perawatan dilakukan ketika cagar budaya dalam kondisi rusak dan lapuk yang diartikan sebagai upaya untuk melestarikan benda cagar budaya dari kerusakan dan pelapukan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati. Sebagaimana pedoman perawatan cagar budaya bahwa dalam pelaksanaan perawatan harus memperhatikan prinsip arkeologis dan prinsip teknis. Prinsip arkeologis yang dimaksudkan disini berkaitan dengan keaslian bahan yang digunakan, keaslian desain, keaslian teknologi pengerjaan, keaslian tata letak dan konteks yakni memperhatikan cagar budaya dalam satuan ruang dan hubungannya dengan benda-benda budaya yang ada di sekitarnya. Sedangkan secara teknis perawatan cagar budaya harus menganut prinsip efektif, efisien, aman dan bersifat ilmiah. Agar kedua prinsip ini arkeologis dan teknis dapat dipertanggungjawabkan, maka

dalam kegiatan perawatan sebuah cagar budaya terlebih dahulu harus dilakukan studi yang kemudian dikenal dengan istilah Studi Teknis Perawatan. Pelaksanaan studi perawatan berangkat dari permasalahan kondisi bahan cagar budaya yang mengalami kerusakan seperti pecah, retak ataupun renggang dan kondisi bahan cagar budaya yang mengalami pelapukan seperti deskomposisi dan desintegrasi. Untuk memetakan kerusakan dan pelapukan bahan cagar budaya studi teknis perawatan secara konseptual diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi observasi lapangan, identifikasi dan analisis. Berdasarkan hasil studi teknis tersebut kemudian diambil kesimpulan untuk menentukan bahan dan cara serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan perawatan.

Pelaksanaan Studi Keterawatan Cagar Budaya Waruga Nima Wanua di Desa Woloan Satu, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, berangkat dari masalah adanya kerusakan beberapa waruga di situs tersebut ketika tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo melakukan kegiatan inventarisasi cagar budaya di Kota Tomohon pada tahun 2011. Bukan hanya itu, kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada Waruga Nima Wanua juga dilaporkan oleh Juru Pelihara Situs melalui Laporan Bulanan Kegiatan Juru Pelihara.

B. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka pelaksanaan Studi Teknis Konservasi Waruga Nima Wanua, Desa Woloan Satu, Kota Tomohon Sulawesi Utara dilakukan kegiatan pengumpulan data berupa observasi lapangan yang meliputi data arkeologi, data lingkungan, dan data keterawatan. Pertimbangan pengkajian ketiga jenis data di atas, dilakukan dengan asumsi bahwa kelestarian cagar budaya baik secara kualitas maupun kuantitas dapat dilihat pada kisaran berubahnya ketiga jenis data tersebut. Selanjutnya penyajian data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan disampaikan sebagai berikut;

1. Data Arkeologi

Arkeologi, berasal dari bahasa Yunani, *archaeo* yang berarti “kuno” dan *logos* berarti “ilmu”. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan (manusia) masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data berupa artefak (budaya bendawi, seperti kapak batu dan bangunan candi) dan ekofak (benda lingkungan, seperti batuan, rupa muka bumi, dan fosil) maupun fitur (artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya (situs arkeologi)). (<https://id.wikipedia.org/wiki/Arkeologi>). Dengan kata lain arkeologi merupakan ilmu sejarah kebudayaan material. Tujuan arkeologi berdasarkan paradigma arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya.

Data arkeologi dapat dikelompokkan kedalam jenis artefak,



Foto 1. Waruga-waruda di dalam situs Nima Wanua (dok.bpcb gorontalo)

ekofak dan fitur. Artefak mengacu pada pengertian semua benda yang diubah (modified) atau dibuat (made) oleh manusia dari benda alam. Ekofak adalah komponen biota, dan abiota yang tidak dibentuk ataupun diubah oleh manusia, tetapi berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Sedangkan fitur adalah struktur atau sisa kegiatan manusia yang karena ukuran dan kondisinya yang terkait dengan matriksnya, tidak dapat dipindahkan serta diangkat tanpa mengakibatkan kerusakannya.

Pada observasi lapangan di Situs Waruga Nima Wanua, Desa Woloan 1, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dapat diketahui bahwa populasi waruga yang ditemukan di situs ini sebanyak 21 waruga dari berbagai ukuran.

Benda-benda warisan budaya yang ditemukan dari dalam situs ini termasuk kategori cagar budaya sebagaimana hasil inventarisasi yang telah dilakukan Balai Pelestarian cagar budaya Gorontalo (2011) dan hasil-hasil penelitian Balai Arkeologi Manado (2008), serta peneliti-peneliti lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para arkeolog, baik secara perorangan maupun instansional seperti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Manado dapat diketahui bahwa fungsi benda-benda warisan budaya tersebut sebagai peti kubur karena dari dalamnya ditemukan kerangka yang berupa tulang manusia, benda-benda keramik, gelang dan manik-manik dan benda logam lainnya yang berfungsi sebagai bekal kubur (Sugondo, 2008). Peti kubur ini oleh masyarakat Minahasa sebagai penduduk asli Sulawesi Utara dinamakan Waruga. Banyak pendapat yang berkembang

mengenai pengertian waruga namun pendapat-pendapat tersebut pada umumnya mengacu pada pengertian sebagai rumah tempat raga yang telah mati. Sistem penguburan waruga disinyalir berkembang di Sulawesi Utara sejalan dengan berkembangnya tradisi megalitik di Indonesia. Konstruksi waruga sebagai peti kubur secara struktural terdiri atas bagian badan dan bagian penutup. Bagian badan yang memiliki rongga berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan mayat, sedangkan bagian penutup yang terletak pada bagian ujung atas badan berfungsi sebagai atap untuk menutup wadah.



Foto 2. Badan waruga yang berbentuk kubus (dok.bpcb gorontalo)

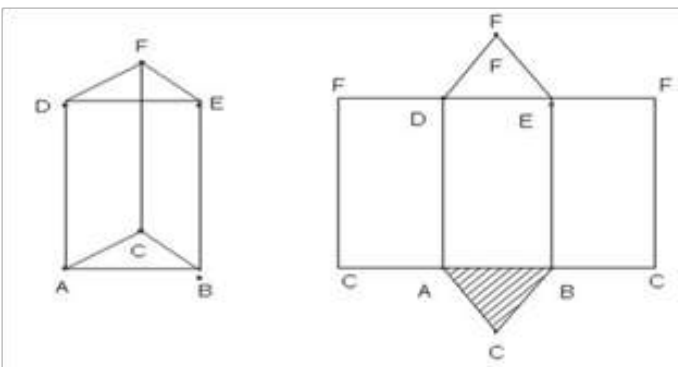
Waruga yang ditemukan di Situs Nima Wanua disepakati untuk mengelompokkannya kedalam bentuk kubus dan bentuk persegi panjang pada bagian badan. Bentuk ini ditetapkan berdasarkan penampang denah dasarnya



Foto 3. Badan waruga yang berbentuk persegi panjang (dok. bpcb gorontalo)

yang dicerminkan pada ukuran panjang dan lebar. Jika penampang denahnya memiliki ukuran yang minimal hampir sama akan dimasukkan kedalam kelompok waruga bentuk kubus, sedangkan waruga yang memiliki penampang denah dimana salah satu sisinya memiliki panjang dua kali lipat dari pada sisi lainnya dikelompokkan kedalam bentuk persegi panjang.

Sedangkan pada bagian tutup dikelompokkan dalam bentuk prisma segitiga, bentuk ini ditetapkan karena melihat dari bentuk atap waruga secara seksama dan digambarkan dalam garis geometri, dapat diketahui bahwa menyerupai salah satu bangun ruang tiga dimensi yang memiliki ciri-ciri; mempunyai 6 buah titik sudut, mempunyai 5 bidang sisi, dan mempunyai 9 buah rusuk. Sederhananya, hal ini merupakan bangun ruang yang bidang alas dan bidang atas sejajar dan sama, dimana sisi-sisi lainnya berbentuk persegi panjang/jajar genjang. Intinya bangunan ini memiliki sifat-sifat, antara lain memiliki atap dan alas yang kongruen. Setiap sisi samping bangun ini berbentuk persegi panjang dan memiliki rusuk tegak.



Gambar 1. Jaringan-jaring prisma segitiga

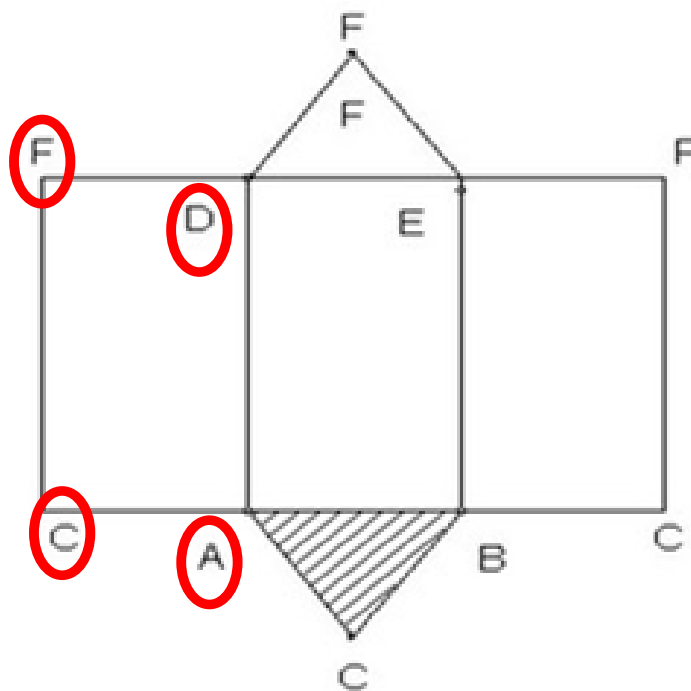


Foto 4. Penampang depan tutup waruga (dok. bpcb gorontalo)

Jika kita melihat gambar dan foto diatas dapat diketahui bahwa sisi A D F C merupakan penampang depan pada tutup waruga.

Sedangkan gambar dan foto dibawah merupakan sisi A B C pada penampang samping tutup waruga berbentuk segitiga. Dari dasar tersebut sehingga tim menjustifikasi penutup waruga tersebut berbentuk prisma segitiga.

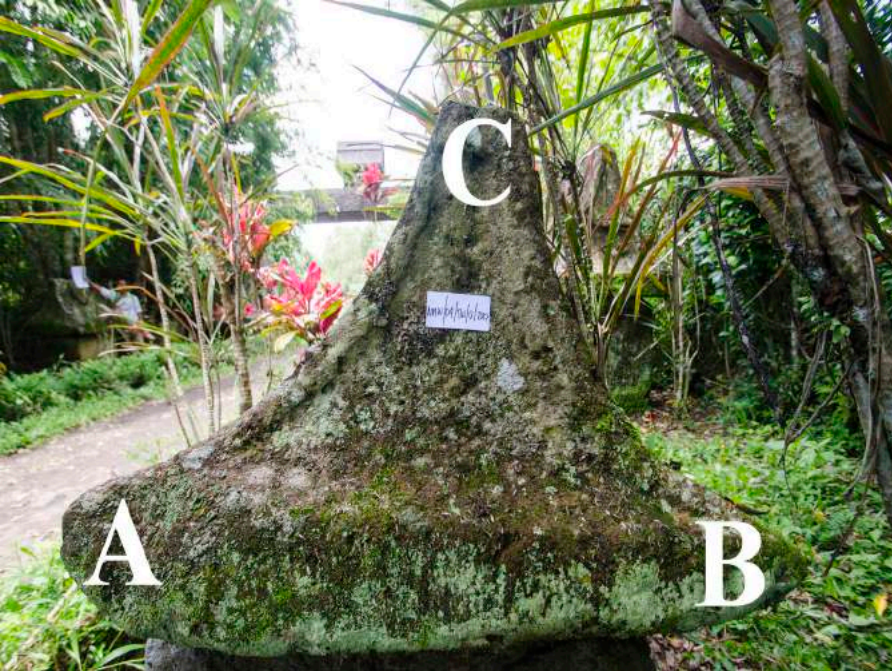


Foto 5. Penampang samping tutup waruga (dok.bpcb gorontalo)

Waruga-waruga dalam Situs Cagar Budaya Waruga Nima Wanua Desa Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon berjumlah 21 (Duapuluh Satu) Waruga. Dari 21 waruga tersebut, dikelompokkan dalam tiga kategori ukuran, yaitu ukuran besar, ukuran sedang dan ukuran kecil.

- Ukuran kecil (dinilai dari luas permukaan 0 – 199 cm), terdapat 6 buah waruga.
- Ukuran sedang (dinilai dari luas permukaan 200 – 399 cm), terdapat 5 buah waruga.
- Ukuran besar (dinilai dari luas permukaan 400 – di atasnya), terdapat 9 buah waruga.

2. Data Keterawatan

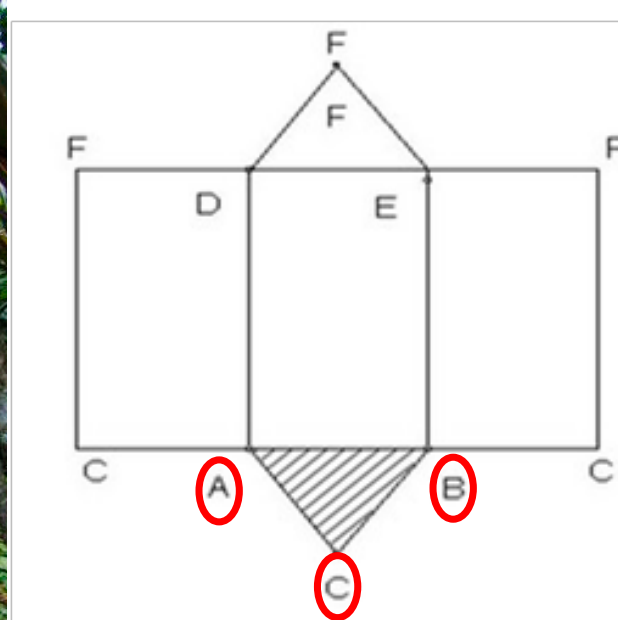
Secara teknis dari segi prosesnya, degradasi bahan Cagar budaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kerusakan dan pelapukan. Pada aspek kerusakan, perubahan terjadi pada bahan yang digunakan tanpa diikuti oleh perubahan sifat-sifat kimiawinya. Sedangkan pada aspek pelapukan terjadi perubahan baik pada sifat-sifat fisik (disintegrasi) maupun kimiawinya (dekomposisi), yang diikuti dengan gejala kerapuhan, korosi, dan perubahan dimensinya.

Dari hasil studi dan observasi yang dilakukan Kompleks Waruga Nima Wanua telah ditemukan berbagai kerusakan dan penyakit pada waruga. Baik itu yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor external.

a. Kerusakan

Sekitar 40 % Waruga di Situs Cagar Budaya Waruga Nima Wanua mengalami kerusakan baik itu terjadi pada badan waruga maupun tutup waruga. Kerusakan yang terjadi disini berupa retakan dan pecah atau hilangnya beberapa bagian dari waruga tersebut, serta ambruk/hancur (bagian-bagian yang hancur masih ada tersisa namun tidak bisa dibina ulang lagi).

b. Pelapukan



Dari jumlah keseluruhan 21 Waruga tersebar di kompleks Waruga Nima Wanua, sekitar 65% yang mengalami pelapukan. Pelapukan kebanyakan terjadi pada ornament waruga dan pada badan waruga. Selain pelapukan jg ada beberapa bagian pada waruga yang mengalami keausan bahkan ada yang sampai berlubang.

c. Intervensi Benda Asing

Hampir semua waruga mengalami intervensi dari luar seperti, intervensi dari organism maupun mikroorganism, bahkan dari manusia. Intervensi yang dimaksud disini berupa penyakit penyakit yang disebabkan oleh mikroorganism serta gangguan dari hewan maupun vandalism dari manusia.

C. ANALISIS

1. Analisis Data Arkeologi

Waruga secara lokal atau dalam istilah lainnya disebut timbukar di Sulawesi Utara memiliki fungsi sebagai wadah kubur berbahan batu atau dikelompokkan sebagai sarkofagus. Umumnya waruga memiliki bentuk kubus dan persegi panjang yang diletakkan berdiri tegak secara vertikal dan diberikan penutup berbentuk atap rumah.

Hal ini terlihat pada kelompok waruga yang berjumlah duapuluh satu buah di lokasi Kompleks Waruga Nima Wanua. Pola ukiran atau relief yang terdapat pun cukup beragam; mulai dari motif flora, fauna, manusia dan geometrik. Penggunaan ragam ukiran dan pahatan yang seringkali dijumpai pada waruga, hingga saat ini belum memiliki penelitian secara arkeologis atau akademis untuk dapat menjelaskan makna ukiran dan pahatan yang terdapat pada waruga. Namun jika diamati dari proses pengerjaan, yang terlihat dari pola pembuatan dan pembentukan ragam relief terdapat dua tehnik pengerjaan; yakni tehnik pahat untuk membuat bentuk relief timbul, dan tehnik ukir untuk membuat relief yang memiliki pola dasar garis untuk mendapatkan relief yang diinginkan.

Relief-relief yang terdapat pada waruga ini tentunya merupakan salah satu pola ornamen yang tidak dapat diperbaharui dan dapat dikatakan cukup memakan waktu lama serta telah melewati fase tahun yang cukup lama pula, sehingga jika dikelompokkan dalam konsep Heine Geldern yang dikemukakan oleh Hoop (1937) dalam Marwati Djoened Poesponegoro (2010), persebaran megalitik dalam dua gelombang, yakni :

1. Gelombang persebaran kebudayaan megalitik tua, yang diwakili oleh persebaran hasil material kebudayaan berupa menhir, undak batu, dan patung-patung simbolis dan monumental dengan pendukung material kebudayaan beliung yang diperkirakan berusia 2.500 – 1.500 Sebelum Masehi, dan dikelompokkan dalam fase waktu Neolitik.

2. Gelombang persebaran kebudayaan megalitik muda, yang diwakili oleh persebaran material kebudayaan berupa peti kubur batu, dolmen semu, dan sarkofagus, kemudian berkembang dalam fase yang telah mengenal logam dan berusia sekitar awal milenium pertama Sebelum Masehi hingga abad-abad pertama Masehi.

Dengan memperhatikan konsep gelombang persebaran megalitik di Indonesia tersebut, maka kesimpulan sementara waruga atau timbukar yang terdapat di Kompleks Waruga Nima Wanua dan berbagai sebaran waruga yang terdapat di Sulawesi Utara dikelompokkan kedalam fase gelombang persebaran kebudayaan megalitik muda.

Waruga pada Kompleks Waruga Nima Wanua sebanyak duapuluh satu buah memiliki pola yang sejajar yang hampir semua menghadap dari Timur ke Barat. Sistem penguburan waruga dan masyarakat pelaku budayanya umumnya menempatkan lokasi penguburan tidak jauh dari lingkungan perolehan sumber bahan material waruga dan juga tidak terlalu jauh dari pemukiman.

2. Analisis Otentisitas Bentuk

Observasi lapangan yang diperoleh bahwa bentuk waruga yang berada didalam kompleks Waruga Nima Wanua terbagi dalam dua bentuk; kubus dan persegi panjang untuk bagian wadah atau badan. Penutup waruga rata-rata memiliki pola atap rumah dengan dilengkapi relief, yang terdiri dari dua tehnik yaitu tehnik pahat dan tehnik gores. Bentuk penutup waruga pun pada umumnya terdiri dari dua bentuk yakni bentuk prisma segitiga dan limas segiempat, namun pada Situs Waruga Nima Wanua yang ada hanya bentuk prisma segitiga. Sedangkan Keseluruhan bentuk umum wadah atau bagian badan waruga yang tersebar di Sulawesi Utara terbagi dalam dua bentuk; kubus dan persegi panjang dengan posisi berdiri tegak secara vertical. Namun pada lokasi ini hanya memiliki bentuk kubus

3. Analisis Bahan dan Teknologi Pembuatan

Didalam pengumpulan data dan bahan analisis yang dilakukan di lokasi Waruga Nima Wanua, diketahui secara umum bahan yang digunakan pada wadah penguburan sebanyak duapuluh satu waruga merupakan himpunan

batuan beku dari hasil material vulkanik berjenis batu tuff.

Batu tuff merupakan batuan yang berasal dari materi vulkanik yang mengalami proses mekanis yang terdiri dari faktor air, abu, lapili dan tekanan angin. Batuan ini vulkanik ini pun umumnya dikelompokkan dalam batuan piroklastik yang merupakan proses dasar pembentukan dari bahan debu halus vulkanik yang bersumber dari batu vulkanik.

Adapun hasil mineral penyusun batuan piroklastik berdasarkan ciri-ciri bentuk yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan waruga di Nima Wanua, merupakan hasil langsung akibat letusan, kemudian membeku dipermukaan (istilah geologi; juvenile pyroclast) dan dimanfaatkan oleh pelaku budaya untuk mendesain wadah kubur sarkofagus atau waruga. Perolehan bahan baku batu tuff tidak terlepas dari faktor bentang lahan di Kota Tomohon yang merupakan dataran ketinggian dan berada di kaki Gunung Lokon.

Pembuatan waruga pada Kompleks Waruga Nima Wanua untuk memperoleh bentuk wadah kubur adalah dengan menggunakan bahan batuan induk yang berasal dari bukit-bukit batu dan sebaran batuan monolit lainnya di wilayah sekitar Tomohon

Teknologi pembuatan waruga yang teramati di situs Nima Wanua terdiri atas teknologi batu tatahan dengan sistim pemangkasan. Pemangkasan tersebut menggunakan batu monolit yang dilepaskan dari batu induknya kemudian dibentuk menyerupai kubus dan diberi rongga pada bagian dalamnya dengan menggunakan pahat.

Setelah menghasilkan bentuk, kedudukan waruga diposisikan secara tegak vertikal dengan bagian bawah di pendam kedalam tanah untuk menopang struktur badan waruga. Proses pembuatan penutup waruga menggunakan tehnik pengerjaan yang sama dengan pembuatan badan waruga kemudian bentuk menjadi pola atap rumah.

Desain waruga dalam studi konservasi kali ini didasarkan pada variabel sistim teknologi cara-cara pembuatan, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya termasuk unsur kelengkapan lainnya yang dalam hal ini adalah ornament atau hiasan.

4. Analisis Tata Letak

Deskripsi tata letak waruga yang terdapat di dalam situs Nima Wanua diamati berdasarkan pola sebaran temuan di dalam situs, arah hadap, dan ketegakan. Kecenderungan pola sebaran akan dilihat berdasarkan variabel bahan dan teknologi pengerjaan. Arah hadap ditentukan berdasarkan penampang tutup yang memiliki bidang lebih luas dan peletakan inskripsi pada salah satu bidang. Kedua variable inilah yang kemudian menentukan kemana arah hadap sebuah waruga sebagai unsur tata letak. Selanjutnya terhadap ketegakan bangunan waruga akan dilihat berdasarkan pada kisaran miring dan tingkat dominasinya di atas atau di bawah permukaan tanah situs sebagai variable perubahan tata letak.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa pola sebaran waruga sangat teratur. 7 waruga berbanjar pada sisi timur pintu gerbang masuk ke situs, 10 waruga berbanjar pada sisi barat pintu gerbang masuk ke situs, dan 4 waruga yang tersebar tidak beraturan di sisi selatan (dekat gedung pertunjukan).

Sesuai dengan letak bidang terluas dari penampang tutup dan peletakan inskripsi pada salah satu bidang waruga dapat diketahui arah hadap dari waruga tersebut. Pada umumnya waruga di situs Nima Wanua ini sebagian besar mengarah Timur – Barat. Dengan rincian sebagai berikut: Timur - Barat sebanyak 16 waruga, Utara – Selatan sebanyak 2 waruga, Tenggara – Timur Laut 1 waruga, dan yang tidak teridentifikasi sebanyak 2 buah (hal ini disebabkan karena kondisi penutup yang sudah ambruk dan hilang/tidak memiliki penutup).

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 21 waruga, pada umumnya waruga diletakkan berdiri tegak (sebagian miring) dimana bagian badannya sebagian (kurang lebih seperempat) ditanam di dalam tanah. Dan berdasarkan ukuran, rata-rata waruga memiliki tinggi antara 30 – 235 cm dari permukaan tanah.

5. Analisis Data Lingkungan

Secara umum, hasil kebudayaan material atau diistilahkan sebagai benda arkeologis kenyataannya merupakan objek yang memiliki interaksi dan tekanan lingkungan makro dan mikro. Tekanan lingkungan ini tidak dapat terhindari sebab merupakan bagian dari proses alam yang pada dasarnya akan mengalami degradasi dan mengakibatkan penurunan kualitas bahan terhadap benda arkeologis. Proses lingkungan dan alam ini pun merupakan pemicu proses percepatan faktor pelapukan seiring dengan penuaan fisik benda arkeologis, sehingga komponen pembentuk bahan penyusun yang bersumber dari alam menjadi hancur dan larut kedalam pelapukan tanah.

Faktor-faktor pemicu percepatan proses degradasi bahan yang terdapat pada kasus kualitas keterawatan di Kompleks Waruga Nima Wanua, dapat dibedakan menjadi tiga faktor; lingkungan mikro, lingkungan makro, dan lingkungan fisik. Dijelaskan disini, bahwa faktor lingkungan mikro yang dimaksud dalam kasus studi konservasi di Kompleks Waruga Nima Wanua adalah kualitas pembentuk waruga yang terdiri dari bahan, desain dan teknologi, tanah dasar, dan iklim setempat. Faktor lingkungan makro merupakan kondisi iklim wilayah regional Kota Tomohon sebagai lokasi Kompleks Waruga Nima Wanua. Faktor lingkungan fisik meliputi unsur hara tanah; pematangan tanah, perkuatan struktur tanah, sistem drainase, tumbuhan dan taman.

a. Lingkungan Mikro

• Tanah Dasar dan pH Tanah

Kondisi tanah dasar pada bagian depan dan belakang Kompleks Waruga Nima Wanua dikelompokkan menjadi permukaan tanah rata, sehingga ketika terjadi musim penghujan sifat permukaan tanah rata tersebut dapat

menjadi tanah resapan. Tingkat pH tanah yang diperoleh dari sampel pengukuran tanah di bagian kaki setiap waruga mencapai pH rata-rata 7% sampai 6,1%, hal ini menunjukkan sifat keasaman tanah pada Kompleks Waruga Nima Wanua.

• Iklim Mikroklimatologi

Iklim di Indonesia merupakan tropis lembab, yang sangat berpengaruh terhadap proses kerusakan dan pelapukan hasil kebudayaan material yang berada di lingkungan terbuka. Iklim merupakan deskripsi dari keadaan cuaca di daerah yang luas dan dalam waktu yang panjang, sedangkan cuaca adalah atmosfer pada saat yang pendek dan pada daerah tertentu. Kondisi atmosfer merupakan gabungan berbagai unsur; suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara dan curah hujan.

Suhu udara di Kota Tomohon rata-rata hanya berfluktuasi di kisaran 22,02 °C sampai 22,80 °C. suhu terendah biasanya terjadi di bulan Januari sedangkan suhu tertinggi terjadi di bulan Juli. Kelembapan udara dari bulan ke bulan cukup tinggi walaupun pada musim kemarau. Kelembapan udara pada bulan Juli, Agustus dan September lebih besar 80%, dengan demikian berarti pada bulan-bulan tersebut kadar uap air di udara cukup tinggi. Kondisi curah hujan rata-rata bulanan selama tahun 1993-2004 diamati oleh Stasiun Geofisika Tondano memperlihatkan curah hujan maksimum pertama terjadi pada bulan April dan maksimum kedua terjadi pada bulan November sebesar 245 mm. sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 98 mm.

Berdasarkan peta iklim Oldeman tipe iklim untuk lokasi Tomohon dan sekitarnya termasuk tipe iklim D1. Kondisi kecepatan arah angin pada bulan Desember dan Januari sebagian besar dari 11 km/jam yang memiliki kisaran 2% - 33% dan sebagian lagi angin utara dengan kisaran 2% - 37% sedangkan bulan Mei sampai Oktober didominasi oleh angin selatan dengan kisaran 2% - 50%. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus berhembus angin selatan dengan cukup kencang. Bulan November berhembus angin barat juga cukup kencang. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0,5 Km/jam sampai dengan 36 Km/jam. (sumber: Stasiun Geofisika Tondano dalam www.tomohonkota.info).

Keadaan unsur-unsur iklim ini akan mempengaruhi perilaku dan metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup, begitu pun sebaliknya keberadaan makhluk hidup terutama tumbuhan akan mempengaruhi keadaan iklim mikro di sekitarnya.

Keberadaan hasil kebudayaan material dan benda-benda alami pada suatu lingkungan juga berpengaruh terhadap iklim mikro setempat, misalnya pada suhu udara, curah hujan, kecepatan dan arah mata angin, intensitas cahaya, dan kelembapan udara. Keragaman unsur-unsur iklim disebabkan perbedaan kemampuan benda dari benda-benda tersebut menyerap radiasi matahari, menyimpan air, dan keragaman fisiknya.

Maka untuk memperoleh data mikroklimatologi di Kompleks Waruga Nima Wanua dilakukan pengamatan temperatur udara dan kelembapan udara untuk mengamati pengaruh iklim terhadap kerusakan dan pelapukan di Kompleks Waruga Nima Wanua dengan menggunakan alat thermometer dan protimeter digital. Hasil pengukuran lapangan diketahui temperatur udara harian berkisar 33°C dengan rata-rata kelembapan udara harian berkisar 80%. Kelembapan terhadap bahan material waruga pun dilakukan untuk mengetahui tingkat kelembapan bahan baku waruga.

b. Lingkungan Makro

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim, suatu penciri yang membedakan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim.

Berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika (23,5°LU-23,5°LS), subtropika (23,5°LU-40°LU dan 23°LS-40°LS), sedang (40°LU-66,5°LU dan 40°LS-66,5°LS), dan kutub (66,5°LU-90°LU dan 66,5°LS-90°LS). (sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim>).

Tipe iklim di Kota Tomohon merupakan kategori tipe A atau iklim basah, dengan musim kemarau terjadi pada bulan Mei – Oktober dan iklim hujan pada bulan November – April. Curah hujan maksimum pada bulan Desember – Maret dengan angka curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar 2.000 – 3.000 mm dengan jumlah hari hujan 90 – 130 hari pertahun. Secara umum suhu udara harian rata-rata bervariasi mulai 25,5°C sampai 27,8°C, pada pagi hari suhu udara minimum berkisar antara 20,8°C sampai 22,8°C, sedangkan pada siang hari suhu udara maksimum dapat mencapai lebih dari 34,6°C. Kondisi ini umumnya berlangsung antara bulan Agustus dan November.

Matahari sebagai sumber utama panas atmosfer, maka energi panas matahari dapat menghasilkan radiasi transfer panas yang terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang panasnya dapat dihitung dalam satuan kalori per hari. Atmosfer tersebut menerima panas secara radiasi dari dua sumber utama, yaitu matahari dan bumi. Besarnya radiasi matahari dapat di absorpsi oleh atmosfer secara langsung dengan rata-rata 19%. Sebaliknya radiasi bumi yang bergelombang panjang sebagian besar dapat di absorpsi oleh atmosfer. Cahaya matahari tersebut memberikan besaran gelombang elektromagnetik yang terdiri; sinar ultraviolet, sinar tampak dan sinar infra merah.

Fluktuasi suhu terjadi akibat perbandingan insolasi

dengan radiasi yang terpancarkan ke antariksa setiap saat dalam waktu satu hari. Sejak matahari terbit sampai kurang lebih pukul 13.00 insolasi lebih besar dari radiasi bumi yang terpancar keluar. Akibatnya sejak matahari terbit sampai kurang lebih pukul 13.00 suhu permukaan bumi terus menerus naik dan sesudah kurang lebih pukul 13.00 suhunya berangsur turun sampai menjelang matahari terbenam. Itulah sebabnya suhu maksimum harian pada umumnya terjadi pada kurang lebih pukul 13.00 dan suhu minimum harian terjadi menjelang matahari terbit (Munandar: 2006).

Kelembapan udara dan keadaan suhu rata-rata yang terjadi di wilayah Kota Tomohon, tentunya memberikan pengaruh terhadap lingkungan waruga di Nima Wanua dan sangat berpengaruh juga terhadap proses penuaan secara alami dengan kondisi lingkungan sekitar.

c. Lingkungan Fisik

• Pematangan Tanah

Kondisi lokasi pada Kompleks Waruga Nima Wanua cukup baik dan terpelihara. Adapun hasil observasi yang diperoleh, bahwa didalam kompleks waruga sudah cukup tertata dengan baik, sehingga tidak diperoleh adanya pengikisan tanah yang dapat mengancam lingkungan waruga, sehingga dapat dikatakan Kompleks Waruga Nima Wanua belum perlu dilakukan tindakan perkuatan struktur tanah atau diistilahkan sebagai konservasi lingkungan.

• Sistem Drainase

Sistem drainase merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadi genangan air pada waktu musim hujan. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pada Kompleks Waruga Nima Wanua belum memiliki system drainase yang baik, sehingga sistem drainase dalam dan sekeliling lingkungan kompleks dianggap perlu dilakukan untuk dapat mengurai genangan air ketika tingkat curah hujan meningkat.

• Vegetasi

Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan akan membuat lingkungan hidup lebih asri, disamping sebagai bagian dari memperindah lingkungan, tanaman juga dapat memodifikasi unsur-unsur iklim. Tanaman memang tidak dapat merubah unsur iklim secara drastis, tetapi dapat melakukan perubahan kecil yang ditimbulkan yang dapat memicu kerusakan akibat perubahan iklim, misalnya: kondisi udara dibawah pohon tersebut akan terasa lebih teduh, sejuk, dan lembab. Lebih teduh karena intensitas cahaya matahari langsung sebagian besar tidak dapat menembus kanopi pohon tersebut. Lebih sejuk karena berkurangnya masukan energi cahaya untuk memanaskan udara dan permukaan tanah dibawah kanopi. Selain menurunkan intensitas cahaya langsung dan suhu, pohon dan semak serta vegetasi lainnya dapat mempertinggi kelembapan udara dan dapat pula mengurangi kecepatan angin (Lakitan, 1994: 57).



Foto 6 & 7. Akar tumbuhan yang dapat merusak waruga (dok.bpcb gorontalo)

Tumbuhan atau tanaman akan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik bangunan waruga. Melihat fenomena yang diperoleh dari observasi di lokasi waruga, menunjukkan bahwa waruga didalam kompleks ini berada pada lokasi yang lembab, karena disekitar waruga ditanami tumbuhan atau tanaman tingkat tinggi dan sangat mempengaruhi tingkat kerusakan dan pelapukan hasil kebudayaan material di lokasi penelitian. Selain itu, akar dari tanaman tingkat tinggi tersebut dapat bahkan telah ada yang mengancam waruga-waruga tersebut dari kerusakan.

Hal tersebut yang mendasari harus dilakukan pengendalian lingkungan, seperti pemangkasan daun tumbuhan supaya intensitas cahaya masuk dan tidak membuat waruga tersebut lembab. Dan harus dilakukan pemotongan akar yang besar yang akan menabrak atau menhantam dasar waruga-waruga tersebut.

• **Taman**

Taman pada halaman Kompleks Waruga Nima Wanua dibuat dengan tujuan menciptakan penataan lingkungan yang serasi dengan hasil kebudayaan material (konservasi lingkungan) dan selain itu untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa tanaman yang tumbuh disekitar waruga memberikan pengaruh terhadap kerusakan dan pelapukan terhadap bahan waruga

di Nima Wanua, selain tanaman kondisi permukaan tanah tempat waruga berdiri lebih rendah dibandingkan jalanan setapak/jalanan masuk, yang justru akan membuat air tegenang di sekitar waruga jika dimusim penghujan. Air yang tegenang tersebut dapat mempercepat tumbuhnya mikroorganisme yang merupakan salah satu penyebab pelapukan.

d. Vandalisme

Pada dasarnya manusia tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pelapukan terhadap hasil material kebudayaan yang berada di lingkungannya. Jenis-jenis kerusakan dan pelapukan yang disebabkan oleh manusia dengan sengaja maupun tanpa disadari bahwa tindakan atau tingkah lakunya merugikan dan merusak hasil kebudayaan material. Kerusakan



Foto 8. Air gampang tergenang di sekitar waruga karena jalanan lebih tinggi dari pijakan waruga (dok.bpcb gorontalo)



Foto 9. Bekas lilin sisa pemujaan dan ziara masyarakat (dok. bpcb gorontalo)

yang diakibatkan aktifitas manusia terhadap interaksinya terhadap hasil kebudayaan material berupa; pencurian, mengambil bahan atau memotong bagian material, menyiram dengan bahan kimia tertentu sehingga mengakibatkan bagian struktur dan penyusun bahan hasil kebudayaan material tersebut akan semakin mempercepat proses kerusakan dan pelapukan sehingga dapat memusnahkan data kebudayaan material.

Hasil observasi didalam Kompleks Waruga Nima Wanua diperoleh bahwa salah satu penyebab kerusakan dan pelapukan yang terjadi sebagian disebabkan oleh faktor manusia, karena waruga di dalam kompleks tersebut merupakan objek wisata ziarah

6. Analisis Keterawatan (Kerusakan dan Pelapukan)

• Kerusakan dan Pelapukan

Waruga adalah Cagar budaya yang merupakan hasil kebudayaan (cipta, karya, dan rasa) dalam bentuk benda-wi yang berumur ratusan tahun. Mengingat karena waruga yang terbuat dari bahan batuan tuff ini telah dibuat dari ratusan tahun silam. Maka besar kemungkinan telah mengalami proses degradasi atau penurunan kualitas. Hal itulah yang terjadi pada waruga-waruga di Nima Wanua.

Degradasi bahan penyusun hasil kebudayaan material memiliki dua kategori; kategori kerusakan yang disebabkan oleh perubahan pada hasil kebudayaan material tanpa diikuti oleh perubahan unsur bahan penyusun yang digunakan seperti retak, pecah, deformasi (melesak, miring, menggelembung); sedangkan kategori pelapukan merupakan proses perubahan pada sifat-sifat fisik bahan penyusun maupun sifat kimiawi yang diikuti dengan peningkatan kerapuhan seperti pelarutan unsur-unsur (karbonatisasi, sulfatasi, hidrolisa, oksidasi,) sehingga membentuk proses dekomposisi berupa penggaraman, pembusukan, pengelupasan, dan metabolisme jasad.

a. Jenis Algae/Ganggang

Algayaitu ganggang yang berupa tanaman atau organisme plantlike yang mengandung klorofil dan pigmen lainnya (bahan pewarna) yang yang berfotosintesis jika terkena energy cahayamatahari. Ganggang dapat tumbuh pada permukaan batuan yang lembab.

Jenis metabolisme jasad ini akan tumbuh pada bahan hasil kebudayaan material yang kondisinya lembab. Sumber makanan jenis algae yaitu debu yang melekat pada pori batu bahan waruga. Siklus pertumbuhan yang lama dan menutupi permukaan batu mengakibatkan pelapukan bahan batu waruga yang selanjutnya menjadikan sumber makanan, akan mati, kering dan mengelupas pada musim kemarau. Pada saat proses pengelupasan tersebut yang akan membawa partikel bahan hasil kebudayaan material waruga yang mengalami proses penuaan, rapuh dan akibatnya menjadi aus pada permukaan batu.

Dari hasil observasi pada waruga-waruga Nima Wanua ditemukan pertumbuhan jasad renik berupa algae sangat berkembang. Hal ini disebabkan oleh suhu di Nima Wanua sangat fluktuatif, kurangnya intensitas cahaya yang kurang bersentuhan langsung terhadap waruga yang menyebabkan permukaan waruga lembab dan gampang ditumbuhi alga. Dan peran Juru Pelihara yang ditugaskan jarang membersihkan alga yang terlanjur menempel pada permukaan waruga dengan ketakutan akan terjadi kerusakan lebih parah dan pengikisan permukaan waruga.



Foto 10 dan 11. Ganggang yang menempel pada waruga. (dok.bpcb gorontalo)

Adapun data serangan alga seluas 13.829 cm² pada 21 waruga dengan luas permukaan keseluruhan sebanyak 730.403 cm².

a. Jenis Moos/Lumut

Moos, adalah tumbuhan lumut yang merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik namun belum memiliki akar dan daun sejati (Wikipedia). Terdapat dua jenis lumut yang berkembang biak disini yaitu Java Moos dan Rhytidiadelphus Triquetrus. Java Moos dengan nama ilmiah Vesicularia Dubyana kebanyakan tumbuh pada permukaan batuan. Pertumbuhan lumut ini dapat mengikis batuan. Sedangkan Rhytidiadelphus Triquetrus tumbuh pada genangan air yang tertampung pada kalamba, akarnya kadang menempel pada batuan yang basah.

Metabolisme jasad jenis moss dengan kata lain lumut merupakan tumbuhan yang mempunyai akar batang dan daun semu. Pertumbuhannya berada pada lingkungan yang lembab dan pada endapan debu, didalam pori-pori batu yang merupakan tempatnya untuk memperoleh makanan. Akar lumut akan masuk kedalam pori-pori batu untuk mencapai sumber makanannya, kemudian pada

proses asimilasi akar lumut akan mengeluarkan gas yang bereaksi terhadap unsur bahan batu dan mengakibatkan kerapuhan pada bahan waruga.

Dari hasil observasi pada waruga-waruga Nima Wanua ditemukan pertumbuhan Lumut yang paling besar. Hal ini disebabkan karena suhu di Nima Wanua sangat lembab, kurangnya intensitas cahaya yang kurang bersentuhan langsung terhadap waruga yang menyebabkan permukaan waruga lembab dan kadar air yang tinggi sehingga mudah bagi lumut untuk berkembang biak. Dan peran Juru Pelihara yang ditugaskan jarang membersihkan lumut yang terlanjur menempel pada permukaan waruga dengan ketakutan akan terjadi kerusakan lebih parah dan pengikisan permukaan waruga.



Foto 12, 13, dan 14. Jenis lumut yang tumbuh pada permukaan waruga (dok.bpcb gorontalo)

Adapun data serangan lumut seluas 411.111 cm² pada 21 waruga dengan luas permukaan keseluruhan sebanyak 730.403 cm².

c. Jenis Lichen/Jamur Kerak

Pertumbuhan lichen merupakan simbiosis algae (ganggang) dan moss (lumut) yang tumbuh pada permukaan batu waruga pada kondisi lingkungan sedang maupun panas. Pada suhu udara tinggi, lichen akan mati dan mengelupas. Saat mati dan mengelupas kemudian membawa partikel bahan pembentuk batuan waruga yang mengakibatkan permukaan batu waruga menjadi lapuk dan aus.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada waruga-waruga Nima Wanua ditemukan pertumbuhan lichen sudah mulai berkembangbiak. Hal ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan lumut dan alga. Hingga mengakibatkan lumut dan alga bersimbiosis.



Foto 15, dan 16. Jenis lichen yang tumbuh pada permukaan waruga (dok.bpcb gorontalo)

Adapun data serangan lichen terhadap permukaan seluruh waruga di Situs Waruga Nima Wanua seluas 76.356 cm² dari luas permukaan keseluruhan sebanyak 730.403 cm².

d. Penggaraman

Penggaraman merupakan proses kapilarisasi air yang membawa mineral terlarut melalui air rembesan, kemudian menguap sehingga terjadi proses endapan garam dan sedimentasi. Pada kasus Waruga Nima Wanua terlihat ada rembesan air yang bisa jadi merupakan penyebab kerusakan. Air yang merembes menimbulkan reaksi kimia, yakni penggaraman terhadap batu.



Foto 17. penggaraman pada permukaan badan waruga (dok. bpcb gorontalo)



Foto 18. penggambaran pada permukaan waruga (dok.bpcb gorontalo)

e. Lubang Pustule

Postules yang terdapat pada material waruga merupakan asosiasi pertumbuhan moss dan algae atau ganggang yang tumbuh pada area endapan garam yang pecah dan membentuk lubang.

Pada kasus dan hasil observasi pada keseluruhan waruga Nima Wanua, ditemukan bahwa timbulnya lubang pustule belum terlalu dominan dan banyak menyerang permukaan batuan. Namun tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan lebih dini.



Foto 19. Lubang pustule pada permukaan waruga (dok.bpcb gorontalo)

f. Kerusakan Mekanis (Retak, Pecah dan Patah)

Retak, Pecah dan patah dapat disebabkan oleh dua faktor yakni internal dan eksternal, dalam kasus penelitian yang dilakukan pada batuan di dalam Situs Kompleks Waruga Nima Wanua ditemukan bahan batu yang retak bahkan pecah dan patah disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh proses kembang susut bahan karena pengaruh iklim. Bukan hanya itu proses patah maupun pecah jg disebabkan oleh faktor lain seperti tindakan vandalism manusia maupun hewan. Sedangkan faktor internalnya disebabkan oleh kekuatan batu pada bagian penutup waruga masih lebih kuat dibandingkan badan waruga yang telah mengalami penurunan kualitas bahan, sehingga menyebabkan bahan penyusun badan waruga ambruk.

Pada kasus Waruga Nima Wanua ini pecahan dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama yaitu bekas pecahan atau patahan masih ada terlihat dan masih bisa di susun bina-bangun. Sedangkan yang kedua yaitu bekas pecahan/patahan tidak ditemukan lagi.

Adapun data keretakan, pecahan/patahan pada permukaan seluruh waruga yang luasnya 730.403 cm².



Foto 20, 21, dan 23. Kerusakan mekanis berupa retak, pecah dan lubang pada waruga (dok.bpcb gorontalo)

Adapun data lubang pustule pada permukaan seluruh waruga di Situs Waruga Nima Wanua yaitu 109 cm² dari luas permukaan keseluruhan sebanyak 730.403 cm².

D. OUTPUT KEGIATAN

1. Rencana Penanganan

Waruga adalah cagar budaya yang merupakan tinggalan purbakala yang memiliki umur terbilang cukup tua dan pasti telah mengalami proses degradasi pada bahan dasar pembuatnya. Maka dari itu dianggap perlu untuk dilestarikan. Baik itu secara konservasi, pemugaran, revitalisasi dan lainnya.

Sebagai Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dalam bentuk konservasi yaitu dengan melakukan perencanaan penanganan dan penghitungan rincian anggaran biaya. Kali ini, pada kasus Studi Keterawatan (Konservasi) Waruga Nima Wanua di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, bentuk pelestarian yang akan dilakukan yaitu dengan perawatan secara konseptual dikenal dengan istilah perawatan preventif dan perawatan kuratif. Mengingat tingkat ketergangguan kualitas bahan waruga pada kompleks Waruga Nima Wanua, Kota Tomohon, Sulawesi Utara sebagai cagar budaya yang telah mengalami degradasi diputuskan untuk melakukan tindakan pelestarian yang direkomendasikan melalui tahap-tahap:

a. Perawatan Preventif

Pembersihan Preventif bertujuan untuk pencegahan kerusakan dan pelapukan yang lebih berlanjut terhadap Waruga.

• Pengaturan/Penataan Lingkungan Makro dan Mikro

Berdasarkan hasil analisis lingkungan telah diperoleh data lingkungan makro dan mikro yang sudah layak. Baik itu dari system penataan lingkungan areal kompleks waruga. Namun penggunaan tumbuhan tingkat tinggi yang berdaun lebat sangat membatasi masuknya atau bersentuh langsungnya cahaya dan panas matahari. Hingga berdasarkan hasil pengkajian klimatologi, ditemukan tingkat kelembaban yang terjadi terhadap bahan waruga sangat tinggi, yang menyebabkan mudah tumbuhnya biotis-biotis yang mampu membuat kekuatan dari bahan waruga mengalami degradasi.

Selain dari itu pada lingkungan Waruga Nima Wanua tidak ditemukan adanya drainase, sehingga menyebabkan tergenangnya sebagian badan waruga jika terjadi hujan deras, dan tanah disekitar waruga menjadi basah dan lembek.

Sehingga dari hasil kegiatan studi keterawatan waruga nima wanua, menemukan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi. Adapun yang harus dilakukan yaitu:

- Harus dilakukan pemangkasan ranting pada tumbuhan tingkat tinggi atau mengganti dengan tanaman yang tidak terlalu tinggi namun merupakan endemik dari wilayah tersebut, sehingga cahaya matahari bisa bersentuhan langsung dengan waruga.
- Dibutuhkan pembuatan system drainase yang bertujuan untuk menghindari terjadinya genangan air pada musim hujan

• Perawatan Rutin

Dalam menjaga kelestarian Waruga Nima Wanua dan menghindarkan dari kerusakan maupun pelapukan, maka dari itu telah ditempatkan tenaga juru pelihara, yang salah satu tugasnya yaitu melakukan perawatan terhadap waruga-waruga di Nima Wanua. Adapun perawatan rutin yang harus direkomendasikan untuk juru peihara dalam melestarikan cagar budaya waruga ini yakni:

- Membersihkan secara rutin rumput-rumput yang ada disekitar waruga
- Membersihkan tanaman merambat dan tanaman tingkat tinggi yang tumbuh di badan maupun penutup waruga
- Membersihkan lumut dan algae dengan sikat ijuk dengan cara menyikat secara pelan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelapukan pada bahan waruga. Juga bisa mencegah tumbuhnya lichen.
- Membersihkan akumulasi debu yang menempel pada waruga tersebut. Pekerjaan ini harus dilakukan secara rutin.

b. Perawatan Kuratif

Pembersihan kuratif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada bahan cagar budaya khususnya waruga yang ada di situs CB Waruga Nima Wanua, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

•Pembersihan

o Pembersihan Debu

Pembersihan debu dilakukan dengan menggunakan kuas, solet bamboo, sapu ijuk serta vacuum cleaner serta alat penyemprot air bertekanan. Pembersihan debu ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kering dan basah. Pembersihan secara kering dilakukan dengan menggunakan kuas, sapu ijuk, solet bamboo (digunakan pada daerah atau titik yang sulit dijangkau misalnya bagian retakan serta pada motif hias waruga), dan jika perlu digunakan vacuum cleaner untuk menghisap debu. Pembersihan secara basah biasanya dilakukan dengan cara menyemprotkan air bertekanan dan cara menyikatnya.

Dalam pembersihan debu pada seluruh permukaan waruga dengan luas 703.403 cm² dikonversi ke m(meter) 7.034 m². Dapat dihitung dan dianalisis, jika 1 orang dapat membersihkan waruga seluas 300 m² per jamnya. Jadi dalam 1 hari, 1 orang dapat membersihkan 1.800 m² (6 jam kerja efektif).

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa untuk membersihkan seluruh permukaan waruga yang ada di Nima Wanua dengan luas 7.034 m², membutuhkan tenaga sebanyak 4 orang. Pembersihan tersebut bisa dilakukan selama 6 jam per orangnya. Jika jumlah waruga sebanyak 21 waruga, waktu pembersihan yang dapat dilakukan yaitu selama 1 hari jam kerja.

o Pembersihan Organisme

Secara umum pembersihan organisme dilakukan dengan dua cara yaitu pembersihan secara tradisional dengan

pembersihan secara modern.

- Untuk pembersihan secara tradisional, yaitu pembersihan dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kuas, sikat ijuk, parang, solet bamboo dan lainnya. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan lumut, algae, tanaman merambat, dan tanaman tingkat tinggi. Pembersihan secara tradisional ini menggunakan dua metode yaitu metode pembersihan secara kering dan pembersihan secara basah.

Dalam proses pembersihan ini, belum dapat membersihkan organisme secara detail dan menyeluruh pada permukaan waruga. Hanya mampu membersihkan lumut kering dan yang masih basah, alga, dan tumbuhan merambat maupun tingkat tinggi.



Foto 24. Pembersihan mekanis kering & basah pada waruga (dok.bpcb gorontalo)

Hasil studi keterawatan yang dilakukan pada seluruh (7.034 m²) permukaan Waruga di Nima Wanua, dapat dihitung dan dianalisis, jika 1 orang dapat melakukan pembersihan mekanis kering dan basah seluas 150 m² perjamnya. Jadi dalam 1 hari, 1 orang dapat melakukan pembersihan seluas 900 m². Dengan estimasi waktu 1 hari yaitu 8 jam kerja di kurangi 2 jam istirahat, shalat dan makan. Jadi waktu efektif yang digunakan dalam sehari yaitu 6 jam.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa untuk membersihkan seluruh serangan organisme (yang dapat hilang menggunakan peralatan tradisional tanpa menggunakan bahan kimia) terhadap permukaan waruga dengan luas (7.034 m²) membutuhkan tenaga sebanyak 6 orang. Dengan rincian 4 orang tenaga pembersih dan 2 orang tenaga penyuplai air. Lama proses pekerjaan pembersihan mekanis kering dan basah ini membutuhkan waktu selama 2 hari.

- Untuk pembersihan modern, biasanya dilakukan pada organisme yang sulit hilang dengan menggunakan peralatan sederhana, seperti lichen. Pembersihan lichen dilakukan dengan campuran bahan kimia yaitu larutan AC-322. AC-322 ini merupakan formulasi dari campuran: Amnium bicarbonate 30 gr, Sodium bicarbonate 50 gr, CMC (Carboxymethyl Cellulose) 50 gr, Sodium EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) 25 gr, Arkopal 3

cc, yang dilarutkan dalam air hingga volume 1000 cc. bahan tersebut dioleskan dengan menggunakan kuas pada dinding waruga yang terjangkit lichen yang telah dibersihkan secara mekanik sebelumnya. Selanjutnya ditutup plastik selama 24 jam. Setelah itu dibersihkan dengan menggunakan air bersih hingga pHnya benar benar netral atau menunjukkan di angka 7. Setelah pH nya netral, kemudian disemprotkan bahan anti lumut seperti hyamine dengan konsentrasi 2 %.

Pada kasus Situs CB Waruga Nima Wanua, Kota Tomohon, Sulawesi Utara berdasarkan kegiatan studi keterawatan ditemukan serangan lichen seluas 76.365 cm² (763,65 m²).

Pada intinya proses pembersihan secara khemis terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu, pencampuran/ pembuatan bahan larutan AC 322, pengolesan larutan AC322, pembungkusan waruga, pencucian waruga dan pengeringan waruga. Adapun rincian analisis dan perhitungan jumlah tenaga, waktu kerja dan total bahan yang akan digunakan, sebagai berikut;

- Perhitungan jumlah tenaga pembersihan (pengolesan dan pencucian), pembungkusan dan waktu kerja sebagai berikut;

1. Pembuatan Larutan AC322, dibutuhkan 1 orang tenaga konservator, dengan waktu yang digunakan selama 1 hari (25 jam). Dengan rincian. 1 jam untuk pencampuran dan pengadukan hingga homogen, 24 jam untuk waktu pengendapan bahan, hingga zat aktifnya bisa bekerja.



Foto 25. . Pembuatan larutan AC322 pada keg konservasi waruga airmadidi (dok.bpcb gorontalo)

2. Pengolesan Larutan AC322 dan Pembungkusan, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa, 1 orang dapat melakukan pengolesan larutan AC322 dan pembungkusan terhadap permukaan waruga seluas 16 m² perjamnya. Jadi jika menggunakan tenaga sebanyak 4 orang membutuhkan waktu selama 2 hari.



Foto 26. . Pengolesan larutan AC322 pada keg konservasi waruga airmadidi (dok.bpcb gorontalo)

3. Pencucian dan pengukuran pH Balance, dilakukan terhadap permukaan waruga yang telah diolesi AC 322. Setelah dilakukan pencucian, kemudian dilakukan pengecekan tingkat keasaman dengan menggunakan pH kertas. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa 1 orang dapat melakukan pencucian permukaan waruga seluas 10 m² perjamnya. Jadi jika keluasan permukaan waruga yang dicuci seluas 763,65 m² maka dibutuhkan waktu pencucian selama 3 hari dengan menggunakan tenaga pencuci sebanyak 4 orang dibantu 2 orang tenaga penyuplai.

4. Evaluasi dan Dokumentasi, setelah dilakukan semua prosedur pembersihan, selanjutnya dilakukan evaluasi pekerjaan dengan pengecekan kondisi waruga dan pengecekan sisa pertumbuhan organisme. Setelah itu dilakukan pendokumentasian secara detail. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 3 orang dengan rincian tugas sebagai berikut; 1 orang konservator, 1 orang dokumentator, dan 1 orang pencatat.



Foto 27. Pencucian waruga pasca pengolesan larutan AC322 pada keg konservasi waruga airmadidi (dok.bpcb gorontalo)



Foto 28. Pengukuran tingkat keasaman pasca konservasi pada keg konservasi waruga airmadidi (dok.bpcb gorontalo)

PENUTUP

Dalam rentang perjalanan waktu, tiap cagar budaya akan mengalami proses degradasi secara wajar yang berupa penuaan. Pada tataran realitas cagar budaya juga mengalami degradasi yang tidak wajar berupa kerusakan dan pelapukan. Degradasi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang terintegrasi hingga menimpa cagar budaya. Untuk menjaga kelestariannya maka perlu dilakukan tindakan perawatan dengan cara preventif dan kuratif melalui pembersihan, pengendalian lingkungan mikro, pengawetan, dan perbaikan dengan tetap memperhatikan otentisitas bentuk, otentisitas bahan pembuat, otentisitas teknologi pengerjaan, otentisitas desain, dan otentisitas tata letak. Mengingat sifatnya yang tak terbarukan dan jumlahnya yang terbatas serta usianya yang tua, maka pelaksanaan perawatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang diawali dengan studi teknis perawatan, kemudian langkah-langkah penindakan.

1. Kesimpulan

Warisan budaya berupa waruga yang berada di Situs Cagar Budaya Waruga Kokole II, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merupakan salah satu bentuk jenis cagar budaya yang disinyalir telah mengalami degradasi. Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa degradasi menyebabkan menurunnya kualitas data arkeologi dan tingkat keterawatan (kelengkapan dan keutuhan) sebagai benda cagar budaya.

Penurunan kualitas waruga sebagai benda cagar budaya dari aspek keterawatan berupa kerusakan dan pelapukan. Kerusakan terjadi pada kisaran pecah, berlubang, ambruk atau hancur. Sedangkan pelapukan terjadi pada kisaran aus pada bagian-bagian waruga yang terdapat ornament. Disamping kerusakan dan pelapukan penurunan kualitas baku mutu waruga juga disebabkan oleh muncul menempelnya benda-benda asing seperti lumut, lumut kerak, tumbuhan rambat dan merembesnya air baik air tanah maupun air hujan.

Penurunan kualitas waruga terjadi karena faktor alam. Faktor alam yang dimaksud disini yaitu terjadinya genangan air yang diakibatkan oleh hujan deras yang menyebabkan tergenangnya badan waruga. Selain itu, turunnya kualitas bahan waruga ini disebabkan oleh ulah vandalisme manusia itu sendiri. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurunnya kualitas otentisitas data arkeologi sebagaimana hasil analisis lebih disebabkan oleh munculnya intervensi luar yang berupa upaya pembongkaran isi waruga sehingga beberapa waruga rusak dan tutupnya bergeser dari tempatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa degradasi baik karena penuaan, maupun kerusakan dan pelapukan telah terjadi pada Waruga Kokole II dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, dan oleh karena itu perlu dilakukan tindakan perawatan untuk menjaga kelestariannya.

2. Saran

Mengingat cagar budaya Waruga Kokole II yang telah mengalami degradasi cukup tinggi, maka pada kesempatan ini disarankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menanggulangi berupa perawatan kuratif dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan perawatan preventif yaitu pencegahan berupa perawatan rutin dan pengendalian lingkungan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2005. Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala.

Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, 2013. Kota Tomohon Dalam Angka 2013. BPS Kota Tomohon.

Kasnowiharjo, Gunadi. 2001. "Manajemen Sumberdaya Arkeologi". Lembaga Penerbitan Unhas: Makassar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Kusumohartono, Bugie .1993. "Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumberdaya Arkeologi". Dalam Berkala Arkeologi. Yogyakarta: Tahun XII Balai Arkeologi Yogyakarta.

Munandar, Aris. 2008. "Faktor-Faktor Kerusakan dan Pelapukan Bangunan Kayu. Borobudur" Makalah disampaikan pada BinteK Konservasi BCB. (tidak diterbitkan)

Poesponegoro, Marwati Djoened. 2010. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Swastika, Ari, 2011, Teknik dan Pemeliharaan BCB Organik dan Anorganik. Sebagai bahan ajar pada diklat dasar konservasi cagar budaya. (tidak diterbitkan)

Tanudirjo, Daud Aris. 2004. Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Jurusan Arkeologi. Fakultas Ilmu Budaya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tim Peneliti. 2011. Laporan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Tomohon (tidak terbit)

Tim Peneliti. 2016. Laporan Studi Keterawatan CB Waruga Kokole di Minahasa Utara (tidak terbit)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Arkeologi>

sumber: Stasiun Geofisika Tondano dalam www.tomohonkota.info

DARI GUA KE RUMAH, TRADISI CAP TANGAN DI SULAWESI SELATAN

Muhammad Nur
Dosen Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan hand stencil di gua-gua prasejarah Sulawesi Selatan yang berumur 39.900 tahun lalu dan hand print di rumah panggung yang masih dibuat oleh orang Bugis sampai sekarang. Ada tiga persamaan antara tradisi hand print dan hand stencil di Sulawesi Selatan, pertama adalah beberapa variasi bentuk hand stencil di gua-gua juga ada pada variasi hand print di rumah. Persamaan kedua adalah sebaran wilayah hand print dan hand stencil yang memperlihatkan korelasi kuat. Ketiga adalah tempat menempelkan hand mark sama-sama pada wadah hunian yaitu gua dan rumah. Hasil penelitian arkeologi menunjukkan bahwa umur hunian gua yang mengandung hand stencil di Sulawesi Selatan sejak masa Plestosen Akhir sampai Awal Masehi, sementara bukti kehadiran imigran Austronesia yang merupakan leluhur orang Bugis baru tampak di gua-gua pada 4.000 tahun lalu. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa tradisi membuat hand print merupakan hasil transformasi budaya dari penghuni gua (Toalian) ke populasi Austronesia awal yang merupakan leluhur orang Bugis.

Kata kunci : **mabbedda bola, hand print, Toalian, Bugis.**

Di kawasan karst Maros-Pangkep-Bone (Sulawesi Selatan), tersebar paling tidak 83 gua prasejarah yang mengandung hand stencil. Salah satu hand stencil di Gua Timpuseng (Maros) yang telah diteliti dengan teknik pertanggalan *uranium-series* menghasilkan umur minimum 39.900 tahun lalu, merupakan salah satu data lukisan tertua di dunia (Aubert, dkk., 2014:223). Sampai sekarang, belum diketahui ciri fisik manusia pembuat hand stencil di gua-gua Sulawesi karena belum pernah ditemukan rangka manusia, tetapi beberapa peneliti sepakat menyebut penghuni gua tersebut sebagai Orang Toalian (Sarasin, 1905; Heekeren, 1972; Glover, 1981; Pelras, 1996; Bellwood, 2000; Forestier, 2007; Simanjuntak dkk., 2012; Aubert, dkk., 2014; Duli dan Muhammad Nur, 2016). Pengetahuan kita tentang batas waktu eksistensi Orang Toalian yang merupakan penghuni awal Pulau Sulawesi sangat terbatas disebabkan kurangnya data. Di sisi lain, berdasarkan penelitian arkeologis, populasi Mongoloid yang menuturkan Bahasa Austronesia baru memasuki Pulau Sulawesi pada 4000 BP (Turner, 1990:302).

Orang Bugis adalah salah satu populasi penutur Bahasa Austronesia dan memiliki ciri fisik Mongoloid. Mereka mendiami wilayah sekitar karst Maros-Pangkep-Bone dan

merupakan etnik dengan populasi terbesar di Pulau Sulawesi. Orang Bugis memiliki ritual membuat hand print di rumah-rumah mereka yang berbentuk panggung. Mereka percaya bahwa tradisi ini telah diwarisi secara turun temurun dari leluhur mereka. Sampai sekarang, belum ada penelitian mendalam tentang tradisi hand print di Sulawesi Selatan, kecuali yang dilakukan oleh Dubel Driwantoro (1989) yang lebih fokus pada tradisi upacara *mabbedda bola*.

Peta 1 Wilayah Indonesia dan letak Pulau Sulawesi



Uraian di atas menempatkan umur pembuatan hand stencil dan hand print di Sulawesi Selatan yang sangat jauh. Sampai sekarang, belum ada sarjana yang mengajukan data dan perspektif mengenai hubungan kedua tradisi tersebut. Permasalahan ini memang tidak sederhana karena berdasarkan hasil penelitian arkeologis di Sulawesi, populasi Mongoloid atau imigran Austronesia yang merupakan leluhur orang Bugis baru menggunakan Gua Codong sebagai gua penguburan pada 4.000 BP. (Turner, 1990:302; Bulbeck, 1996-7:1026), sementara gua-gua Toalian yang mengandung hand stencil di Sulawesi Selatan memperlihatkan umur hunian sejak masa Plestosen Akhir (39.900 tahun lalu) (Glover, 1981:1-38; Bulbeck, dkk., 2004:114-127; Aubert, dkk., 2014:223) sampai awal Masehi. Terlepas dari jauhnya perbedaan waktu tradisi hand print dan hand stencil di Sulawesi Selatan, hal yang menarik adalah ada beberapa persamaan atau kedekatan antara hand stencil yang dibuat oleh orang Toalian dengan hand print yang dibuat oleh orang Bugis sekarang.

Penelitian ini akan mendiskusikan dua hal, pertama

adalah sebaran dan variasi bentuk *hand mark* (*hand stencil* dan *hand print*), dan kedua adalah skenario transformasi *hand stencil* dari Orang Toalian ke imigran Austronesia (leluhur Orang Bugis) di Sulawesi Selatan. Diskusi tentang hubungan antara tradisi *hand stencil* dan *hand print* di Sulawesi merupakan isu baru dalam kajian prasejarah Asia Tenggara dan diharapkan dapat menjadi bahan diskusi jika ada data tambahan dari para pembaca.

Metode dan kendala Penelitian

Data yang dikumpulkan meliputi data arkeologi dan data etnografi. Survei lapangan dilakukan pada dua lokasi data, yaitu lokasi gua-gua prasejarah yang mengandung *hand stencil* di Kabupaten Maros, Pangkep dan Bone, serta rumah panggung yang mengandung *hand print* di Kabupaten Soppeng, Bone, Pangkep, Maros, dan Barru (lihat peta no.1). Fokus perhatian pada survei lapangan adalah letak, warna, variasi bentuk, dan teknik pembuatan *hand stencil* di gua prasejarah, sedangkan perhatian pada tradisi *hand print* difokuskan pada letak, warna, variasi bentuk, teknik pembuatan, bahan, dan individu pembuat. Teknik wawancara secara mendalam dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang berhubungan dengan tradisi *hand print*. Informan yang dipilih adalah pembuat *hand print* yang merupakan pemilik rumah, penghuni rumah, tokoh adat, serta *sanro bola* (dukun yang memimpin ritual *Mabbedda Bola*). Adapun kegiatan studi pustaka, dilakukan pengumpulan dan pembacaan laporan tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan *hand stencil* di gua-gua prasejarah dan *hand print* di rumah orang Bugis.

Hasil data lapangan berupa bentuk-bentuk *hand stencil* dan *hand print*, bahan yang digunakan, sebaran gua dan rumah yang mengandung *hand mark*. Data tersebut kemudian diklasifikasi lalu dibandingkan. Untuk menguatkan analisis, digunakan pendekatan etik-etik, dalam pengertian, data wawancara (etik) diverifikasi oleh data *hand print* di rumah panggung (etik). Setelah itu, kedua data *hand mark* dibandingkan untuk melihat persamaan dan variasinya. Tahap selanjutnya adalah integrasi hasil analisis dengan hasil penelitian prasejarah Sulawesi, untuk mengurai skenario yang terjadi pada masa lalu.

Kendala dalam penelitian ini cukup sulit terutama pada data *hand print*. Selain kendala teknis seperti lazimnya sebuah penelitian, ada dua kendala utama yang menyebabkan sulitnya perolehan data *hand print*. Kendala pertama adalah data *hand print* sifatnya tidak permanen karena cepat rusak atau terhapus, berbeda dengan *hand stencil* di gua-gua yang terbukti dapat bertahan ribuan tahun. Dengan demikian, hanya 639 sampel *hand print* yang ditemukan pada 52 rumah, padahal jumlahnya pasti jauh lebih banyak karena hampir semua rumah penduduk Bugis melalui tahapan ritual *mabbedda bola*. Kendala kedua adalah masyarakat yang umumnya beragama Islam takut memberikan informasi tentang *hand print* karena mereka tidak mau disebut melakukan ritual yang tidak

dianjurkan agama Islam. Oleh karena itu, informasi tentang ritual *mabbedda bola* sulit dilacak secara maksimal.

Tradisi Hand Print di Sulawesi Selatan

Orang Bugis masih mewarisi suatu tradisi dari leluhurnya yaitu tradisi *mabbedda bola*. Menurut para informan, tradisi ini adalah tradisi tua sehingga tidak diketahui kapan pertama kali dibuat oleh leluhurnya. Catatan naskah lontarak hanya menerangkan satu cerita tentang tradisi ini. Dalam naskah Lontarak, disebutkan bahwa Raja Bone ke-23 Ahmad Assaleh (1775-1812) memerintahkan untuk melakukan tradisi *mapparada bola* yang dipimpin oleh *sanro bola* (Wawancara perorangan dengan Dr. Mukhlis Hadrawi tanggal 15 Juni 2017). *Mapparada bola* adalah sebutan Orang Bone untuk ritual membuat cap tangan di rumah ketika rumah baru akan dihuni, sama dengan tradisi *mabbedda bola* bagi masyarakat Bugis lainnya. Tradisi *mabbedda bola* adalah ritual membuat *hand print* pada tiang atau dinding rumah panggung. Konstruksi rumah panggung orang Bugis terdiri dari tiga bagian secara vertikal yaitu bagian bawah yang terdiri dari tiang dan balok horizontal, bagian tengah yang terdiri dari teras dan ruangan, dan bagian atas yang terdiri dari bagian plafond dan atap. Tempat *hand print* dicapkan adalah pada bagian tiang dan balok horinzontal di bagian bawah rumah dan bagian tengah pada dinding, pintu, ruang tengah, kamar, dan dapur.

Hasil *hand print* yang ditemukan pada bidang gambar adalah positif. Bahan yang digunakan berbeda di tiap lokasi penelitian. Lokasi yang masih memelihara tradisi *mabbedda bola* di Sulawesi Selatan adalah di Desa Lambattorang dan Lopi-lopi (Maros), Balocci dan Bellae (Kabupaten Pangkep), Ralla dan Mangkoso (Kabupaten Barru), Lamuru (Kabupaten Bone), Takkalalla, Lajoa, dan Cabbenge (Kabupaten Soppeng). Semua lokasi yang disebut merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Penduduk pada semua lokasi tersebut adalah penduduk Bugis yang menuturkan bahasa Bugis



Foto 1. Bentuk rumah panggung Suku Bugis di Barru, Sulawesi Selatan. *Hand print* ditempelkan pada bagian dinding luar, tiang, ruang tamu dan ruang dapur (Sumber: Koleksi penulis).

dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Bugis adalah salah satu varian dari rumpun bahasa Austronesia yang umum digunakan di Indonesia dan Malaysia (Bellwood, 2000).



Foto 2 hand print pada dinding depan rumah panggung di Ralla. Letaknya di sisi samping dan atas pintu utama (Sumber: Koleksi penulis).

Untuk membuat hand print di Ralla, masyarakat memakai bahan *puale* (tepung kapur) yang dicampur dengan daun sirih, sedangkan di Soppeng, bahan yang digunakan adalah *bedda tettu*. Bahan *bedda tettu* adalah tepung beras yang diulek halus lalu dicampur dengan kunyit. Sebelum bedak dipakai, terlebih dahulu dibasahi. Dalam prosesi upacara *mabbedda bola* di Cabbenge, adonan *bedda tettu* disimpan pada wadah *kaddaro* (tempurung kelapa) lalu diletakkan di depan pintu utama rumah (wawancara dengan Andi Batti, 21 September 2013). Di Lamuru dan Ralla, wadah yang digunakan adalah mangkuk tembikar.



Foto 3 hand print pada balok horizontal bagian bawah rumah panggung (Sumber: Koleksi penulis).

Upacara *mabbedda bola* dilakukan ketika sebuah rumah panggung dibangun atau akan dihuni untuk pertama kali. Waktu kegiatan ritual ini berbeda di tiap daerah di Sulawesi Selatan. Di Cabbenge, waktu pelaksanaan ritual pada dini hari setelah shalat subuh. Ritual ini dipimpin oleh seorang yang diberi julukan *sanro bola*. *Sanro bola*

(bahasa Bugis) adalah dukun yang memiliki kecakapan mengenai aspek religius rumah panggung, yang dipercaya dapat menghubungkan pemilik rumah dengan *Dewata Seuwa*. Peserta ritual yang hadir adalah keluarga inti yang akan menghuni rumah baru, kerabat dan tetangga. Semua calon penghuni rumah kemudian mencap tangan lalu memanjatkan doa ke *Dewata Seuwa*. *Dewata Seuawe* (bahasa Bugis) adalah Tuhan Yang Maha Esa, suatu simbol pemahaman monoteistik penduduk Bugis di Sulawesi sebelum Islam masuk pada awal abad ke-17.

Tangan yang dicap adalah tangan kiri dan kanan, tetapi dominan tangan kanan (wawancara dengan La Sakka, 27 Mei 2014). Hasil pengamatan langsung juga menunjukkan sekitar 90% *hand print* adalah bagian tangan kanan. Para informan tidak mengetahui perbedaan makna antara tangan kanan dan tangan kiri. Posisi cap tangan yang dihasilkan adalah tegak, dengan jari-jari mengarah ke atas. Puang Ngile (86 tahun), seorang informan yang saya awancarai pada tahun 2006 di Soppeng yang membangun rumahnya pada tahun 1987 mengatakan bahwa ada beberapa bentuk *hand print* yang dibuat di rumahnya yaitu *hand print* dengan jari-jari yang meruncing, *hand print* dengan jari yang tidak lengkap, dan *hand print* anak-anak. Di Ralla, tiga varian *hand print* tersebut tidak ditemukan.

Waktu pelaksanaan upacara *mabbedda bola* di Ralla adalah pagi hari, berbeda dengan di Soppeng yang dilaksanakan pada jam 5.30 setelah shalat subuh. Perbedaan yang terlihat di Ralla adalah hanya tangan kanan yang boleh dicapkan, sedangkan tangan kiri tidak diperkenankan. Berdasarkan pengamatan pada tiga rumah panggung di Ralla, semua *hand print* yang ditemukan adalah *hand print* sebelah kanan. Selain itu, yang boleh mencap tangannya hanya *sanro bola* dan istri pemilik rumah, sedangkan suami dan anak tidak diperkenankan. Menurut salah seorang *sanro bola* di Ralla, (wawancara dengan Idrus tanggal 18 Februari 2012), hanya istri yang diperbolehkan karena sang istri yang bertugas mengurus rumah tangga.

Dalam prosesi upacara *mabbedda bola*, dilibatkan banyak materi seperti *kaluku* (kelapa), *puale* (kapur), *rekko ota* (sirih), *utti* (pisang), *sokko tellunrupa* (nasi dari beras ketan tiga warna), dan *onde-onde* (sejenis kue). Upacara ini terintegrasi dengan kepercayaan masyarakat yang beragama Islam. Pada beberapa bagian ritual, ada pembacaan ayat-ayat Al-quran atau doa-doa selamat dalam lafal-lafal bahasa Arab. Paling tidak, data ini memberi petunjuk bahwa ritual *mabbedda bola* telah ada sebelum agama Islam melembaga di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Saya tidak mengetahui jika di tempat lain di luar Pulau Sulawesi, ada penganut Islam yang melakukan ritual serupa.

Di Desa Lambattorang dan Lopi-lopi (Maros), ritualnya juga bernama *mabbedda bola*, yang dilaksanakan pada jam 4 sore setelah shalat Azhar. Bahan yang digunakan adalah tepung beras ditambah empat jenis daun-daunan. Ritual juga dipimpin oleh *sanro bola*. Dalam prosesnya, *sanro bola* membacakan mantra sambil berkeliling rumah,

lalu memulai mencapkan tangannya pertama kali pada *possi bola* (tiang tengah yang dimaknai sebagai titik pusat rumah panggung), kemudian berpindah ke tiang rumah yang lain, ke dinding, kusen, dan ke pintu rumah. Pada tiang *possi bola*, tergantung pisang yang dibalut kain putih. Data menarik di Lambattorang dan Lopi-lopi adalah rumah yang menjadi lokasi ritual *hand print* hanya berjarak sekitar 500 m dari kelompok Gua Lambattorang dan kelompok Gua Lopi-lopi yang mengandung banyak *hand stencil* dari jaman Praneolitik. Sementara di Balocci (Pangkep), ritual *mabbedda bola* sama dengan yang dilakukan di Maros (Wawancara dengan Pak Mappa, tanggal 22 Februari 2013).

berbentuk lagi karena setelah ditempel, tangan ditarik ke bawah sehingga cap tangan menjadi tidak berbentuk tangan lagi. Selain itu, juga dijumpai variasi *hand print* tiga jari, *hand print* tanpa ibu jari, dan *hand print* anak-anak.



Foto 4 Posisi 12 *hand print* pada ruang utama rumah Bugis (Sumber: Isba).



Foto 6 Variasi *hand print* tiga jari di rumah Bugis Lamuru (Sumber: Isba).

Sedangkan di Lamuru (Bone), *mabbedda bola* juga memakai bahan *puale* (kapur) yang dicampur daun sirih. Yang berbeda adalah kebanyakan *hand print* tidak

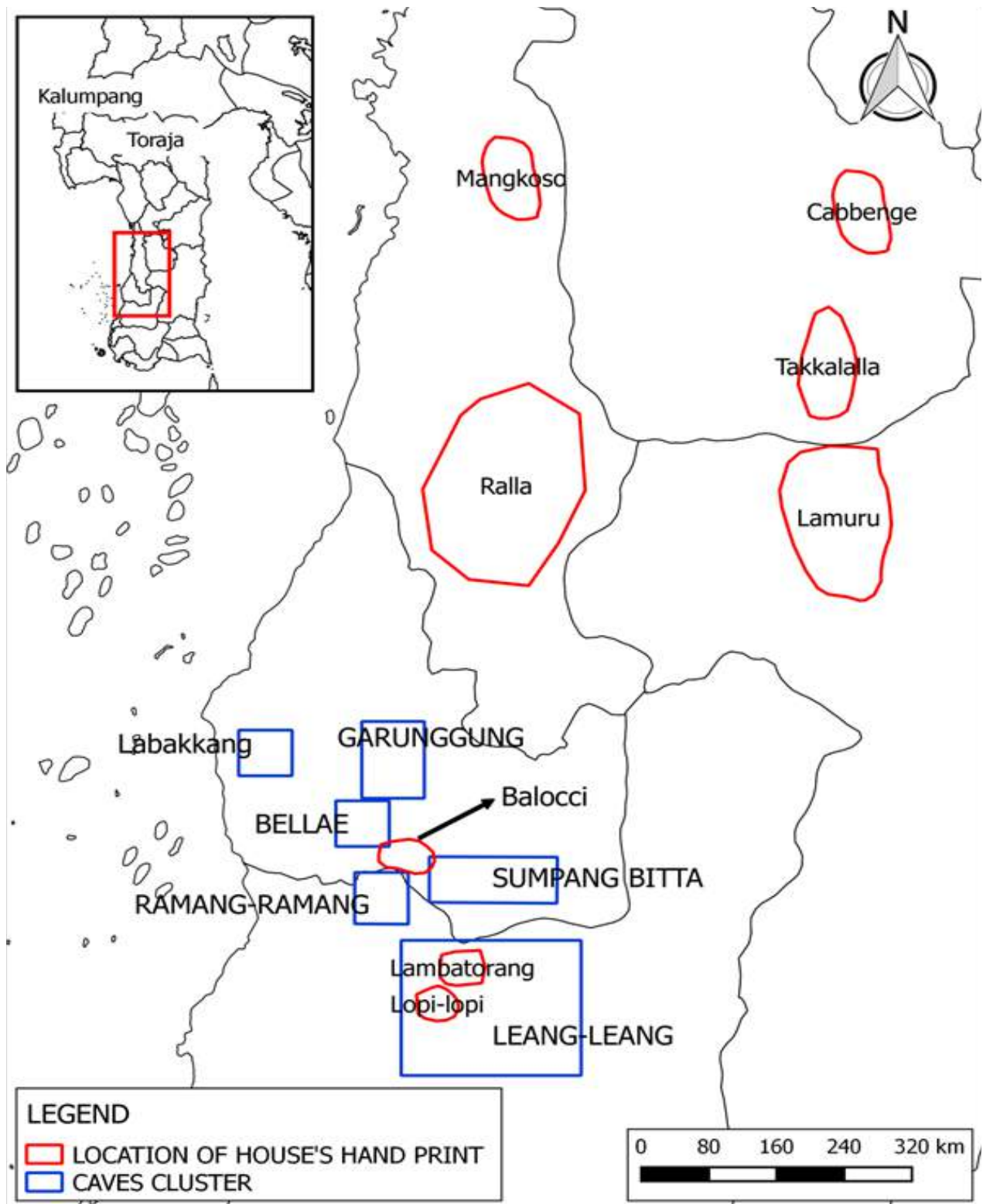
Dari segi makna *hand print*, baik di Barru, Maros, Pangkep, Bone, maupun di Soppeng tidak terdapat perbedaan. *Hand print* dipercaya oleh orang Bugis dapat melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan kekuatan gaib yang membahayakan. Dalam falsafah pembangunan rumah orang Bugis, rumah sebagai tempat hunian harus dilindungi oleh dua pagar, yaitu pagar yang berwujud seperti pagar kayu, besi, atau bambu, dan pagar gaib atau pagar yang tidak berwujud. Salah satu bentuk pagar gaib tersebut adalah pembuatan *hand print* melalui suatu rangkaian ritual, yang dalam konteks waktu sekarang sudah menyatu dengan agama Islam yang dianut secara tidak ketat. Pagar gaib berupa *hand print* akan melindungi keluarga atau seisi rumah dari gangguan kekuatan gaib yang jahat dan mencelakakan. Pemahaman ini berlaku menyeluruh bagi penduduk Bugis di lokasi penelitian.



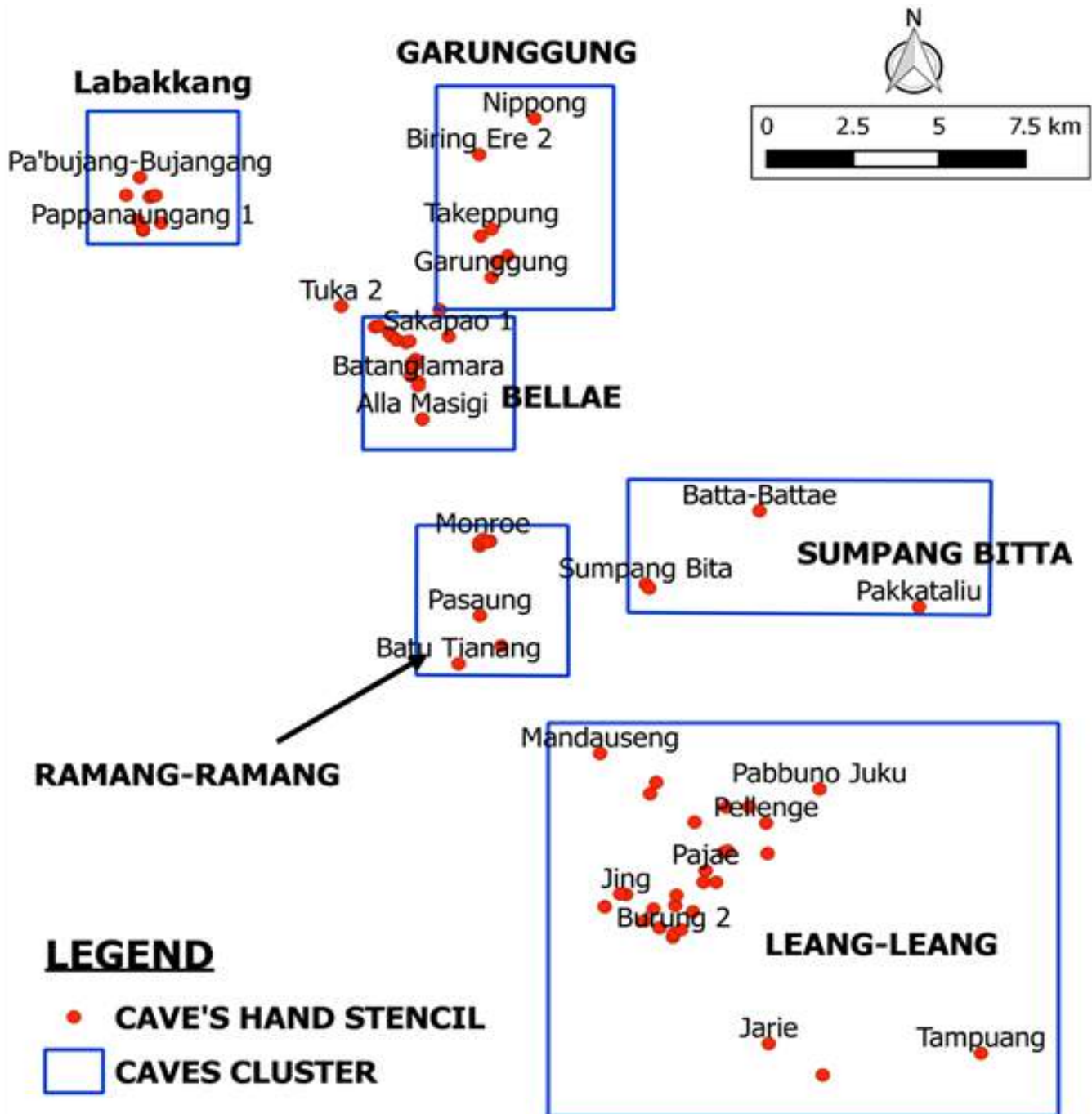
Foto 5 Variasi *hand print* tanpa ibu jari di rumah Bugis Lamuru

Satu hal menarik selain ritual dan makna *hand print* di atas adalah adanya satu variasi di Mangkoso (Kabupaten Barru), meskipun bentuk dan letak *hand print* tetap sama. Di Mangkoso, upacara membuat *hand print* pada rumah panggung disebut upacara *mappasilli*. Upacara *mappasilli* dibuat ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Bahan yang digunakan adalah air beras yang kental, sehingga *hand print* yang dihasilkan juga berwarna putih (Wawancara dengan Muhaeminah, 17 Maret 2012). Tujuan ritual *mappasilli* adalah supaya anggota keluarga yang ditinggalkan si mati selalu dilindungi dari gangguan kekuatan gaib yang jahat. Dalam penelitian lapangan, tidak ditemukan lagi *hand print* di Mangkoso karena sudah terhapus, tetapi tradisi *mappasilli* masih tetap dijalankan. Muhaeminah (59 tahun) adalah salah seorang yang ikut membuat *hand print* ketika ayahnya meninggal dunia.

Peta 2 Sebaran cluster rumah-rumah yang mengandung *hand print* dan gua-gua yang mengandung *hand stencil* di Sulawesi Selatan



(Sumber: Koleksi penulis)



Peta 3 Sebaran cluster gua yang mengandung hand stencil di Sulawesi Selatan

(Sumber: Koleksi penulis)

Hand Stencil di Sulawesi Selatan

Survei arkeologi telah dilakukan pada 83 gua yang mengandung hand stencil di Pulau Sulawesi. Gejala arkeologis pada gua yang mengandung hand stencil berbeda-beda, ada gua yang hanya mengandung hand stencil saja, dan ada yang bercampur dengan lukisan jenis lain. Beberapa gua yang hanya mengandung *hand stencil* adalah Gua Cammingkana, Gua Buto, Gua Pucu, Gua Bu'buka, dan Gua Karrasa. Adapun gua yang mengandung *hand stencil* serta bentuk lukisan lain berjumlah lebih banyak, seperti di Gua Sumpang Bitta, Timpuseng, Sakapao, Lompoa, Garunggung, Sapiria, Jaria, Petta Kerre, Pattae, Lompoa,

Kassi, Lasitae, dan masih banyak lagi. Keseluruhan data *hand stencil* pada gua-gua prasejarah di Sulawesi Selatan memperlihatkan beberapa variasi sehingga polanya sulit ditemukan. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya lukisan gua yang rusak dan kabur. Meskipun demikian, paling tidak ada tiga gejala yang terulang pada semua data *hand stencil* di Sulawesi, yaitu:

- a. Semua hand stencil berwarna merah. Berdasarkan pengamatan, penampilan warna hand stencil yang merah agak kehitaman adalah hasil perubahan warna akibat proses pelarutan bahan dari warna asli yaitu merah.
- b. Semua hand stencil berbentuk negatif, dalam pengertian hanya bagian luar tangan yang diwarnai sedangkan bagian tangan tidak diwarnai.

c. Semua teknik yang digunakan adalah teknik semprot yang dibuktikan oleh gradasi percikan bahan pewarna pada bagian luar.

Menurut pandangan saya, ada asumsi logis yang dapat dibangun dari gejala persamaan hand stencil yaitu populasi Toalian memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan makna pembuatan hand stencil. Persamaan pemahaman tentang tujuan dan makna hand stencil mudah dipahami karena lokasi sebaran 83 gua di Sulawesi Selatan berada pada satu wilayah geografi karst dan posisinya yang berdekatan.

Secara sepintas, upaya generalisasi di atas sangat sederhana dan terkesan mengabaikan variasi-variasi hand stencil yang begitu komplisit dan rumit. Selain persamaan tersebut, terdapat beberapa variasi hand stencil yaitu:

a. Hand stencil dengan bagian telapak tangan dan jari lengkap. Hand stencil jenis ini adalah yang paling banyak jumlahnya seperti terdapat di Gua Cammingkana, Jaria, Buto, Lompoa, Jing, dan Parewe.

b. Hand stencil dengan bagian lengan, telapak dan jari yang lengkap. Contoh hand stencil ini terdapat di gua-gua seperti Petta Kerre, Sakapao, Jaria, Jing, dan Sumpang Bitta.

c. Hand stencil yang bagian jarinya tidak lengkap, ini terdapat di gua-gua seperti Cammingkana, Jaria, dan Parewe.

d. Hand stencil yang ujung jari-jarinya meruncing, ini terdapat di Gua Cammingkana, Gua Jaria, dan Gua Parewe.

e. Hand stencil yang tertimpa lukisan lain, sepseperti yang terdapat di Gua Sakapao dan Petta Kerre. Di Gua Sakapao, hand stencil ditimpa oleh gambar warna hitam menyerupai binatang vertebrata yang bertanduk.

f. Hand stencil yang berhubungan dengan hand stencil lain sehingga membentuk satu pola. Contoh hand stencil kategori ini hanya ditemui di Gua Lompoa, dengan pola 2 susun, dan tiap susunan berjejer 14 cap tangan. Jumlah hand stencil tersebut adalah 28.

Variasi hand stencil tersebut sangat jelas terlihat seperti ditampilkan dalam foto 7 sampai foto 11. Asumsi logis dari adanya enam variasi hand stencil di atas adalah adanya perbedaan tujuan dan makna setiap bentuk hand stencil. Jadi, data tentang persamaan dan variasi bentuk hand stencil menjelaskan bahwa semua populasi Toalian memahami tujuan dan makna yang berbeda dari setiap variasi hand stencil.



Foto 7 hand stencil kiri dengan ujung jari terputus, dari Gua Cammingkana (Sumber: Koleksi penulis)



Foto 8 hand stencil dengan ujung jari yang runcing, dan tanpa ibu jari di Gua Jaria (Sumber: Koleksi penulis).

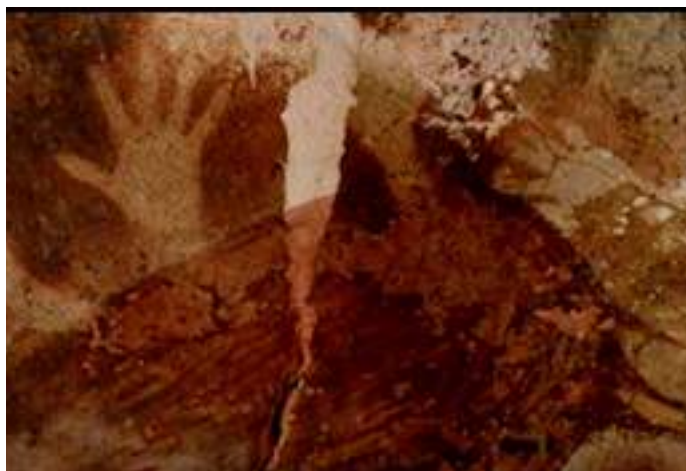


Foto 9 hand stencil yang tertimpa lukisan lain, dari Gua Petta Kerre (Sumber: Koleksi penulis)



Foto 10 hand stencil dengan lengan dan tanpa lengan, tertimpa lukisan anoa berwarna hitam, dari Gua Sakapao (Sumber: Koleksi penulis)



Foto 11 hand stencil yang berhubungan dengan hand stencil lain hingga membentuk pola berjejer memanjang (Sumber: Koleksi penulis).

Persamaan hand stencil dan hand print

Ada tiga alasan yang mendukung kuatnya hubungan antara hand stencil dan hand print di Sulawesi Selatan meskipun perbedaan umurnya sangat jauh. Pertama adalah sebaran gua-gua yang mengandung hand stencil berada pada formasi karst Kabupaten Maros, Pangkep, Soppeng, dan Bone. Lokasi sebaran hand stencil berkorelasi kuat dengan sebaran hand print yang meliputi lokasi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, dan Bone (lihat lampiran peta no.1). Di daerah lain yang jauh dari sebaran hand stencil dan hand print misalnya di Kalumpang (Sulawesi bagian Barat) yang memiliki bukti hunian imigran Austronesia Awal dari jaman Neolitik, tidak dijumpai ritual mabbedda bola. Demikian pula di dataran tinggi Toraja (Sulawesi bagian tengah) dimana tradisi Austronesia masih dijalankan secara ketat, juga tidak dijumpai tradisi mabbedda bola. Alasan kedua adalah beberapa variasi hand print seperti

variasi telapak tangan berjari lengkap, variasi telapak tangan berjari tidak lengkap, variasi telapak tangan anak-anak, dan variasi telapak tangan berujung runcing, juga terdapat pada variasi hand stencil di gua prasejarah. Variasi bentuk hand print dan hand stencil memperlihatkan persamaan yang kuat. Persamaan tersebut agak mengherankan karena tidak ditemukan informasi tentang alasan dan penyebab munculnya variasi hand print pada penduduk Bugis.

Alasan ketiga adalah hand stencil dan hand print sama-sama menggunakan tangan manusia dalam mengekspresikan diri, dan wadah hunian (rumah dan gua) sebagai tempat menempelkan hand mark. Jika Populasi Toalian membuatnya di dinding dan langit-langit gua hunian, maka orang Bugis menempelkannya pada bagian rumah seperti renring (dinding), babang (pintu), addeneng (tangga), alliri (tiang), kamara (kamar), dapur, dan pattolo (balok horisontal yang merangkai setiap tiang rumah panggung).

Diskusi dan Kesimpulan

Bagian ini akan difokuskan pada episode pertemuan antara populasi Toalian yang telah membuat hand stencil dengan populasi Austronesia yang masih membuat hand print sampai sekarang. Stratigrafi budaya Toalian meliputi rentang masa Plestosen Akhir sampai Awal Masehi, sementara imigran Austronesia dengan ciri fisik Mongoloid juga telah menghuni gua di Sulawesi Selatan pada millenium kedua sebelum Masehi. Jejak yang sangat meyakinkan adalah temuan 2,700 gigi yang mewakili 276 individu Mongoloid di Gua Codong, (Heekeren, 1972). Gua ini merupakan lokasi penguburan dengan pertanggalan rangka dan gigi manusia 4,000 BP (Turner, 1990:302; Bulbeck, 1996-7:1026).

Data tambahan, salah satu ciri budaya Austronesia awal di Sulawesi adalah pembuatan dan penggunaan tembikar yang jelas tidak dikenal oleh populasi Toalian seperti dibuktikan dalam lapisan budayanya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kehadiran tembikar di gua-gua Toalian yang mengandung hand stencil terdapat pada lebih dari 60 situs gua. Van Heekeren (1972:106) yang telah membuat risalah mengenai tiga tahap budaya Toalian di Sulawesi Selatan, juga menempatkan tembikar sebagai salah satu ciri yang menandai fase terakhir penghunian gua. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dkk. (2009:46) juga menunjukkan bahwa kontak budaya antara populasi Toalian dengan imigran Austronesia terlihat pada stratigrafi Gua Pasaung (Kabupaten Maros) yang mengandung tembikar berumur 2,000 BC. Pada dasarnya, data stratigrafis mendukung hipotesis bahwa populasi Toalian masih menghuni gua di Sulawesi Selatan ketika imigran Austronesia datang 4,000 tahun lalu. Di sisi lain, Peter Bellwood (2000:289) juga menyatakan sintesisnya berdasarkan perspektif regional bahwa ada kemungkinan para pemburu Toalian hidup berdampingan dan melakukan pertukaran dengan penduduk Austronesia yang telah bercocok tanam di Sulawesi Selatan. Argumentasi di atas menunjukkan bahwa fase yang paling memungkinkan

terjadinya kontak budaya antara populasi Toalian dengan populasi Austronesia adalah sekitar 4,000 BP.

Pada fase sekitar 4.000 BP., skenario transformasi budaya dari populasi Toalian ke populasi Austronesia paling memungkinkan terjadi. Selain data persamaan antara hand stencil dan hand print seperti telah dijelaskan sebelumnya, alasan yang lain adalah tidak ada bukti arkeologis dan etnografi yang menunjukkan bahwa tradisi hand print dibawa masuk ke Sulawesi oleh imigran Austronesia awal pada 4.000 BP. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tradisi hand print yang dimiliki populasi Bugis sekarang merupakan hasil adopsi dari tradisi hand stencil yang dimiliki oleh populasi Toalian.

Akhirnya, diskusi tentang kontak budaya dan transformasi budaya dari populasi Toalian dengan Austronesia di Sulawesi Selatan seperti yang diajukan dalam paper ini, baru memasuki tahap embrional. Di masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan bukti-bukti tersebut akan bertambah, dan akan menguatkan suatu perspektif bahwa penduduk Toalian tidak tergusur dan menghilang di Pulau Sulawesi, melainkan turut memberi warna dalam perkembangan budaya di Sulawesi Selatan sampai sekarang.

Dalam skala Asia Tenggara yang sangat majemuk dari segi bio-kultural, artikel ini akan memperkaya kajian tentang kontak dan lintas budaya prasejarah. Implikasi teoritiknya adalah lukisan prasejarah tidak dapat dianggap sebagai budaya yang telah mati dan terpisah dengan budaya sekarang. Hand mark pada gua-gua prasejarah seperti yang banyak tersebar di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan China menjanjikan informasi masa lalu lebih banyak dibandingkan apa yang telah dicapai sekarang.

Acknowledgements

Tulisan ini dapat selesai berkat diskusi, saran dan kontribusi Bapak Muhammad Ramli, Budianto Hakim, Akin Duli, Muhaeminah, Hasanuddin, Mukhlis Hadrawi, Yadi Mulyadi, Suryatman, Isba, Asteng, dan para informan di Lapangan. Terima kasih banyak. Makassar, awal 2017.

Daftar Pustaka

Anggraeni, 2012. The Austronesian Migration Hypothesis As Seen From Prehistoric Settlements On The Karama River, Mamuju, West Sulawesi. Unpublished PhD. Dissertation, Australian National University, Canberra.

Aubert M., A. Brumm, M. Ramli, T. Sutikna, E.W. Saptomo, B. Hakim, M.J. Morwood, G.D. van den Berg., I. Kinsley, A. Dosseto. 2014. Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia. *Journal of Nature*. Volume 514 :223-227.

Bellwood, Peter, 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Revisi). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Bulbeck, David, 2008, An Archaeological Perspective On The Diversification of The Languages Of The South Sulawesi Stock, in Truman Simanjuntak (ed.) *Austronesian in Sulawesi*, Depok, CPAS, hal: 185-212.

Bulbeck, David, Iwan Sumantri, Peter Hiscock, 2004, Leang Sakapao 1, A second dated Pleistocene site from South Sulawesi, Indonesia. In Susan G. Keates and Juliette M. Pasveer (eds.), *Quaternary Re-search in Indonesia, Modern Quaternary Research in Southeast Asia Vol. 18:129-66*. Rotterdam: A.A. Balkema.

Bulbeck, D. 1996-7. The Bronze – Iron Age of South Sulawesi, Indonesia: mortuary tradition, metallurgy and trade. In F. D. Bulbeck and Noel Barnard (eds), *Ancient Chinese and Southeast Asia Bronze Age Cultures*, Vol. 2, pp. 1007- 1075. Taipei: Southern Materials Center.

Duli, Akin dan Muhammad Nur, 2016. Prasejarah Sulawesi, Makassar. Fakultas Ilmu Budaya Unhas Press.

Glover, I. C., 1981. Leang Burung 2 : An Upper Palaeolithic Rock Shelter in South Sulawesi, Indonesia. *Modern quaternary Research in Southeast Asia* 6: pp. 1-38.

Hakim, Budianto, M. Nur, Rustam, 2009, The Sites Of Gua Pasaung (Rammang-Rammang) And Mallawa: Indicators Of Cultural Contact Between The Toalian And Neolithic Complexes In South Sulawesi, *IPPA Bulletin Vol. 29* : 45-52.

Heekeren, R. van, 1972. *The Stone Age of Indonesia*. 2nd ed. The Hague Martinus Nijhoff.

Pelras, Christian, 1996. *The Bugis*, Oxford: Blackwell Publishers.

Sarasin, Paul and Fritz, 1905. *Reisen in Celebes*. Zweiter band. Wiesbaden: C.W. Kreidel's Verlag.

Simanjuntak, Truman, (ed.), 2008. *Austronesian in Sulawesi*. Depok-Indonesia. Center for Prehistoric and Austronesia Studies.

Simanjuntak, Truman, (ed.), 2012, *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. PT. Ichtar Baru Jakarta.

Turner II, C.G. 1990 Major features of Sundadonty and Sinodonty, including suggestions about East Asian microevolution, population history, and Late Pleistocene relationships with Australian Aborigines. *American Journal of Physical Anthropology* 82: 295-317.

MENGELOLA KONFLIK DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Oleh. Yadi Mulyadi
(Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat)
arkeologsunda@hotmail.com

Ihktisar

Pelestarian cagar budaya baik berupa perlindungan, pemanfaatan maupun pengembangan selalu bersentuhan dengan beragam bentuk permasalahan yang berujung pada konflik. Dengan demikian konflik adalah sebuah keniscayaan dalam pelestarian cagar budaya yang harus dikelola dengan baik. Fenomena konflik dalam pelestarian cagar budaya yang terjadi di berbagai tempat membuktikan, bahwa cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki posisi sejajar dengan sumberdaya alam lain dan banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, konflik dalam pelestarian cagar budaya harus dikelola dalam kaitannya dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Kata Kunci: **cagar budaya, konflik, pelestarian, sumberdaya budaya**

1. Pendahuluan

Pelestarian cagar budaya dewasa ini telah menjadi isu yang semakin menarik masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat terhadap isu pelestarian cagar budaya, khususnya yang masuk ranah publik melalui berbagai media. Konflik mengenai cagar budaya ini pun jejak rekam digitalnya bisa ditelusuri melalui website www.petisionline.net dan juga www.change.org, dimana dikedua website ini cukup banyak kita temukan petisi yang diajukan masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya. Beberapa diantaranya, seperti petisi Save Somba Opu, Save Pasar Cinde, dan Save Majapahit. Petisi online tersebut rata-rata telah ditandatangani lebih dari 1000 orang.

Petisi-petisi online mengenai cagar budaya ini disebarkan melalui beragam media sosial sehingga masyarakat mudah dan cepat mengaksesnya. Petisi online itu sendiri dipicu oleh adanya konflik atau permasalahan yang dianggap dapat mengancam pelestarian cagar budaya. Hal ini dapat kita lihat pada judul maupun narasi dalam petisi online tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Petisi Online terkait Pelestarian Cagar Budaya

No	Nama Petisi	Pendukung Petisi	Website
1	Jangan Rusak Trowulan, Tolak Pabrik Baja, tetapkan Cagar Budaya!#save Trowulan	10.301 orang	Dibuat 24 Agustus 2013 di www.change.org
2	Selamatkan Cagar Budaya Kalimantan	35 orang	Dibuat 5 Maret 2016 di www.change.org
3	Pemerintah Kota Surabaya Pertanggungjawabkan Penghancuran Bangunan Cagar Budaya!	3.991 orang	Dibuat 10 Mei 2016 di www.change.org
4	Eks Palaguna untuk Hutan Kota dan Cagar Budaya	2.552 orang	Dibuat 20 Februari 2017 di www.change.org
5	Stop Pembongkaran Cagar Budaya Banyuwangi	82 orang	Dibuat 25 Mei 2016 di www.change.org
6	Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Kembali Terancam#saveTrowulan	323 orang	Dibuat 10 April 2017 di www.change.org
7	Presiden Republik Indonesia @ SBY Yudhoyono: Melindungi Kawasan Situs Cagar Budaya Ibukota Kerajaan Majapahit	924 orang	Dibuat 31 Juli 2013 di www.change.org
8	Jadikan Ampera sebagai Cagar Budaya	26 orang	Dibuat 14 Juni 2016 di www.change.org
9	Dukung Doro Puma sebagai Cagar Budaya Stop Aktifitas tambang di Kawasan Doro Puma	133 orang	Dibuat 6 September 2016 di www.change.org
10	Save ASHIGARA, Save Kekayaan Bawah Laut dan Cagar Budaya Bangka Belitung	38 orang	Dibuat 7 April 2017 di www.change.org
11	Save Pasar Cinde, Selamatkan Pasar Cinde!	1.674 orang	Dibuat 11 Juni 2016 di www.change.org
12	Selamatkan Cagar Budaya Istana Kota Lama Sei Carang di Kota Tanjung Pinang	15 orang	Dibuat 27 Desember 2016 di www.change.org

13	Pak Awang Penetapan RTRW Kaltim akan hancurkan Karst Sangkulirang	855 orang	Dibuat 9 Desember 2016 di www.change.org
14	Pertahankan Keberadaan Pasar Pahingan Magelang	645 orang	Dibuat 21 Mei 2016 di www.change.org
15	Tolak Perijinan Perubahan Bentuk maupun pemangkasan bangunan Gereja Katedral Makassar	162 orang	Dibuat 26 Juni 2014 di www.change.org
16	Menyelamatkan Lapangan Merdeka	469 orang	Dibuat 10 April 2015 di www.change.org
17	Tolak Relokasi SDN Magetan Komplek	72 orang	Dibuat 29 Oktober 2016 di www.change.org
18	Hentikan Proyek Peninggian Jl. Jenderal Sudirman Banjarmasin (Karena Temuan Arkeologis)	170 orang	Dibuat 8 Agustus 2016 di www.change.org
19	Selamatkan Asrama Mahasiswa Sumsel Bandung	54 orang	Dibuat 30 Mei 2016 di www.change.org
20	Denda dan Pidana seberat-beratnya pembongkar Rumah Radio Pemberontakan Bung Tomo	18 orang	Dibuat 23 Juni 2016 di www.change.org
21	Menuntut tanggung jawab pembongkaran Rumah Radio Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia	23 orang	Dibuat 9 Mei 2016 di www.change.org
22	Selamatkan Situs Kunitir Mojokerto	9 orang	Dibuat 8 April 2017 di www.change.org
23	Save Gedung Juang 45 Nganjuk	9 orang	
24	Save GNI Gresik	48 Orang	Dibuat 30 Oktober 2016 di www.change.org
25	Hukum pembongkar Rumah Radio Pemberontakan Bung Tomo	4 orang	
26	Tolak Tambang Marmer di Kecamatan Buntu Batu Enrekang Sulawesi Selatan	48 orang	
27	Jangan merubah fungsi dan merusak Stasiun Beos	38 orang	
	Jumlah	22.718 orang	

Berdasarkan data tersebut, tercatat 22.718 orang telah menandatangani petisi online terkait cagar budaya dari kurun waktu 2013-2017 dari 27 petisi online. Hal ini menarik untuk dicermati lebih lanjut, terkait dengan fakta bahwa pelestarian cagar budaya selalu memiliki potensi konflik. Mengacu pada hal tersebut, konflik adalah sebuah keniscayaan dalam pelestarian cagar budaya yang harus dikelola dengan baik. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan bagaimana upaya mengelola konflik atau

resolusi konflik dalam pelestarian cagar budaya dengan melihat pada studi kasus konflik pelestarian cagar budaya di situs gua prasejarah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan mengawali pengumpulan data pustaka melalui penelusuran data pustaka baik sumber online maupun tekstual. Data pustaka ini yang kemudian diolah untuk menghasilkan informasi awal yang dapat ditindaklanjuti dengan data lapangan. Pengumpulan data lapangan berupa observasi dan wawancara terbatas pada responden terpilih, yang dianggap mewakili pemangku kepentingan terkait.

Hasil pengumpulan data tersebut, dianalisis komparatif dipadukan dengan analisis tekstual dengan menerapkan beberapa teori terpilih terkait dengan resolusi konflik. Hasil analisis itulah yang kemudian diinterpretasi untuk menghasilkan paparan terkait dengan pengelolaan konflik dalam pelestarian cagar budaya.

3. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Konflik sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis sangat rentan terhadap berbagai pengaruh yang berasal dari banyak aspek. Namun disisi lain, sifatnya yang dinamis inilah yang menjadikan konflik dapat dikelola guna mencapai suatu resolusi. Dalam konteks ini, resolusi tersebut merupakan suatu keadaan dimana kepentingan yang mengalami pergesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama. Sulistyanto (2006a) menetapkan metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (conflict governance). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, Sulistyanto (2006b) juga memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai dengan 2 (dua) cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (self regulation), dan melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.

Resolusi konflik pada hakekatnya merupakan sebuah proses penghapusan konflik melalui metode analitis yang mampu menjangkau akar permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan solusi yang bersifat permanen terhadap suatu permasalahan yang melibatkan dua pihak atau lebih di dalam suatu konteks pemanfaatan sumberdaya arkeologi (Sulistyanto, 2003). Resolusi konflik yang dimaksudkan di sini pada hakekatnya adalah penyelesaian konflik dengan cara menangani akar permasalahan yang menjadi sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama di antara berbagai pihak yang berkonflik (Fisher, 2000: 7). Dalam hal ini maka yang menjadi sasaran bukan hanya kesepakatan untuk mengakhiri “perselisihan”,

tetapi lebih menekankan pada pencapaian suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya. Para ahli yang fokus meneliti tentang konflik, memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai resolusi konflik atau conflict resolution. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together).

Mengacu pada pemaparan teori menurut para ahli tersebut, resolusi konflik dapat disimpulkan sebagai suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Oleh karena itu disarankan, dalam resolusi konflik menggunakan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik guna memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya (Tanudirdjo, 2004).

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat dijabarkan bahwa dalam menganalisis konflik sedikitnya terdapat beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Interaksi (interaction), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik. 2). Sumber-sumber konflik (source), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan

identitas, kekecewaan, keterbatasan sumberdaya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip. 3). Pihak-pihak yang berkonflik (stakeholder), yakni pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliputi; individu, kelompok, dan pihak ketiga (mediator, free rider, dan lain sebagainya).

Demikian pula dalam menganalisis konflik terkait dengan sumberdaya arkeologi di kawasan karst Maros Pangkep, ketiga indikator itu menjadi hal penting guna merumuskan resolusi konflik yang menjadi objek kajian penelitian ini. Kawasan karst Maros Pangkep yang memiliki beragam potensi, menjadikan banyak pihak memiliki kepentingan di kawasan ini. Perbedaan persepsi dalam melihat potensi kawasan karst Maros Pangkep, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di beberapa lokasi di kawasan ini, khususnya pada situs-situs arkeologi yang arealnya memiliki potensi non arkeologi yang dianggap lebih bernilai ekonomis.

Hingga saat ini, sistem pengelolaan sumberdaya arkeologi termasuk di kawasan karst Maros Pangkep lebih cenderung masih menjadi otoritas pemerintah semata. Sistem ini nyaris bersifat tertutup dan eksklusif yang mengabaikan kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya. Sebagai akibatnya, peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi menjadi terbatas. Bahkan, mereka cenderung menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan kekecewaan, kekhawatiran, pembatasan kegiatan, dan bahkan kehilangan penghasilannya yang akhirnya memunculkan konflik. Padahal pemilik syah dari Cagar Budaya yaitu masyarakat, maka setiap bentuk pengelolaan Cagar Budaya tentunya harus diarahkan pada



Gambar 1. Koordinasi dengan stakeholder terkait dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan secara langsung di lokasi areal tambang yang berpotensi mengancam kelestarian Gua Prasejarah Mandauseng di Maros, sebagai bagian dalam mencari resolusi (Sumber: Ujungpandang Heritage, 2011)

kebermanfaatan buat masyarakat (Yadi Mulyadi, 2015).

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan di kawasan karst Maros Pangkep, memperlihatkan adanya beragam konflik kepentingan yang terkait langsung dengan pemanfaatan potensi di kawasan ini. Sumberdaya arkeologi di kawasan karst Maros Pangkep memiliki kandungan nilai penting yang menjadikannya memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Keberadaan potensi sumberdaya arkeologi di kawasan karst Maros Pangkep selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Namun model pemanfaatan yang berjalan saat ini belum mencapai pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung, yang merupakan amanah undang-undang cagar budaya. Demikian pula pemanfaatan potensi sumberdaya non arkeologi, salah satunya yaitu tambang juga belum memberikan dampak manfaat secara keseluruhan pada masyarakat. Hal ini pula yang menimbulkan konflik kepentingan di kawasan karst Maros Pangkep, yang secara garis besar yaitu kepentingan pelestarian cagar budaya dan kepentingan lain terkait potensi sumberdaya non arkeologi di kawasan ini.

Konflik antara pelestarian cagar budaya dan tambang telah berlangsung cukup lama dan mencapai puncaknya pada kurun waktu 2009-2011. Pada periode tersebut, terjadi beberapa kasus pemanfaatan potensi tambang yang di area situs arkeologi. Hal ini memicu konflik antara stakeholder tambang dan stakeholder pelestari cagar budaya termasuk kalangan arkeolog dan akademisi. Bahkan konflik ini sampai memunculkan istilah bahwa arkeologi itu menghambat pembangunan. Hal ini muncul karena adanya pemahaman bahwa pemanfaatan potensi tambang itu memberikan manfaat untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sumberdaya arkeologi dianggap

belum memberikan manfaat bagi peningkatan PAD.

Persepsi ini, dipicu pula oleh rendahnya perhatian daerah terhadap upaya pelestarian situs-situs arkeologi di kawasan ini. Orientasi pemerintah daerah baik Kabupaten Maros maupun Kabupaten Pangkep lebih cenderung pada aspek ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada proses pemberian izin areal konsesi tambang yang tidak memperhatikan aspek keberadaan situs arkeologi. Sebagaimana terjadi di Maros, beberapa izin areal konsesi tambang yang diberikan pada perusahaan tambang, merupakan areal yang terdapat situs arkeologi. Hal inilah yang kemudian memicu konflik antara perusahaan tambang dengan instansi pelestari cagar budaya. Mengacu pada hasil penelitian Mubarak, hingga 2014 tercatat 119 Izin Usaha Tambang (IUP) yang telah diterbitkan di Kabupaten Maros dan Pangkep. IUP yang diterbitkan tersebut untuk jenis usaha galian marmer, batugamping, batu gunung, clay (tanah urug), sirtu, pasir laut, dan batukapur (Mubarak, 2016:20).

Aktivitas tambang di kawasan ini yang dianggap berpotensi merusak kelestarian situs-situs arkeologi sebagai cagar budaya. Sehingga ketika di areal konsesi tambang terdapat situs arkeologi maka terjadi konflik, karena perbedaan pemanfaatan pada areal tersebut. Pada beberapa kasus, konflik tambang di wilayah Maros, berhasil diselesaikan dengan baik setelah dilaksanakannya kajian dan diskusi dengan pihak perusahaan tambang. Kajian yang dilakukan terkait dengan adanya konflik tambang pada areal situs arkeologi di kawasan Maros Pangkep ini, memperlihatkan fakta bahwa konflik ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara semua pemangku kepentingan. Khususnya dalam prosedur pemberian izin areal konsesi tambang dari pemerintah daerah ke perusahaan tambang. Tidak adanya koordinasi itulah yang mengakibatkan tidak dipertimbangkannya



Gambar 2. Aktivitas tambang yang sempat berlangsung di area Situs Cagar Budaya Gua Prasejarah Mandauseng di Maros, kini aktivitas tambang di lokasi tersebut telah direlokasi ke lokasi lain yang tidak mengancam kelestarian situs (Sumber: Ujungpandang Heritage, 2011)

keberadaan situs arkeologi pada pemberian ijin areal konsesi tambang (Sulistyanto dkk, 2017).

Kajian yang telah dilakukan pada saat menangani konflik tambang di Maros dan Pangkep dari kurun waktu 2009-2011, menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah daerah seyogyanya mempertimbangkan keberadaan situs arkeologi dalam proses pemberian ijin tambang. Kasus yang terjadi di kawasan karst di Maros seperti di Lambatorang, Mandauseng, Tenggae, dan Rammang-Rammang memperlihatkan bahwa keberadaan situs arkeologi yaitu gua-gua prasejarah di kawasan ini tidak dipertimbangkan dalam pemberian ijin areal konsesi tambang. Dimana yang seharusnya dalam areal konsesi tambang tidak boleh terdapat situs arkeologi. Sehingga ketika perusahaan tambang akan mulai eksploitasi, terjadilah konflik tersebut, karena pemangku kepentingan lain dalam hal ini instansi pelestari harus mempertahankan kelestarian situs-situs arekologi tersebut.

Resolusi konflik yang dapat diterapkan pada kasus seperti ini yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan ijin tambang, dengan instansi BPCB sebagai pihak yang mengetahui potensi situs-situs arkeologi di kawasan ini. Demikian pula pihak perusahaan tambang seyogyanya tetap berkoordinasi dengan BPCB dalam proses tersebut, guna memastikan bahwa di areal tambang tidak terdapat situs arkeologi. Aktifitas tambang di kawasan ini idealnya dibatasi, mengingat banyaknya sebaran situs arkeologi, dan belum adanya kajian mendalam terkait dengan dampak nyata dari aktifitas tambang terhadap kelestarian situs arkeologi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan tambang, pada dasarnya mereka bersedia untuk terlibat dalam pelestarian situs arkeologi. Oleh karena itu, resolusi konflik yang juga dapat diterapkan yaitu merancang model pelibatan perusahaan tambang dan juga masyarakat dalam pelestarian situs arkeologi. Dengan demikian diharapkan semua kepentingan pada kawasan ini dapat berjalan secara beriringan, tidak ada satu pihak yang dirugikan.

Konflik yang terjadi di kawasan gua prasejarah Maros Pangkep ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula di wilayah lain. Salah satunya yang mulai muncul pada awal 2017 yaitu adanya potensi ancaman pada Situs Cagar Budaya GuaVavompogaru dan Gua Tokadindi akibat adanya kegiatan tambang galian C di Desa Topogaro, Kecamatan Morowali Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan penelitian kerjasama Internasional oleh Rintaro Ono, Ph.D. dari School of Marine and Technology Tokai University, Japan melibatkan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Manado, Mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia, Universitas

Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasa nuddin tentang "Prehistoric human Migrations, Maritime Networks and Resource Use in Sulawesi and Maluku Island" dengan melakukan uji pertanggalan C14

dan Accelerator Mass Spectrometry (AMS) di situs GuaVavompogaru dan Gua Tokadindi, merupakan situs prasejarah masa plestosen akhir yang berusia 26.000 sebelum Masehi. Hal tersebut menjadikan situs ini memiliki nilai penting pengetahuan, kebudayaan dan sejarah terkait peradaban manusia, dengan demikian memenuhi kriteria sebagai Cagar budaya sehingga wajib mendapatkan perlakuan perlindungan dan penyelamatan sebagai Situs Cagar Budaya sesuai peraturan yang berlaku.

Aktifitas tambang galian C tentunya dapat berdampak pada keberadaan situs Gua Vavompogaru dan Gua Tokadindi, sehingga potensi konflik cukup besar. Oleh karena itu, potensi konflik tersebut perlu untuk dikelola agar tidak berdampak merugikan pada upaya pelestarian Gua Vavompogaru dan Gua Tokadindi sebagai cagar budaya. Dalam konteks ini, upaya pertama yang harus dilakukan sebagai bagian dari mengelola konflik dalam pelestarian situs cagar budaya Gua Vavompogaru dan Gua Tokadindi, yaitu koordinasi dengan pihak perusahaan tambang dan pemangku kepentingan lain yang terkait, termasuk masyarakat sekitar situs. Pada beberapa kasus tertentu, koordinasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian pelestarian cagar budaya yang didalamnya termasuk analisis dampak aktifitas tambang.

Pemangku kepentingan dibidang pelestarian cagar budaya dalam hal ini BPCB Gorontalo bekerjasama dengan SKPD bidang kebudayaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten dapat menjadi leading sector dalam kajian pelestarian tersebut. Harapan yang ingin dicapai dalam kajian pelestarian itu yaitu dapat meminimalisir potensi ancaman pada kelestarian cagar budaya tetapi tetap tidak menutup ruang untuk aktifitas tambang. Hal ini dapat tercapai apabila ada persamaan persepsi terkait pentingnya pelestarian cagar budaya dan bahwa upaya pelestarian ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kajian ini pula yang menjadi acuan dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan GuaVavompogaru dan Gua Tokadindi sebagai cagar budaya. Selain itu menjadi acuan bagi perusahaan tambang dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika hasil kajian memberikan fakta bahwa tidak boleh sama sekali ada aktifitas tambang, maka pihak pemerintah daerah seyogyanya dapat merekomendasikan alternatif lahan lainnya. Adapun jika, masih memungkinkan ada aktifitas tambang di kawasan ini, maka yang perlu dilakukan adalah penentuan batas zona cagar budaya yang mengatur area mana yang boleh ditambang dan area mana yang tidak dapat ditambang. Jika opsi ini ditempuh, perlu ada model pelibatan perusahaan tambang dalam pelestarian cagar budaya sebagai tanggung jawab moral dan implementasi dari penerapan Corporate Cultural Responsibility.

4. Kesimpulan dan saran

Konflik dalam pelestarian cagar budaya adalah

sebuah keniscayaan yang akan selalu kita hadapi dalam setiap upaya pelestarian. Oleh karena itu, konflik harus dikelola agar tidak memberikan dampak negatif pada setiap upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan. Fenomena konflik dalam pelestarian cagar budaya dewasa ini terus mengalami peningkatan sehingga kemampuan kita dalam mengelola konflik harus semakin ditingkatkan.

Resolusi konflik perlu dirumuskan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Oleh karena itu membutuhkan keterbukaan dan koordinasi yang baik agar menghasilkan resolusi yang bersifat win-win solution dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu hal yang seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam pelestarian cagar budaya, yaitu masih lemahnya kemampuan kita dalam mendesain model-model publikasi dan sosialisasi cagar budaya yang dapat meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Demikian pula hasil penelitian arkeologi belum tersebarluaskan secara merata dan menyeluruh sehingga terkadang pihak di luar arkeologi yang juga memiliki kepentingan di area situs dan sekitarnya belum memahami pentingnya tinggalan arkeologi sebagai potensi cagar budaya.

Resolusi konflik dalam pelestarian cagar budaya adalah upaya mengelola konflik yang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Dilakukan dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik guna memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalah yang terkait dalam pelestarian cagar budaya. Keterlibatan semua pihak terkait secara terbuka dan koordinatif menjadi hal penting dalam mengelola konflik pelestarian cagar budaya. Hal ini sejalan dengan hakekat dari pelestarian cagar budaya yang merupakan tanggung jawab kita bersama.

Daftar Pustaka

Bambang Sulistyanto, Nasruddin, Rr. Triwurnani, Yadi Mulyadi, Harry Octavianus Sofian. 2017. Laporan Penelitian Arkeologi: Resolusi Konflik Warisan Budaya Kawasan Karst Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan Tahap III. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Coleman, P.T., & Deutch, Morton. (2000). *The Handbook of Conflict Resolution. Theory & Practice*. San Francisco: John Wiley & Sons Inc. Cronbach, L.J. (1960).

Fisher, Simon, et al. 2002. *Working with Conflict: skill et strategis for Action*. London: zed Books Ltd, 7 Cynthia

Street. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak: British Council, 2001.

Pampang, Mubarak Andi. 2016. “Model Pelibatan Perusahaan Tambang Dalam Mendukung Pelestarian Situs Gua-Gua Prasejarah Kawasan Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan”. Universitas Gadjah Mada.

Tanudirdjo, Aris Daud. 2004. “Pengembangan Model Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY” Laporan belum diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Sulistyanto, Bambang. 2003. *Balung Buto : Warisan Budaya Dunia Dalam Perspektif Masyarakat Sangiran*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.

Sulisyanto, Bambang, 2006. “Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual”. Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, vol.24 No.1.Pusat Penelitian dan pengembangan Arkeologi Nasional.

Sulistyanto, Bambang, 2006. “Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi” dalam *Buletin Cagar Budaya*, edisi No. 4, hal. 577-586. Jakarta: Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman.

Yadi Mulyadi. “Cagar Budaya untuk Masyarakat: Refleksi Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia”. *Buletin Umulolo* Vol.--- No.---(2015): Hal.-----

TONGKONAN SEBAGAI MUSEUM BUDAYA TORAJA

Studi Kasus: Tongkonan Ke'te Kesu Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan

Mubarak Andi Pampang

Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari permasalahan kondisi museum di Indonesia yang sebagian besar hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memamerkan koleksi. Pendekatan yang digunakan mengacu pada paradigma baru museologi saat ini yang mensyaratkan penggunaan metode kuratorial asli pribumi, pendekatan dalam pelestarian warisan budaya, dan berbasis kearifan lokal. Tongkonan Ke'te Kesu dipilih sebagai studi kasus dalam tulisan ini dengan pertimbangan kelengkapan data dan komponen pemukiman serta masih difungsikan sampai saat ini. Hasil analisis memperlihatkan peluang Tongkonan Ke'te Kesu dikelola sebagai Museum Budaya Toraja menggunakan paradigma baru dalam museologi yang berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: **museum, situs, tongkonan, toraja.**

Abstract

This paper arose from the museum's problem in Indonesia that most of them is just functioned as storage and collection exhibiting. Using the new paradigm of museology approaches, such as original method of curatorial, approach in preserving cultural heritage, and based on indigenous wisdom. Tongkonan Ke'te Kesu is chosen as a case study based on its completeness of data and still functioned nowadays. The result of analysis shows the opportunities of Tongkonan Ke'te Kesu managed as Cultural Museum of Toraja using new museology approaches based on indigenous wisdom.

Keywords: **museum, sites, tongkonan, toraja.**

I. Latar Belakang

Museum selama ini dilihat sebagai sebuah institusi atau lembaga yang berfungsi untuk mengoleksi, menyimpan, merawat, mempelajari, dan memamerkan koleksi benda-benda budaya manusia (material culture) baik yang berasal dari masa lalu maupun yang berasal dari masa kini (kontemporer), sebagai benda etnografi atau karya seni. Hal ini kemudian "dipertegas" secara internasional melalui definisi yang dikeluarkan oleh International Council of Museum (ICOM) yang diadopsi pada Sidang Umum XXI di Vienna, Austria, sebagai sebuah lembaga/institusi yang permanen, bersifat non-profit, yang bertugas melayani masyarakat dan dalam perkembangannya, terbuka bagi

umum, yang memperoleh, mengkonservasi, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya bendawi dan non-bendawi yang dihasilkan oleh manusia dan lingkungannya dengan tujuan sebagai media edukasi, pembelajaran, dan kesenangan (ICOM, 2007). Pada definisi ICOM tersebut terlihat bahwa lembaga museum memang "berfungsi" untuk memperoleh (mendapatkan), mengoleksi (memiliki), menyimpan, memelihara, meneliti dan memamerkan objek budaya bendawi dan non-bendawi manusia dan lingkungannya. Sehingga secara langsung boleh dikatakan bahwa museum "berwenang" atau diberi kewenangan dalam mengumpulkan dan memamerkan hasil budaya manusia baik bendawi maupun non-bendawi dan lingkungannya. Aktifitas mengumpulkan (mengoleksi) dan memamerkan benda budaya materi manusia sebagai cikal bakal konsep museum memang telah lama dilakukan. Kegiatan ini diindikasikan bermula sejak dua abad sebelum masehi di Larsa, Mesopotamia, berupa penyalinan prasasti-prasasti tua untuk digunakan di sekolah-sekolah, dimana dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penafsiran terhadap material aslinya. Sebagaimana temuan Sir Leonard Woolley, dimana dia menafsirkan bahwa Raja Babilonia, Nebukadnezar dan Nabonidus, telah mengumpulkan barang antik selama masa kekuasaan mereka dan pernah memiliki ruangan untuk memamerkan koleksinya.

Kegiatan seperti mengumpulkan, mengoleksi dan memamerkan benda-benda karya seni dan benda eksotis baik yang berasal dari daerah setempat maupun dari tempat lain, kemudian semakin berkembang pada masa klasik ketika Yunani mengalami puncak perkembangannya sekitar satu abad sebelum masehi. Kemudian berlanjut terus hingga periode abad pertengahan dimana Eropa mulai mendominasi sebagai sebuah kekuatan yang telah berkembang sangat maju dan moderen. Pada periode ini kemudian, Eropa juga memulai ekspansinya jauh ke wilayah timur terutama untuk mencari jalur perdagangan baru dan menelusuri asal rempah-rempah sebagai komoditi utama dan mahal pada masa itu. Sebagai sebuah kawasan dengan tingkat perkembangan yang telah maju pada masa itu, Eropa kemudian dengan mudah menaklukkan wilayah-wilayah di timur dengan mudah, yang saat itu belum semaju dan semapan Eropa. Sehingga era kolonialisasi kemudian dimulai sebagai bagian dari upaya untuk memonopoli perdagangan global dan wilayah-wilayah kekuasaan baru. Kolonialisasi

yang terjadi kemudian berimbas pada hampir semua sendi kehidupan baik fisik maupun ideologi antara dunia Eropa yang dilihat sebagai bangsa barat dengan wilayah timur sebagai wilayah kekuasaan baru bangsa Eropa. Aktifitas “mengeksktraksi” segala sumberdaya yang dimiliki, menjadi aktifitas utama yang dilakukan di daerah koloni baru. Ekstraksi yang dilakukan bukan hanya dengan “menguras” sumberdaya alam, tetapi hingga sumberdaya budaya yang dimiliki oleh bangsa yang terkoloni. Sumberdaya budaya (material culture) yang dimiliki oleh bangsa terkoloni, dianggap sebagai benda-benda yang eksotis dan memiliki keunikan tersendiri sehingga mengundang hasrat untuk mengumpulkan dan mengoleksinya. Upaya pengumpulan dan pengoleksian sumberdaya budaya yang pada awalnya dilakukan perorangan kemudian dilegalkan melalui badan-badan baik swasta maupun pemerintah, sehingga pelan tapi pasti, sumberdaya budaya semakin banyak yang mengalir keluar meninggalkan wilayah bangsa yang dikoloni sebagai pemilikinya. Pada awalnya motif dari pengumpulan sumberdaya budaya dari wilayah koloni adalah karena keunikan yang dimilikinya, namun lambat laun kemudian berkembang pada pemahaman yang mengacu pada penguatan ideologi bangsa barat sebagai bangsa yang “superior” dengan bangsa timur yang “inferior” dengan melihat sumberdaya budaya yang mereka miliki. Dimana sumberdaya budaya dari bangsa timur terlihat sebagai produk budaya yang bentuknya aneh, tampak sederhana dan jauh dari kesan moderen. Oleh Schiffer (2013) didefinisikan sebagai parent community yang melakukan kolonisasi/eksplorasi dan indigenous community yang merupakan komunitas pribumi yang masih bercocok tanam atau berburu dan meramu (Schiffer, 2013:118). Fenomena ini kemudian menimbulkan semacam dikotomi antara bangsa barat sebagai bangsa yang moderen dan lebih maju sementara bangsa timur masih primitif, terbelakang, bahkan cenderung barbaris. Entah disadari atau tidak pemikiran seperti ini bahkan tetap bertahan sampai sekarang dengan menganggap pemikiran dan gagasan dari bangsa barat sebagai sesuatu yang benar. Hal ini kemudian semakin “mengerdilkan” potensi kemampuan bangsa timur yang pada dasarnya juga memiliki kemampuan pemikiran dan perilaku yang telah dipelajari dan diadopsi sejak dahulu—bahkan jauh sebelum bangsa barat tersebut datang. Kemampuan pemikiran dan cara bertahan hidup hingga menghasilkan produk budaya lahir dari proses yang sangat panjang—bahkan telah ada dan dikembangkan sejak ribuan tahun lalu—yang kemudian lazim dianggap sebagai kemampuan lokal atau kearifan lokal (indigenous wisdom).

Belum habis perdebatan tentang superioritas-inferioritas dalam diskusi kajian museum, fenomena kebanyakan museum di Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah yang nampak tidak pernah berkembang semakin menambah beban bagi para penggiat museum. Museum di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Taylor (1994), memiliki semacam “standar” atau panduan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang berkeinginan menonjolkan konsep “Bhineka Tunggal Ika”. Sehingga

berakibat pada tampilan yang lebih banyak menampilkan benda budaya setempat dan galeri nusantara, dimana penyajiannya lebih banyak memamerkan benda dari pada informasi. Dalam hal pelestarian koleksi, Taylor juga menilai museum sebagian besar hanya merupakan tempat menyimpan koleksi tanpa dibarengi dengan perawatan yang memadai dan cenderung mengabaikan sistem registrasi dan katalogisasi yang berujung pada banyaknya koleksi yang kehilangan data dasar (provenance) (Taylor, 1994, dalam Tanudirjo, 2008). Kemudian ditambahkan lagi oleh Tanudirjo dengan adanya keterbatasan museum dalam meneliti baik dalam konteks menggali informasi baru terkait koleksi, tehnik konservasi atau cara penyajiannya (pameran) (Tanudirjo, 2008), bahkan oleh Kreps (1998) menganggapnya sebagai belum museum-minded (Kreps, 1998:5). Kondisi museum di Indonesia—dalam beberapa kondisi—juga dilihat oleh Sektiadi (tanpa tahun) sebagai sebuah hasil budaya yang menyiratkan aspek politik dengan melakukan penilaian pada Museum Sonobudoyo dan Monumen Yogya Kembali di Yogyakarta. Kedua museum tersebut, memiliki tujuan-tujuan yang secara tidak langsung sangat politis yang terlihat pada pemilihan gedung (desain arsitektural), pemilihan koleksi pamer, tata pamer serta kelengkapan lainnya (Sektiadi, tanpa tahun). Kondisi museum di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Tanudirjo dan Sektiadi tersebut kemudian mengundang tanda tanya yang cukup mendasar dalam kajian museum, dimana museum sebagai media komunikasi budaya belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara cikal bakal museum di Indonesia telah eksis sejak tahun 1778, ketika didirikannya Bataviaasch Genootschap (Perkumpulan Ilmu Pengetahuan dan Seni Batavia), yang juga merupakan cikal bakal Museum Nasional saat ini. Bahkan oleh Taylor dianggap sebagai museum tertua di Asia (Taylor, 1995, dalam Kreps, 1998:5).

II. Rumusan Masalah

Museum di Indonesia, sebagaimana dipaparkan pada bagian pengantar di atas, selama ini hanya dilihat sebagai tempat menyimpan dan memamerkan koleksi yang dikumpulkan dari berbagai daerah sesuai tingkatannya, baik itu level kabupaten, propinsi, maupun nasional. Hal ini kemudian berimbas pada belum meningkatnya jumlah kunjungan museum secara signifikan sejak pertama kali lembaga ini dikenal. Sehingga tujuan museum sebagaimana yang dirumuskan oleh ICOM sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, melestarikan, meneliti, dan mengkomunikasikan informasi dari koleksi, belum benar-benar tercapai di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia permuseuman di Indonesia. Permasalahan utama adalah bagaimana mengubah persepsi atau mindset masyarakat Indonesia yang melihat museum hanya sebagai tempat mengumpulkan dan memamerkan koleksi benda-benda budaya sebagai representasi etnisitas yang ada, yang kemudian dibungkus dalam sajian atau tampilan statis yang

tidak berubah sejak dari dulu. Nampaknya permasalahan ini akan menjadi sulit bila pengelola atau orang yang berkecimpung dalam permuseuman itu sendiri yang tidak mengubah mindsetnya akan bentuk dan tampilan museum saat ini. Tantangan atau permasalahan lain adalah bagaimana mengikis paradigma superior-inferior yang telah terbentuk sejak kolonisasi bangsa barat (Eropa, Belanda) berlangsung di Indonesia (timur). Paradigma ini kemudian oleh beberapa ahli museum, seperti Kreps (2005) misalnya, menjadi dasar perkembangan museologi di dunia menjadi model orientasi barat (western-oriented models), menggantung pada arahan ahli (the reliance on expert-driven), atas-bawah (top-down), serta upaya standarisasi dalam pelatihan dan pengembangan museum (professionalized/standardized museum training and development). Perkembangan museum dengan paradigma Museologi Eropa yang “ikut” disebarluaskan oleh ICOM tersebut, bahkan dianggap oleh Kreps sebagai pengikis metode kuratorial asli pribumi dan pendekatan dalam pelestarian warisan budaya (Kreps, 2005:4-5) yang berbasis kearifan lokal.

Kedua permasalahan yang telah dijelaskan di atas kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menawarkan solusi berupa konsep museum yang dianggap ideal dan layak diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak corak budaya dan etnisitas yang sangat banyak dan beragam. Konsep museum yang penulis tawarkan berakar dari masyarakat adat atau komunitas adat yang memang merupakan pemilik dari warisan budaya yang saat ini menghiasi sebagian besar museum-museum di Indonesia, bahkan di dunia. Sehingga harapannya tiap-tiap daerah yang memiliki masyarakat/komunitas adat, bisa menyelenggarakan “museum” yang berakar dari tradisi dan kearifan yang telah mereka anut sejak lama.

III. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini bermaksud menawarkan solusi atas permasalahan pengelolaan museum yang selama ini belum cukup diminati dan masih berorientasi barat di Indonesia. Menjembatani maksud ini, kemudian coba diimplementasikan dalam sebuah museum yang berbasis atau berakar dari masyarakat/komunitas adat, yang mengambil studi kasus di wilayah Tongkonan Ke'te Kesu, Toraja. Museum Budaya Toraja Tongkonan Ke'te Kesu nampaknya cukup mewakili keseluruhan aspek kebudayaan Toraja di Tongkonan Ke'te Kesu yang terefleksikan pada budaya bendawi dan non-bendawinya. Museum ini mungkin bisa dikategorikan sebagai museum komunitas (community museum) atau museum kehidupan (living museum) atau bisa juga museum terbuka (open air museum). Open Air Museum sendiri biasanya dikenali sebagai museum of buildings, living farm museum, living history museum, dan folk museum, yang pada umumnya mengkhususkan koleksinya pada kawasan dan bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis dan estetis. Dimana open air museum ditujukan untuk menciptakan suatu gambaran mengenai kehidupan masyarakat masa lalu

dengan cara merekonstruksi kembali lingkungan dan kehidupan mereka (Winaya, 2012:202-203). Namun dalam konteks tulisan ini, adalah untuk mempertahankan konteks pelestarian kawasan dan nilai-nilai kebudayaan Toraja yang telah berkembang dan masih bertahan sampai saat ini.

Tujuannya agar minat masyarakat, terutama masyarakat Indonesia mengunjungi museum bisa meningkat karena merasakan manfaat dari museum, serta paradigma kesetaraan dan kemerdekaan secara budaya di dunia bisa tercapai. Karena perkembangan kebudayaan tidak bisa selalu dalam satu garis lurus antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kemampuan adaptasinya masing-masing.

IV. Tongkonan Sebagai Masyarakat Adat dan Kawasan Adat Toraja

Mendengar kata “Toraja”, orang biasanya akan langsung mengasosiasikannya dengan sebuah daerah dataran tinggi di bagian tengah Pulau Sulawesi, rumah tongkonan, pesta kematian yang mewah, adu kerbau, menhir, percaya pada arwah leluhur, ragam hiasnya menawan, serta lansekapnya yang indah. Kesemuanya itu memang melekat atau “dilekatkan” sejak dulu oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke kawasan ini. Hasilnya kawasan Toraja kemudian menjadi “terkenal” dan dijadikan kawasan wisata budaya dan alam karena keunikan-keunikan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ketenaran Toraja sebagai sebuah kawasan budaya yang unik kemudian menarik minat banyak orang untuk datang berkunjung. Ada yang hanya datang sekedar menikmatinya, namun tidak sedikit pula yang datang untuk mempelajarinya. Orang yang datang sekedar menikmati pesona budaya dan alam Toraja lazim disebut sebagai wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sementara orang yang datang mempelajarinya atau lebih keren dengan istilah “meneliti”nya dianggap sebagai peneliti. Para peneliti dengan berbagai latar belakang keilmuan tersebut datang dari berbagai daerah dan kebangsaan dengan tujuan untuk meneliti Toraja sebagai sebuah kawasan budaya dan alam yang unik dan eksotis. Bila dirunut ke belakang, penjelajah—dalam hal ini dianggap sebagai “peneliti” awal—yang dianggap pertama kali mengabarkan budaya dan kawasan Toraja sebagai jurnal perjalanan adalah N. Gervaise (1685). Bukunya yang berjudul *Description Historique du Royaume de Macassar* dianggap sebagai sumber Eropa tertua yang mengulas orang Toraja (Nooy-Palm, 1978:165). Setelah jurnal perjalanan Gervaise ini, hingga akhir 1800-an baru ditemukan lagi catatan mengenai orang Toraja dari sumber Eropa lainnya yang ditulis oleh Nicolaus Adriani, seorang misionaris (Zendeling) yang diutus dari Lembaga Alkitab Belanda (Nederlandsch Bijbelgenootschap). Dia bekerjasama dengan A.C. Kruyt dalam memetakan rumpun suku Toraja yang meliputi Rantepao, Makale, Palopo, Mamasa, Poso dan Palu sepanjang tahun 1895-1923 (Wikipedia, 2017). Saat ini

semua daerah tersebut tersebar di 3 propinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan (Rantepao, Makale, dan Palopo), Sulawesi Barat (Mamasa), dan Sulawesi Tengah (Poso dan Palu).

Kawasan budaya Toraja secara umum diketahui oleh masyarakat sekarang secara geografis meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah geografis tersebut, didasarkan pada sebaran pendukung kebudayaan Toraja yang pernah berkembang. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, Toraja yang dipahami masyarakat, merupakan wilayah dan masyarakat yang ada di wilayah administratif Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut pemahaman masyarakat Toraja, secara umum wilayah adat Toraja terdiri atas:

1. Wilayah Adat Pappuangan, yang meliputi wilayah Sangngalla, Mengkendek, Makale (kini bagian dari Kab. Tana Toraja) dan pada awalnya meliputi wilayah Enrekang.
2. Wilayah Adat Pekamberan/Pekaindoran, yang saat ini sebagian besar masuk dalam wilayah Kab. Toraja Utara.
3. Wilayah Adat Dimaddikai, meliputi wilayah sebagian Kab. Toraja Utara, sebagian wilayah Kab. Luwu dan Kab. Mamasa Propinsi Sulawesi Barat (Mulyadi, 2013:24-25).

Salah satu ciri khas wilayah adat Toraja adalah Tongkonan. Tongkonan berasal dari kata “tongkon” yang berarti duduk. Tongkonan bagi orang Toraja bukan sekedar “hanya” bangunan tradisional semata, akan tetapi juga berfungsi sebagai sumber norma, pelaksana pemerintahan dan penghimpun keluarga atau kerabat. Hal ini mengandung arti bahwa pada dasarnya Budaya Toraja direfleksikan dalam budaya Tongkonan, yang meliputi gagasan/ide, aktifitas budaya serta budayamaterialnya yang berupa rumah tradisional atau adat yang juga disebut Tongkonan.

Sebagai sebuah identitas, Tongkonan juga merupakan sebuah kesatuan wilayah adat yang didalamnya terdiri dari tujuh unsur, yaitu rumah adat (tongkonan), lumbang (alang), tempat upacara (rante) yang biasanya ditandai dengan pendirian batu menhir (simbuang), area pekuburan (liang), hutan adat, sawah adat (huma), dan area penggembalaan (panglambaran).

Sebagai sebuah rumah atau oleh masyarakat Toraja menyebutnya dengan banua, tongkonan tidak dimiliki secara personal, namun diwariskan secara turun temurun. Banua tongkonan dianggap sebagai “ibu” oleh masyarakat Toraja dan alang sebagai “bapak”, yang didirikan menghadap ke utara sebagai pengingat akan asal usul nenek moyang mereka yang datang dari utara. Secara umum, banua tongkonan memiliki tiga bagian utama, yaitu bagian utara, tengah dan selatan. Ruang utara yang disebut tengalok berfungsi sebagai ruang tamu, tempat tidur anak-anak serta tempat menaruh sesajian. Ruang tengah yang disebut Sali berfungsi sebagai ruang makan, pertemuan keluarga, dapur serta tempat meletakkan orang mati. Ruang

selatan yang disebut Sambung berfungsi sebagai ruang kepala keluarga namun juga dianggap sebagai sumber penyakit. Secara umum masyarakat Toraja mengenal tiga jenis tongkonan, yaitu 1). Tongkonan Layuk atau Pesio’ Aluk yang berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan dan menyusun aturan-aturan sosial keagamaan, 2). Tongkonan Pekaindoran atau Pekamberan atau Kaparengngesan yang berfungsi sebagai pengurus atau pengatur pemerintahan adat yang mengacu pada Tongkonan Pesio’ Aluk, serta 3). Tongkonan Batu A’riri yang berfungsi sebagai tongkonan penunjang. Salah satu ciri khas lain banua tongkonan adalah pemasangan tanduk kerbau pada tiang utama depan rumah. Tingkat kebangsawanan di Toraja biasanya terlihat dari banyaknya tanduk kerbau yang terpasang di tiang utama rumah tongkonan. Hal ini berarti bahwa keluarga di tongkonan tersebut telah mengorbankan banyak kerbau dalam ritual keagamaan sebagai perlambang kemampuan ekonomi. Sebagai pelengkap status, biasanya pada bagian barat rumah digantung rahang kerbau dan bagian timur digantung rahang babi. Dimana semakin banyak yang digantung mengindikasikan tongkonan tersebut status sosialnya semakin tinggi (Kebudayaan Indonesia, 2013). Ukiran dan warna tongkonan juga merupakan salahsatu penanda tingkat kebangsawanan tongkonan, dimana ukiran dan warna tertentu hanya bisa digunakan oleh golongan tertentu pula. Sebuah keunikan tersendiri dari rumah tongkonan adalah penggunaan bambu sebagai atap dan tanpa penggunaan bahan baku dari unsur logam dalam pembangunannya. Atap disusun dari bambu yang dibelah dua dengan panjang tertentu kemudian dipasang saling menelungkup dan bagian paling atas atap dilapisi jerami.

Pemukiman Tradisional Toraja sebagai kawasan budaya sejak tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Tentatif Situs Warisan Dunia dengan nomor 5642, yang meliputi situs situs pemukiman tradisional Pallawa, Bori Parinding, Kande Api, Nanggala, Buntu Pune, Rante Karassik, Ke’te Kesu, Pala’tokke, Londa, Lemo dan Tumakke (UNESCO, 2009).

4.1 Sekilas Tongkonan Ke’te Kesu

Secara administratif Ke’te Kesu berada di Jl. Ke’te Kesu, Kampung Bunoran, Desa Panta’rukan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedang keletakan astronomisnya berada pada koordinat 02° 59’ 47.8”Lintang Selatandan 119° 54’ 36.3”Bujur Timur, pada ketinggian sekitar 814 meter dari permukaan laut. Berbatasan langsung dengan area perbukitan gamping di sisi selatan, area persawahan di sisi utara, sisi timur bukit karst dan sisi barat hutan bambu dan area persawahan. Akseibilitas menuju Ke’te Kesu relatif mudah karena letaknya yang hanya berjarak sekitar 4 km dari Rantepao (ibukota Kab. Toraja Utara) ke arah tenggara yang bisa dijangkau semua jenis kendaraan.

Dalam geneologi Puang, anggota tertua dari Tongkonan Kesu adalah Puang Ri Kesu yang hidup sekitar abad VIII. Tongkonan tersebut dibangun secara terpisah-pisah, namun pada tahun 1908 kelima diantaranya (To’sedana, Puang

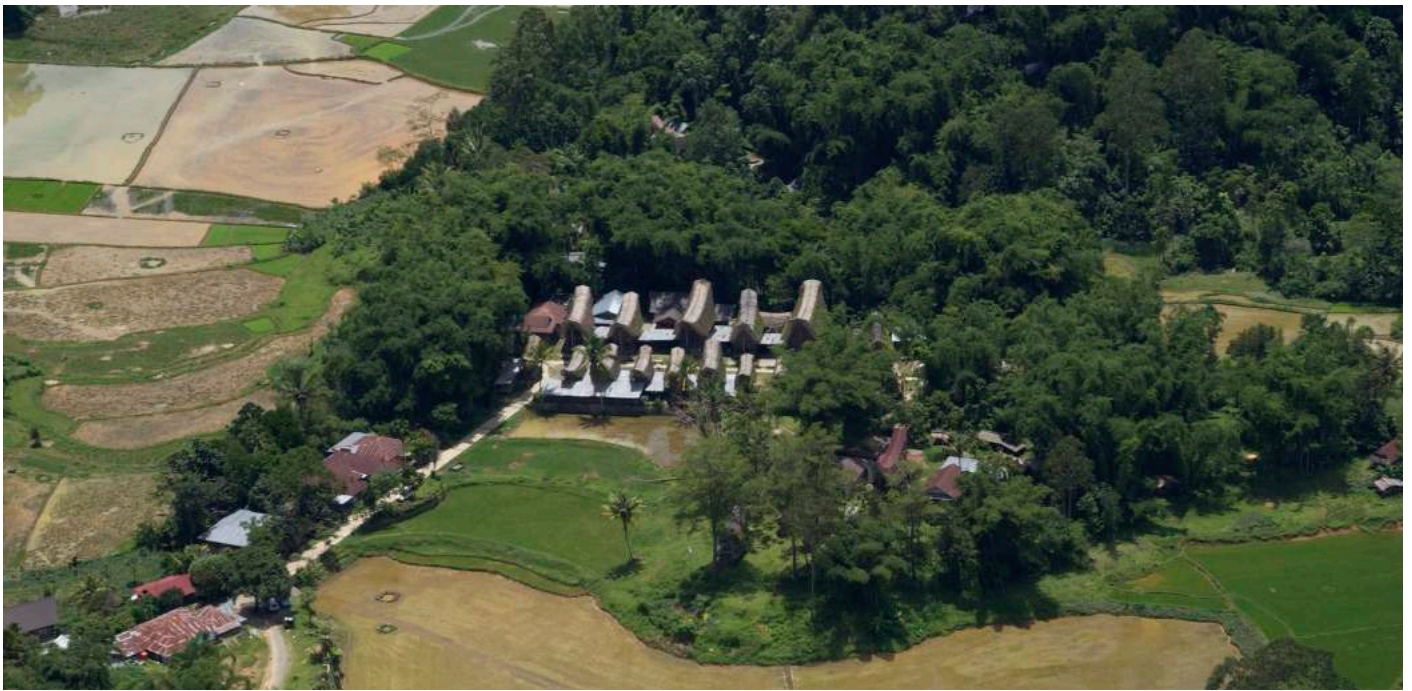


Foto 1 Kompleks Tongkonan Ke'te Kesu terlihat dari udara (Koleksi: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2005)

Ri Kesu, Tonga, Rura', dan Barongsa'lau) dikumpulkan menjadi satu lokasi menjadi Tongkonan Bamba dan bertahan sampai sekarang.

Ke'te Kesu memiliki seluruh komponen dalam sebuah wilayah adat/pemukiman Toraja. Komponen seperti tongkonan(rumah), alang(lumbung), liang (areal pemakaman), rante (lapangan upacara), huma (sawah adat), hutan adat dan panglambaran (areal penggambalaan) masih eksis dan masih menjadi milik adat Tongkonan Ke'te Kesu. Tongkonan Ke'te Kesu memiliki 6 rumah dan 15 lumbung yang dibangun sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat Toraja yang berorientasi utara-selatan.

Rumah terbesar (Tongkonan Puang Ri Kesu), berada bagian tengah jejeran rumah. Tongkonan ini juga merupakan tongkonan tertua di wilayah ini yang lazim disebut sebagai tongkonan layuk (layuk=tua), yang dibangun oleh pemimpin pertama wilayah di Kesu. Sebuah kepala kerbau yang terbuat dari kayu (kabongo) dan ukiran ayam jantan (katik) dipasang di depan rumah. Beberapa tongkonan saat ini berdiri di sekitar area Ke'te Kesu yang pada mulanya berasal dari sini. Tongkonan Rura saat ini difungsikan sebagai museum, yang menjadi semacam contoh hasil kebudayaan material (material culture) Toraja.

Areal upacara adat (rante) berada di bagian utara yang berjarak sekitar 50 meter dari tongkonan dan memiliki luas sekitar 2000 m². Sekitar 17 buah menhir (simbuang) berdiri di rante tersebut. Ukuran menhir tersebut bervariasi, yang paling besar berukuran tinggi 3,85 meter dan ketebalan batu 0.9 meter. Menhir terkecil berukuran tinggi 0.4 meter dan tebal 0.4 meter.

Areal pekuburan (liang) berada bagian lereng bukit karst tepatnya di arah selatan atau bagian belakang tongkonan. Peti kubur (erong) ada yang diletakkan di

tanah, di dalam ruang gua, atau digantung di tebing (kubur gantung). Bentuk erong yang ada terdiri atas bentuk hewan (kerbau dan babi) dan bentuk rumah tongkonan. Menurut tradisi tutur yang berkembang bentuk hewan merupakan bentuk yang pertama kali digunakan. Dalam penggunaan erong sebagai peti kubur pada awalnya, bentuk hewan yang digunakan ternyata mengandung arti tersendiri. Seperti misalnya erong berbentuk kerbau untuk laki dan erong berbentuk babi untuk perempuan. Namun pada perkembangan selanjutnya model hewan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal yang belum berkeluarga. Peti kubur berbentuk bangunan tersendiri atau menyerupai rumah adat (patane) relatif baru di Ke'te Kesu. Bentuknya berupa peti yang terbuat dari kayu yang diletakkan pada sebuah bangunan tembok atau miniatur rumah adat. Tau-Tau sebagai representasi orang yang dimakamkan dipasang di depannya. Penggunaan gua alam (liang) sendiri sebagai tempat penguburan, tidak lepas dari bentuk peringatan dan penghormatan kepada leluhur yang datang pertama kali di Kesu, yaitu Puang Ri Kesu, yang menginap di gua alam sebelum membangun tongkonan. Setelah meninggal, jenazah Puang Ri Kesu dimasukkan ke dalam erong dan disimpan di dalam gua.

Kompleks Ke'te Kesu juga memiliki sawah adat (uma) sebagai sumber utama untuk menghidupi tongkonan sehari-hari dan untuk keperluan upacara adat. Sawah adat tersebut berada di sisi utara dan memiliki luas sekitar 320 ha. Hutan bambu (kombong) sebagai komponen utama dalam setiap pelaksanaan upacara adat juga bisa dijumpai di sisi selatan antara kompleks tongkonan dengan area pekuburan. Tempat penggembalaan (panglambaran) kerbau sebagai salah satu komponen dalam Tongkonan Ke'te Kesu terletak di sisi utara tongkonan, tepatnya di sekitar daerah Buntu Kana. Saat ini situs Ke'te Kesu dikelola oleh Yayasan Ke'te Kesu yang juga sebagai

generasi pewaris dari kepemilikan tongkonan Ke'te Kesu.

4.2. Warisan Budaya Non-Bendawi (Intangible Heritage) Toraja

4.2.1 Alam Kepercayaan dan Genealogi

Orang Toraja meyakini kedatangan leluhur mereka menggunakan perahu yang dikenal sebagai To Lembang, dimana lembang diartikan sebagai orang perahu. Orang berperahu atau yang diartikan sebagai orang yang menggunakan perahu tersebut—sebagai leluhur orang Toraja—diyakini datang dari utara dan masuk dari daratan menuju wilayah Toraja sekarang melalui Enrekang. Kelompok-kelompok To Lembang tersebut kemudian menjalani hidup di sekitar pegunungan Bamba Puang (wilayah utara Enrekang) dimana masing-masing pemimpinya membangun tempat tinggal mereka yang disebut Banua Puang atau Banua Tamben. Bangunan ini yang kemudian dianggap masyarakat Toraja sebagai tongkonan pertama yang dibangun oleh nenek moyang mereka. To Lembang kemudian membawa aturan serta tatanan kehidupan yang disebut Aluk Sanda Pitunna, dimana aluk berarti aturan dan sanda pitunna berarti ketujuh. Aluk Sanda Pitunna ini oleh Tandilintin disebut Aluk 7777 (Tangdilintin, 1981, dalam Mulyadi, 2013:26). Kepercayaan ini dikenal pula dengan sebutan Aluk Todolo (aluk=aturan, todolo=leluhur), yang berarti kepercayaan terhadap leluhur (ancestor worship). Seiring perjalanan waktu, aturan adat tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk wilayah adat yang sampai saat ini diakui oleh sebagian besar orang Toraja, yaitu wilayah adat Pa'puangan, Pekamberan/Pekaindoran, dan Dimaddikai. Pembagian tiga wilayah adat tersebut bermula dari pelanggaran yang dilakukan Aluk Sanda Pitunna yang menyebabkan banyak orang yang meninggal. Peristiwa ini dianggap sebagai pelanggaran Aluk di Rura Bamba Puang yang diyakini telah membuka Eran di Langi' (jalan/tangga menuju ke langit). Akibatnya leluhur orang Toraja menjadi terpecah ke dalam tiga wilayah adat seperti yang disebut diatas dan menyebar ke wilayah Kab. Mamasa, Kab. Enrekang dan ke bagian utara yang jadi daerah Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara sekarang. Dalam perjalanan penyebaran tersebut, terjadi perselisihan mengenai Aluk Sanda Pitunna sehingga muncul Aluk Sanda Saratu (aturan keseratus/seratus aturan) sebagai pelaksanaan Aluka Sanda Pitunna. Penerapan Aluk Sanda Saratu kemudian mulai membedakan antara bangsawan atau pemimpin dengan masyarakat biasa. Istilah Puang (pap'puangan) sebagai gelar bangsawan atau pemimpin kemudian digunakan di wilayah selatan yang tergabung dalam wilayah Tallu Lembangna (tallu=tiga, lembang=wilayah), yaitu Sanggalla, Mengkendek dan Makale, wilayah Endekan, serta Tallu Batupapan (Alla, Malua dan Buntu), yang saat ini sebagian besar wilayah Kab. Enrekang dan Kab. Tana Toraja. Istilah Ambe (pekamberan) digunakan oleh wilayah Toraja utara, saat ini wilayah Kab. Toraja Utara. Sementara Maddika (dimaddikai) kemudian digunakan di wilayah timur dan sedikit di barat yang saat ini masuk

wilayah barat Kab. Toraja Utara hingga Kab. Mamasa dan sebagian Kab. Luwu (Mulyadi, 2013:26-27).

4.2.2 Prosesi Adat

Masyarakat Toraja secara umum mengenal dua jenis prosesi adat, yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solo, yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

4.2.2.1 Rambu Tuka

Upacara Rambu Tuka adalah upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran. Misalnya acara pernikahan, syukuran panen dan peresmian rumah adat/tongkonan yang baru, atau yang selesai direnovasi; menghadirkan semua rumpun keluarga, dari acara ini membuat ikatan kekeluargaan di Toraja sangat kuat. Upacara tersebut oleh masyarakat Toraja dikenal dengan nama Ma'Bua', Meroek, atau Mangrara Banua Sura'. Upacara ini menarik karena berbagai atraksi tarian, dan nyanyian dari kebudayaan Toraja yang unik. Upacara Rambu Tuka dilaksanakan sebelum tengah hari di sebelah timur tongkonan. Ini berbeda dengan Rambu Solo yang di gelar tengah atau petang hari serta di adakan di sebelah barat tongkonan. Sebagai upacara kegembiraan, Rambu Tuka digelar mengiringi meningginya matahari, sedangkan Rambu Solo untuk mengiringi terbenamnya matahari.

4.2.2.2 Rambu Solo

Upacara Rambu Solo bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, bersama para leluhur mereka yang bertempat di Puya (alam roh). Upacara ini sebagai penyempurnaan, karena orang baru dianggap benar-benar wafat setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Jika belum, maka orang yang wafat itu hanya dianggap sebagai orang yang "sakit" atau "lemah", sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya ketika masih hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi makanan dan minuman, bahkan diajak berbicara.



Foto 2 Salah satu ritual Rambu Tuka yaitu Mangara Banua Tongkonan (Sumber: www.properti.kompas.com)

Selain itu, orang Toraja arwahnya mencapai tingkatan dewa (Tomembali Puang) untuk kemudian menjadi dewa pelindung (Deata). Pada awalnya, tata cara upacara Rambu Solo dalam kepercayaan Aluk Todolo, tergolong upacara yang rumit dan kompleks. Karena dalam upacara Rambu Solo meliputi tujuh tahapan, yaitu: Rapasan, Barata Kendek, To Dibalang, To Dirondon, To Disangoloi, Disilli, To Ditanaan. Namun, sejak masuknya agama Kristen, Katolik, dan Islam, beberapa bagian prosesi telah dihilangkan. Kini, secara umum, ada empat bagian prosesi yang masih terus dilakukan, yaitu Mapalao, penerimaan tamu, penyembelihan kerbau, dan penguburan.



Foto 3 Rangkaian prosesi Rambu Solo, (searah jarum jam) mappalao, ma'badong, matinggoro, mattarek batu (sumber: dari internet)

5. Tongkonan Ke'te Kesu Sebagai "Museum" Budaya Toraja

Sebagai prasyarat agar dapat "layak" disebut sebagai sebuah museum, Tongkonan Ke'te Kesu sebenarnya telah memiliki komponen-komponen—walaupun beberapa diantaranya perlu ditingkatkan kapasitasnya—sebagaimana yang didefinisikan oleh ICOM. Dimana museum merupakan lembaga non-profit, memiliki lembaga/institusi penyelenggara permanen yang melayani publik, terbuka untuk umum, memiliki aktifitas mengoleksi, merawat, meneliti, mengkomunikasikan serta memamerkan warisan budaya bendawi non-bendawi manusia dan lingkungannya, demi kepentingan edukasi, pembelajaran dan kesenangan (ICOM, 2007). Sebagai penyelenggara/lembaga, tongkonan memiliki lembaga adat. Sebagai ruang publik, saat ini Ke'te Kesu terbuka sebagai kawasan wisata budaya. Sebagai aktivitas, pola kehidupan sehari-hari sesuai tradisi dan pelaksanaan ritual keagamaan masih dilaksanakan dan dipertahankan hingga kini. Sebagai media edukasi, pembelajaran dan kesenangan, Ke'te Kesu telah menjadi laboratorium ilmu pengetahuan tentang kearifan masyarakat Toraja dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang kemudian menghasilkan wujud yang unik dan mempesona. Apabila diwujudkan dalam sebuah visi dan misi, maka Museum Budaya Toraja Tongkonan Ke'te Kesu bisa dijabarkan sebagai berikut:

Visi, budaya toraja sebagai media pembelajaran kearifan lokal berbasis masyarakat adat.

Misi, melestarikan warisan kearifan budaya Toraja sebagai media informasi, edukasi dan penguat identitas Indonesia yang majemuk, dengan memberi peluang dalam pengelolaan secara mandiri aset-aset kebudayaannya.

5.1 Museum Budaya Toraja Tongkonan Ke'te Kesu

Museum Budaya Toraja di Tongkonan Ke'te Kesu akan menampilkan produk-produk budaya Toraja di wilayah adat Tongkonan Ke'te Kesu, baik budaya bendawi maupun non-bendawinya. Konsepnya adalah budaya bendawi (bana, alang, menhir, liang) dan aktifitas religi dan sehari-hari menjadi koleksi yang bisa dinikmati langsung pengunjung. Tata letaknya menyesuaikan dengan konsep tata letak yang telah dianut sejak dulu, namun tetap memberi peluang untuk modifikasi pada beberapa kondisi yang bisa ditoleransi dan tidak bertentangan dengan konsep aslinya. Fasilitas yang diperlukan sebagai pendukung operasional museum juga pada dasarnya telah dimiliki oleh Tongkonan Ke'te Kesu. Seperti misalnya fasilitas MCK di belakang tongkonan, pemeliharaan koleksi yang bersifat tradisional (pemeliharaan tongkonan dengan bahan tradisional dan alami), petunjuk arah kunjungan (sign system), informasi kawasan (leaflet, peta dan buku yang membahas budaya Toraja bisa dijumpai pada toko-toko souvenir di sekitar lokasi), toko souvenir lengkap dengan pengrajin yang sedang mengerjakan souvenir khas juga bisa dijumpai di sekitar tongkonan. Terkait aspek keamanan, masyarakat adat melalui dewan adat sendiri telah memiliki satuan pengamanan adat yang dibantu den-

gan penempatan polisi khusus (polsus) cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, polisi khusus pariwisata oleh Polda Sulselbar, serta aparat Polres Toraja Utara.

5.2 Manajemen Museum

Dewan adat sebagai perangkat pemerintahan dalam tongkonan memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengembangkan kesenian dan budaya tradisional yang



Foto 4 Pembuatan souvenir khas Toraja oleh masyarakat adat Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

telah diwariskan leluhur serta memelihara keseluruhan unsur pembentuk tongkonan sebagai wilayah kesatuan adat (banua, alang, rante, liang, kombong, dan panglambaran). Sehingga manajemen museum sebaiknya dikelola atau langsung ditangani oleh dewan adat serta masyarakat pendukungnya di wilayah Tongkonan Ke'te Kesu. Pengaturan strukturalnya juga mengacu pada struktur kelembagaan adat yang sudah ada, termasuk pembagian kerja dan wilayahnya masing-masing. Secara umum terdapat empat bidang yang diatur dalam masyarakat Toraja, yaitu, 1) bidang keagamaan (ada' aluk na pemali), 2) kepemimpinan (tallu silolok), 3) ekonomi (tallu lolona), serta 4) adat budaya (rambu tuka dan rambu solo). Saat ini di Tongkonan Ke'te Kesu juga telah berdiri sebuah yayasan bernama Yayasan Ke'te Kesu dengan ketua dewan adat yang juga merangkap sebagai ketua yayasannya. Dimana yayasan ini kemudian bisa menjadi pengelola museum secara resmi.

5.3 Riset

Sebagai bagian dari pengembangan dan pemanfaatan Tongkonan Ke'te Kesu sebagai "museum", diperlukan riset yang intensif terutama dalam menggali nilai-nilai kearifan budaya dan masyarakat Toraja yang telah ada dan berkembang sejak masa lalu. Riset-riset terkait budaya

Toraja secara umum telah banyak dilakukan baik oleh peneliti dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Hasil riset nilai tersebut kemudian dikemas menjadi informasi yang akan menambah nilai penting Toraja sebagai kawasan adat yang masih lestari. Selain itu, riset terkait pelestarian baik dalam lingkup makro (kawasan) maupun mikro (artefaktual) juga perlu untuk diintensifkan, terutama upaya-upaya pelestarian/konservasi tradisional dan alami yang telah dianut dan diterapkan sejak dulu.

5.4 Koleksi

5.4.1 Koleksi Budaya Bendawi

5.4.1.1 Tongkonan

Konstruksi rumah adat Tongkonan, dengan bahan dasar kayu dan bambu, dalam pembagian ruang dan arah hadapnya, adalah arah Utara - Selatan. Arah hadap itu didasarkan pada arah kedatangan orang Toraja, juga dikaitkan dengan ajaran Aluk Todolo sebagai titik pusat mata angin, berkaitan dengan pembangunan rumah yang berfilosofi pada kepercayaan nenek moyang orang Toraja, maka sebelum pembangunan Tongkonan ini selalu didahului dengan serangkaian upacara adat dan persembahan hewan kurban yaitu babi dan kerbau.

Orang Toraja dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu mengikuti norma-norma adat yang telah disepakati, begitupun dengan keberadaan Tongkonan. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk Tongkonan juga disesuaikan dengan status sosialnya. Di ke'te Kesu sendiri dikenal dengan beberapa tipe Tongkonan yang mempunyai peranan masing-masing, dan perbedaan pemberian atribut ragam hias behubungan dari fungsi Tongkonan tersebut, terdiri atas tiga, yaitu;

- Tongkonan Layuk, yaitu Tongkonan yang mempunyai status paling tinggi dan digunakan sebagai tempat kajian adat dan berdiskusi dalam membuat norma adat dan memecahkan masalah adat. Pada Tongkonan Layuk ini menggunakan tiang tengah yang disebut dengan Tulak Somba pemakaian hiasan kerbau yang disebut dengan Kabongo dan pemakaian hiasan kepala ayam yang disebut dengan Katik. Hiasan ini menjadi ciri khas yang khusus pada Tongkonan ini, dan tidak semua Tongkonan memakai ragam hias ini.
- Tongkonan Pekamberan atau Pekaindoran, adalah Tongkonan kedua yang berfungsi sebagai pelaksana atau yang menjalankan aturan perintah dan kekuasaan adat di dalam masing-masing daerah adat yang dikuasainya. Pada Tongkonan ini memiliki ragam hias Kabongo dan Katik, dan tidak memiliki Tulak Somba.
- Tongkonan Batu Ariri, adalah tingkatan Tongkonan ketiga, karena tidak mempunyai kekuasaan di dalam adat tetapi berperan sebagai tempat persatuan dan pembinaan keluarga dari turunan yang membangun Tongkonan tersebut pertama kali.

Posisi Tongkonan awalnya di daerah perbukitan, didasarkan pada fungsi awalnya sebagai sumber pemerintahan dan kekuasaan. Tongkonan Ke'te Kesu termasuk dalam kategori sebagai pusat pemerintahan, yaitu "Pangta'nakan lolo aluk sola pemali", yang artinya Tongkonan sebagai tempat penyemaian bibit tradisi, tempat memelihara dan tempat menyebarkan tradisi. Tongkonan ini sudah berumur empatratus tahun tahun dan telah dihuni kurang lebih tigapuluh generasi.

Struktur Tongkonan pada umumnya berbentuk struktur, rangka bangunan di letakan di atas umpak yang sebelumnya telah dipikirkan sistem penyaluran gaya dari atas walaupun cara perhitungannya tidak seperti perhitungan teknis, adapun rangka bangunan dibagi atas tiga bagian, yaitu;

1. Kolong rumah atau Sulluk Banua
2. Badan rumah atau Kale Banua
3. Atap rumah atau Ulu Banua



Foto 6 Jejeran alang (lumbung) di Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)



Foto 5. Banua Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.2 Alang

Bangunan ini terlatak berhadapan dengan Tongkonan di antarai dengan pelataran yang disebut Allu Baba. Bangunan rumah adat menghadap ke Utara dan lumbung padi menghadap ke Selatan. Alang dalam kehidupan sosial masyarakat Toraja selain digunakan sebagai tempat menyimpan padi juga digunakan sebagai tempat menerima tamu serta digunakan sebagai tempat bersantai keluarga pada waktu senggang pada saat upacara tertentu, baik pada upacara Rambu Tuka atau Rambu Solok, Alang digunakan sebagai tempat duduk bagi tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pemimpin dalam masyarakat dan tidak diperkenankan pada rakyat biasa.

Alang yang terdapat pada Tongkonan hanya satu dan di letakan didepan Tongkonan dengan arah hadap Utara-Selatan. Struktur Alang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian atap, badan dan kaki. Alang ditopang oleh tiang yang berbentuk bulat terbuat dari pohon Palm-Banga berjumlah enam buah tiang. Pada bagian atas terdapat hiasan tanduk rusa dan simbol ayam jantan yang digambarkan pada depan dan belakang atap Alang.

5.4.1.3 Rante

Rante atau lapangan upacara masyarakat Toraja, merupakan tempat untuk melaksanakan upacara Rambu Solok bagi kaum bangsawan Rante adalah salah satu unsur yang harus ada pada Tongkonan Layuk dan pemukiman tua. Rante berfungsi sebagai tempat mengadakan upacara akhir bagi orang yang meninggal sebelum dimakamkan, yang berhak di upacarakan pada Rante adalah hanya golongan bangsawan atau mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Rante pada situs Ke'te kesu berada sekitar 2 km sebelah Selatan Tongkonan, areal ini sangat penting dalam rangkaian upacara masyarakat Toraja Rambu Solok, kegiatan yang dilakukan disini meliputi pembagian daging secara tradisional dengan penyebutan istilah kekeluarga "Tepo'a'pa'na yaitu keturunan empat nenek sebelah menyebelah. Dalam areal Rante ini terdapat komponen antara lain:

1. Simbuang atau Menhir yang berbentuk tiang monolith menjulang ke atas terbuat dari batu andesit dan mengelilingi rante terletak sebelah Barat dari Tongkonan, struktur susunannya dalam Aluk Rante biasanya terdapat paling kurang 3 Simbuang yang mengelilingi areal Rante, Simbuang berfungsi sebagai pengikat kerbau juga sebagai media pemujaan terhadap daeta-daeta. Simbuang adalah tiang monolith yang terbuat dari batu. Dalam interpretasi masyarakat Toraja Simbuang diartikan sebagai simbol phallic atau status seseorang. Bentuk batu disesuaikan dengan gender biasanya batu berukuran kecil untuk wanita dan yang lebar untuk laki-laki yang meninggal (Tangdilinting,1979;60). Simbuang yang berasosiasi dengan Rante digunakan sebagai sarana upacara pada rambu solo' yaitu sebagai sarana sakral dalam upacara rambu solo', Jumlah Simbuang yang ditemukan pada Rante Ke'te Kesu berjumlah limabelas buah, dengan ukuran yang berbeda-beda.
2. Lakkian, berbentuk seperti rumah tradisional Toraja pada bagian atapnya, akan tetapi pada bagiannya bawahnya

terbuka, Lakian berfungsi sebagai tempat persemayaman jenazah pada saat upacara Rambu Solok dilakukan, Lakian terletak disebelah barat dari Simbuang, dan dalam Rante hanya terdapat satu Lakian saja.

3. Balakkan, adalah tempat pembagian daging hewan kurban, biasanya berupa daging babi atau daging kerbau, yang sudah disembelih. Bentuk Balakan berupa rumah yang terdiri dari empat tiang penyangga utama yang ketinggiannya mencapai tiga meter, kemudian pada diameternya dibuatkan bangunan atau lantai yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk tempat orang yang membagikan daging tersebut dan bentuk atapnya terbuat dari daun rumbia. Balakan terletak di sebelah Selatan Rante.



Foto 7 Rante (tempat pelaksanaan upacara) Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.4 Liang

Terletak di belakang Tongkonan, Liang atau biasa yang disebut dengan "Tongkonan Tang Merambu", tongkonan disini berarti tempat duduk, tang merambu berarti tidak berasap, jadi tongkonan tang merambu adalah rumah yang tidak berasap lagi, dalam arti sosialnya adalah kuburan. Pengertian lainnya adalah kuburan yang dipahatkan pada tebing-tebing batu dan menjorok kedalam, dalam analogi tersebut menjelaskan bahwa kematian bagi orang toraja hanya merupakan perpindahan alam dari dunia bersayap, pada setiap tongkonan dianggap lengkap apabila memiliki tempat khusus untuk menguburkan sanak saudara yang telah meninggal. Tempat tersebut biasanya bagi golongan bangsawan dibuat dengan melihat tebing-tebing batu yang tinggi dan membentuk lubang atau biasa disebut dengan liang. Semakin tinggi penempatan liang menandakan bahwa keluarga yang dikuburkan adalah golongan bangsawan tertinggi dalam masyarakat. Jarak liang Ke'te Kesu dari tongkonan sekitar 1,5 km kearah selatan tongkonan.

Pemanfaatan lahan masyarakat toraja yang digunakan untuk penguburan adalah areal yang tidak produktif lagi seperti bukit karst, akan tetapi dengan perkembangan zaman

dan teknologi sekarang, penguburan di liang sudah mulai ditinggalkan, dan masyarakat mulai menggunakan Patane atau peti batu yang terbuat dari semen dengan diameter yang mencapai tiga meter, biasanya juga berbentuk seperti rumah yang di atasnya terdapat hiasan baik berupa patung atau simbol keluarga. Patane mulai digunakan pada tahun abad XVIII, pada saat Belanda mulai memasuki wilayah toraja, dimana dalam satu patane biasanya dikuburkan satu keturunan dengan jumlah biasanya 30-50 jenazah.



Foto 8 Liang (area pekuburan) Tongkonan Ke'te Kesu berwujud peti kubur kayu atau erong (kiri) dan berwujud patane (kanan) (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.5 Area Pemukiman

Pada wilayah adat Ke'te Kesu, terdapat areal pemukiman baik yang berlokasi di dalam kawasan inti ataupun di luar kawasan inti. Dimana dalam kawasan inti terdapat 3 rumah dan di luar kawasan inti sekitar 20-an rumah. Masyarakat yang tinggal dalam kawasan Ke'te Kesu antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan persaudaraan satu tongkonan, dalam masyarakatnya sendiri mengenal istilah Banua Dioboko Tongkonan, hal tersebut bukan hanya berarti rumah dibelakang tongkonan, akan tetapi bermakna, bahwa tidak sembarangan orang dapat tinggal di dalam kawasan inti Ke'te Kesu, harus orang yang mempunyai hubungan darah, dalam artian bisa sebagai keturunan dari ahli waris atau merupakan prajurit atau abdi dalam, untuk menjaga warisan keluarga tersebut.

5.4.1.6 Kombong (Hutan Bambu)

Kombong atau kebun bambu selalu ada dalam pemukiman di kawasan toraja, dan terletak di samping rumah-atau bagian timur tongkonan. Kombong atau hutan bambu adalah salah satu unsur yang dimiliki oleh tongkonan. Bambu bagi masyarakat toraja memiliki fungsi sosial, seperti sarana untuk minum (pipa air), untuk memasak makanan (piong), sebagai bahan bangunan terutama dijadikan atap tongkonan, sebagai alat mengangkut air dari sumur, dan sebagainya. Selain pohon bambu, masyarakat toraja juga membudidayakan pohon angka, kegunaan dari pohon angka ini selain untuk menyelaraskan lingkungan juga sebagai bahan dasar dari tau-tau atau patung representase orang yang telah meninggal, kayu pohon

angka juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rumah tongkonan.



Foto 9 Hutan adat (kombong) Tongkonan Ke'te Kesu yang ditanami bambu di bagian selatan tongkonan (Koleksi BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.7 Uma (Sawah Adat)

Merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah pemukiman, karena uma (sawah) merupakan penghasil padi sebagai sumber bahan makanan pokok. Setiap keluarga dari tongkonan tersebut berhak untuk mengelola sawah adat untuk ditanami padi sekaligus memelihara ikan (tumpangsari) dan hasilnya dibagi rata terhadap setiap anggota keluarganya. Keletakan uma pada bagian timur dari tongkonan, atau pada bagian depan kawasan pemukiman.



Foto 10 Sawah adat (uma) Tongkonan Ke'te Kesu yang berada di sisi utara tongkonan (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.8 Panglambaran (Area Penggembalaan)

Areal Panglambaran (penggembalaan) terletak pada bagian terpisah dari kawasan tongkonan yang biasanya berdekatan dengan hutan lindung. Setiap pemukiman terdapat hutan lindung, yang berfungsi sebagai ekosistem lingkungan dan sebagai tempat penggembalaan hewan. Pemanfaatan kawasan hutan lindung sebagai areal penggembalaan hewan, adalah suatu bentuk adaptasi dari komunitas terhadap pemanfaatan ruang sumberdaya, dalam konteks ini adalah pemanfaatan lahan yang kosong. Peman-

faatan areal yang kosong sebagai areal penggembalaan tidak menggunakan konsep aluk, penempatan areal penggembalaan ini tergantung pada ketersediaan areal yang kosong. Areal penggembalaan kawasan adat Ke'te Kesu terletak pada bagian timur, di belakang sawah adat, bersebelahan dengan kawasan hutan adat. Secara kasat mata areal penggembalaan ini tidak terlihat secara terbuka, apabila dilihat keletakannya dari areal tongkonan dan simbuang. Hal ini dimungkinkan sebagai pemanfaatan areal yang kosong, yang secara bentang lahan ketersediaan tersebut berada pada bagian timur.

Kebutuhan areal penggembalaan ini karena komunitas adat yang tinggal di dalamnya, mereka selalu melakukan ritual upacara, dalam upacara tersebut selalu melakukan persembahan hewan korban sebagai media penghormatan kepada penguasa alam, dengan tersedianya areal penggembalaan, kebutuhan akan hewan korban dalam hal ini kerbau dan babi, terpenuhi.



Foto 11 Lokasi area penggembalaan (panglambaran) Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.9 Area Upacara Aluk Baba

Merupakan areal tempat mengadakan upacara pemujaan kepada Deata-deata terletak di antara tongkonan dan alang. Luas areal ini sekitar 10 meter arah timur pada bagian tengah dari tongkonan dan alang, areal ini difungsikan pada saat upacara rambu solo.



Foto 12 Area di antara tongkonan dan alang yang juga difungsikan sebagai ruang upacara tertentu (Koleksi, BPCB Makassar, 2011)

5.1.4.10 Bubun (Sumber Air)

Sebuah tongkonan dianggap tidak lengkap apabila tidak memiliki Bubun (sumur/sumber air). Sumber air tersebut adalah tempat khusus yang telah dimiliki secara penuh oleh sebuah tongkonan, dan masyarakat dari wilayah lain yang ingin mengambil air dari tongkonan tersebut harus meminta izin dulu kepada tongkonan yang memiliki bubun tersebut.

Sumber air bagi masyarakat toraja, memiliki arti simbolik yaitu sebagai simbol perdamaian dalam keluarga apabila terdapat perselisihan. Bubun berada sekitar 200 meter ke arah utara di belakang tongkonan. Bubun ini berbentuk empat persegi terbuat dari batu, sebagai sumber air bersih pada kawasan Ke'te Kesu.



Foto 13 Sumber air utama (bubun) Tongkonan Ke'te Kesu pada masa lalu (Koleksi, BPCB Makassar, 2011)

5.4.1.11 Erong dan Tau-tau

Erong atau peti mayat yang berbentuk perahu atau babi terbuat dari kayu, diyakini sebagai kendaraan bagi orang yang telah meninggal, biasanya dalam satu erong di tempati oleh duapuluh mayat, dengan ukuran panjang dua meter. Erong di tempatkan dalam bukit batu atau digantung di pohon yang tinggi untuk mencegah dari hewan buas. Areal pemakaman (liang) Ke'te Kesu terdapat dua puluh tujuh erong yang sebagian bentuknya sudah rusak, dan sebagian erong masih tersimpan rapi di dalam gua dan pohon rambutan yang tinggi.

Secara umum bentuk erong melengkung kurva menyerupai bentuk perahu, yang mempunyai cirikhas ornamen. Erong dengan ornamen Pa'doti Langi atau Padoti Siluan, yang artinya kepala ular merupakan ornamen khusus dibuat bagi kaum bangsawan.

Tau-tau berarti orang kecil atau orang saja. Tau-tau merefleksikan kepada orang yang telah meninggal, dengan memakai pakaian dan perhiasan orang yang telah meninggal tersebut. Tau-tau dibuat untuk jiwa orang yang meninggal. Ukuran tau-tau biasanya setengah meter yang diletakkan disamping kuburan dan biasanya bahan tau-tau terbuat dari pohon nangka.



Foto 14 Tau-tau di liang Tongkonan Ke'te Kesu (Koleksi: BPCB Makassar, 2011)

5.4.2 Koleksi Non-Bendawi

Koleksi non-bendawi yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alam kepercayaan, nilai-nilai, pola hidup sehari-hari, maupun tradisi yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Seperti telah disinggung pada bagian gambaran umum di atas, dimana Toraja sebagai sebuah komunitas adat telah memiliki alam kepercayaan yang telah dianut sejak dulu berupa pemujaan terhadap arwah leluhur (ancestor worship) yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Kepercayaan ini kemudian ditransformasikan ke dalam ritual-ritual dan pola perilaku sehari-hari, seperti misalnya, upacara adat yang unik dan kolosal (rambu tuka dan rambu solo), pola pemanfaatan kawasan (tata ruang tongkonan), serta pola pertanian yang berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka sejak dulu.

5.5 Konservasi Koleksi

Pemeliharaan terhadap koleksi atau konservasi koleksi berpegang pada prinsip pemeliharaan atau konservasi berbasis tradisional yang telah dianut dan diterapkan sejak dulu. Seperti misalnya pengawetan bambu dan kayu sebagai bahan baku pengganti komponen rumah tongkonan. Orang Toraja biasa merendam bambu terlebih dahulu ke dalam lumpur (biasanya di sawah) agar terhindar dari rayap sebagai salah satu perusak utama bahan kayu. Kemudian bambu dan pohon keras lainnya sebagai bahan baku utama dalam penggantian komponen rumah dan pesta adat juga ditanam di sekitar rumah dan menerapkan standar dalam pengambilannya. Pada pengawetan mayat, secara tradisional dikenal beberapa bahan alami yang berfungsi layaknya formalin yang banyak dikenal saat ini. Ramuan tersebut berupa campuran beberapa daun, kayu, dan getah pohon tertentu. Sehingga upaya konservasi terhadap koleksi (mikro) dan kawasan (makro) Toraja, sebenarnya telah dipersiapkan sejak dulu dengan penanaman bahan bakunya di hutan adat (kombong).

5.6 Model Tampilan

Tampilannya adalah setting/tata letak Tongkonan Ke'te Kesu saat ini, atau tidak melakukan perubahan, atau meminimalkan perubahan yang dilakukan. Mengingat bahwa salah satu sajian "koleksi"nya adalah setting kompleks tongkonan itu sendiri dengan segenap komponennya. Sebagai pengantar, pengunjung bisa diterima di alang (sebagai tamu), kemudian mendengarkan penuturan sejarah masyarakat Toraja dan alam kepercayaannya oleh perangkat adat. Penerimaan pengunjung di alang (lumbung), juga merupakan pola kebiasaan masyarakat Toraja dalam menerima tamu. Sehingga secara langsung pengunjung bisa merasakan langsung proses penyambutan tamu ala Toraja. Pada bagian ini, juga dijelaskan keseluruhan komponen yang ada dalam sebuah tongkonan (kawasan adat), termasuk makna dibalikinya. Sehingga pengunjung bisa memiliki informasi awal sebelum memasuki kesemua komponen-komponen tersebut. Setelah mendapatkan informasi awal, pengunjung kemudian diantar menuju masing-masing komponen tongkonan untuk melihat lebih dekat. Koleksi yang artefaktual bisa dilakukan setiap saat, namun untuk koleksi yang non-artefaktual (budaya non-bendawi) harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaannya masing-masing. Seperti misalnya upacara adat rambu solo (pesta kematian), yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu sehingga kunjungan bisa diformat sebagai kunjungan periodik. Pengunjung pada even-even tertentu tersebut juga didampingi pemandu, agar informasinya terarah dan maksimal.

Sebagai bagian dari mengkomunikasikan kepada publik terkait upaya pemasarannya, memasukkan budaya Toraja ke dalam kurikulum muatan lokal, terutama dalam bingkai budaya daerah di Indonesia, bisa menjadi salah satu upaya yang penting untuk dilakukan. Selain itu, penggunaan papan informasi yang dipasang pada masing-masing koleksi, tidak menjadi sebuah keharusan, karena secara langsung hal ini juga akan menumbuhkan komunikasi yang aktif antara pengunjung dan pemandu yang memang berasal dari komunitas adat Tongkonan Ke'te kesu sendiri, yang sangat memahami budaya mereka sendiri. Sensasi berdikusi dengan pemandu tentang objek yang dilihat di lokasi, menjadi nilai kelebihan tersendiri, terutama dalam konteks pertukaran informasi/pengetahuan (transfer of knowledge) antara pemandu (masyarakat adat Toraja) dengan pengunjung.

Untuk menunjang publikasi, penerbitan katalog koleksi dan even menjadi penting—walaupun pada dasarnya Toraja sudah relatif dikenal masyarakat internasional. Pembuatan website untuk bisa menjangkau publik internasional, terutama untuk nilai-nilai yang menjadi keunikan dan khas dari Toraja, juga dianggap perlu dilakukan.

5.7 Target Pengunjung

Sebagai sebuah kawasan budaya, tentu saja yang menjadi jualan utamanya adalah budaya bendawi dan non bendawi dari Toraja yang unik dan berbeda dengan daerah

lain. Jualan tersebut kemudian mengundang hasrat banyak orang yang tidak memandang usia, latar pendidikan, maupun asal usul suku bangsa untuk datang menikmatinya. Dalam artian, target pengunjungnya adalah siapa saja yang tertarik dengan nuansa budaya yang eksotis dan unik. Kunjungan bisa dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

VI. Penutup

Sebagai sebuah kawasan budaya, Tongkonan Ke'te Kesu, bisa menjadi "museum" sebagai salah satu sumber informasi yang cukup lengkap untuk mengenal Toraja. Pengemasan museum yang penulis usulkan disini, memang tidak sesuai dengan konsep museum yang selama ini dikenal, yang mengumpulkan koleksi artefaktual kemudian ditampilkan pada sebuah bangunan/ruangan yang khusus. Namun lebih untuk melihat dan menawarkan sebuah kawasan adat, dengan segenap komponen artefaktualnya dan perilaku serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Toraja, pada konteks pemilikinya secara langsung. Sehingga diharapkan kedepannya, museum tidak lagi dilihat sebagai kumpulan koleksi dari berbagai negeri/daerah/adat, namun masyarakat dengan kekayaan budaya bendawi dan non-bendawi itu sendiri yang menjadi museum. Selain itu, dengan menempatkan koleksi langsung pada konteks pemilikinya, fenomena superior-inferior dalam konteks kebudayaan bisa sedikit terkikis karena makna dan nilai langsung dilekatkan oleh masyarakat pemilikinya.

Daftar Pustaka

Anonim. 2011. *Delineasi Situs-Situs Cagar Budaya di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak terbit.

Astuti, Devianty. 2007. "Sistem Penataan Ruang Pada Situs Ke'te Kesu Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan". Skripsi. Makassar: Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Tidak terbit.

Hakiwai, P. S. 2013. "Mana Taonga and the Public Sphere: A Dialog Between Indigenous Practice and Western Theory". *International Journal of Culture Studies*, Vol.17, p191-205.

Kreps, C. 1998. "Museum-Making and Indigenous Curation in Central Kalimantan Indonesia". *Museum Anthropology*, Vol.22, p5-17.

_____. 2005. "Indigenous Curation as Intangible Cultural Heritage: Thoughts on the Relevance of the 2003 UNESCO Convention". *Theorizing Cultural Heritage*, Vol.1, p1-8.

Mulyadi, Yadi. 2013. "Menjaga Tongkonan: Alternatif Upaya Pelestarian Budaya Toraja. *Jurnal Borobudur*, Vol.24.

Nooy-Palm, C. 1978. "Survey of Studies on the Anthropology of Tana Toraja Sulawesi". *Archipel*, Vol.15, p163-192.

Schiffer, M. B. 2013. "The Archaeology of Science: Studying the Creation of Useful Knowledge". *Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique*. New York-London: Springer.

Sektiadi. Tanpa tahun. *Politics at the Museum: The Appearances of Museum Sonobudoyo and Monumen Yogya Kembali Yogyakarta*. Yogyakarta. Tidak terbit.

Tangdilintin, L.T. 1975. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Cetakan Kedua. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan Tana Toraja.

Tanudirjo, D.A. 2008. "Menuju Kebangkitan Permuseuman di Indonesia Reposisi Museum di Indonesia". *Seminar Reposisi Museum di Indonesia dalam rangka Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional*. Jakarta: Museum Nasional Kebangkitan Nasional.

Winaya, A. 2012. "Pengembangan Situs Pemakaman Kolonial Sebagai Open Air Museum: Uji Coba Pada Museum Taman Prasasti. *Arkeologi Untuk Publik*, p200-211. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Sumber Internet

<http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1032>, diakses Januari 2017.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf, diakses Januari 2017.

http://id.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Adriani#cite_ref-J._Kruyt_4-0, diakses Januari 2017.

<http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5462/>, diakses Januari 2017.

<http://icom.museum/the-vision/museum-definition/>, diakses Januari 2017.

<http://kabarmasasilam.blogspot.com/2012/11/sejarah-dan-perkembangan-museum.html>, diakses Januari 2017.

BENTENG KASTELA

“RIWAYATMU DULU DAN KINI”

ANTARA PELINDUNGAN DAN RUANG HUNIAN

Irwansyah Baharuddin Zese
Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara

ABSTRAK

Kastela Castle is a cultural heritage objects in Ternate City, North Maluku Province which has important values of history, science and culture that must be preserved. Kastela is the first Portuguese fortress in Indonesia that was used as a center of spice monopoly in the Maluku Islands in the past. But it is unfortunate because now the greatness of Kastela Castle leaving only a small part of the fortress structure that is located on the street Kastela Village, Ternate City. The area of the castle is now filled with homes, school buildings, and public facilities and used as plantation land of surrounding communities. Kastela Castle is a very valuable cultural heritage therefore must be conserved especially from development that is not based on the conservation and inappropriate land management.

Keyword : **Preservation, Protection, Kastela Castle**

PENDAHULUAN

Situs Benteng Kastela (Nostra Senhora de Rosario atau Gamlamo) terletak di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Secara administratif bangunan pertahanan ini berbatasan dengan Kelurahan Jambula dan Kelurahan Rua. Dengan luas area 2.724 m² dan berada pada titik koordinat N 000 45' 67,2" S 1270 18' 72,4", Benteng Kastela kini berjarak sekitar 100 meter dari garis pantai. Benteng ini memiliki denah empat persegi panjang. Bagian dalam benteng berisi fasilitas pertahanan serta permukiman. Terdapat perumahan dan sarana peribadatan serta bastion di setiap sudut dan sisinya. Pada hakekatnya, Benteng Kastela dibangun oleh Portugis di awal abad 16 Masehi. Letak geografisnya yang strategis menjadikan benteng ini juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk mengawasi Kesultanan Ternate yang terletak di Foramadiah; lokasi pertama Kesultanan Ternate yang berada di belakang benteng.

Bahan utamabangunan Benteng Kastela adalah batu hasil erupsi Gunung Gamalama. Batu gunung ini direkatkan dengan koral yang dibakar (kalero). Sekarang ini Benteng Kastela hanya berupa reruntuhan dengan beberapa bongkah dinding bangunan yang dahulu kala terdapat di dalamnya. Bagian benteng yang masih bisa teridentifikasi hanya bastion dan menara saja. Parit yang dahulu membatasi antara kawasan benteng dengan lahan di sekitarnya juga sudah tidak dapat ditemukan. Benteng ini memiliki ukuran yang cukup besar pada masanya, dengan tembok keliling yang panjang dan tinggi, di

dalamnya terdapat kantor-kantor dagang, rumah-rumah pejabat Portugis, Gereja, dan sebuah menara. Namun hal tersebut sudah tidak dapat disaksikan lagi sekarang. Kini Benteng Kastela hanya berupa puing-puing tembok batu yang luasnya tidak lebih dari seratus meter persegi. Tidak banyak yang tersisa dari kemegahannya di masa lalu, kecuali reruntuhan menara yang berada di tengah-tengah area situs ini.

Tidak banyak penelitian yang dilakukan pada benteng ini, begitu pula dengan upaya-upaya pelestariannya. Tercatat hingga kini tindakan dan perlakuan terhadap benteng ini antara lain : a). Pembangunan tugu cengkeh dan diorama pembunuhan Sultan Khairun. Bangunan yang dibuat pada tahun 2001-2002. Hal ini merupakan simbolisasi tentang keberadaan cengkeh sebagai tanaman yang “dicari” pada masa penjelajahan Eropa terhadap sumberdaya alam, yang berdampak pada terbunuhnya Sultan Khairun di tahun 1570;b). Identifikasi Cagar Budaya di Kota Ternate, oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun di tahun 2004-2005; c). Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Bersejarah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Propinsi Maluku Utara melalui dana Insus No. 6 tahun anggaran 2005;d). Inventarisasi Benteng-benteng Di Indonesia oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia (PDAI); e). Inventarisasi Cagar Budaya di kota Ternate tahun 2011 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Ternate yang kini berubah nama jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara; f). Zonasi Benteng Kastela oleh BPCB Ternate tahun 2014 dan terakhir g). Ekskavasi penyelamatan benteng Kastela oleh BPCB Ternate tahun 2015.

Dari uraian di atas, tidak banyak yang menggambarkan upaya yang bersifat Pelestarian terutama Pelindungan, dimana kondisi benteng Kastela saat ini sangat memprihatinkan baik kondisi fisik atau struktur benteng itu sendiri maupun kondisi lingkungan yang semakin hari semakin padat dengan aktivitas pembangunan di sekitarnya. Padahal upaya pelestarian khususnya pelindungan dapat dilakukan bersama-sama dengan upaya penataan ruang hunian khususnya ruang hunian bagi penduduk masyarakat kelurahan Kastela saat ini.

Tinggalan fisik benteng yang belum dapat dilindungi sepenuhnya diperparah dengan pembangunan pemukiman di sekitar area benteng yang tidak terkontrol. Dari uraian di atas, tidak banyak yang menggambarkan upaya yang

bersifat Pelestarian terutama Pelindungan, melainkan hanya upaya perekaman data yang sifatnya dokumentasi saja baik bentuk gambar maupun foto dan video.

BENTENG KASTELA DALAM RIWAYATMU DULU

Kedatangan Francisco Serrao di Ternate adalah kedatangan seorang pejabat pertama Eropa – dalam hal ini Portugis – dari sebuah program eksplorasi Portugis yang ambisius dan telah dimulai sejak pertengahan abad ke-15 M. Ekspansi Portugis ke Maluku dilakukan dalam rangka menemukan Kepulauan Rempah-Rempah (the spice islands). Mereka seolah-olah berjudi dengan nasib dan mempertaruhkan segalanya dalam upaya memperoleh monopoli perniagaan rempah-rempah yang kala itu menjadi komoditas mewah di pasaran Eropa. Hal ini dikarenakan penjualan rempah-rempah menjanjikan keuntungan yang fantastis. Kemudian mereka mempertahankannya dengan segala daya dan upaya, baik politik, ekonomi, maupun kekuatan militer sekalipun. Francisco Serrao adalah seorang utusan Portugis pertama yang berhasil merundingkan hak-hak monopoli negerinya atas perdagangan rempah-rempah dan hak eksklusif pendirian benteng Portugis di Gamlamo dengan penguasa Ternate saat itu yaitu Sultan Bayanullah (Boleif).

Akhirnya, pada tahun 1520, Raja Portugis, Don Manuel, mengirim Jorge de Brito untuk membangun benteng Portugis di Gamlamo, Ternate, dan menunjuk adik Jorge de Brito, yaitu Antonio de Brito, sebagai komandan benteng tersebut. Benteng yang dibangun Portugis itu diberi nama Nostra Senhora de Rosario, tetapi lebih dikenal sebagai benteng Gamlamo oleh penduduk lokal, dan sekarang berubah nama menjadi benteng Kastela karena lokasinya yang berada di desa atau kelurahan Kastela.

Benteng ini dibangun secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Sesudah dimulai oleh Antonio de Brito di tahun 1522, pembangunan dilanjutkan tahun 1525 oleh penggantinya, Garcia Henriquez, lalu dilanjutkan di tahun 1530 oleh Goncalo Pereira untuk pada akhirnya di tahun 1540 dirampungkan oleh penguasa Portugis ke-8 di sana, Jorge de Castro. Pemberontakan rakyat Ternate yang berakhir dengan diusirnya Portugis dari Ternate pada tahun 1575, bermula ketika Sultan Khairun dibunuh setelah acara jamuan makan yang diselenggarakan di benteng ini.

Setelah sempat dikuasai Ternate, benteng ini direbut oleh bangsa Spanyol pada tahun 1606 yang menguasai Ternate hingga tahun 1660. Saat terjadi pengepungan dan penyerangan benteng ini dan kota oleh orang Spanyol setelah tanggal 1 April 1606, maka Spanyol cepat menguasai beberapa posisi yang dipertahankan dan mengambil lima puluh tiga meriam tembaga besar yang ada di dalam benteng. Dalam penyerbuan di kota ini mereka menemukan barang rampasan berharga lainnya. Di dalam balai dagang Belanda mereka mendapatkan satu gudang dengan

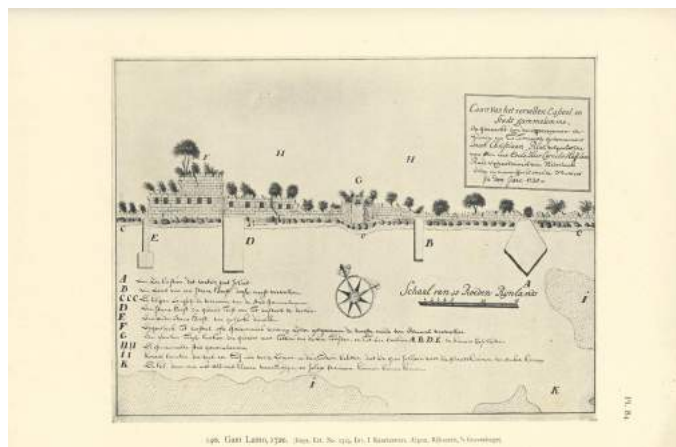
dua ribu ducat, peti penuh dengan barang dagangan dan cengkeh dalam jumlah banyak. Bagi mereka pertempuran sehari itu mengakibatkan lima belas orang meninggal dan dua puluh orang luka-luka. Sedangkan orang Ternate ke-



Gambar 01: Peta Lama Benteng Kastela (Gamlamo) Tahun 1540

hilangan prajurit paling sedikit dua kali lebih banyak serta miliknya yang berharga.

Orang Spanyol mencantumkan sebagai persyaratan pertama untuk perdamaian bahwa Sultan harus menyerahkan diri dan mengakui kedaulatan Spanyol kemudian mereka (Spanyol) akan menjamin keamanan pribadinya. Saat benteng ini beserta seluruh kota Gamlamo dibumi hanguskan. Sejak kejadian tersebut, benteng ini kemudian ditelantarkan. Belanda yang kemudian menguasai Ternate, lebih memilih untuk mendirikan



Gambar 02 : Potongan Denah Benteng Kastela (Gamlamo) Dokumentasi Belanda

benteng baru di lokasi bekas benteng Malayo (benteng Orange kota Ternate) daripada memperbaiki benteng ini.

BENTENG KASTELA DALAM RIWAYATMU KINI

“Antara Pelindungan dan Ruang Hunian”

Kemegahan dan kebesaran Benteng Kastela dimasa lalu tinggal cerita sejarah saja karena kini Benteng Kastela dalam kondisi memprihatinkan dan rusak parah; hanya menyisakan sebagian kecil struktur batuan benteng

yang mana dalam kondisi rapuh pula. Keruntuhan Benteng Kastela disebabkan rapuhnya struktur tembok lama yang menjadi pondasi struktur tembok baru sehingga tidak mampu menahan struktur tembok baru di atasnya. Selain itu dari reruntuhan tembok baru terlihat bagian dalam struktur tembok hanya diisi tanah sehingga pada musim hujan tembok tersebut runtuh. Tidak lama setelah runtuhnya struktur dinding itu, Disbudpar kembali melakukan renovasi bagian yang runtuh namun saat ini terlihat keretakan yang cukup panjang (kurang lebih 20 meter) pada dinding tersebut. Hal tersebut terjadi akibat upaya pelestarian kurang tepat khususnya upaya perlindungan (penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran).

Lingkungan dalam benteng merupakan pemukiman padat, di sebelah Timur sisa Benteng Kastela terdapat sebuah masjid, yang juga masih berada dalam lokasi benteng. Jarak dari Pusat Kota Ternate kurang lebih 12 km dengan kondisi jalan berupa jalan raya Ternate yang dapat dilalui semua jenis kendaraan termasuk kendaraan umum berupa angkutan kota dan ojek motor ke arah Selatan ke Kelurahan Kastela. Benteng Kastela berada di pinggir kota yang letaknya dekat dengan pantai yang merupakan dataran rendah di sebelah Selatan Pulau Ternate.



Gambar 03 : Foto Udara Kondisi Benteng Kastela. Bpcb Maluku Utara, 2015.

Situs Benteng Kastela yang di masa lalu terletak tepat di tepi pantai, kini berada menjauh ke arah darat sejauh 100 m karena pendangkalan akibat menyusutnya air laut, sebagai bagian dari siklus kebumihan. Situs ini kini berada dalam himpitan relung ekologi yang rawan, karena aktivitas masyarakat yang memanfaatkan lahan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik sebagai tempat tinggal maupun

lahan pertaniannya. Bahkan fasilitas jalan pun terlihat memotong pada lokasi benteng Kastela dan beberapa ruas jalan kelurahan juga terlihat baik menuju ke pantai maupun menuju ke kebun dan rumah penduduk.

Berdasarkan peta lama Benteng Kastela dan kondisi



Gambar 04 : Peta Zona Inti benteng Kastela; Bpcb Ternate, 2013

saat ini di lapangan serta data peta hasil zonasi pada zona inti Benteng Kastela oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate tahun 2013 lalu menunjukkan kurang lebih sekitar 20-30 bangunan baru di dalamnya terutama rumah hunian penduduk yang dominan, termasuk di dalamnya bangunan masjid, Puskesmas dan SMK. Berdasarkan peta lama Benteng Kastela dan kondisi saat ini di lapangan serta data peta hasil zonasi pada zona inti Benteng Kastela oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate tahun 2013 lalu menunjukkan kurang lebih sekitar 20-30 bangunan baru di dalamnya terutama rumah hunian penduduk yang dominan, termasuk di dalamnya bangunan masjid, Puskesmas dan SMK.

PELINDUNGAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik

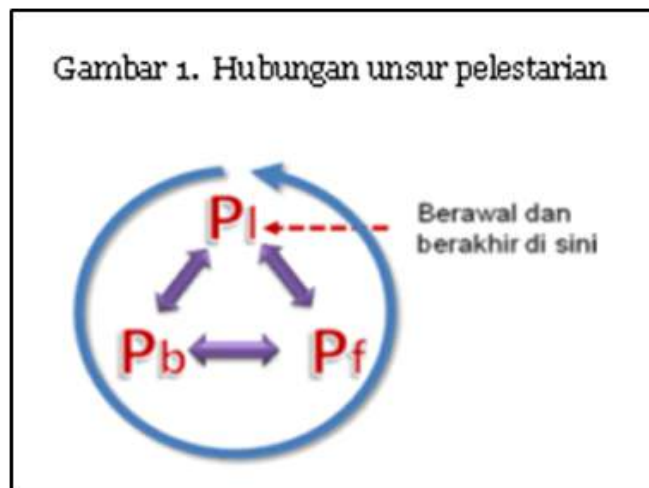
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Penyelamatan pada Benteng Kastela karena dampak kegiatan pembangunan harus dilakukan melalui kegiatan terencana dengan: didahului kajian, dilakukan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dan mempertahankan nilai penting dan sesegera mungkin dilakukan guna meminimalisasi dampak kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Bentuk pengamanan pada benteng bertujuan untuk menghentikan aktifitas pencurian, pengrusakan dan penghancuran pada sisa struktur batu benteng. Hal lazim yang dilakukan oleh masyarakat adalah pencurian batu benteng yang kemudian digunakan sebagai batu pondasi rumah. Hal ini dapat dicegah dengan memberi pagar pengamanan/ garis polisi, papan larangan (sarana informasi) dan penempatan juru pelihara dan polisis khusus.

Kajian untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona dan tata letaknya pada benteng Kastela dapat memperhatikan hal-hal berikut ;

- a. Kepentingan negara, kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat;
- b. Kepadatan serta persebaran Cagar Budaya;
- c. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
- d. Lingkungan alam, berupa :
 - Daratan;
 - Perairan;
 - Perbatasan antara daratan dengan perairan;
 - Perbatasan antara perairan dengan perairan.

Adapun kegiatan zonasi pada Benteng Kastela pada tahun 2013 oleh BPCB Ternate baru sebatas menentukan zona 1 atau zona inti dimana zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga benda, bangunan dan struktur yang paling penting yang terdapat dalam situs atau kawasan cagar budaya. Adapun kegiatan pemeliharaan yang dapat dilakukan pada Benteng Kastela adalah dengan menempatkan juru pelihara guna merawat dan menjaga sisa bangunan fisik benteng yang masih ada dan menata taman pada ruang dalam benteng. Sedangkan upaya pemugaran dapat dilakukan secara bertahap mengingat area benteng yang cukup luas serta dilakukan dibeberapa lokasi atau struktur yang masih ada dengan kata lain pemugaran yang bersifat parsial atau sebagian saja sedangkan rekonstruksi secara total dapat dilakukan diatas kertas tentu dengan kajian yang mendalam dan berkelanjutan. Secara sederhana upaya Pelestarian khususnya Pelindungan pada benteng Kastela dapat dilakukan dengan memperhatikan alur hubungan unsur pelestarian di bawah ini :



Keterangan :

Pl = Pelindungan

Pb = Pengembangan

Pf = Pemanfaatan

Pelestarian Cagar Budaya diawali dari tindakan atau perlakuan dari Pelindungan dalam hal ini penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, zonasi dan pemugaran lalu dapat dikembangkan dengan cara penelitian, revitalisasi dan adaptasi hingga akhirnya di manfaatkan sesuai dengan nilai yang terkandung pada cagar budaya tersebut seperti pemanfaatan di bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata yang nantinya diharapkan dapat menambah devisa atau nilai ekonomi bagi negara, daerah dan masyarakat sekitar cagar budaya.

Untuk dapat dimanfaatkan secara terus menerus sebagaimana konsep pelestarian tentu memerlukan pemeliharaan dan pengamanan yang baik guna kelestarian cagar budaya itu sendiri maka dari itu sebagaimana gambar di atas konsep pelestarian diawali dari Pelindungan dan juga berakhir Dipelindungan.

PENUTUP

Benteng Kastela adalah warisan budaya yang terwujud dari pemikiran dan perilaku kehidupan manusia di masa lalu yang memiliki berbagai arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Benteng Kastela kemudian menjadi cagar budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional demi semata-mata kemakmuran masyarakat luas. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa benteng Kastela kini terancam kelestariannya akibat :

1. Dijadikan lahan Perkebunan;

2. Pemanfaatan bangunan dan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai konsep pelestarian;
3. Bencana Alam (meletusnya gunung Gamalama dan rawan gempa bumi);
4. Pertambahan jumlah Penduduk;
5. Perubahan penggunaan lahan;
6. Perbedaan kebijakan;
7. Pengelolaan yang belum optimal.

Pengelolaan Benteng Kastela sebagai cagar budaya ini haruslah dilakukan secara bijaksana, mengingat warisan budaya ini tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok masyarakat yang tunggal. Benteng Kastela adalah milik semua lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan yang beragam dalam memaknai dan memanfaatkan Benteng Kastela ini. Ada kelompok masyarakat yang menilai warisan budaya sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan (untuk pengajian dan pengujian akademik), sumber sejarah (sebagai bukti peristiwa penting dalam kehidupan masyarakatnya), dari segi etnik (jatidiri dan latar belakang eksistensi suatu bangsa tertentu), dari segi estetika (menjadi bukti hasil seni yang adiluhung), maupun dari segi kepentingan publik dimana Benteng Kastela ini dapat dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta dapat menghasilkan keuntungan ekonomis (Hodder, 1999; Cleere, 1990; Little, 2002; Schiffer dan Gumerman, 1977; Tanudirjo, 2006 dalam Laporan Ekskavasi benteng Kastela 2015).

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Laporan Zonasi Benteng Kastela, 2013; Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate.

Laporan Ekskavasi Benteng Kastela, 2015; Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate.

Pelindungan, 2016; Bahan Ajar Diklat Pelestarian Cagar Budaya, Pusdiklat; Depok.

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/>

<https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>

<http://kekunaan.blogspot.co.id/2014/11/benteng-kastela.html>tgl 21-02- 2017

EVALUASI HASIL KONSERVASI LUKISAN PADA KAWASAN GUA PRASEJARAH KARST MAROS DAN PANGKEP SULAWESI SELATAN

Oleh. Iswadi

Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Abstrak

Kawasan karst Maros Pangkep yang masuk di dalam Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul) memiliki berbagai jenis potensi sumberdaya yang amat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya, tidak hanya potensi sumberdaya alam yang menghasilkan mineral, akan tetapi terdapat pula berbagai keanekaragaman hayati jenis flora dan fauna endemik serta sumberdaya budaya berupa gua-gua prasejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan masa silam. Sumberdaya budaya berupa lukisan dinding mengalami ancaman kelestariannya akibat adanya faktor lingkungan dengan berbagai macam aktivitas baik oleh alam maupun manusia di dalam area kawasan karst di wilayah Maros dan Pangkep. Sehingga diperlukan suatu upaya konservasi kawasan yang melibatkan stakeholder yang ada.

Kata Kunci: Evaluasi, Konservasi Kawasan, Lukisan Prasejarah

A. Pendahuluan

Konservasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris; *conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. Lebih jauh dirumuskan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa *kon.ser.va.si/konservasi/konsérvasi/* berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian. Sementara itu, menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003), pengertian konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan pusaka (pusaka budaya/cagar budaya) melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Hal senada juga termaktub dalam piagam International Council of Monument and Site (ICCOMOS) atau dikenal dengan nama Burra Carter tahun 1981. Konservasi dalam piagam merupakan konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau objek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Suatu

program konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya dan perawatannya namun harus mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat. (Permana, 2015:42-44).

Selanjutnya menurut The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Area yang merupakan hasil pertemuan ICOMOS tahun 2011 menyebutkan bahwa rencana konservasi harus merupakan kombinasi antara rencana pengelolaan (*management plan*) dan diikuti oleh monitoring yang permanen. Sedangkan menurut Burra Charter ICOMOS (2013) definisi konservasi adalah semua proses pelestarian ruang (warisan budaya) agar makna kultural yang ada di dalamnya terpelihara dengan baik. Prinsip-prinsip konservasi mencakup pelestarian, pengelolaan, pengetahuan, keterampilan, dan teknik. Konservasi merupakan bagian integral dari manajemen yang baik pada warisan budaya yang memiliki makna kultural (*cultural significance*). (Asmara, 2015).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kata “konservasi” memang tidak secara eksplisit dinyatakan. Namun, satu kata kunci yakni “perlindungan” terumuskan dengan baik dan jelas melingkupi maksud, tujuan dan sekaligus cara konservasi. Pada pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan cagar budaya ini sendiri merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya, serta mencegah dari kerusakan/kehancuran/kemusnahan karena faktor manusia dan/atau alam. Secara eksplisit disebutkan di dalam aturan perundangan di atas, cagar budaya yang dimaksud mencakup benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan.

Konservasi dalam arkeologi adalah pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan lebih lama dengan tetap mempertahankan makna kulturalnya. Kegiatan konservasi di bidang ini meliputi; pemeliharaan berkesinambungan (*maintenance*), pengawetan objek tanpa melakukan perubahan (*preservation*), mengembalikan objek pada keadaan sebenarnya tanpa menggunakan bahan baru (*restoration*), mengembalikan objek pada keadaan mendekati aslinya dengan bukti-bukti yang ada baik bukti fisik maupun bukti tertulis (*reconstruction*),

dan memodifikasi objek sesuai dengan penggunaannya (adaptation). (Taufik, 2005 dalam Suhartono, 2008:11).

Dari beberapa definisi tentang konservasi di atas paling tidak mengacu pada 4 (empat) hal yaitu: (1). Konservasi adalah pelestarian atau pemeliharaan dan perlindungan untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan serta menjaga kesinambungannya tinggalan arkeologi, (2). Upaya pengelolaan sumberdaya budaya atau tinggalan arkeologi berupa situs dan lingkungannya agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (3). Pengembangan dan pemanfaatan tinggalan arkeologi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat serta dalam usaha tersebut tetap memperhatikan kelestarian situs dan kawasannya. Dan (4) konservasi yang dilakukan pada objek harus mendekati aslinya yang disertai dengan bukti fisik dan tertulis.

Situs dan Kawasan Cagar Budaya tercantum di dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun tentang Cagar Budaya, berbunyi: Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kemudian pada ayat (6) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Dalam makalah ini, akan dibahas lebih lanjut tentang situs dan kawasan gua/ceruk, tebing prasejarah yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya gua/ceruk prasejarah yang terdapat di dalam kawasan karst Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan yang memiliki lukisan (gambar) dinding.

Di Indonesia lukisan dinding pada gua/ceruk dan tebing ditemukan hampir disemua pulau-pulau besar antaralain di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua kecuali di Pulau Jawa. Selain itu, lukisan prasejarah juga ditemukan pada pulau-pulau kecil lainnya, sebut saja misalnya Pulau Muna (Sulawesi Tenggara), Pulau Kei dan Seram (Maluku) (Prasetyo, 2012). Di Pulau Sumatera, lukisan dinding gua ditemukan di Gua Harimau pada tahun 2008 dan mulai diteliti pada tahun 2009, gua tersebut terletak di daerah Padangbindu, Baturaja, Sumatera Selatan, ditemukan berupa lukisan tentang proses ritual dalam konsepsi kepercayaan (Sumakyu, 2013). Identifikasi terhadap gambar cadas di dinding timur dan dinding barat di situs Gua Harimau tahun 2010 oleh Pindi Setiawan sebanyak 25 motif gambar cadas yang umumnya berbentuk geometris menggunakan kuasan jari dan alat runcing, gambar cadas tersebut berwarna merah gelap atau coklat gelap. Tahun 2011 pengamatan dilakukan kembali oleh Adhi Agus Oktaviana dan Pindi Setiawan yang menambahkan sebanyak enam motif geometris di relung Galeri Wahyu (nama penemu gua dan lukisannya yang kemudian diabadikan dalam nama panel lukisan). Adhi Agus Oktaviana kembali melakukan pengamatan pada bulan Maret 2014 untuk mengidentifikasi kondisi gambar

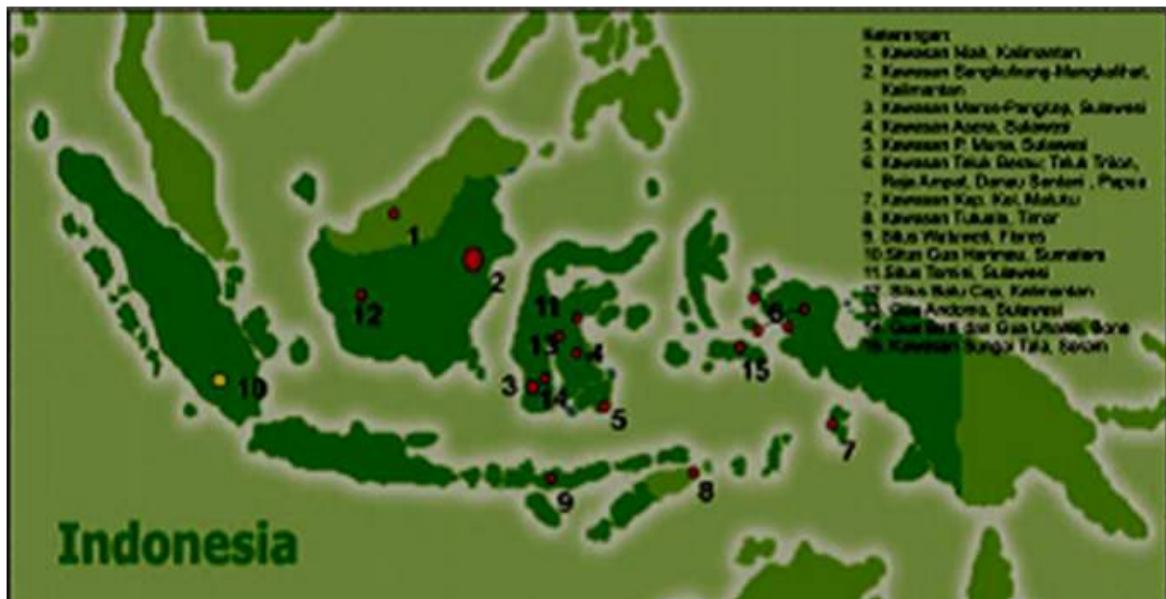
cadas dan ditemukan 18 motif pada panil selatan Galeri Wahyu dan pada bagian atas temuan tahun 2009-2010 di Galeri Barat. (Oktaviana, 2015:4-5).

Di Pulau Kalimantan ditemukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Di wilayah Kalimantan Timur ditemukan di wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur, pada kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat, seperti Gua Tewet, Ham, Saleh, Karim dan sebagainya, dari hasil kegiatan pendataan dan deliniasi dalam 2 (tahap) ditemukan tidak kurang dari 64 gua, bentuk lukisan berupa Gambar cadas di gua-gua prasejarah yang terdapat di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat, berwarna merah dan ungu tua ini, didominasi oleh imaji cap-(telapak) tangan, yang dibuat dengan cara semburan cat, baik lewat mulut maupun tulang binatang, terdapat pula lukisan telapak tangan bayi, anak-anak, perempuan atau laki-laki yang digambarkan dengan garis yang saling berkaitan, dan dikomposisikan dengan penuh pertimbangan desain. (Mulyadi, 2016). Di Kalimantan Barat di wilayah Kabupaten Kayong Utara, lukisan dinding ditemukan di Gua Bercap. Kemudian di Desa Sungai Sungkang Kabupaten Sambas, ditemukan di situs Gua Tengkeyu, Batu Bakil, dan Batu Kadok. Ditemukan lukisan yang digoreskan pada batu karang dengan motif pedang, mata tombak, dan perisai, perkakas, burung, serta manusia. Di lokasi lain yaitu Liang Kaung, Kapuas Hulu. Motif lukisan yang ditemukan di Saba berupa gambar matahari, panah, ikan, antropomorfik, genderang, biawak, dan rusa.

Kelompok Maluku ditemukan di sekitar Pulau Seram (Maluku Tengah), Kepulauan Kei (Maluku Tenggara). Lukisan di Pulau Seram di sepanjang Teluk Seleman dengan warna merah berbentuk Cap-cap tangan, hewan dan manusia. Kemudian di Pulau Kei ditemukan lukisan berbentuk manusia, topeng, burung, matahari, perahu dan Geometri. Kemudian di sekitar Kampung Dudumahan, pantai utara Pulau Nuhu Rowa ditemukan lukisan dalam bentuk manusia, ikan, topeng, perahu, matahari, dan bentuk geometris.

Di Pulau Papua ditemukan di sepanjang tepi pantai maupun di bagian pedalaman. Ditemukan di sekitar Teluk Speelman di sebelah Selatan Fak-Fak ditemukan sejumlah lukisan dinding, kemudian ditemukan juga di sepanjang pantai seperti di Teluk Berau, Pulau Ogar, dan Teluk Arguni. Di Teluk Berau ditemukan lukisan dinding berupa cap-cap tangan dan kaki yang ditaburi cat merah. Ditemukan juga di sepanjang Teluk Bitsyari dan Teluk Triton masuk wilayah Kaimana, lukisan yang ditemukan dalam bentuk abstrak. (Prasetyo, 2012:233-235).

Keberadaan lukisan dinding pada gua dan ceruk prasejarah di Pulau Sulawesi, tersebar di 3 (tiga) propinsi yaitu Sulawesi Tengah, Tenggara dan Selatan. Di wilayah Sulawesi Tengah terdapat di Kabupaten



Peta 1. Persebaran Gua Prasejarah di Indonesia
 Sumber: Adhi Agus Oktaviana 2016 (diolah dari Arifin dan Delanghe)

Morowali Utara di dalam kawasan karst perairan Teluk Tolo, ditemukan pada 3 (tiga) gua yaitu Gua Pengia, Batu Putih, dan Ganda-ganda, temuannya berupa 3 (tiga) lukisan cap tangan berwarna merah. (Hidayat, 20016).

Di wilayah Sulawesi Tenggara temuan ini, tersebar di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Muna. Di Kabupaten Konawe Utara diantara 8 (delapan) gua prasejarah, lukisan dinding hanya ditemukan pada 2 (dua) gua yaitu di Gua Anabahi Desa Bende Watu Kecamatan Oheo, temuannya berupa lukisan dinding berwarna merah dan hitam berjumlah 22 (duapuluh dua) buah, berupa cap tangan, dan garis-garis 4 (empat) buah. Sedangkan di Gua Pondo Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano, ditemukan lukisan berwarna merah sebanyak 48 (empatpuluh delapan) buah, berupa gambar manusia, perahu, hewan, garis-garis, dll. (Anonim, 2014).

Selain itu ditemukan juga di kawasan gua prasejarah Kabupaten Muna, menurut hasil penelitian Balai Arkeologi Makassar tahun 2010 pada gua prasejarah Muna pada 4 (empat) gua/ceruk yaitu di Gua Wabose, Gua Toko, dan Ceruk Lakuba Desa Liang Kobori Kecamatan Lohia. Pada Gua Wabose ditemukan 65 gambar lukisan dinding. Beberapa di antaranya dapat diidentifikasi jenisnya seperti gambar manusia menunggang kuda, gambar matahari, gambar cap tangan (hand stencil), gambar yang menyerupai kemaluan perempuan, dan gambar lipan. Pada Gua Toko, ditemukan Gambar yang tertera di dinding gua yang paling dominan adalah gambar manusia menunggang kuda, disamping gambar berupa pemburu dan penari. Warna lukisan didominasi warna merah dan sebagian kecil berwarna hitam. Secara keseluruhan jumlah gambar yang tersebar di dinding gua sebanyak 57 yang terdiri

atas, 23 gambar manusia, 18 manusia berkuda, 2 gambar adegan menari, 2 gambar binatang (kuda), 2 gambar flora (kelapa?), dan 10 gambar yang tidak diketahui. Sedangkan pada Ceruk Lakuba ditemukan sebanyak 16 buah dengan rincian, 10 gambar manusia, 1 gambar manusia berkuda, 2 gambar manusia perahu, dan 3 gambar yang tidak diketahui karena bagian-bagiannya sudah hilang.

Kegiatan Pendataan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar di kawasan gua/ceruk prasejarah Muna pada tahun (2014) pada 14 (empatbelas) yakni: Liang Metanduno, Ceruk Idamalanga, Liang Kabori, Liang Lakolumbu, Ceruk Lansarofa 1, Liang Lansarofa 2, Liang Pominsa, Ceruk Sugi Patani, Ceruk panda, Ceruk Lasabo, Ceruk Latanggara, Liang Wabose, Liang Toko dan Ceruk Lakuba. Lukisan dinding baik yang berwarna merah, coklat dan hitam berupa gambar manusia kangkang-jongkok, manusia naik perahu, gambar perahu layar lengkap dengan dayung, gambar hewan seperti rusa, lipan, kura-kura, ular, sapi?, kambing?, kadal, biawak, gambar pohon, layang-layang dan cap-cap tangan. Kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan survei penyelamatan pada tahun 2015 pada lokasi yang sama dilakukan pada 8 gua dan ceruk yaitu Gua Metanduno, Gua Kabori, Ceruk Idhamalanga, Ceruk La Uhu, Ceruk Lansirofa dan Gua Lansirofa 2, Gua Lakolumbu, Gua Pominsa 1 dan 2.

Di Sulawesi Selatan sebaran gua prasejarah yang memiliki lukisan dinding, tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur terdapat di Gua Andomo, kemudian di Kabupaten Bone ditemukan di Desa Langi yaitu di Gua Uhallie dan Gua Batti. Kemudian di kawasan gua prasejarah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep di dalam kawasan karst Maros-Pangkep,

data terakhir ditemukan 126 gua/ceruk di dalamnya terdapat 88 buah gua yang memiliki lukisan dinding.

Keberadaan tinggalan arkeologi atau warisan budaya berupa lukisan dinding yang terdapat padagawa maupun ceruk prasejarah di dalam kawasan karst Maros-Pangkep, perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Selain itu, warisan budaya bersifat benda (tangible) ini merupakan sumberdaya budaya yang tak-terbaharui (non-renewable), terbatas (finite), dan khas (contextual), rentan mengalami kerusakan, hilang, dan bahkan musnah. Warisan budaya ini diteruskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang dan mendatang. (Tanudirjo, tanpa tahun: 1-3). Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjamin melestarikannya baik berupa situs dan lingkungannya, maupun nilai penting

species Kupu-kupu yang beberapa diantaranya merupakan jenis endemik. (Anonim, 2001).

Kawasan karst ini merupakan tangki raksasa yang menyimpan cadangan air yang melimpah, yang tidak hanya digunakan sebagai sumber air minum juga sebagai sumber air bagi areal pertanian di sekitarnya terutama areal persawahan dengan sistem irigasi. Tidak hanya itu kawasan ini juga kaya dengan cadangan batuan kapur/gamping yang digunakan untuk industri semen (saat ini berdiri PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Bosowa), selain itu batuan gamping sebagai bahan baku pengolahan marmer, saat ini telah paling tidak terdapat puluhan perusahaan tambang marmer baik yang berskala kecil maupun besar di Kabupaten Maros-Pangkep, yang telah melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di dalam kawasan karst Maros dan Pangkep.



Foto 1. Kawasan Karst yang menyimpan banyak potensi; hidrologi, keanekaragaman hayati (flora dan fauna), arkeologi, tambang, pariwisata, pendidikan dll. Sumber: BPCB Sulawesi Selatan.

yang terkandung dibalikny warisan budaya tersebut.

B. Permasalahan

Bentang lahan perbukitan kawasan karst Maros-Pangkep yang memanjang dari selatan ke utara, pada dasarnya merupakan satu kesatuan kawasan karst, dan mengandung satu kesatuan budaya yang tidak terpisahkan oleh batas administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Secara astronomis terletak pada $S4^{\circ} 42' 49'' - 5^{\circ} 06' 42''$ dan $E119^{\circ} 34' 17'' - 119^{\circ} 55' 13''$. (Anonim, 2011c: 5). Kawasan karst Maros dan Pangkep memiliki keindahan panorama alamnya yang tidak adanya duanya di Indonesia, selain itu kawasan ini mempunyai keunikan geologinya (geodiversity) dan keanekaragaman hayati (biodiversity) juga sangat kaya. Kawasan ini berada pada Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung (babul) di Kabupaten Maros dan Pangkep, di dalamnya terdapat tidak kurang dari 284 species tumbuhan berkayu, 103

Disamping itu, pemanfaatan batuan kapur/gamping digunakan juga sebagai bahan pondasi rumah, pembuatan jalan dan sebagainya. Potensi keindahan dan panorama alam khas kawasan karst, menyimpan keanekaragaman hayati, selain itu juga memiliki gua-gua prasejarah dengan segala jenis lukisan dinding di dalamnya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dimanfaatkan sebagai wisata alam seperti wisata alam permandian Bantimurung dan wisata alam Rammang-Rammang Kabupaten Maros dan wisata budaya seperti Taman Prasejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros dan Taman Prasejarah Sumpang Bitu dan Taman Prasejarah Biring Ere di Kabupaten Pangkep. Terakhir di dalam kawasan juga dihuni oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas, yang mendiami lahan di luar taman nasional Bantimurung Bulusaraung, namun tidak menutup kemungkinan dikemudian hari seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, dikuatirkan akan areal sekitar gua-gua prasejarah

menjadi area alternatif baru untuk areal permukiman, sehingga kawasan sekitar karst semakin padat dengan perumahan penduduk. Hal semacam itu akan menjadi ancaman tersendiri terhadap kawasan karst dan situsnya.

Berbagai macam permasalahan di atas, perlu mendapat perhatian yang besar dari berbagai stakeholder yang terkait tidak hanya di daerah tetapi juga di pemerintah pusat, perlunya koordinasi lintas sektoral dalam melakukan upaya pelestarian yang berkelanjutan dan pengelolaan yang terpadu di dalam kawasan karst Maros-Pangkep, agar berbagai macam potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, tanpa merugikan kepentingan yang lainnya. Hal lain yang harus dilakukan adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi sedini mungkin dan perlunya solusi agar pemanfaatan kawasan karst ini dapat dimanfaatkan dalam batas-batas tertentu yang tidak mengancam kelestarian baik alam dan tinggalan budaya di dalamnya.

Khusus untuk lukisan dinding pada gua prasejarah kawasan karst Maros-Pangkep, permasalahan utama yang terjadi adalah lukisan mengalami kerusakan karena proses pelapukan dan pengupasan kulit batuan yang terus berlanjut. Lukisan pada dinding gua prasejarah umumnya mengalami kerusakan yang sama, selain terjadi pengupasan juga terjadi retakan mikro dan makro. Disamping itu di beberapa gua, lukisan mulai memudar utamanya lukisan yang berada di mulut gua. Demikian juga proses inkristasi (pengendapan kapur) yang terus berlanjut. Selain itu adanya aktivitas pengunjung yang melakukan vandalisme berupa coretan dan goresan pada lukisan gua. Untuk itu diperlukan upaya konservasi untuk menghambat kerusakan yang terjadi pada lukisan dinding gua prasejarah sehingga keberadaan lukisan ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. (Suhartono, 2012: 497-498). Disamping itu perubahan atau alih fungsi lahan akibat okupasi yang berlebihan oleh masyarakat dan aktivitas tambang menjadi faktor lainnya yang turut menyumbang laju kerusakan lingkungan dan ekosistem gua, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kerusakan lukisan dinding gua Maros-Pangkep.

C. Pembahasan

1. Potensi Tinggalan Arkeologi (Lukisan dinding gua)

Potensi tinggalan arkeologi atau warisan budaya yang dimiliki oleh kawasan karst Maros-Pangkep berupa gua prasejarah berjumlah 126 situs dan 1 situs terbuka di pelataran Leang Sakapaodi Kabupaten Pangkep. Berdasarkan wilayah administratif, gua-gua prasejarah ini, terdapat di Kabupaten Maros tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bontoa, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Bantimurung. Sedangkan di Kabupaten Pangkep berada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Balocci, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, dan Kecamatan Tondong Tallasa. (Anonim, 2011c:5-6).

Gua-gua prasejarah itu tidak hanya memiliki tinggalan

berupa artefak batu, sampah dapur (kjokekemodding), tulang dan tembikar, tetapi lebih dari itu gua-gua tersebut memiliki tinggalan seni prasejarah berupa lukisan (gambar) pada dinding gua maupun ceruk yang tidak banyak dijumpai di wilayah Indonesia. Berdasarkan pada sebaran dan pengelompokannya kemudian dapat dibagi menjadi sub-sub kawasan gua prasejarah maupun satuan gua yang berdiri sendiri yang memiliki tinggalan lukisan dinding. Diuraikan sebagai berikut:

- a. Sub Kawasan Samangki terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 328,3 Haterdiri dari 5 gua prasejarah yaitu : Leang Jarie*, Tampuang*, Saripa, Karrasa dan Kado*.
- b. Sub Kawasan Leang-Leang terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 710,8 Haterdiri dari 19 gua prasejarah yaitu : Leang Burung 1*, Burung 2*, Pangia*, Sampaeng*, Bettue (Tompobalang)*, Ulu Leang*, Ambe Paco*, Elle Pusae, Ulu Wae*, Pajae, Pattae*, Petta Kere*, Tinggi Ada*, Barang Tedong 1*, Bara Tedong 2*, Alle Bireng, Pellenge*, Bara Jarang*, dan Pabbuno Juku*.
- c. Sub Kawasan Lopi-Lopi terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 344,9 Haterdiri dari 18 gua prasejarah yaitu : Leang Lompoa, Bettue (Lopi-Lopi), Bembe*, Timpuseng, Batu Karope*, Bulu Tungke'e*, Barugayya*, Palimukang (Pakalu), Tanre, Cabbu, Balang, Jing*, Sengkae*, Batabatae, Paccepacce, Bulu Batu, dan Boddong*.
- d. Sub Kawasan Samongkeng terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 3,3 Ha terdiri dari 4 gua prasejarah yaitu : Leang Samongkeng 1*, 2*, 3, dan 4*.
- e. Sub Kawasan Lambatorang terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 66 Haterdiri dari 3 gua prasejarah yaitu : Leang Lambatarong*, Pucu*, dan Wanuwae*.
- f. Sub Kawasan Bulu Kamase terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 101,9 Haterdiri dari 6 gua prasejarah yaitu : Leang Tenggae*, Bulu Kamase*, Panampu 1*, 2, Bunga Eja 1 dan 2.
- g. Sub Kawasan Mandauseng terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 53,1 Haterdiri dari 2 gua prasejarah yaitu : Leang Mandauseng* dan Botto*.
- h. Sub Kawasan Rammang-Rammang terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 280,3 Haterdiri dari 3 gua prasejarah yaitu : Leang Batu Tianang*, Karama (Akkarasaka)*, dan Pasaung*.
- i. Sub Kawasan Bulu Sippong terletak di Kabupaten Maros dengan luas area 57,4 Haterdiri dari 5 gua prasejarah yaitu : Leang Sippong 1*, 2*, 3*, Monroe* dan Cempae*.
- j. Sub Kawasan Sumpang Bitu terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 149,7 Haterdiri dari 2 gua prasejarah yaitu : Leang Bulu Sumi* dan Sumpang Bitu*.
- k. Sub Kawasan Balocci terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 400,7 Haterdiri dari 3 gua prasejarah yaitu : Leang Alla Masigi*, Battae-Battae*, dan Pakkataliu*.
- l. Sub Kawasan Bellae terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 1.433,1 Haterdiri dari 31 gua prasejarah

yaitu : Leang Ulu Tedong*, Lamperangang, Sapiria*, Batanglamara*, Sassang*, Ujung*, Bujung, Carawali*, Buluribba*, Cammingkana*, Bawie, Pelataran Je'netaesa, Sakapao 1*, 2*, Tanarajae, Pattenung*, Jempang, Kajuara*, Kassi*, Lompoa*, Caddi*, Bubbuka, Tinggia*, Buto*, Lessang, Tuka 1, 2*, 3,4,5, dan Cumilantang*.

m. Sub Kawasan Siloro terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 334,5 Haterdiri dari 8 gua prasejarah yaitu : Garunggung*, Bujung Dare'*, Saluka*, Taboro*, Kappara*, Takeppung*, Sumpang Siloro*, dan Macinna.

n. Sub Kawasan Leangnge terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 119,2 Haterdiri dari 2 gua prasejarah yaitu :Leang Leangnge 1 dan 2.

o. Sub Kawasan Labbakang terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 166,3 Haterdiri dari 10 gua prasejarah yaitu : Leang Barayya*, Pappanaungang 1*, 2*, Cinayya*, Bawang Leangnge*, Lasitae*, Pamelakkang Tedong*, Bulu Bellang*, Parewe*, dan Pa'bujang-Bujangang*.

p. Sub Kawasan Biring Ere terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 37,4 Haterdiri dari 2 gua prasejarah yaitu : Leang Biring Ere 1 dan 2*.

q. Leang Nippong* terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 267,7 Ha.

r. Leang Pising-Pising terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 21,5 Ha.

s. Leang Tagari* terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 29,2 Ha.

t. Leang Kahu* terletak di Kabupaten Pangkep dengan luas area 58,8 Ha. (Anonim, 2011a).

Keterangan : * Leang (gua) yang memiliki lukisan dinding.

Dari keseluruhan gua-gua prasejarah yang terdapat di dalam kawasan karst Maros-Pangkep, ditemukan gua yang memiliki lukisan dinding di Kabupaten Maros, yang memiliki lukisan dinding berjumlah 45 gua sedangkan di Kabupaten Pangkep terdapat 43 gua yang memiliki lukisan dinding dari 126 gua di dalam kawasan tersebut. Di Kawasan Karst Maros-Pangkep, terdapat 16 Sub-Kawasan gua prasejarah dan 4 Satuan Situs gua. Luas lahan kawasan gua prasejarah di Kabupaten Pangkep 2.774,1 Ha dan di Kabupaten Maros seluas 1.936,7 Ha dengan luas keseluruhan Kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep 4.710,8 Ha.

Berbagai macam lukisan dinding pada gua dan ceruk prasejarah di dalam kawasan karst Maros-Pangkep, yang ditemukan lukisan manusia berwarna merah dan hitam, gambar hewan dan binatang darat seperti babi rusa, anoa, kuda, ayam, ular, lipan dll. Kemudian cap-cap tangan orang dewasa dan anak-anak berjari lengkap, empat dan tiga yang berbentuk bulat maupun runcing dan telapak kaki berwarna hitam dan merah. Gambar-gambar abstrak, geometris yang berwarna hitam dan merah. Gambar hewan/fauna air tawar maupun hewan laut seperti gambar berbagai jenis ikan, ubur-ubur dan penyu yang berasosiasi dengan temuan lainnya. (Handayani, 2015:216-217).

2. Faktor Ancaman dan Tingkat Keterancaman

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sampai dengan 2015. Faktor penyebabnya kerusakan dan pelapukan lukisan dindingsitus (lukisan dinding) dan lingkungannya dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu: (1).

Faktor Internal, yaitu faktor bersumber dari sifat/kelemahan bawaan yang menyatu di dalam situs sendiri, yaitu: bahan, desain, dan teknologi, tanah dasar, lokasi geotopografis, dan iklim setempat dan (2). Faktor Eksternal, adalah faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan yang melingkupi situs dan kawasannya yang antara lain berupa:

Bagan 1. Faktor Ancaman situs dan kawasan gua prasejarah Maros-Pangkep

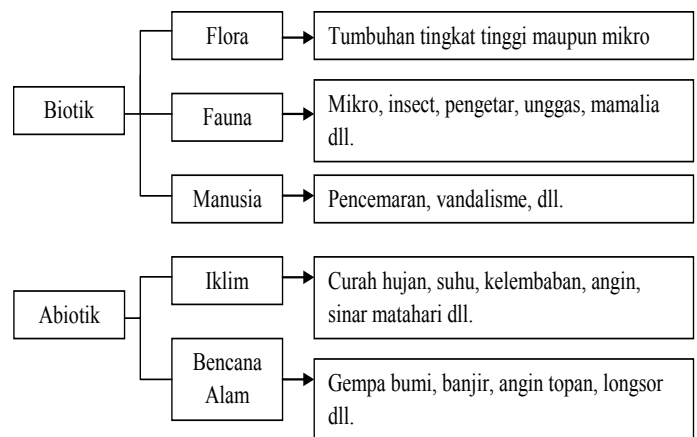


Foto 2. Lukisan dinding Leang Petta, Leang Jarie, Petta Kere, Lambatorang Kabupaten Maros. Sumber: Bpcb Sulawesi Selatan.

Beberapa faktor lingkungan—baik alami maupun budayawi—yang diidentifikasi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada situs dan lingkungannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor lingkungan yang mengancam kelestarian Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep

No	Jenis Aktivitas	Dampak Yang Dapat Ditimbulkan
1	<p>Alam: Hujan</p> <p>Angin</p> <p>Suhu dan Kelembaban</p>	<p>Banjir, erosi, abrasi, kelembaban, dll.</p> <p>Tekanan, debu dan material halus lainnya</p> <p>Fluktuasi suhu dan kelembaban dapat menyebabkan retak, pengelupasan, dan pelapukan pada batu.</p>
2	<p>Budaya: Penambangan</p> <p>Pertanian</p> <p>Pengunjung</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kerusakan ekosistem karst; struktur gamping, getaran, debu, vegetasi, fauna, suhu dan kelembaban, siklus air/hidrologi, asap mesin (CO₂), dll.</p> <p>Pembakaran, pembukaan dan pengolahan tanah,</p> <p>Vandalisme, sampah, dll.</p> <p>Getaran, asap mesin (CO₂), pembuatan jalan baru dll.</p>

Sumber: Laporan Pemintakatan Gua-Gua Prasejarah Karst Bantimurung Kab. Maros tahun 2007a dan Pemintakatan Gua Prasejarah Bellae Kab. Pangkep 2007b.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ancaman utama datang dari aktivitas budaya (manusia), yaitu terutama pada konversi lahan dan penggunaan bahan-bahan yang tak ramah lingkungan. Konversi lahan yang mengancam adalah perubahan fungsi kawasan karst menjadi kawasan industri pertambangan, perambahan hutan untuk ekstensifikasi pertanian, terutama untuk kebun pada lereng lereng perbukitan karst. Namun demikian yang paling mengancam adalah perluasan aktivitas industri pertambangan dengan menjadikan batu gamping sebagai bahan baku industri kapur, semen dan marmer.

Pengaruh alam terutama datang dari aktivitas air dan hujan, pemanasan matahari, angin, serta fluktuasi suhu dan kelembaban yang kesemuanya saling berkaitan, namun tidak akan memberikan pengaruh yang besar sepanjang kondisi lingkungan di sekitarnya masih baik. Ekosistem karst yang stabil memberikan lingkungan alam yang ramah bagi kelestarian situs-situs yang ada di dalamnya, hal ini terbukti dengan masih bertahannya lukisan-lukisan dinding selama ribuan tahun. Namun perkembangan populasi manusia akhir-akhir ini ternyata menyebabkan menurunnya kualitas lukisan secara cepat. Dengan demikian pengaruh lingkungan alam masih juga bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan lingkungan karst sebagai media pelestarian situs.

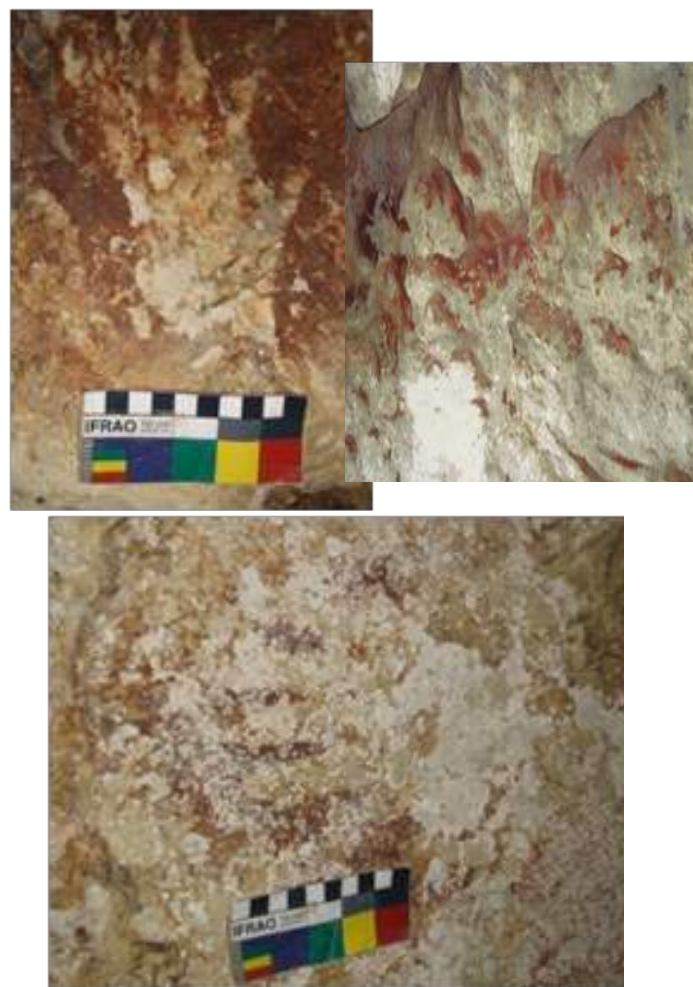


Foto 4 .Kerusakan dan pelapukan yang terjadi lukisan dinding. Sumber: Bpcb Sulawesi Selatan.

Selanjutnya aktivitas pengunjung juga memberikan dampak negatif terhadap usaha pelestarian kawasan situs, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian situs. Demikian juga pada bidang kemasyarakatan, aktivitas pertanian memang masih memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan situs, namun hal ini dapat dipahami karena ini menyangkut masalah pencaharian.



Foto 5. Aktivitas Vandalisme pada lukisan dan dinding gua. Sumber: Bpcb Sulawesi Selatan.

Melihat seluruh faktor tersebut di atas, ternyata aktivitas pertambangan masih berpeluang memegang peranan yang paling dominan dalam menghambat usaha pelestarian situs-situs prasejarah kawasan karst Maros-Pangkep. Hal ini disebabkan aktivitas ini memberikan efek berantai pada lingkungan karst, baik secara langsung maupun tidak. Meskipun untuk sementara waktu, Kawasan karst Maros-Pangkep belum dirambah namun peluang tersebut masih terbuka sepanjang tidak ada keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mencegahnya.



Foto 6. Aktivitas penambangan batu gamping untuk bahan industri marmer di Kawasan karst Maros. Sumber: Bpcb Sulawesi Selatan.

Besarnya pengaruh aktivitas tambang ini masih diikuti lagi dengan pengembangan kawasan untuk infrastruktur yang menunjang kelancaran industri, seperti pembangunan jalan, pabrik dan fasilitas lain. Tidak berhenti sampai disitu, beroperasinya mesin-mesin tambang tersebut diikuti dengan pencemaran udara, air, tanah dan lain-lain. Lingkungan karst dapat terganggu keseimbangannya, getaran akibat peledakan dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi material batuan gamping sebagai penyusun karst. Selanjutnya dapat pula menyebabkan punahnya berbagai jenis vegetasi maupun fauna yang langka atau endemik. Yang paling mengkhawatirkan adalah terganggunya siklus air/hidrologi yang tidak saja memberikan pengaruh buruk terhadap situs, namun lebih luas pada masalah kebutuhan masyarakat akan air bersih dan pertanian.

Penelitian dan kajian tentang faktor penyebab kerusakan dan pelapukan lukisan di kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep, telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya sebut saja misalnya Muhammad Kadafi (2000)

meneliti tentang pengaruh getaran dari adanya peledakan batuan kapur (karst) untuk industri semen di sekitar gua prasejarah Maros dan Pangkep, efek dari adanya getaran dalam proses peledakan batuan kapur/gamping dapat mempercepat laju kerusakan pada lukisan dinding. Kemudian, Asmunandar (2001) meneliti tentang pengaruh polusi asap terhadap kelestarian situs gua prasejarah di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep baik yang ditimbulkan oleh asap dari industri semen atau asap dari kendaraan, adanya asap yang terbawa sampai masuk ke dalam gua, oleh angin dan membawa partikel minyak fosil dapat menyebabkan kerusakan pada lukisan dinding. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Yudi Suharto dkk (2008), mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan kerusakan dan pelapukan lukisan prasejarah adalah pertama, karena pengaruh kerusakan lingkungan baik pada lingkungan makro sekitar gua maupun lingkungan mikro atau di gua. Kedua, pengaruh musim baik musim hujan dan musim kemarau merupakan penyebab selanjutnya. Ketiga, pengaruh keletakan sangat mempengaruhi laju

kerusakan dan kelestariannya.

3. Upaya Pelestarian Kawasan Gua Prasejarah Karst Maros-Pangkep

Serangkaian upaya konservasi (diartikan upaya pelestarian) kawasan gua prasejarah Maros-Pangkep, yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan antarlain dalam bentuk pemeliharaan dengan penempatan juru pelihara pada kawasan ini, hal ini dilakukan untuk menjamin keterawatan, kebersihan, keamanan situs gua prasejarah, upaya yang lain adalah dalam aspek perlindungan dan pengamanan adalah pembuatan pagar pengaman (kawat duri) yang mulai intens dilakukan pada tahun 90an, pembuatan papan peringatan (larangan), pengangkatan petugas pengamanan dan polsus, pembuatan pos jaga. Selain itu pembebasan lahan situs seperti di Kawasan Taman Prasejarah Sumpang Bitu (leang bulu bitu dan leang bulu sumi), taman prasejarah leang-leang (leang pettae dan leang petta kere), dan lain-lainnya.

Kegiatan perlindungan yang lainnya adalah memasukkan gua (leang) yang ada ke dalam inventaris (database), kemudian pada tahun 2007 dan 2011 diadakan zonasi (zoning) pada kawasan gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep, yang menghasilkan area perlindungan utama situs gua dan kawasannya berupa zona inti dan zona penyangga, zona pengembangan dan penunjang untuk kepentingan pengembangan potensi dan pemanfaatan situs dan kawasannya untuk kepentingan lainnya, seperti pariwisata, permukiman, pertanian dsb. Berikutnya adalah kajian sosial budaya kawasan karst pada tahun 2011. Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti di tahun yang sama dengan kegiatan deliniasi kawasan gua prasejarah karst Maros dan Pangkep yang menghasilkan 16 sub kawasan dan 4 satuan situs gua yang berdiri sendiri. Kajian pelestarian cagar budaya kawasan gua prasejarah Bellae pada tahun 2015 pada beberapa gua seperti Leang Caddia, Leang Lompoa, Leang Kajaura dan Leang Sakapoa dan beberapa gua lainnya.

Kegiatan publikasi dan dokumentasi. Kegiatan publikasi berupa pembuatan brosur, leaflet, pembuatan buku direktori gua-gua prasejarah kawasan karst Maros dan Pangkep pada tahun 2007. kegiatan pendataan (updating) tahun 2009 di gua-gua prasejarah Maros-Pangkep. Kegiatan sosialisasi cagar budaya, kegiatan dokumentasi pada gua, pembuatan film dan pemutaran film tentang pentingnya pelestarian cagar budaya khususnya tinggalan gua prasejarah di wilayah ini. Serta diikuti dengan kegiatan pendokumentasian total pada tahun 2015, di beberapa gua di Maros dan Pangkep seperti di Leang Kassi, Leang Burung dan Leang Sakapao, bekerjasama dengan Balai Konservasi Borobudur dengan menggunakan laser scan 3D, untuk merekam bentuk morfologi gua beserta dengan lukisan dinding yang ada di dalamnya secara tiga dimensi. Kegiatan pengembangan dan revitalisasi pada tiga kawasan yaitu kawasan gua prasejarah Sumpang Bitu, Leang-Leang dan Biring Ere. Kegiatan destinasi wisata

bekerjasama sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pembuatan master plan dan ded (detail engineering design) pada kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep. Terakhir upaya lain yang dilakukan adalah koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait yaitu Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup dan pelibatan Balai Konservasi Borobudur dalam aspek konservasi lukisan dinding. Kegiatan kerjasama penelitian dengan Balai arkeologi Makassar, Puslit Arkenas dan Australian National University (ANU). Pelibatan akademisi dari Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin dalam merancang model pelestarian kawasan gua-gua prasejarah Maros dan Pangkep.

4. Penanganan Fisik Lukisan Dinding Gua

Kegiatan semacam ini mulai dilakukan pada tahun 1985 oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Sulawesi Selatan dan Tenggara, berupa konservasi lukisan perahu Leang Bulu Bitta dan babi di Leang Petta Kere yang mulai memudar dan bahkan terkelupas. Upaya mengembalikan keutuhan lukisan/gambar tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan kimia antara lain Barium Karbonat dan Resin Ciba EP-IS (Samidi, 1985 dan 1986). Menurut informasi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makasar, pada tahun 1998, Sadirin, mengadakan percobaan dengan menggunakan bahan organik untuk konservasi lukisan. Hasil yang diperoleh, bahan yang digunakan tersebut hanya mampu bertahan beberapa bulan.

Kemudian pada tahun 2008, Balai Konservasi Borobudur melakukan kajian konservasi lukisan gua prasejarah di Maros dan Pangkep. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan kerusakan dan pelapukan yang terdapat pada lukisan dinding gua dan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan yang terjadi. Kemudian ini, hal ingin diketahui adalah bahan yang digunakan untuk melukis dan mencari alternatif bahan pengganti apa yang aman yang dapat digunakan untuk merekonstruksi lukisan dinding gua yang mengalami kerusakan. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka digunakan analisis laboratorium, analisis uji bahan pengganti lukisan, uji bahan permukaan lukisan dinding.

Uji kekuatan bahan pengganti dan bahan permukaan lukisan dinding gua dan uji petrografi serta uji lab. Kimia. Di Kabupaten Maros dilakukan pada 9 guadiantara 45 gua (leang) yang memiliki lukisan dinding, yaitu Leang Pettae, Petta Kere, Burung, Jing, Barugayya, Karrassa, Sampeang, Jing dan Wanuwae. Di Kabupaten Pangkep dilakukan pengamatan dan pengambilan data pada 7 gua diantara 43 yaitu Leang Sakapao, Kajuara, Kassi, Lompoa, Pattennung, Bulu Sumi dan Sumpang Bitu.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengamatan langsung pada gua-gua di Kabupaten Maros dan Pangkep, dapat diketahui beberapa faktor penyebab kerusakan dan

pelapukan pada lukisan gua, disimpulkan sebagai berikut:

a. Lukisan dinding pada gua-gua prasejarah telah banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh : (a). Kerusakan lukisan tidak terjadi pada pudar/lunturnya bahan/cat yang digunakan untuk melukis tetapi terjadinya pelupasan lapisan pada permukaan batuan di mana lukisan itu dibuat. (b). Tumbuhnya ganggang di permukaan lukisan yang membuat tidak terlihat jelas. (c). Lukisan terhapus oleh aliran air hujan yang melewati lukisan.

b. Berdasarkan hasil analisis, kerusakan lukisan dinding disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah pelapukan fisik (mekanik) dan pelapukan kimia. Pelapukan kimia terdiri dari dua jenis yaitu Pelarutan (Dissolution) dan biologi.

c. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konservasi yang pernah dilakukan pada tahun 1985 dan 1986, memperlihatkan bahwa konservasi menggunakan bahan kimia menyebabkan kondisi lukisan yang di konservasi tidak sama seperti aslinya, sehingga dapat mengurangi nilai arkeologis dari lukisan tersebut. Untuk itu, konservasi menggunakan bahan kimia dapat dikurangi seminimal mungkin, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumberdaya arkeologi.

d. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap bahan lukisan dinding gua prasejarah, menunjukkan bahwa bahan lukisan dinding gua yang digunakan tidak murni dari satu unsur, tetapi dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Dengan demikian tidak hanya menggunakan bahan mineral merah saja (hematite) tetapi juga menggunakan unsur lain sebagai campurannya. Dalam hal ini hematite yang didominasi oleh unsur oksida besi (Fe) berperan dalam pembentukan warna merah. Melihat hal tersebut, kemungkinan besar pada masa lalu, manusia yang tinggal di gua, dalam membuat bahan lukisan menggunakan hematite yang dicampur dengan media lainnya yang kemungkinan berasal dari bahan organik.

e. Hasil uji laboratorium terhadap bahan pengganti lukisan gua dengan menggunakan batuan merah (hematite) yang berasal dari sekitar situs Sumpang Bitu sebagai bahan dasar yang dicampurkan dengan 8 buah larutan yang sebagian besar berasal bahan organik. Hasil uji ini memperlihatkan bahwa bahan campuran hematite yang berasal dari bahan organik yang efektif dan hasilnya relatif paling baik di antara 8 sampel adalah menggunakan ekstrak tumbuhan, dalam uji ini menggunakan daun sirih dan buah pinang. (Anonim, 2008:72-73).

Selanjutnya kegiatan ini kembali dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2009 kajian konservasi lukisan gua prasejarah di Maros dan Pangkep kegiatan ini dilakukan pada 6 (enam) gua di Kabupaten Maros yaitu Leang Jarie, Sampeang, Burung, Timpuseng, dan Petta Kere. Sementara di Kabupaten Pangkep dilakukan pengamatan dan pengambilan data pada 2 (dua) gua yaitu Leang Sakapao dan Leang Sumpang Bitu. Beberapa permasalahan yang dikemukakan antarlain:(a). Bagaimana kondisi iklim makro dan mikro di lingkungan sekitar gua prasejarah di di Maros dan Pangkep? Apakah

kondisi iklim tersebut mempengaruhi kerusakan yang terjadi pada lukisan gua dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan pada lukisan tersebut? (b). Apa saja komponen yang terkandung dalam bahan yang digunakan dalam lukisan gua, apakah ada unsur khusus yang membuat bahan tersebut melekat dan dapat bertahan lama? dan (c). Sistem monitoring yang bagaimana dapat diterapkan untuk memantau kerusakan yang terjadi pada lukisan gua?

Hasil Pengumpulan data menunjukkan bahwa kerusakan lukisan gua di kabupaten Maros dan Pangkep sebagian dikarenakan mengelupasnya lapisan dinding gua, pertumbuhan algae (ganggang) yang menutupi lukisan dan Lukisan terhapus oleh aliran air hujan yang melewati lukisan. Dari beberapa pengamatan langsung di lokasi terlihat bahwa tingkat kerusakan lukisan yang terletak dekat mulut gua dan lingkungannya terbuka cenderung lebih besar daripada lukisan yang letaknya tersembunyi dan terlindungi oleh pepohonan. Analisis Kerusakan Gua, hasil pengamatan pada lingkungan di sekitar gua-gua yang dijadikan sampel kajian, menunjukkan bahwa kerusakan pada lukisan gua tersebut diduga diakibatkan oleh adanya kontak dengan atmosfer yang berbeda secara signifikan pada musim hujan dan kemarau. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Lukisan dinding pada gua-gua prasejarah telah banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh : (a). Kerusakan lukisan tidak terjadi pada pudar/lunturnya bahan/cat yang digunakan untuk melukis tetapi terjadinya pelupasan lapisan pada permukaan batuan di mana lukisan itu dibuat. (b). Tumbuhnya ganggang di permukaan lukisan yang membuat tidak terlihat jelas. (c). Lukisan terhapus oleh aliran air hujan yang melewati lukisan.

b. Kerusakan lukisan yang letaknya dekat mulut gua dan lingkungannya terbuka cenderung lebih besar daripada lukisan yang letaknya tersembunyi dan terlindungi oleh pepohonan.

c. Data Curah Hujan (1990 – 2008) menunjukkan bahwa terjadi penurunan curah hujan dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan penyinaran matahari makin intensif ke bumi sehingga menyebabkan sinar matahari lebih banyak masuk ke dalam gua. Intensitas masuknya sinar semakin besar ke dalam gua dengan berkurang pepohonan di sekitar mulut gua. Berkurangnya pepohonan di sekitar lingkungan gua menyebabkan tidaknya adanya penyangkai / penahan untuk sinar matahari masuk ke dalam gua.

d. Berdasarkan hasil analisis, kerusakan lukisan dinding disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah pelapukan kimia, pelapukan fisik dan pelapukan biologi.

e. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap bahan lukisan dinding gua prasejarah, menunjukkan bahwa bahan lukisan dinding gua yang digunakan tidak murni dari satu unsur, tetapi dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Hasil uji laboratorium, menunjukkan ada bahwa kemungkinan ada 2 unsur yang memberi pengaruh terhadap warna merah yaitu unsur Fe yang jika teroksidasi

menjadi Fe₂O₃, dan unsur Pb yang jika teroksidasi menjadi PbO. (Anonim, 2009).

Kemudian Pada tahun 2013, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar melakukan kajian keterawatan lukisan keberadaan tinggalan purbakala di gua-gua prasejarah tersebut, khususnya yang berupa lukisan gua makin lama kondisinya makin mengkhawatirkan. Saat ini telah banyak lukisan gua prasejarah yang mengalami kerusakan, salah satunya karena letak gua-gua prasejarah yang berada di alam terbuka sangat rentan terpengaruh oleh faktor lingkungan/alam sekitarnya. Faktor cuaca dan iklim merupakan pengaruh yang dominan terhadap kerusakan dan pelapukan dinding gua dan lukisannya yang selanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keselamatan dan keberadaan lukisan tersebut. Pada dasarnya kerusakan dan pelapukan merupakan proses alami dan dapat terjadi pada semua cagar budaya termasuk lukisan dinding gua. Upaya konservasi yang dilakukan hanya bersifat untuk menghambat laju kerusakan dan pelapukan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan dalam kajian ini, memperlihatkan bahwa tingkat keterawatan gua-gua prasejarah di Maros Pangkep bervariasi mulai dari tidak terawat sampai terawat, mengacu pada tingkat kerusakan dan pelapukan fisik (retak, pecah, aus), pelapukan biologis (pertumbuhan algae, moss, lichen), pelapukan kimiawi (penggaraman, sementasi). Selain itu juga mengacu pada data jumlah titik-titik kebocoran dinding gua di musim kemarau dan musim penghujan, dimana hampir semua gua yang diobservasi memperlihatkan adanya titik-titik kebocoran tersebut. Kedua, kondisi mikro dan makro klimatologi, keanekaragaman flora dan fauna serta observasi untuk mengetahui kualitas udara di lingkungan gua sangat berpengaruh pada tingkat keterawatan gua prasejarah. Demikian pula kondisi air di gua-gua prasejarah dan lingkungan sekitarnya terutama di musim kemarau dan musim hujan yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan gua. Selain itu adanya permasalahan yang berkaitan dengan pengamanan, sarana dan prasarana berupa belum semua gua prasejarah dilengkapi dengan prasarana yang memadai, juga berpengaruh pada tingkat keterawatan gua prasejarah baik di Maros maupun di Pangkep. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat keterawatan gua prasejarah di Maros dan Pangkep ini sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia, oleh karena itu untuk mempertahankan tingkat keterawatan gua prasejarah diperlukan sebuah sistem konservasi gua prasejarah yang memadukan antara konservasi lingkungan, konservasi arkeologis dan juga pengelolaan sumberdaya arkeologi yang berbasis pelestarian.

5. Evaluasi Hasil Konservasi Kawasan dan Penanganan Fisik (konservasi) Lukisan Dinding Gua Prasejarah Karst Maros-Pangkep.

a. Evaluasi Konservasi Kawasan Gua Prasejarah Karst Maros-Pangkep.

Serangkaian penelitian dan kajian yang telah dilakukan, belum diikuti dengan peraturan perundangan pendukungnya seperti belum ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya, peringkat kabupaten dan provinsi maupun nasional dalam bidang cagar budaya. Kedua, belum adanya penetapan kelas kawasan karst Maros dan Pangkep di luar area hutan lindung, penetapan semacam ini penting untuk upaya perlindungan, mengingat bahwa masih banyak gua-gua prasejarah yang tidak masuk kawasan hutan lindung tetapi masuk dalam hutan produksi maupun area penggunaan lainnya yang dapat digunakan sebagai lahan tambang.

Di dalam kawasan ini terdapat 75 perusahaan tambang baik tambang batuan (gamping/kapur, industri cipping, dan batu gunung), marmer, pasir silika dan tanah liat, perusahaan tersebut baik dalam eksplorasi maupun eksploitasi. Di Kabupaten Maros terdapat 37 perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Jenis tambang yang terdapat pada wilayah karst Maros terdiri dari 2 golongan yakni golongan B dan C. Berdasarkan pembagiannya tambang golongan B berupa tambang batu bara, mineral logam, dan batu gamping/marmer dan di Kabupaten Pangkep terdiri dari 40 perusahaan dengan jenis tambang yang sama seperti di Kabupaten Maros. (Anonim, 2011c:18). Hal tersebut di atas, jika tidak dilakukan upaya penetapan dan koordinasi dengan pihak terkait dapat menyebabkan kerusakan pada kawasan karst yang tentunya juga berimbas pada kerusakan lingkungan mikro gua dimana lukisan gua itu berada.

Upaya yang memberikan dampak sangat positif adalah tetapkannya sebagian besar kawasan karst Maros dan Pangkep, sebagai kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Sebelum berubah fungsi menjadi taman nasional, kawasan ini berfungsi sebagai cagar alam seluas ± 10.282,65 Ha, taman wisata alam seluas ± 1.624,25 Ha, hutan lindung seluas ± 21.343,10 Ha, hutan produksi tetap seluas ± 10.355 Ha serta hutan produksi terbatas seluas ± 145 Ha. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung mempunyai luas ± 43.750 Ha yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Gua-gua prasejarah yang berada di dalam kawasan ini relatif aman dari adanya gangguan baik dari aktivitas masyarakat maupun tambang.

Serangkaian upaya pelestarian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, untuk konservasi kawasan karst Maros dan Pangkep seperti zonasi dan deliniasi kawasan belum ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sehingga belum memberikan kekuatan hukum. Selain itu kajian yang dilakukan baru pada tahap mengidentifikasi faktor-faktor ancaman dan kerusakan yang terjadi, belum sampai pada tahap penerapan konsep pelestarian kajian atau dapat dikatakan bahwa, kajian semacam ini dapat menjadi data awal untuk kegiatan monitoring kelestarian gua dan kawasannya. Hal lain yang direkomendasikan oleh Balai Konservasi Borobudur

adalah Penghijauan di sekitar lingkungan gua merupakan upaya jangka panjang dalam upaya mempertahankan kelestarian lukisan gua. Namun demikian perlu dilakukan upaya jangka pendek untuk mengurangi/menghalangi masuknya sinar matahari langsung ke dalam gua. Jika upaya jangka pendek ini tidak dilakukan, dikhawatirkan lukisan gua akan hancur sebelum upaya penghijauan lingkungan berhasil dilakukan. Upaya jangka pendek dilakukan misalnya dengan membuat penangkal sementara yang dapat menghalangi masuknya sinar matahari. Upaya yang dilakukan baik jangka panjang maupun jangka pendek merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan di sekitar gua tetap stabil sebelum ada pengaruh dari luar. Dengan kondisi lingkungan yang stabil diharapkan lukisan yang ada di gua-gua dapat lebih lama bertahan dan tetap terjaga kelestariannya.

Selain itu juga, direkomendasikan untuk melakukan kegiatan monitoring mengetahui berbagai kerusakan lukisan gua. Kegiatan semacam ini secara intensif dari tahun ke tahun dan pada periode-periode tertentu akan dilakukan evaluasi terhadap laju kerusakan yang terjadi setelah dilakukannya upaya konservasi lingkungan mikro gua prasejarah baik di Maros maupun Pangkep. Menurut saya, hal yang perlu dilakukan adalah mencoba melakukan penelitian dan kajian terhadap gua-gua di kawasan gua prasejarah maros dan pangkep, dimana kondisi lukisannya masih terjaga dengan baik, maupun lokasi lainnya yang mempunyai karakteristik lingkungan yang sama dengan gua-gua di Maros dan Pangkep. Kondisi lukisan yang masih terjaga dengan baik dapat juga ditemukan di Gua Uhallie Kabupaten Bone, gua tersebut berada jauh dari permukiman penduduk, berada di daerah karst di dalam hutan Bontocani yang terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengancam kelestariannya, tipe dan karakteristik lingkungannya sama dengan kawasan karst Maros dan Pangkep. Kondisi lukisan dinding yang mencapai 135 gambar cap tangan, 7 gambar fauna terdiri dari 3 gambar babi rusa dan 7 gambar anoa, sebagian besar lukisan dinding yang masih relatif utuh, warna nampak jelas. (Anonim, 2013:60). Keseluruhan Data tentang lukisan gua dan lingkungannya, sangat penting untuk diteliti lanjut dalam studi komparatif dan dapat dijadikan sebagai data kunci untuk menjawab serangkaian permasalahan yang terjadi terhadap pelapukan dan kerusakan lukisan dinding di kawasan karst Maros-Pangkep.

Dari berbagai macam upaya konservasi kawasan yang dilakukan, nampaknya model yang ditawarkan oleh Asmara Dewi (2015) pada Kawasan Candi Gedongsongo, dapat diterapkan pada kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep. Kajian yang menggunakan metode manajemen resiko yang dilakukan dengan pendekatan sistemik melalui tahap identifikasi dan analisis, penilaian, dan manajemen resiko. Identifikasi dan analisis dilakukan dengan menentukan indikator dan variabel yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan gua prasejarah Maros dan Pangkep. Indikator dan variabel yang dianalisis dipertimbangkan

relevansinya dalam ruang baik secara mikro (gua) maupun secara makro (kawasan gua prasejarah dan lingkungannya). Dengan luas keseluruhan kawasan Karst Maros-Pangkep, terdapat 16 Sub-Kawasan gua prasejarah dan 4 Satuan Situs gua. Luas lahan kawasan gua prasejarah Di Kabupaten Pangkep 2.774,1 Ha dan di Kabupaten Maros seluas 1.936,7 Ha dengan luas keseluruhan Kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep 4.710,8 Ha. Dimana di dalamnya terdapat 126 gua prasejarah dan 88 diantaranya memiliki gua prasejarah. Indikator tersebut adalah ancaman, kerentanan, dan kapasitas, sedangkan variabel terdiri dari jenis aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya oleh alam berupa Hujan (Banjir, erosi, abrasi, kelembaban, dll.), Angin, dampak yang ditimbulkan adalah Tekanan, debu dan material halus lainnya. oleh Suhu dan Kelembaban, akan menimbulkan Fluktuasi suhu dan kelembaban dapat menyebabkan retak, pengelupasan, dan pelapukan pada batu. Berbagai jenis aktivitas oleh manusia berupa penambangan, pertanian, pengunjung dan transportasi. Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan adalah Kerusakan ekosistem karst; struktur gamping, getaran, debu, vegetasi, fauna, suhu dan kelembaban, siklus air/hidrologi, asap mesin (CO₂), dll. Aktivitas Pertanian, akan menimbulkan dampak adanya Pembakaran, pembukaan dan pengolahan tanah. Transportasi akan menimbulkan dampak adanya getaran, asap mesin (CO₂), pembuatan jalan baru dll.

b. Evaluasi Hasil Penanganan Fisik (konservasi) Lukisan Dinding Gua Prasejarah Karst Maros-Pangkep.

Evaluasi terhadap konservasi yang telah dilakukan pada tahun 1985 dan 1986, baru dilakukan sekitar 23 tahun setelah konservasi lukisan berjalan. Hasilnya adalah lukisan pada Leang Sumpang Bitu terlihat utuh kembali, namun menimbulkan efek yang lain yaitu ketidaksamaan warna lukisan yang telah dikonservasi dengan warna aslinya. Kajian yang dilakukan pada tahun 2008, ini juga mengambil sampel lukisan dinding, hal ini dilakukan untuk mengetahui unsur atau bahan alami yang terkandung di dalam warna merah lukisan yang kemudian akan dianalisis di laboratorium. Hasil dari kajian tersebut, menunjukkan bahwa bahan pembuatan lukisan menggunakan bahan mineral merah (hematite) yang juga banyak ditemukan di sekitar gua. Tidak hanya itu, bahan yang digunakan mengandung campuran dari bahan lain. Uji sampel itu juga menunjukkan hasil lebih baik pada daun sirih dan buah pinang (Suhartono, dkk, 2008). Hasil konservasi oleh Samidi pada tahun 1986, dengan menggunakan bahan campuran tuak sebagai bahan tambahan untuk perekat, nampaknya memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan.

D. Penutup

Tinggalan lukisan dinding gua prasejarah Maros dan Pangkep, merupakan bukti nyata karya seni para leluhur bangsa Indonesia dan merupakan salah satu karya seni

tertua di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Umur lukisan dinding tertua berupa cap tangan berumur 39.000 tahun dan gambar babi rusa berumur 35,400 tahun dari Leang Timpuseng, kemudiangambar cap tangan tua lainnya berasal dari Leang Jarie berumur 39.400 tahun dan lukisan yang termuda ditemukan di Leang Lompoa berumur 17.400 tahun. (Aubert, 2014).Salah satu lukisan/gambar tertua di dunia lainnya ditemukan di Eropa di Gua El Castillo di utara Spanyol yang berumur 37.300 tahun. Hal Ini membuktikan bahwa peradaban bangsa kita, memegang peran penting dalam peradaban umat manusia di dunia khususnya dalam bidang seni.

Seiring dengan berjalannya waktu, lukisan dinding gua prasejarah pada kawasan karst Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan, telah mengalami kerusakan, kehancuran dan bahkan musnah hal ini dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun alam, jika hal ini dibiarkan terus menerus terjadi tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang warisan budaya leluhur tersebut akan musnah dengan sendirinya dan tidak dapat lagi dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Untuk itu diperlukan upaya konservasi tidak hanya pada objek yang berupa lukisan tetapi juga pada lingkungan dimana situs gua prasejarah ini berada baik lingkungan mikro gua maupun lingkungan makro karst kawasan Maros dan Pangkep. Hal lain yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait di dalam kawasan tersebut dalam hal pelestariannya. Diperlukan dukungan dan langkah yang nyata dari berbagai pihak baik yang terkait dengan kawasan tersebut, perlunya upaya perlindungan dalam bentuk regulasi dan ketetapan hukum dalam upaya pelestarian kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep, sehingga dapat tetap lestari di masa yang akan datang. Amin.

Daftar Pustaka

Anonim, 2007a. Pemintakatan Gua-Gua Prasejarah Kawasan Karst Bantimurung Kabupaten Maros. Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

-----, 2007b. Pemintakatan (Zoning) Kompleks Situs Gua Prasejarah Bellae, Kabupaten Pangkep. Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

-----, 2008a. Indonesian Scientific Karst Forum (ISKF # 1). Diselenggarakan oleh Goenoeng Sewoe Karst Forum di Gedung University Club Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19-20 Agustus 2008. Yogyakarta.

-----, 2008b. Kajian Konservasi Lukisan Gua Prasejarah di Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang.

-----,2008c, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008-2027. Kabupaten Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan.

-----,2009. Kajian Konservasi Lukisan Goa Prasejarah di Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan Tahap II. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang-Jawa Tengah.

-----,2010.Laporan penelitian prasejarah di Kabupaten Muna. Balai Arkeologi Makassar.

-----, 2011a. Zonasi Gua Prasejarah Kabupaten Maros. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

-----, 2011b. Zonasi Gua Prasejarah Kabupaten Pangkep. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

-----, 2011c. Delineasi Kawasan Cagar Budaya Gua Prasejarah Kars Maros-Pangkep. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.

-----, Survei Penyelamatan Gua Uhallie dan Gua Batti Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Subpok Penyelamatan Kelompok Kerja Pelindungan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

-----, 2014. Survei Penyelamatan Situs Gua Prasejarah Asera Kecamatan Oheo dan Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Tim Kerja. Kelompok Kerja Pengamanan dan Penyelamtaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

-----, 2015. Survei Penyelamatan Situs Prasejarah Kabupaten Muna. Kelompok Kerja Pengamanan dan Penyelamtaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

-----, 2015. Kajian Pelestarian Gua Prasejarah Pangkep. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

Aubert, M. et.al. 2014. "Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia". dalam jurnal Nature, vol 514 No. 7521 tanggal 9 Oktober 2014.

Asmunandar, 2001. Pengaruh polusi asap terhadap kelestarian situs gua prasejarah di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Skripsi. Universitas Hassanudin. Makassar, Tidak terbit.

- Dewi, Asmara. 2015. Implementasi Manajemen Resiko dalam Konservasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus Kawasan Candi Gedongsongo). *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 9, nomor 2, Desember 2015. Balai Konservasi Borobudur. Magelang.
- Doehne, E. 2002. Salt weathering: a Selective review. Dalam *Natural Stone, Weathering Phenomena, Conservation Strategies and Case Studies*. Geological Society London, Special Publication 205, 51-64).
- Ghadafi, 2000. Antisipasi efek peledakan dengan diagram zoning terhadap kelestarian situs gua prasejarah Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tidak terbit.
- Handayani, Sultra 2015. Gambar Fauna Perairan Pada Gua-gua Prasejarah Kawasan Karst Maros-Pangkep. Skripsi. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hidayat, Romi. 2016. Lukisan Cap Tangan Manusia Prasejarah Morowali Utara. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo.
- Irawati, Setiasih. 2010. Kajian Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung di Sulawesi Selatan. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qtmedia (off line). Tahun 2016.
- Kosasih, S.A. 1983. Lukisan Gua di Indonesia sebagai Data Sumber Penelitian Arkeologi. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) III*. Jakarta
- Linda, 2005. Tata Letak Lukisan Dinding Gua di Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Munandar, Aris. 2006. Kerusakan dan Pelapukan Material. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang
- , 2008. Identifikasi Pengaruh Lingkungan Terhadap Keterawatan Peninggalan Gua Prasejarah. Makalah dalam Semiloka Konservasi Lukisan Gua Prasejarah Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Makassar. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Oktaviana, Agus Adi. 2015. Pola Gambar Cadas di Situs Gua Harimau Sumatera Selatan.
- Permana, R. Cecep. 2008. Pola Gambar Tangan Pada Gua-Gua Prasejarah di wilayah Pangkep-Maros Sulawesi Selatan. Disertasi. Universitas Indonesia. Depok.
- , 2015. Lukisan Dinding Gua (Rock Art): Keterancaman dan Upaya Konservasinya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. Balai Konservasi Borobudur. Vol. 9 No. 2, Desember 2015. Magelang.
- Prasetyo, Bagyo. 2012. Seni dan Konsepsi Kepercayaan. Indonesia Dalam Arus Sejarah 1 Prasejarah. Diterbitkan oleh PT. Ichtar Baru Van Hoeve. Atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Samidi, 1985. Laporan Hasil Survey Konservasi Lukisan Gua Sumpang Bitu dan Pelaksanaan Konservasi Lukisan Gua Pettae Kerre, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- , 1986, Laporan Konservasi Lukisan Perahu/Sampan si Gua Sumpang Bitu (Tahap Awal) dan Konservasi Lukisan Babi Rusa di Gua Petta Kere (Penyelesaian), Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- Suhartono, Yudi. Kerusakan dan Pelapukan Lukisan Dinding Gua Prasejarah di Maros dan Pangkep. *Arkeologi Untuk Publik*. Ikatan Ahli Arkeologi (IAAI). Jakarta.
- , 2015. Penggunaan Bahan Alami pada Bahan Restorasi Lukisan Gua Prasejarah Maros Pangkep. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. Balai Konservasi Borobudur. Vol. 9 No. 1, Oktober 2015. Magelang.
- Sumayku, Reynold 2016. Gua Harimau, Rumah Peradaban Lampau di Sumatera Selatan. (sumber: Lutfi Fauziah) www.nationalgeographic.co.id diakses, 10 Desember 2016.
- Tanudirjo, Tanpa Tahun. Sekilas Tentang Warisan Budaya. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yadi, Mulyadi. 2016. Distribusi dan Sebaran Situs Gambar Cadas di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelestarian Situs Kompleks Makam Belanda di Kabupaten Majene

Oleh. Yusriana

Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
Tamalanrea, Makassar 90245
E-mail: yusriana@unhas.ac.id

Intisari

Pelestarian sumberdaya budaya adalah suatu upaya mempertahankan agar sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem sehingga dapat berfungsi aktif dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar dapat berfungsi aktif dalam masyarakat, maka sumberdaya budaya harus memiliki makna yang baru bagi masyarakat. Salah satu sumberdaya budaya yang perlu diberi makna yang baru sesuai konteks kekinian adalah Situs Kompleks Makam Belanda dari periode kolonial hingga kemerdekaan yang berada di Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat. Kondisi situs saat ini cenderung terabaikan sementara kondisi keterancaman kian meningkat. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi arkeologis, signifikansi, mengidentifikasi stakeholder yang semestinya terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian situs. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa situs yang disebut sebagai kompleks makam Belanda ini ternyata mayoritas diisi oleh makam serdadu pribumi dari Minahasa dan Ambon. Untuk itu, berdasarkan analisis terhadap signifikansi yang dimilikinya, maka idealnya situs ini dikelola dengan pendekatan partisipasi kolaborasi antar stakeholder. Adapun stakeholder yang dianggap berkepentingan dalam pengelolaan situs ini adalah Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Budaya; Pemerintah Kota Manado; Pemerintah Kota Ambon; Pemilik lahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat sekitar situs.

Kata Kunci : **Pelestarian, Makam, Belanda, Majene, Partisipasi Kolaborasi.**

Abstract

The preservation of cultural resources is an effort to preserving cultural resources so that can remain in its context of system so can be functioning actively and can be utilized by the community. In order to function it in society actively, cultural resources must have a new meaning for them. One of the cultural resources that need to be given a new meaning according the present context is the largest complex of Dutch tombs of colonial period to independence period that are located at Majene, West Sulawesi Province. The current conditions of the site tend to be neglected while threatened conditions are increasing.

This paper aims to identify potential of archaeological significances, identifying the stakeholders that should be involved in the management and preservation of the site. The method of this research is using descriptive-analytic method. The results of the analysis show that the complex of the Dutch tomb was apparently filled by the tombs of indigenous troops from Minahasa and Ambon. For that, based on analysis of its significance, then ideally this site is managed by a participatory approach collaboration between stakeholders. The stakeholders are those whose considered interested in the management of this site is Majene regency government that in this case represented by the Department of Tourism and Culture; City Government of Manado; City Government of Ambon; Landlord, NGO and Community around the site.

Keywords: **Preservation, Tombs, Dutch, Majene, Collaborative Participation.**

A. Pendahuluan

Suatu sumberdaya budaya merupakan perwujudan dari sejarah yang dialaminya, sehingga memahami sumberdaya budaya sebagai peninggalan sejarah dapat dianggap sebagai sebuah upaya untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya (Hardyansah, tanpa tahun: hal.2). Upaya untuk memahami sejarah dibalik sumberdaya budaya akan tercapai apabila eksistensi fisik sumberdaya budaya masih dapat dipertahankan. Berangkat dari pemikiran arkeologi pascaprosesual yang menyatakan bahwa, budaya materi merepresentasikan ide. Pemahaman tentang ide, gagasan dan makna di balik budaya bendawi dengan sendirinya menjelaskan apa yang tampak (Hodder, 1989: Hal.147-152). Oleh karena itu, yang perlu dilestarikan adalah budaya bendawi sekaligus makna yang terdapat pada benda tersebut. Informasi yang asli harus dipertahankan untuk tetap memberi peluang pada masyarakat untuk menafsirkan masa lampau sesuai dengan imajinasinya (Tanudirjo, 1996: Hal.16).

Pelestarian sumberdaya budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar sumberdaya

tersebut dapat berfungsi aktif dalam masyarakat, maka sumberdaya budaya harus memiliki makna yang baru bagi masyarakat. Namun, dalam proses memberi makna baru terhadap sumberdaya budaya bukanlah merupakan hal yang mudah karena setiap orang atau kelompok memiliki tafsir dan keinginannya sendiri untuk memberikan makna baru. Pemberian makna baru terhadap sumberdaya budaya membutuhkan proses kontekstualisasi, artinya nilai-nilai penting dijelaskan dalam konteks masa kini (Tanudirjo, 2006: Hal.5).

Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki sumberdaya budaya yang melimpah, mulai dari zaman pra sejarah hingga zaman kolonial. Beberapa bangunan bekas perkantoran dari masa kolonial menjadi bukti penting eksistensi Majene di masa lalu. Bangunan-bangunan tersebut antara lain, bekas rumah sakit lama yang berdiri tahun 1908 dan saat ini difungsikan sebagai Museum Mandar; kamp militer yang saat ini ditempati oleh TNI Kodam VII Wirabuana, Batalyon Infanteri 721; sebuah menara penampungan air bersih yang dibangun pada 1907 yang berada persis di belakang kantor bupati Majene di Kelurahan Pangali-ali. Selain bangunan-bangunan, juga terdapat sebuah kompleks pemakaman bagi orang-orang Belanda yang dulu bermukim di Majene.

demikian, kompleks makam ini tidak sepopuler dan semegah makam-makam dalam Situs Taman Prasasti di Jakarta, Kompleks Makam Belanda di Kebun Raya Bogor, ataupun Situs Kerkhof Peucut di Aceh. Mungkin karena ketidakpopulerannya itulah sehingga kompleks makam Belanda di Majene, menjadi terbengkalai dan terlupakan. Saat ini kondisi makam di dalamnya kian mengalami degradasi kualitas. Berdasarkan hasil wawancara upaya pelestarian yang dilakukan terhadap situs tersebut, baru sebatas registrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2007 dan pendataan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar di tahun 2014. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi arkeologis dari kompleks makam, analisis signifikansi, stakeholder dan bentuk keterlibatannya dalam pelestarian situs.

B. Identifikasi Situs Kompleks Makam Belanda

Situs kompleks makam ini berada di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae. Secara astronomis berada di titik koordinat $3^{\circ} 32' 42.8''$ LS dan $118^{\circ} 57' 42.1''$ BT. Kompleks makam berada di sisi bukit dengan ketinggian 25 m dpl dan dikelilingi oleh rumah penduduk. Untuk mencapai lokasi dapat dengan berjalan kaki melalui jalan setapak sejauh 65 meter jalan



Gbr 1. Akses jalan setapak menuju Kompleks Pemakaman Belanda dari Jalan Gatot Soebroto (Dok. M. Zulfikar, 2017)

Di antara tinggalan-tinggalan Belanda tersebut, salah satu yang menarik perhatian dan masih kurang terpublikasi adalah Situs kompleks Pemakaman Belanda atau pakkuburang balanda. Situs ini pernah ditulis dalam koran Radar Sulbar, Senin 16 April 2012 hal.12. Tinggalan ini menarik karena, makam-makam yang ada di dalamnya khas dengan bentuk-bentuk makam Belanda lengkap dengan inskripsi berbahasa Belanda. Walaupun

Gatot Soebroto (jalan propinsi) (lihat Gbr 1). Kompleks makam tidak terawat, bahkan dimanfaatkan oleh warga untuk menanam singkong, pisang dan serai (lihat Gbr.2). Di sekitar kompleks makam ditumbuhi beberapa jenis vegetasi seperti; pohon pisang, sukun, kelapa, pepaya, lamtoro gung, jambu batu, bambu, tanaman jenis bunga-bunga dan semak belukar.



Gbr.2 kiri: kondisi pemukiman di sekitar kompleks makam. Kanan: Kondisi makam-makam yang tidak terawat bahkan dijadikan sebagai kebun pisang oleh warga sekitar (Dok. M. Zulfikar, 2017)

Bagi masyarakat lokal, kompleks makam ini dikenal dengan istilah Pakkuburang Balanda/Kristen (kuburan Belanda/Kristen) yang merupakan tempat pemakaman bagi warga Belanda, Manado, dan Ambon yang dahulu pernah bertempat tinggal di Majene sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan. Dari pengamatan terdapat 86 makam namun hanya 31 makam yang masih dapat diidentifikasi. Diperkirakan masih ada beberapa makam lain yang kemungkinan tertutup oleh semak dan sudah ditimpa oleh rumah-rumah penduduk.

Secara umum makam yang terdapat dalam situs ini dibuat dari susunan bata dengan perekat dan plester semen. Namun, terdapat satu makam yang menggunakan bahan granit dan dua makam lain yang berbahan batu padas. Mayoritas makam memiliki prasasti. Prasasti tersebut terbuat dari bahan semen dan marmer. Inskripsi pada prasasti makam secara keseluruhan menggunakan aksara latin dalam bahasa Belanda dan beberapa berbahasa Indonesia.

Kondisi makam-makam tampak tidak terawat. Berdasarkan pada kondisi fisik makam, beberapa di antaranya sudah tidak utuh, bahkan beberapa makam sudah tidak memiliki prasasti. Menurut informan, prasasti-prasasti tersebut pernah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, terdapat satu bagian makam yang digunakan sebagai batu pondasi dan penyangga tiang rumah (lihat Gbr.3). Di antara 86 makam yang tampak, hanya 31 makam yang masih dapat diidentifikasi.



Gbr.3 kiri: salah satu makam yang dijadikan penyangga tiang. Kanan: salah satu bagian makam yang dijadikan batu pondasi rumah (lihat arah panah) (Dok. Yusriana, 2014)

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan bentuk makam, terdapat lima jenis yaitu; (a) makam persegi dengan media prasasti tegak; (b) makam persegi (berbentuk peti); (c) makam bercungkup; (d) makam berbentuk tugu; (e) makam batu padas dengan nisan batu.

a) Makam persegi dengan media prasasti tegak

Jenis makam ini yang paling banyak ditemukan yakni berjumlah 48 buah walaupun beberapa sudah mengalami kondisi patah, namun masih dapat teridentifikasi. Makam ini terdiri dari beberapa variasi ukuran. Bagian tempat prasasti yang tegak juga memiliki berbagai variasi bentuk yakni persegi, segi tiga, segi lima, dan berundak. Makam ini terdiri dari beberapa variasi ukuran dari yang terbesar dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 68 cm, dan tinggi 135 cm hingga terkecil dengan ukuran panjang 95 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 125 cm.

b) Makam persegi (bentuk peti)

Jenis makam ini berjumlah 12 buah. Beberapa makam juga sudah mengalami kerusakan. Bentuk makam jenis ini persegi panjang agak landai ke bagian utara (bagian kaki) dengan tepi permukaan atas lebih lebar dari badan makam. Bagian permukaan tampak berlapis/berundak dengan tinggi undakan 3 cm. Pada bagian tengah permukaan makam dijadikan sebagai media prasasti. Pada bagian tengah permukaan makam dijadikan sebagai media prasasti. Adapun ukuran makam; panjang 202 cm, lebar 82 cm dan tebal 70 cm.

c) Makam bercungkup

Makam bentuk ini hanya terdapat satu buah. Tokoh yang dimakamkan bernama Angganitje Elizabeth Mukuan (lahir 1907-meninggal 1936). Makam ini memiliki cungkup permanen yang ditopang dengan enam tiang. Atap berundak dua, semakin ke atas semakin mengecil. Terdapat empat buah tiang yang kemungkinan sebagai tiang pagar luar makam karena tampak lubang berpola di bagian dalam tiang. Keseluruhan bahan makam terdiri dari bahan granit. Adapun ukuran panjang makam 179 cm, lebar 158 cm, tinggi 240 cm. Kondisi makam ini cukup baik tampak tidak ada bagian makam yang rusak, hanya lapisan tanah yang menutupi pondasi sudah mulai tergerus oleh air.

d) Makam berbentuk tugu

Makam jenis ini terdiri dari dua variasi bentuk atap yakni:

(a) Bagian atap berundak dengan puncak berbentuk limas. Bagian badan makam jenis ini berbentuk kotak. Prasasti dilekatkan pada salah satu sisi badan makam, berbentuk belah ketupat. Terdapat hiasan motif kelopak bunga dan sulur di bagian atas prasasti. Terdapat hiasan motif kelopak bunga dan sulur di bagian atas prasasti. Makam bentuk ini berukuran panjang 102 cm, lebar 101 cm dan tinggi 233,5 cm.

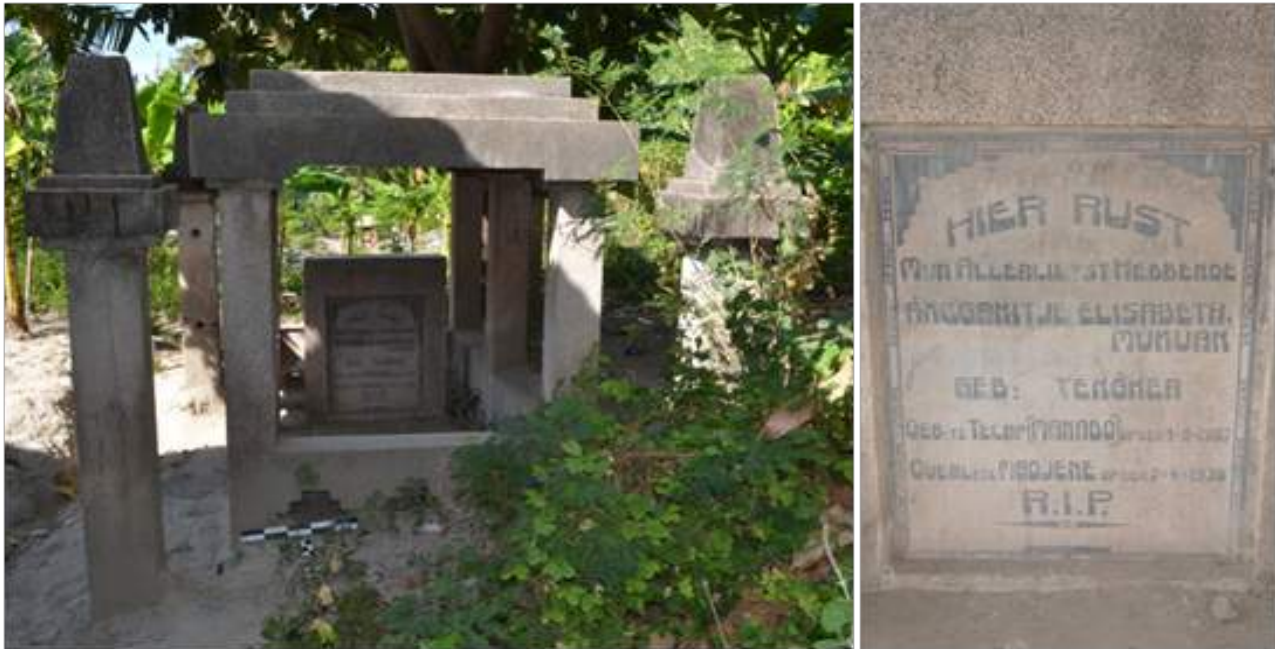
(b) Bagian puncak berbentuk prisma. Bagian badan jenis makam ini juga berbentuk kubus berundak. Prasasti dilekatkan pada bagian bawah badan makam. Bagian kaki/dasar memiliki dua undakan. Adapun ukuran makam panjang 129 cm, lebar 129 cm, dan tinggi 253 cm.

e) Makam batu padas

Di antara makam berbahan bata, terdapat pula dua buah makam yang berbahan batu padas. Makam yang pertama tidak memiliki jirat dengan dua buah nisan pipih sedangkan makam yang kedua merupakan makam dengan jirat monolit dengan dua buah nisan, mahkota segi delapan di selatan dan nisan hulu keris di utara. Tidak ada informasi tentang tokoh yang dimakamkan di sini.



Gbr.4. Variasi bentuk makam dalam kompleks Makam Belanda (Dok. BPCB Makassar, 2014)



Gbr.5. *kiri*: satu-satunya makam dengan cungkup dengan bahan marmer (Dok. BPCB Makassar, 2014; *kanan*: prasasti makam berbahasa Belanda (Dok. M Zulfikar, 2017)

Dari 86 makam yang ada, hanya 31 makam yang mencantumkan nama orang yang dimakamkan. Berikut nama-nama orang yang dimakamkan berikut tahun meninggalnya.

- 1) Anna Esther Inkiriwang (meninggal 1931)
- 2) Bung Maximukalangi (meninggal 1956)
- 3) Deice (meninggal 1963)
- 4) Gustaaf Ferdinand (meninggal 1961)
- 5) PM Rumiap (meninggal 1957)
- 6) Jeanette Angela Wicherts (meninggal 1913)
- 7) NTH Lawalata (meninggal 1931)
- 8) Erna de Kock Lunow (meninggal 1946)
- 9) SE Resso (tahun meninggal sudah tidak terbaca)
- 10) DZ Ponnokaraeng (meninggal 1956)
- 11) Elisabeth (meninggal 1955)
- 12) Wilar Max Rudy (meninggal 1955)
- 13) Palandeng (meninggal 1955)
- 14) Turanggan Alex Fredy (meninggal 1955)
- 15) Ety Wondal (meninggal 1949)
- 16) Laitalo (meninggal 1946)
- 17) B Laitalo (meninggal 1931)
- 18) R Mogol (meninggal 1988)
- 19) NEL Pandegirot (meninggal 1933)
- 20) HO Groneinstein (meninggal 1924)
- 21) Ciuda de Pierre (meninggal 1939)
- 22) LM Leiwakabessy (meninggal 1935)
- 23) AH Haumahu (meninggal 1935)
- 24) Pietje Sitrop (meninggal 1941)
- 25) Angganitje Elizabeth Mukuan (meninggal 1936)
- 26) MN Mamahit Parera (meninggal 1941)
- 27) A Tutuiha (meninggal 1933)
- 28) Caroline (meninggal 1938)
- 29) Ibunda Mamahit Parera (meninggal 1941)
- 30) Nj Jacoba Saerang Sitania (meninggal 1952)

31) Jeanne Saerang (meninggal 1951)

Dari hasil identifikasi makam diketahui bahwa makam paling tua berangka tahun 1913 dan yang paling baru 1988. Namun, belum diketahui pasti apakah pemakaman ini sudah mulai digunakan sejak tahun tersebut, tetapi paling tidak informasi yang dapat diketahui bahwa orang-orang yang dimakamkan di kompleks ini sudah ada di Majene ketika masa penjajahan Belanda. Dari keseluruhan makam yang teridentifikasi dan memiliki prasasti, tidak semua mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, hanya beberapa makam saja dan dari prasasti tersebut diketahui bahwa di antara orang-orang dewasa yang dimakamkan terdapat pula makam-makam bayi dan anak-anak antara lain sebagai berikut:

- 1) NEL.Pandegirot (meninggal dalam usia 4 bulan)
- 2) Jeanne Saerang (meninggal dalam usia 11 Tahun)
- 3) DZ Ponnokaraeng (meninggal dalam usia 7 tahun)
- 4) Jeannette Angela Wicherts (meninggal dalam usia 6 tahun)
- 5) Gustaaf Ferdinand Boki (meninggal dalam usia 4 bulan)
- 6) PM Rumiap (meninggal dalam usia 18 bulan).

Berdasarkan identifikasi terhadap nama-nama tersebut, diketahui bahwa orang-orang tersebut kebanyakan merupakan pribumi keturunan Minahasa dan Ambon jika dilihat dari fam (nama marga) yang tertera di prasasti makam. Nama marga dari Minahasa antara lain; Mamahit; Inkiriwang; Mukuan; Saerang; Wondal; Pandegirot. Sedangkan yang berasal dari Ambon dengan marga: Tutuiha; Leiwakabessy; Haumahu; Sitania.

C. Manfaat Pelestarian

Lowenthal (1997) sebagaimana dikutip oleh Bond and Worthing (2016) menguraikan bahwa pelestarian

tinggalan bersejarah bermanfaat untuk: (a) mengikat keakraban dan membuat kita mengerti keadaan saat ini. Tanpa memori dari masa lalu dan membiasakan diri dengan memori tersebut, maka kita akan kesulitan memaknai masa lalu dan masa kini; (b) Penegasan ulang dan validasi: Masa lalu memvalidasi atribut dan tindakan sekarang dengan kemiripan dengan yang sebelumnya; (c) Identitas: Masa lalu tidak terpisahkan dengan akal sehat kita. Kemampuan untuk mengingat dan mengidentifikasi masa lalu kita sendiri memberi makna keberadaan, tujuan dan nilai. Bahkan kenangan traumatis yang menyakitkan tetap penting untuk dipelajari guna menunjukkan identitas.

D. Signifikansi Situs Kompleks Makam Belanda

Pelestarian Kompleks Makam Belanda di Majene adalah sebuah upaya mempertahankan agar objek materi dari masa lalu tersebut dapat berfungsi aktif dan dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini. Mengapa hal tersebut perlu, dikarenakan tinggalan arkeologis tersebut mencerminkan suatu teknologi dan konstruksi dari suatu masa tertentu sebagai gambaran proses budaya yang terjadi di masyarakat di masa lalu. Pada prinsipnya semua sumberdaya budaya memiliki nilai penting, namun sangat tergantung pada kondisi sumberdaya dan kerangka penilaian yang digunakan. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, setidaknya suatu sumberdaya memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Secara singkat berikut diuraikan nilai penting (signifikansi) dari Situs Kompleks Makam Belanda di Majene.

a. Nilai Sejarah

Nilai sejarah menurut Tanudirjo (2004) apabila suatu sumberdaya budaya menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa sejarah atau prasejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu. Nilai sejarah situs dikaitkan dengan peristiwa periode kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan di Kabupaten Majene.

Kabupaten Majene terbilang cukup penting pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Majene terpilih sebagai ibukota Afdeling Mandar kala itu. Istilah Afdeling/Afdeling berarti sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat kabupaten. Afdeling ini dipimpin oleh seorang asisten residen. Sejak tahun 1924, Gewest Celebes en Onderhoorigheden dibagi menjadi delapan afdeling (Staatblad 1924 No 467) yaitu, (1) Afdeling Makassar dengan ibukota Makassar; (2) Afdeling Sungguminasa dengan ibukota Sungguminasa; (3) Afdeling Bontain dengan ibukota Bontain; (4) Afdeling Bone dengan ibukota Watampone; (5) Afdeling Pare-pare dengan ibukota Parepare; (6) Afdeling Mandar dengan ibukota Majene; (7) Afdeling Luwu dengan ibukota Palopo; dan (8) Afdeling Buton dengan ibukota Bau-bau (Paeni, dkk, 1995: 118).

Keberadaan kompleks makam Belanda menambah bukti bahwa pada masa kolonial Belanda, terdapat kompi serdadu pribumi Belanda yang menetap di Majene. Bukti penguat adalah salah satu makam mencantumkan profesi dari orang yang dimakamkan sebagai serdadu medis dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda (Koninklijke Landmacht) yang meninggal tahun 1935. Orang tersebut bernama LM Leiwakabessi yang merupakan keturunan Ambon.



Gbr. 6. Salah satu makam yang menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan adalah seorang serdadu medis dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda (Dok. BPCB, Makassar 2014)

Atas adanya makam tersebut, diperkirakan bahwa kompleks makam ini merupakan kompleks makam yang diperuntukkan bagi para serdadu pribumi dari Sulawesi Utara dan Maluku yang bergabung dalam KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger). Pernyataan ini diperkuat juga dengan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Sulawesi Utara, Jawa dan Maluku (Ambon) adalah daerah yang memberikan banyak pemudanya untuk menjadi prajurit KNIL (Matanasi, 2014 Hal: 61). Menurut Mappangara (wawancara, 16 Juni 2017) kemungkinan besar orang-orang yang dimakamkan pada kompleks tersebut merupakan para serdadu KNIL yang dahulu ditugaskan ke Afdeling Mandar tepatnya di Onderafdeeling Madjene (Majene saat ini) jika melihat rentang masa (tahun-tahun yang tertera pada makam). Mayoritas dari tentara KNIL tersebut adalah pribumi yang berasal dari Manado, Minahasa, dan Ambon. KNIL merupakan kesatuan tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830. Anggota KNIL sebagian besar merupakan pribumi Indonesia sebagai prajurit rendahan, hanya sedikit orang pribumi yang menjadi perwira KNIL. Pemuda yang menjadi KNIL umumnya berasal dari keluarga terpandang yang memiliki pendidikan yang cukup baik di zaman kolonial (Matanasi, 2012 Hal: 3).

b. Nilai Ilmu Pengetahuan

Suatu sumberdaya budaya memiliki nilai ilmu

pengetahuan apabila sumberdaya tersebut memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam disiplin ilmu tertentu. Bagi disiplin ilmu arkeologi, kompleks makam ini berpotensi untuk diteliti dalam arkeologi kolonial dengan menghubungkan antara situs-situs kolonial lainnya di kota Majene dalam konteks arkeologi keruangan. Bagi disiplin ilmu sejarah, data mengenai inskripsi makam sangat membantu untuk meneliti lebih lanjut terkait historiografi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.

c. Nilai Penting Budaya

Nilai budaya dalam hal ini terkait dengan nilai estetis dan nilai publik. Menurut Tanudirjo (2004) bahwa sumberdaya budaya memiliki nilai estetis apabila mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara, maupun bentuk-bentuk kesenian yang lain, termasuk juga keserasian antara bentang alam dan karya budaya (sajana budaya). Selain itu sumberdaya budaya memiliki nilai estetis apabila menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan masa mendatang. Sedangkan nilai publik di dimaksudkan apabila sumberdaya berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat masa lampau dan cara penelitiannya; menyadarkan tentang keberadaan manusia sekarang; berpotensi atau telah menjadi fasilitas rekreasi; dan berpotensi atau telah menjadi sumberdaya yang dapat menambah penghasilan bagi masyarakat (Tanudirjo, 2004. Hal: 8). Nilai etik yang dimiliki oleh situs ini berkaitan dengan rancang bangun makam masa kolonial. Untuk nilai publiknya sendiri, dikaitkan terutama bahwa situs ini dapat dikembangkan menjadi sarana pendidikan dan rekreasi misalnya dijadikan sebagai objek wisata sejarah atau sebagai museum terbuka.

E. Identifikasi Stakeholder

Untuk menyukseskan proses pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya budaya, maka perlu dilakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait terhadap keberadaan sumberdaya budaya. Pihak-pihak yang dimaksud bisa saja secara langsung maupun yang tidak langsung. Keterlibatan stakeholder bisa secara institusional maupun secara individual. Identifikasi stakeholder bukan hanya sebatas mengenali pihak yang terkait, tetapi mencakup bentuk dan jenis keterlibatannya terhadap sumberdaya arkeologi.

Untuk situs kompleks makam ini dapat kita identifikasi beberapa stakeholder yang berkepentingan dalam pelestarian dan pengelolaan situs yakni, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Budaya; Pemilik lahan; LSM yang bergerak di bidang sejarah dan budaya; dan Masyarakat sekitar situs. Pihak lain di luar Majene yang sangat diharapkan keterlibatannya dalam pelestarian kompleks makam tersebut adalah Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kota Ambon, mengingat ada kaitan antara orang-orang yang dimakamkan di dalamnya. Tentunya,

banyak keluarga yang merupakan keturunan dari orang-orang yang dimakamkan tersebut berkeinginan untuk mencari jejak leluhur mereka.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 95 dan 96 dapat kita lihat dalam uraian berikut. Dalam Pasal 95 dijelaskan bahwa: Pemerintah/dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menyebabkan terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam Pasal 96 ayat (1) dijelaskan wewenang penanganan Cagar Budaya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. Menghimpun Data Cagar Budaya;
 - d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. Membuat Peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. Menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. Mendirikan dan membubarkan Unit Pelaksana Teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
 - k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
 - m. Memindahkan/dan atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;

- n. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. Menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang dan atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;

Berkaitan dengan pelestarian Situs Kompleks Makam Belanda di Majene Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dalam pasal 95 ayat (1). Adapun bentuk keterlibatan Pemerintah daerah berupa penyediaan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat sesuai pasal 95 ayat (2) butir (d) serta butir (i) untuk mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian. Sedangkan pada pasal 96 ayat (1) butir (b) dan (g) bahwa Pemerintah berwenang untuk mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah dan berwenang melakukan kerjasama dalam pelestarian Cagar Budaya.

F. Bentuk Keterlibatan Stakeholder dengan Pendekatan Partisipasi Kolaboratif

Pendekatan partisipatif digunakan dalam pembangunan yang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder dalam proses pembangunan. Proses ini mencakup dari perencanaan awal, penyusunan konsep, dan implementasi sampai kepada pengelolaan (S Titik, dkk, 2011.Hal:56). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulita Titik S dkk (2011), bahwa ada beberapa model partisipasi yang mungkin diterapkan yaitu:

1) Partisipasi dengan berbagi informasi

- a. Merupakan bentuk partisipasi paling dangkal;
- b. Bentuknya bisa penyebarluasan program, atau meminta para stakeholder untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk membantu merencanakan atau mengevaluasi kegiatan;
- c. Model komunikasi lebih bersifat satu arah daripada interaktif.

2) Partisipasi melalui konsultasi

- a. Istilah konsultasi untuk melukiskan setiap pelibatan stakeholder dalam kegiatan, tetapi dalam pembangunan partisipatif diartikan lebih sempit;
- b. Mengacu pada orang yang diminta pendapatnya mengenai sesuatu, para profesional pembangunan mendengarkan pandangan mereka, dan tidak wajib memasukkan pandangan mereka;
- c. Model ini mengandung resiko hanya mengambil (ekstraktif) yakni: para stakeholder jarang mengetahui bagaimana umpan balik mereka digunakan; orang kurang memiliki motivasi untuk berpartisipasi; bisa menjadi sekedar pro forma atau manipulatif bila para profesional pembangunan menggunakan proses konsultasi untuk mensahkan agenda mereka sendiri; proses-proses seperti ini biasanya tidak menghasilkan kepemilikan dan

keberlanjutan masyarakat;

- d. Konsultasi perlu disadari sebagai prosedur terbatas untuk mengikutsertakan para stakeholder.

2) Partisipasi dengan kolaborasi

- a. Mengundang para stakeholder untuk menjadi mitra dalam pengambilan keputusan; ada kolaborasi antara stakeholder;
- b. Mengikutsertakan stakeholder sejak pencarian fakta dan penyusunan konsep;
- c. Dalam proses yang bersifat kolaboratif, masing-masing stakeholder melakukan pembahasan dan menyusun dokumen serta mengembangkan bersama. Stakeholder ikut ambil bagian dalam keputusan;
- d. Proses ini dapat mengembangkan rasa memiliki yang dapat memotivasi mereka secara berkelanjutan; dialog dapat terus menerus perlu untuk mengembangkan komitmen.

3) Partisipasi melalui pemberdayaan/kendali bersama

- a. Kendali bersama melibatkan partisipasi yang lebih dalam daripada kolaborasi
- b. Warga masyarakat menjadi lebih diberdayakan dengan menerima tanggungjawab yang makin bertambah atas pengembangan dan pelaksanaan rencana
- c. Pembuat keputusan terpusat pada masyarakat
- d. Masyarakat (stakeholder) mengembangkan rencana tindakan dan mengelola kegiatan mereka berdasar prioritas dan gagasan mereka sendiri
- e. Profesional pembangunan menjadi fasilitator
- f. Memungkinkan para stakeholder menjadi pelaku penuh dalam pembangunan mereka.

Adapun bentuk partisipasi yang dapat diterapkan adalah bentuk partisipasi kolaborasi. Partisipasi stakeholder utamanya Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kota Ambon dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Melibatkan diri secara aktif sejak pencarian fakta dan penyusunan konsep, termasuk memberikan informasi mengenai sejarah perang kemerdekaan di Manado dan Ambon serta para serdadu yang direkrut untuk bergabung dalam tentara kerajaan Belanda;
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyajian nilai sejarah dalam perspektif kekinian;
- 3) Melakukan pembahasan dan menyusun dokumen serta mengembangkan bersama;
- 4) Mengambil bagian dalam keputusan mengenai visi pengelolaan situs; dan
- 5) Memberikan sumbangsih pendanaan berkaitan dengan pelestarian.

G. Kesimpulan

Situs Kompleks Pemakaman Belanda yang terdapat di Majene merupakan kompleks pemakaman yang mayoritas diisi oleh makam serdadu pribumi Minahasa dan Ambon sejak tahun 1930-an hingga 1950-an. Saat ini kondisi kompleks makam cukup memprihatinkan karena tidak

adanya perlindungan terhadap tinggalan arkeologis yang ada di dalamnya, bahkan beberapa bagian dari makam telah dijarah dan ditimpa oleh rumah penduduk.

Hasil identifikasi terhadap potensi arkeologis dan stakeholder serta assessment value yang dilakukan memperlihatkan bahwa situs tersebut perlu dilestarikan. Hal yang paling mendesak adalah perlindungan secara fisik mengingat keterancaman situs. Hasil identifikasi dan assessment situs ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan kajian dan kegiatan pelestarian. Selain itu, diharapkan pula keterlibatan Pemerintah Kota Manado, dan Pemerintah Kota Ambon mengingat situs kompleks makam ini menjadi memori yang mengikat hubungan emosi antara masyarakat Minahasa dan Ambon kini dengan leluhurnya dari masa lalu. Adapun saran bentuk keterlibatan stakeholder dalam pelestarian situs kompleks makam ini dapat menggunakan pendekatan partisipasi kolaboratif sehingga diharapkan dapat menjamin keterwakilan aspirasi berbagai pihak dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memberikan penafsiran dan arah pemanfaatan situs.

Daftar Pustaka

Anonim. 2014. Laporan Pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Tidak Terbit.

Bond, Stephen dan Derek Worthing. 2016. *Managing Built Heritage*. Second Edition. Wiley Blackwell: New Jersey.

Fisher, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terjemahan oleh Kartikasari. Jakarta: The British Council.

Hardyansah. Tanpa Tahun. Model pengelolaan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat. Diunduh dari <http://www.academia.edu> tanggal 15 Juni 2018.

Juniardi. "Pekuburan Belanda, Bukti Sejarah yang Terlupakan". Radar Sulbar. 16 April. 2002, Daerah:A4.

Matanasi, Petrik. 2012. *Pribumi Jadi Letnan KNIL*. Yogyakarta: Trompetbook.

-----2014. *Ikut NICA dan Berontak!!*. Yogyakarta: Sibuku.

Paeni, Muhklis (Ed.), dkk. 1995. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Dirjenbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud: Jakarta.

Prasodjo, 2003. Arkeologi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Buletin Cagar Budaya*. No. 3, Januari 2003.

Tanudirjo, Daud Aris. 1996. *Arkeologi Pasca-modernisme*

untuk Direnungkan. Makalah. Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) VII. Cipanas, 12-16 Maret 1996.

Tanudirjo, 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Perkotaan*. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Pengelolaan Warisan Budaya, Hotel Suwarnadwipa Palembang, 2006.

Tanudirjo, 2004. *Kriteria Penetapan Cagar Budaya*. Makalah disampaikan dalam Workshop Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya diselenggarakan Deputi Menteri Bidang Kepurbakalaan dan Museum, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Cirebon 16-18 Juni 2004.

Titik S, Yulita, dkk. 2011. Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya. *Seri Kajian Ilmiah*, Vol. 14, Nomor 11 Januari 2011. Hal: 52-73.

PROMOSI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN GORONTALO

Oleh. Yulianty Aliah

Kasubag. Keuangan Perencanaan Dinas Kominfo Kab. Gorontalo

Abstrak

Sebagai instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan melakukan Promosi Cagar Budaya. Salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini adalah wisata arkeologi khususnya wisata budaya yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di hampir seluruh Kabupaten Gorontalo. Wisata budaya di Kabupaten Gorontalo yang saat ini masih mengandalkan peninggalan-peninggalan caga budaya sebagai salah satu daya tarik menunjukkan belum optimalnya Pemerintah Daerah mengembangkan wisata ini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengemas berbagai atraksi wisata sebagai tambahan daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi harus mulai dirubah tidak hanya dengan menggunakan model public information, yang tugasnya hanya menyampaikan informasi saja (komunikasi satu arah) tetapi harus dikombinasikan dengan model komunikasi Two way Symmetric yang mau mendengarkan pendapat masyarakat (komunikasi dua arah). Sedangkan kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukkan sebagai bagian dari konsep bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix).

Kata Kunci :

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, komunikasi dua arah, bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix).

PENDAHULAUN

Kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Gorontalo pada abad ke-18 masih dalam tatanan pemerintahan kerajaan. Di Gorontalo memiliki lima kerajaan tradisional yang pada saat itu dari kelima kerajaan tersebut melakukan persekutuan (Limo lo pohala), yaitu Gorontalo (Hulontalo), Limboto (Limoetu), Bone-Suwawa-Bintauna, Bolango (kemudian kedudukannya diganti oleh Boalemo), dan Atinggola (Andagile). Dari persekutuan Limo lo pohala tersebut yang paling mendominasi identitas politiknya adalah Gorontalo. Namun, dalam perjalanannya kerajaan

Gorontalo dibawah pengaruh kesultanan Ternate, terutama pada periode pengaruh Sultan Baabullah Daud Syah (1570-1583). Adapun latar belakang masuknya pengaruh dari kesultanan Ternate di Gorontalo adalah perselisihan yang terjadi antara kerajaan Gorontalo dan Limboto, kondisi ini melibatkan pihak luar, yaitu Kesultanan Ternate dan kesultanan Gowa. Perselisihan tersebut dapat terselesaikan melalui perjanjian yang disebut Janjia lou duluwo limo lo pohala (1672) dan akhirnya terjadilah persekutuan antar Gorontalo dan Lombok. Sebelum akhirnya Belanda masuk dan berhasil menguasai Ternate, ditandai dengan penyerahan wilayah kekuasaan Ternate terhadap kolonial Belanda. Dengan demikian, atas pengaruh kesultanan Ternate terhadap Gorontalo, sehingga secara otomatis Gorontalo dapat dikuasai oleh Belanda pada 1705.

Letak Kabupaten Gorontalo terletak pada posisi di antara 00.24” - 10.02 Lintang Utara (LU) dan 121^o.59” - 123^o.32 Bujur Timur (BT) dengan batas-batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Gorontalo Utara, sebelah selatan dengan Teluk Tomini, sebelah barat dengan Kabupaten Boalemo dan di sebelah timur dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Kabupaten Gorontalo dengan kekayaan sumberdaya alam dan budayanya terus berupaya maju dalam segala sektor. Salah satu pengembangan yang tengah dilakukan adalah pariwisata. Kekayaan lokal yang menjadi modal dalam pengembangan pariwisata. Olehnya tidak salah kalau kita berkunjung Kabupaten Gorontalo ini dengan segala keunggulannya. Adapun sumberdaya arkeologi di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai potensi sebagai aset wisata budaya adalah :

1. Makam Raja Tuniyu

Makam Raja Tuniyu terletak di desa Mongolato kecamatan Telaga Jaya kabupaten Gorontalo. Raja Tuniyu adalah seorang raja dari kerajaan kecil di Gorontalo, Pusat kerajaan Raja Tuniyu memerintah di kerajaan Limutu-Hulontalo (Limboto-Gorontalo) pada tahun 1411 Masehi. Raja Tuniyu merupakan keturunan raja Ternate dari kerajaan Mongolate.



Foto 1. Makam Raja Tuniyu

2. Makam Tabala-bala

Makam Tabala-bala terletak di Desa Luwo'o Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Tabala-bala adalah seorang tokoh penyebar agama Islam sekitar abad XVII-XVIII Masehi. Tabala-bala berasal dari daerah ternate yang datang ke Gorontalo untuk menyebarkan agama Islam.



Foto 2. Makam Tabala-bala

3. Rumah Keluarga Nelly Yusuf

Rumah Keluarga Nelly Yusuf terletak di Desa Tuladongi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai Rumah Sakit pertama di daerah Gorontalo pada jaman kolonial. Setelah itu kemudian beralih fungsi sebagai gedung pertunjukan.



Foto 3. Rumah Keluarga Nelly Yusuf

4. Rumah Aman Hiola

Secara administratif rumah Aman Hiola terletak di desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.



Foto 4. Rumah Aman Hiola

5. Masjid Al Muttaqin Yosonegoro

Masjid ini terletak di kelurahan Yosonegoro, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo, Prov Gorontalo. Masjid ini letaknya pas di depan jalan raya Gorontaalo-Limboto. Masjid ini pertama didirikan oleh Mbah Amal Kyai Modjo pada tahun 1914 yang terbuat dari kayu, karena umatnya makin bertambah maka masjid ini mengalami perubahan, bahkan konstruksinya tidak lagi dari kayu tetapi sudah terbuat dari beton.



Foto 5. Masjid Al Muttaqin Yosonegoro

6. Rumah bergaya Indis

Secara administratif rumah bergaya Indis terletak di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Prov.Gorontalo. Rumah ini dibangun pada tahun 1932. Dari awal pembangunan sampai sekarang bangunan ini berfungsi sebagai hunian.



Foto 6. Rumah bergaya indis

7. Rumah Tradisional Jawa Tondano

Rumah adat Jawa Tondano terletak di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.



Foto 7. Rumah tradisional Jawa Tondano

8. Makam Raja Panipi

Makam Raja Panipi terletak di desa Barakati, kecamatan Batudaa, kabupaten Gorontalo, Raja Panipi adalah raja Gorontalo yang berkedudukan di Batudaa, raja Panipi berkuasa antara tahun 1821-1874 dengan nama asli Bobihoe.



Foto 8. Makam Raja Panipi

9. Pasar Tradisional Yosonegoro

Pasar tradisional Yosonegoro terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.



Foto 9. Pasar tradisional Yosonegoro

10. Pesantren Al Khaerat Kyai Modjo

Pesantren Al Khaerat Kyai Modjo terletak di Desa Umbulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.



Foto 10. Pesantren Al Khaerat Kyai Modjo

11. Makam Keturunan Kyai Modjo

Makam keturunan keluarga Kyai Modjo terletak di Desa Umbulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Lokasi pemakaman letaknya di atas bukit.



Foto 11. Makam keturunan Kyai Modjo

12. Makam Raja Olih

Makam Raja Olih terletak di Desa Bolihuangga, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.



Foto 12. Makam Raja Olih

Benda cagar budaya merupakan tempat terjadinya peristiwa penting/bersejarah dapat dipergunakan sebagai sumber penghubung dengan masa lalu dapat dijadikan sarana pembelajaran serta membuka kesadaran pentingnya menghayati proses nilai-nilai historis yang tersirat di dalamnya. Berdasarkan uraian tersebut maka keberadaan benda cagar budaya Gorontalo bisa mewakili proses pembangunan bangsa ini, karena beberapa bangunan benda cagar budaya tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia secara nasional. Gorontalo memiliki benda cagar budaya sebagai peninggalan sejarah yang perlu diperhatikan keberadaannya, sebab benda cagar budaya tersebut mencerminkan upaya dinamika perjuangan rakyat Gorontalo yang mengandung nilai-nilai historis.

Benda cagar budaya tersebut menyimpan kenangan masa lalu dan menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Gorontalo yang perlu kita jadikan sebagai tempat pembelajaran sejarah sebagai cermin untuk membangun masa depan Gorontalo itu sendiri. Keberadaan benda cagar budaya Gorontalo merupakan bukti sejarah yang mewarnai perjuangan rakyat pada masa prakemerdekaan. Namun dewasa ini benda cagar budaya Gorontalo hanya dipandang oleh masyarakat hanya sebatas peninggalan sejarah dan pemanfaatannya belum dimaksimalkan.

Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan budaya oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota menjadi salah satu penyebab terancam punahnya bangunan budaya di Indonesia. Gubernur, bupati dan walikota di Indonesia lebih memikirkan masalah kepentingan politik dan ekonomi dibandingkan dengan budaya. Menurut Budihardjo (2011) bangunan bersejarah tidak mendapat perhatian serius dari kepala daerah, padahal dari bangunan ini sangat penting untuk pendidikan dan menambah daya tarik wisata. Sayangnya saat ini pemerintah lebih suka membangun gedung yang baru daripada menjaga kelestarian bangunan bersejarah. Hal ini menjadi tantangan serius pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai upaya untuk mengenalkan cagar budaya demi menjaga serta melestarikan warisan leluhur.

Menyadarkan masyarakat mengenai keberadaan cagar budaya tidak hanya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu, akan tetapi membuat masyarakat lebih peduli dengan keberadaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, mengharuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo untuk berinovasi dan kreatif dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini strategi komunikasi yang dimaksud adalah dengan menggabungkan tiga konsep yakni strategi, komunikasi dan pemasaran.

Strategi merupakan simpulan taktik dalam keperluan bagaimana tujuan yang diinginkan dapat diperoleh atau didapat (Prisgunanto, 2006 : 86). Sedangkan definisi komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti

yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) yang dikutip oleh Muhammad (2009 : 2) berbunyi, "Communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behaviour of the other individuals" (komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain). Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan.

Jadi berdasarkan definisi tersebut diatas, komunikasi diartikan sebagai kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan komunikan atau orang yang ditujukan dalam menerima pesan. Hasil akhir dari komunikasi adalah adanya perubahan sikap lawan bicara atau komunikasi yang diartikan sebagai sikap menerima komunikasi akan pesan yang dibawa oleh komunikator dalam pertukaran dimaksud. Diharapkan, komunikan akan dengan serta merta menerima pesan, terpengaruh, bahkan mengikuti apa yang diajukan oleh si komunikator. Hal ini karena pengetahuannya terganggu dan menyebabkan mereka ingin melengkapinya pengetahuan yang mereka miliki. Keberhasilan menyinggung dan mengganggu pengetahuan inilah yang akan menimbulkan rasa ingin tahu yang merupakan salah satu stimulus penting dalam menciptakan komunikasi pemasaran.

Beberapa literatur menyamaartikan istilah promosi dengan komunikasi pemasaran. Bahkan, marketing communication mix disamaartikan dengan promotion mix atau promotional mix. Crosier menjelaskan bahwa istilah-istilah tersebut disamaartikan karena terdapat konteks pengertian yang sama dalam memahami untuk konteks pijakan 4P's (Product, Price, Place, dan Promotion) (Prisgunanto, 2006: 9). Dalam konsep komunikasi, product dihubungkan dengan solusi pelanggan (customer cost), price dihubungkan dengan biaya pelanggan (customer cost), place dihubungkan dengan kenyamanan (convenience), sedangkan promotion dihubungkan dengan sebuah komunikasi (communications). Empat konsep ini sering diistilahkan dengan bauran komunikasi (communication mix) 'Four C's' (Soemangara, 2006 : 3).

Kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukkan sebagai bagian dari konsep bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix). Bauran komunikasi pemasaran merupakan penggabungan dari lima model komunikasi dalam pemasaran, yaitu advertising, sales promotion, public relations, personal selling dan direct selling. Demikian pula halnya dengan event dan exhibition, keduanya merupakan bagian dari marketing communication mix yang dikembangkan oleh bagian sales promotion. Komunikasi yang digunakan dalam kegiatan sales promotion membutuhkan media promosi seperti banner, poster, folder, catalog, atau

corporate profile. Sedangkan pada personal selling, media tersebut juga dibutuhkan dalam mempromosikan suatu jasa kepada khalayak secara tatap muka (Soemanagara, 2006).

Pada dasarnya, marketing communication mix terdiri atas empat elemen dasar, kata De Loizer, yang dilanjutkan oleh Kotler, yang kemudian bentuknya dimodifikasi oleh Crosier dan Shimp. Kemudian, konsepsi tersebut dirumuskan oleh Belch tahun 1995 menjadi marketing communication mix.

Menurut Nickels (1984 : 19) bauran promosi (promotion mix) yang lengkap meliputi enam saluran yaitu, iklan (advertising), penjualan personal (personal selling), promosi dari mulut ke mulut (word of mouth), promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity), dan hubungan masyarakat (public relations). Sedangkan menurut Belch and Belch (2006 : 24) bauran promosi meliputi Advertising, Interactive/Internet marketing, Sales promotion, Direct marketing, Publicity/ public relations, Personal selling.

PEMBAHASAN

Sebagai Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan melakukan kegiatan sosialisasi sehingga komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Contoh sederhana dari komunikasi dua arah yaitu: seorang manager pemasaran menjelaskan kepada bawahannya, kemudian setelah itu ada respon (umpan balik) dari bawahannya yang menyatakan bagaimana mengatasi/ menghindari kendala-kendala yang ada dalam pemasaran sedangkan komunikasi satu arah mempunyai kekurangan karena bisa saja terjadi miss communication karena tidak adanya umpan balik. Contoh sederhana dari komunikasi satu arah adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang dituju, bisa saja pesan itu tidak sesuai dengan yang dimaksud, karena daya pikir orang untuk menerima informasi berbeda-beda. Jadi, langkah baiknya bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menggunakan komunikasi dua arah. Sehingga ada hubungan timbal balik.

Di masa lalu dan bahkan hingga sekarang ini pun, arkeologi selalu mendapat cap tentang "kekunoan". Image ini agaknya menjadi kendala untuk menancapkan pada generasi yang tidak pernah mengalami masa lalu atas nilai kekunoan tersebut. Rentang waktu panjang membuat jarak "frame of experience" dan "frame of reference" antara informasi arkeologi tersebut dengan publik (sebagai konsumen). Disinilah kemudian diperlukan creator yang bisa menjembatani nilai informasi masa silam menjadi bagian dari masa kini. Lebih dari mengkreasi informasi, dalam konteks bauran komunikasi diperlukan tenaga pemasar yang piawai untuk membawakan atau menghantarkan informasi tersebut.

Para creator harus menetapkan entitas arkeologi sebagai product-knowledge. Penetapan ini bermakna bahwa arkeologi sebagai sebuah pesan. Maka dengan demikian, perlu identifikasi terhadap nilai informasi yang terkandung dalam material arkeologi. Misalnya, saat ini publik mengetahui bahwa Kerajaan Majapahit itu berpusat di Trowulan, Mojokerto. Maka, informasi yang bisa dikomunikasikan kepada publik jangan semata-mata hanya berupa benda-benda purbakala. Harus disediakan informasi yang sifatnya in-tangible yang mampu membawa imajinasi bagi publik. Selama ini, kritik yang harus ditujukan kepada arkeolog adalah ketidak-tersampaiannya informasi yang berkualitas tentang kearkeologian kepada publik. Akibatnya, ketika publik melihat atau menyaksikan sesuatu yang kuno, maka cara pandangnya (persepsinya) hanya berdasarkan pandangan kasat mata belaka. Sampai sekarang belum banyak dikembangkan informasi yang dikemas dengan efektif yang mampu menyita "kebutuhan" publik. Dengan demikian, publik tidak memperoleh manfaat sama sekali dan tidak tertarik (Widodo, 2011).

Pada dasarnya, tindakan komunikasi diperlukan untuk mewujudkan adanya perubahan meanset publik terhadap makna arkeologi. Bangunan kesadaran baru diperlukan agar publik tidak menjadi berjarak dengan makna arkeologi tersebut.

Berdasarkan teori bauran promosi yang telah dikemukakan oleh Nickels serta Belch and Belch, maka strategi promosi yang tepat diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dalam mempromosikan cagar budaya sehingga dengan harapan terjadinya perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan tindakan yang dikendaki. Serta penggunaan strategi komunikasi yang efektif dapat memberikan dampak positif sehingga cagar budaya dapat dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo adalah :

a. Promosi dari mulut ke mulut (word of mouth)

Promosi yang paling sering kita jumpai adalah promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini terjadi karena adanya interaksi antara penjaga situs atau orang yang mempromosikan cagar budaya dengan pengunjung, atau juga dari pengunjung dengan orang lain. Yang selanjutnya bisa sambung menyambung dari mulut ke mulut. Sejak zaman dahulu sebelum ada kemajuan teknologi, promosi inilah yang dilakukan. Dan sampai sekarang pun terbukti ampuh dan manjur. Karena promosi dari mulut ke mulut bisa dibidang promosi berupa rekomendasi dari pengunjung ke orang lain. Agar tercipta cara promosi dari mulut ke mulut yang pertama yang harus kita lakukan adalah :

1. Memberikan kepuasan kepada pengunjung ataupun calon pengunjung. Seperti menyediakan fasilitas di tempat cagar budaya agar pengunjung bisa nyaman dan betah untuk menikmati warisan budaya nenek moyang.
2. Terima masukkan yang sekiranya baik dari pengunjung untuk warisan budaya.

b. Interactive/Internet marketing

Pemasaran internet berbeda karena internet mempunyai fasilitas dimana pengunjung dan calon pengunjung dapat menerima informasi lebih seperti foto, buat surat kebutuhan, merespon pertanyaan, dan melakukan kunjungan secara rutin. Internet marketing digunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo untuk melakukan tujuan komunikasi pemasaran bisa dengan menggunakan sosial media untuk memberikan informasi tentang cagar budaya yang ada di provinsi Gorontalo.

c. Publicity

Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Kata publisitas berasal dari kata Inggris, publicity yang memiliki pengertian sebagai berikut: publicity is information from an outside source that is used by the media because the information has news value. It is an uncontrolled method of placing messages in the media because the source does not pay the media placement. (Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan sebuah metode yang tidak dapat terkontrol, dalam penempatan pesan di media massa karena sumber tidak membayar media untuk memuat berita bersangkutan). Dengan demikian publisitas adalah informasi yang bukan berasal dari media massa atau bukan pencarian wartawan media massa itu sendiri namun media massa menggunakan informasi itu karena memiliki nilai berita. Media massa kerap melaporkan berita publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk mendapatkan berita dibanding harus mencari sendiri yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya.

d. Exhibition

Dalam pameran cagar budaya, bisa menyajikan materi pameran tentang bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dengan tujuan diadakannya kegiatan pameran antara lain sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai benda cagar budaya kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian cagar budaya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya cagar budaya di daerahnya. Sasaran yang dicapai adalah seluruh masyarakat pecinta dan pemerhati dalam pelestarian budaya baik di dalam maupun di luar Gorontalo, sehingga dapat diketahui tingkat apresiasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Dengan tersajinya koleksi cagar budaya, maka informasi koleksi yang memuat nilai-nilai luhur sejarah dan budaya akan diterima oleh masyarakat. Diharapkan pameran ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang apa dan bagaimana warisan budaya artefaktual yang ada, serta pemahaman tentang arti pentingnya upaya pelestarian, baik benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar

budaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

Anonim. (2010), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Belch E. George & Belch A. Michael. (2006). Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communicationsperspective. Sixth Edition. The Mcgraw-Hill Companies.

Budihardjo, Eko. (2011). Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta , di Yogyakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Muhammad, Arni. (2009). Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Nickles, William G. (1984). Marketing Communications and Promotion (Third Edition), New York : John Wiley & Sons. Inc.

Prisgunanto, Ilham. (2006). Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik dilengkapi analisis SOSTAC & STOP-SIT. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soemanagara R. Dermawan. (2006). Strategic Marketing Communications: Konsep Strategi dan Terapan. Bandung : Alfabeta.

Widodo, Suko. (2011). Mengomunikasikan Makna Arkeologi bagi Publik dalam Konteks Kekinian. Makalah Pleno Pia 2011

INVENTARISASI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh. Tim inventarisasi BPCB Gorontalo

Ihktisar

Dalam proses penetapan cagar budaya harus didahului dengan kegiatan inventarisasi atau pendataan cagar budaya baik di luar ruangan (lapangan) maupun di dalam ruangan. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk menemukan, mencari, dan mencatat tentang tinggalan budaya yang kemudian didaftarkan. Buol adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi cagar budaya yang tersebar di beberapa tempat. Hasil Inventarisasi Cagar Budaya yang dilakukan di Kabupaten Buol menemukan beberapa tinggalan yang diduga cagar budaya yang terdiri dari bangunan dan struktur diduga cagar budaya.

Kata Kunci: **Inventarisasi, Buol, potensi cagar budaya**

1. Latar Belakang

Tinggalan purbakala merupakan kekayaan budaya bangsa, yang persebarannya hampir merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sumberdaya arkeologi tersebut adalah warisan leluhur bangsa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis, maupun untuk kepentingan yang bersifat ekonomis (Cleree, 1990:5-10). Pernyataan ini selaras dengan apa yang dimaksud cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Adapun yang dimaksud tentang cagar budaya yaitu warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU RI No 11 Tahun 2010, 2010:2).

Adapun kriteria-kriteria yang berkenaan dengan CB tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 salah satunya menyebutkan yang dapat diusulkan sebagai cagar budaya (Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, atau Struktur Cagar Budaya) adalah:

- 1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

(UU RI No 11 Tahun 2010, 2010:8-9)

Namun jika benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di atas dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya (UU RI No 11 Tahun 2010, 2010:10).

Keberadaan cagar budaya baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak sering kita jumpai atau temukan di pedesaan/kampung tua, lereng gunung, persawahan, perbukitan bahkan ada yang masih tertimbun dalam tanah bahkan di bawah air yang banyak tersebar di pelosok Nusantara. Namun dari persebarannya tersebut, sangat banyak yang belum diketahui secara pasti keberadaannya dan informasi secara mendetail tentang cagar budaya tersebut.

Salah satu daerah yang di Nusantara yang memiliki sebaran Cagar Budaya maupun yang diduga Cagar Budaya yaitu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat kebudayaan daerah ini serumpun dengan kebudayaan daerah-daerah di Sulawesi Tengah, maka banyak warisan budaya yang merupakan cagar budaya baik itu dalam bentuk bangunan maupun benda. Bukan hanya itu, Kabupaten Buol juga tidak terlepas dari proses kolonialisme karena merupakan daerah tambang atau penghasil emas sejak Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang juga menjadi sebaran cagar budaya maupun yang diduga sebagai cagar budaya. Namun sampai saat ini belum diperoleh informasi secara mendetail mengenai cagar budaya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelestarian cagar budaya di tiga wilayah kerja yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo melakukan langkah awal dalam pengelolaan Cagar Budaya di wilayah ini yakni dengan melakukan pendataan (inventarisasi) cagar budaya. Kegiatan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 khususnya pada pasal 26 yang menyebutkan:

- 1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- 2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- 3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

2. Letak Geografis

Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada awalnya, Buol tergabung dalam satu kabupaten dengan Tolitoli sehingga dinamakan Kabupaten Buol Tolitoli. Namun sejak 12 Oktober 1999, Buol merupakan satu kabupaten yang berdiri sendiri.

Kabupaten Buol terletak pada posisi $0,35^{\circ}$ - $1,20^{\circ}$ Lintang Utara dan $120,12^{\circ}$ - $122,09^{\circ}$ Bujur Timur. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Buol adalah:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi sekaligus berbatasan dengan negara tetangga Philipina
- Sebelah selatan : Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah timur : Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
- Sebelah barat : Kabupaten Tolitoli.

Luas wilayah daratan Kabupaten Buol $\pm 4.043,57 \text{ Km}^2$ dan luas laut $\pm 3.777 \text{ Km}^2$ yang terbagi atas 11 kecamatan yang meliputi 7 kelurahan dan 108 desa. Kecamatan terluas adalah adalah Tiloan dengan luas wilayah $1.437,70 \text{ km}^2$ atau 35,56 persen yang terbagi atas 9 desa. Sedangkan Kecamatan Karamat merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yakni $153,10 \text{ km}^2$ atau 3,79 persen yang terbagi atas 7 desa.

Kabupaten Buol memiliki ketinggian tempat yang bervariasi yakni 475-2.000 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografis datar hingga pegunungan dengan derajat kemiringan juga bervariasi. Sedangkan dataran rendah umumnya tersebar di sekitar pantai dan letaknya bervariasi.

Suhu udara maksimum rata-rata di Kabupaten Buol pada tahun 2015 yaitu $33,26^{\circ}\text{C}$ dengan suhu maksimum tertinggi mencapai $33,80^{\circ}\text{C}$ yang terjadi pada bulan April 2015. Sementara itu suhu minimum rata-rata tercatat $22,06^{\circ}\text{C}$, dengan suhu terendah $21,20^{\circ}\text{C}$ yang terjadi pada

bulan April 2015. Adapun rata-rata kelembaban udara pada tahun 2015 sebesar 78,03 persen.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Pada musim hujan, angin bertiup agak menurun dibandingkan dengan keadaan angin pada musim kering. Pada tahun 2015 di Kabupaten Buol kecepatan angin maksimum adalah 2-3 knots. Curah hujan sepanjang tahun 2015 tercatat 179 hari hujan dengan curah hujan sebesar 968 mm. Sehingga rata-rata hari hujan per bulan adalah 15 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar 80,6 mm (BPS Kabupaten Buol, 2016).

3. Sejarah Singkat Kabupaten Buol

Sejarah Buol dikenal secara teratur sejak zaman pemerintahan Ndubu I dengan permaisurinya bernama Sakilato (\pm Tahun 1380 M) dan selanjutnya digantikan oleh Anagu Rlipu sebagai Madika yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Guamonial ke Lamolan. Setelah Anagu Rlipu meninggal dan Dai Bolre belum kembali maka Bokidu memutuskan Baratalangit menjadi Madika (Raja) dengan gelar Madika Moputi atau Sultan Eato dan diperkirakan Madika Moputi adalah Raja Buol yang pertama memeluk Islam dengan nama Muhammad Tahir Wazairuladhim Abdurahman dan meninggal tahun 1594 M.

Pengganti Madika Moputi adalah putra Dai Bolre yaitu Pombang Rlipu yang diberi gelar Prins Yakut Kuntu Amas raja besar oleh Portugis. Setelah masa pemerintahan Pombang Rlipu yang terkenal adalah Sultan Ponda yang banyak melakukan perlawanan pada Portugis yang akhirnya tertangkap dan dihukum mati pada tahun 1770 M.

Sesudah Sultan Ponda yang memerintah adalah Dinasti Mokoapat, yaitu:

- Sultan Undain
- Datumimo (1804-1810)
- Mokoapat (1810-1818)
- Ndubu II
- Takuloe
- Datumula (1839-1843)
- Elam Siradjudin (1843-1857)
- Modeiyo (1857-1858)
- Lahadung (1858-1864)

Dilanjutkan oleh Dinasti Turumbu/Turungku yaitu:

- Turumbu/Turungku (1864-1890)
- Haji Patra Turungku (1890-1899)
- Datu Alam Turungku (1899 – 1914)
- Haji Akhmad Turungku (1914-1947)
- Mohammad Aminullah Turungku (1947-1997)
- Mahmud Aminullah Turungku (1997-2014)
- Mohammad Safri Turungku (2015-sekarang)

Pada awalnya Kabupaten Buol tergabung dengan Tolitoli dengan nama Kabupaten Buol Tolitoli. Namun sejak diterbitkannya Undang-undang RI nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali

dan Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol terpisah dari Kabupaten Buol Tolitoli dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten Buol.

Sebelumnya pada pembentukan Negara Indonesia Timur, Buol adalah daerah Swapraja yang tergabung dengan daerah Gorontalo. Selanjutnya melalui Undang-undang RI nomor 29 tahun 1959 Swapraja Tolitoli dan Swapraja Buol tergabung menjadi Kabupaten Buol Tolitoli. Sejak tanggal 16 Februari 1966 melalui keputusan DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah, Buol diusulkan menjadi kabupaten dan keinginan ini baru terlaksana dengan pembentukan Kabupaten Buol pada tanggal 12 Oktober 1999. (<http://www.pa-buol.go.id/artikel-715-gambaran-umum-kabupaten-buol.html>).

4. Hasil Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Buol

4.1 Makam Raja-raja Buol

Makam raja-raja Buol terletak di Jalan Syarif Mansur, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Situs berada di tepi jalan raya yang menghubungkan antara Buol dengan Tolitoli serta Buol dengan Gorontalo. Secara astronomi keletakan situs berada pada Lintang Utara 1°9'41,30¹¹ dan Bujur Timur 121°25'59,20¹¹ dan UTM X 325658.21927908924, Y 128426.08585668003, dengan ketinggian 15 mdpl



Foto 1. Makam Raja-raja Buol
doc.bpcbgorontalo/2017

Makam dikelilingi oleh pagar dengan ukuran 15,13 meter x 18,18 meter. Situs ini berada di lingkungan pemukiman dengan kondisi lingkungan makam kurang terawat, hampir di seluruh bagian makam ditumbuhi rumput. Makam yang paling tua berangkat tahun 1952 yakni makam dari Ndubu Mangkona. Ada beberapa keturunan atau keluarga dari Raja Buol yang dimakamkan di lokasi tersebut terbagi menjadi dua tempat yakni:

- Di dalam pagar inti antara lain: Ndubu Mangkona (wafat 1 Januari 1952), Abdul Muthalib Turungku, R.Rb. Turungku, dan Basar Turungku, selain terdapat makam-makam lain yang tidak ada identitasnya.
- Makam yang berada di luar pagar inti yakni: Mansyur DS. Butudoka (11-11-1952 – 17-12-2016), Berlian A.Hi. Turungku (15-09-1938 – 12-12-2015), Hadidin Syarif Hadi (26-12-1926 – 19-05-2009), dan Ibrahim Turungku



Foto 2. Salah satu bentuk nisan di dalam kompleks makam Raja Buol
Doc.bpcbgorontalo/2017

(10-2-1942 – 16-05-2014) serta ada beberapa makam yang tidak terdapat identitasnya.

Kompleks makam Raja- raja Buol Nisannya memakai nisan Tipe Aceh dengan bahan batuan granit. Baatuan granit digunakan karena mudah dibentuk dan daerah buol banyak batuan granit. Tipe aceh yang digunakan bentuk gada dan bentuk pipih. Bentuk gadah berjumlah 5 nisan dan pipih berjumlah 2 buah . Nisan bentuk gadah digunakan untuk laki-lakidan hanya menggunakan satu nisan, sedangkan bentuk pipih untuk perempuan menggunakan dua buah nisan. Dengan ukura masing-masing nisan :

- Nisan bentuk gadah I, dibungkus kain Putih Tinggi 35 cm x diameter 20
- Nisan bentuk gadah II, bagian puncak berbentuk segitiga Tinggi 52 x diameter 16cm
- Nisan bentuk gadah III, Tinggi 40 x diameter 15 cm
- Nisan bentuk gadah IV, Tinggi 37 x diameter 15 cm
- Nisan bentuk gadah V, Tinggi 15 x diameter 10 cm
- Nisan bentuk pipih berukuran , Tinggi 10 x lebar 20 cm

Catatan sejarah Buol mulai dikenal secara teratur sejak zaman pemerintahan Ndubu I. Selanjutnya Ndubu I digantikan oleh Anagu Rlipu sebagai Madika (Raja). Setelah Anogu Rlipu meninggal, maka Bokidu memutuskan Baratalangit menjadi Madika dengan gelar Madika Moputi atau Sultan Eato. Beliau meninggal tahun 1594 M.

Kemudian Madika Moputi diganti Pombang Rlipu yang merupakan anak dari Dai Bolre. Pombang Rlipu terkenal dengan Sultan Pondu yang banyak melakukan perlawanan pada Portugis. Akhirnya ia tertangkap dan dihukum mati pada tahun 1770 M. Sesudah Sultan Pondu, kerajaan Buol diperintah oleh Dinasti Mokoapat yang dilanjutkan oleh Dinasti Turumbu/Turungku antara lain:

- Turumbu/Turungku (1864-1890)
- Haji Patra Turungku (1890-1899)
- Datu Alam Turungku (1899-1914)
- Haji Akhmad Turungku (1914-1947)
- Mohammad Aminullah Turungku (1947-1997)
- Mahmud Aminullah Turungku (1997-2014)

Pada tahun 2014 Raja Mahmud Aminullah Turungku meninggal dunia dan sejak tahun 2015 kedudukan Raja

digantikan oleh Mohammad Safri Turungku.

4.2 Tugu ID. Awuy (Tugu Leok)

Tugu terletak di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Usman Ladjong, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Monumen peringatan perjuangan ID Awuy atau dikenal sebagai Tugu Leog merupakan bukti perjuangan Rakyat Buol Melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh ID. Awuy.

Tugu atau monumen berada di tepi jalan raya yang menghubungkan antara Buol dengan Tolitoli serta Buol dengan Gorontalo. Secara astronomi keletakan situs berada pada Lintang Utara $01^{\circ}11'29,81''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}25'09,09''$ dan UTM X 324110.95044444455, Y 131759.7984731994, dengan ketinggian 13 mdpl.



Foto 3. Tugu Id Awuy
doc.bpcbgorontalo/2017

Tugu ini merupakan tugu untuk memperingati penembakan terhadap I.D. Awuy yang merupakan pimpinan gerakan merah putih yang ditembak oleh Tentara Belanda. Secara historis, berawal ketika Tentara Jepang mulai masuk di daerah selatan, maka Pemerintah Hindia Belanda mulai kalang kabut. Melihat situasi tersebut pada tanggal 25 Januari 1942 polisi yang dipimpin oleh 9 orang agen Polisi tingkat II masing-masing: Awuy, Waani, Piring, Miokalu, Siswoyo, Supandi, Languyu, J. Habibie, dan Kamal mengadakan penyerangan terhadap Belanda. Rupanya penyerangan tersebut kurang terencana, sementara berita tentang segera mendaratnya pasukan Jepang semakin santer sehingga bisa dimaklumi bahwa polisi yang ada tidak lagi memikirkan hal-hal kepentingan umum namun memikirkan bagaimana menyelamatkan diri sendiri seaman mungkin apabila ada serangan balasan dari pihak Belanda atau kalau tentara Jepang mendarat.

Pada tanggal 18 Februari 1942, Letnan Jenderal Haerberts dan Sersan Welinga mendarat di Pantai Kalangkangan. Polisi-polisi yang melakukan penyerangan tersebut setelah mendengar adanya pendaratan di Kalangkangan, mereka menyelamatkan diri di kaki-kaki Gunung Tuweley. Sementara kedua pimpinan mereka yakni Awuy dan Waani mengendarai Jeep menuju ke Kalangkangan. Di tengah perjalanan kedua polisi tersebut bertemu dengan tentara Belanda dan terjadi tembak-menembak. Jeep

yang mereka kendari kena tambah bannya, sementara Awuy terus menuju Buol, sedangkan Waani lari ke bukit di atas Kampung Sidoarjo. Seminggu kemudian, polisi-polisi yang melakukan penyerangan tersebut tertangkap kecuali J. Habibie dan Kamal yang dapat melarikan diri ke Gorontalo. Sedangkan Waani, Piring, Languyu, Supandi, Moku, Siswoyo dihukum mati di Gunung Panasakan, sedangkan Awuy yang tertangkap di Buol divonis/ditembak di tempat tersebut. (Tjoek Soedarmadji, 1983:85)

4.3 Pangkalan TNI AL (Rumah Peninggalan Belanda Bekas Kantor Kerajaan)

Bangunan terletak di Jalan Awuy, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Tengah. Letak bangunan berada pada Lintang Utara $01^{\circ}11'32,00''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}25'09,31''$ dan UTM X 324117.79033699725, Y 131827.05972203185, dengan ketinggian 10 mdpl.

Bangunan yang sekarang dipergunakan sebagai Pos TNI Angkatan Laut Buol berupa bangunan permanen berdinding beton, beratap seng dengan plafon dari lembaran-lembaran kayu yang tersusun rapat. Bangunan terdiri atas teras dan bangunan induk. Teras berukuran 3.5 meter x 4.5 meter, sedangkan rumah induk berukuran 12 meter x 13 meter. Tinggi atap dari lantai 3 meter.



Foto 4. Pangkalan TNI AL (Rumah Peninggalan Belanda Bekas Kantor Kerajaan)

Lingkungan sekitar bangunan berupa halaman yang cukup luas serta dikelilingi pagar beton dengan ukuran 30 meter x 30 meter. Beberapa sumber menyebutkan bahwa rumah ini dahulunya merupakan rumah sakit pada masa Kolonial Belanda kemudian pernah dipergunakan sebagai kantor pemerintahan dan kantor Polisi.

4.4 Penjara Tua

Bangunan terletak di Jalan Awuy, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara astronomi keletakan bangunan berada pada Lintang Utara $01^{\circ}11'33,65''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}25'4,61''$ dan UTM X 323972.5193935076, Y 131877.82244278956, dengan ketinggian 9 mdpl.



Foto 5. Penjara Tua
doc.bpcbgorontalo/2017

4.5 Makam Dai Borie (Makam Keramat Tanjung Dako)

Makam terletak di Pakunayat Tanjung Dako, Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara astronomi letak makam berada pada Lintang Utara $01^{\circ}17'48,30''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}25'46,20''$ dan UTM X 325265.1205130685, Y 143384.2886233582, dengan ketinggian 11 mdpl.

Makam berada di sebuah tanjung, untuk mencapai lokasi makam keramat ini dapat ditempuh menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh ± 20 menit dari pusat Desa Mendaan. Makam dikelilingi oleh pagar dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter.

Makam Dai Borle terletak di dalam Gua dengan ukuran mulut gua lebar 5,5 meter, panjang 6,6 meter, makam ditutup dengan kain berwarna kuning. Makam tidak menggukang jrat, sebagai tanda menggunakan nisan saatu buah, yang diletakkan pada bagian tengah. Nisan makam

berbentuk gadah tipe aceh dengan ukuran Tinggi nisan 70 cm x lebar 15 cm. Pada hari-hari tertentu makaam ini sering dikunjungi oleh masyarakat untuk bersiarah, karena makam ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

Dari sisi historis bahwa pemerintahan Kerajaan Buol sudah mulai teratur sejak pemerintahan madika (raja) Ndubu. Madika Ndubu memiliki 3 orang anak seorang puteri bernama Anggatibone dan dua orang laki-laki bernama Anogu Rlipu dan Dai Bolre. Berdasarkan keputusan Bokidu (Dewan Penasehat Madika/Raja) Ndubu digantikan oleh puteranya yang bernama Anogu Rlipu. Dalam perjalanan pemerintahannya, Madika Anogu Rlipu ternyata tidak cocok dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga akhirnya ia ditinggalkan sendiri di Buol, Anggatibone dan Dai Boire melakukan pelayaran ke Tolitoli (Kerajaan Nalu pada waktu itu). Dai Bolre Kawin dengan puteri Mandalulingo.

Dikisahkan bahwa perjalanan Dai Bolre hanya sampai di Mamuju, sedangkan Anggatibone terus ke Goa. Dai Bolre kemudian ingin kembali ke Buol, namun di tengah perjalanannya tewas ketika berhadapan perompak-perompak asal Mindanao. Ketika Dai Bolre tewas maka alam menjadi gelap, badai dan angin ribut serta gelombang besar yang menghancurkan perahu orang Mangindano tersebut. Panglima Mindanao itu berpendapat bahwa yang tewas itu bukan orang sembarangan tetapi orang keramat, oleh karena itu harus dikuburkan dengan baik di darat. Maka dipilihlah Pakunayat Tanjung Dako untuk memakamkan Dai Bolre. Oleh masyarakat setempat dinamakan “keramat” meskipun letak makam berada di dua tanjung tetapi air laut tidak pernah masuk walaupun air mengalami pasang. (A. Rahim Samad, 2000:54).



Foto 6. Makam Dai Borie
doc.bpcbgorontalo/2017

4.6 Rumah Adat Buol/ Rumah Raja Mohammad Safri Turungku

Bangunan terletak di sudut antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan M.K. Razak, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara astronomi bangunan ini berada pada Lintang Utara $01^{\circ}11'28,52''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}25'07,03''$ dan UTM X 324047.2429825806, Y 131720.21307872853, dengan ketinggian 8 mdpl. Tipe bangunan berupa rumah panggung tersusun dari kayu dengan tiang penyangga (umpak) sebanyak 24 buah dan tinggi 1,2 meter. Bangunan bercorak rumah adat Boul ini berukuran 11.6 meter x 18.9 meter dengan tinggi atap 5.7 meter.



Foto 7. Rumah adat Buol/Rumah Raja Mohammad Safri Turungku
doc.bpcbgorontalo/2017

Lingkungan sekitar bangunan berupa halaman yang cukup luas serta dikelilingi pagar beton dengan luas lahan $\pm 3.400 \text{ m}^2$. $121^{\circ}25'07,03''$ dan UTM X 324047.2429825806, Y 131720.21307872853, dengan ketinggian 8 mdpl. Tipe bangunan berupa rumah panggung tersusun dari kayu dengan tiang penyangga (umpak) sebanyak 24 buah dan tinggi 1,2 meter. Bangunan bercorak rumah adat Boul ini berukuran 11.6 meter x 18.9 meter dengan tinggi atap 5.7 meter. Lingkungan sekitar bangunan berupa halaman yang cukup luas serta dikelilingi pagar beton dengan luas lahan $\pm 3.400 \text{ m}^2$.

Secara historis bahwa pada tahun 1914, Datu Alam Turungku digantikan oleh Haji Ahmad Turungku sebagai Raja Buol. Kemudian pada tahun 1916, Haji Ahmad Turungku dinobatkan sebagai Madika Buol secara adat (ni tonguok).

Haji Ahmad Turungku memindahkan kedudukan kerajaan dari Kasangan ke Roji. Pada tahun 1924, istana kerajaan dibangun cukup megah dengan atap terbuat dari sirap, sehingga dikenal dengan nama Kumalrigu Sirap. Pada tahun 1930, daerah Leok telah mengalami kemajuan. Atas usul Kontrolir J. Rookmake (1929) dan M. Waiswisz (1930), maka Haji Ahmad Turungku menjadikan Leok sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Kemudian istana kerajaan di Roji juga dipindahkan ke Leok.

Menurut narasumber bahwa istana kerajaan yang ada sekarang dibangun kembali pada tahun 1985 oleh Pemerintah Kabupaten Buol Tolitoli pada waktu itu. Kondisi istana saat dibangun kembali dalam keadaan rusak. Saat ini bangunan dipergunakan sebagai rumah tinggal raja dan museum Kerajaan Buol.

4.7 Makam Dakula

Makam Dakula terletak di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Letak makam secara astronomi berada pada Lintang Utara $01^{\circ}08'53,20''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}24'37,70''$ dan UTM X 323137.8041966848, Y 126950.1108935672, dengan ketinggian 7 mdpl.

Selain makam Dakula, juga terdapat beberapa makam lain yang tidak beridentitas. Kondisi Lingkungan makam kurang terawat karena memang berada di tengah-tengah kebun yang dijadikan lokasi makam.



Foto 8. Makam Dakula
doc.bpcbgorontalo/2017

Dalam sejarah Buol disebutkan bahwa Kulango merupakan salah satu pusat pemerintahan selain Guamonial dan Lamolan. Pusat-pusat pemerintahan yang lain adalah: Mopu (Mulat), Kodolagon, Mongongi, Blabat Roji (Buol sekarang), dan Leok. Hingga saat ini masyarakat Buol mempercayai bahwa pusat pertama Kerajaan Buol ialah di Guamonial dan Madika (raja) pertama adalah Ndubu.

Ndubu inilah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan kemasyarakatan suku bangsa Buol. Di dalam pemerintahan Ndubu dibentuk suatu Dewan yang menjadi penasehat Madika yang disebut Bokidu. Pengaturan lebih lanjut dari Ndubu yaitu:

- a. Kerajaan Buol terdiri atas 4 (empat) wilayah yang disebut Balak antara lain: Balak Biau, Balak Tongon, Balak Talaki, dan Balak Bunobogu.
- b. Madika atau raja dibantu oleh beberapa pembesar negeri yang diangkat dari keturunan kepala-kepala Balak yaitu: Jogugu atau Gugu, Kapitalau, dan Ukumo.

Atas dasar tulisan yang tertera pada nisan menyebutkan bahwa makam tersebut merupakan makam dari Dakula, seorang Jogugu Kerajaan Buol yakni sebagai Marsaoleh Talaki, Negeri Kulango yang meninggal pada 14 Rajab 1282 H atau tahun 1863 Masehi. Marsaoleh merupakan kepala distrik. Sistem politik ini dilakukan setelah dikeluarkan surat keputusan Residen Manado pada tanggal 1 Januari 1913.

Kompleks makam ini terdapat dua buah makam yang nisannya menggunakan tipe aceh berbentuk gadah dan pipih. Makam yang nisannya bentuk gadah pada bagian belakang terdapat prasasti yang bertuliskan bahwa makam tersebut merupakan makam dari Dakula, seorang Jogugu Kerajaan Buol yakni sebagai Marsaoleh Talaki, Negeri Kulango yang meninggal pada 14 Rajab 1282 H atau tahun 1863 Masehi. Marsaoleh merupakan kepala distrik. Sistem politik ini dilakukan setelah dikeluarkan surat keputusan Residen Manado pada tanggal 1 Januari 1913. Adapun ukuran nisan Tinggi 35 cm x Lebar 15 cm, sedangkan ukuran prasasti tinggi 45 cm x l 28 cm. Nisan tipe aceh yang berbentuk pipih berjumlah 2 buah, biasanya diperuntukkan buat wanita berukuran nisan I T 80 cm x 25 cm, nisan II T 70 x L 25 cm.

4.8 Bekas Gudang Senjata

Secara astronomi letak bangunan berada pada Lintang Utara $01^{\circ}03'03,70''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}57'43,00''$ dan UTM X 384503.3532774941, Y 116189.4724761078, dengan ketinggian 10 mdpl. Sisa-sisa bangunan yang ada berupa beberapa sisi dinding.

Lingkungan sekitar sisa bangunan ditumbuhi tanaman-tanaman keras seperti beringin, kelapa, sukun, ketapang dan sebagainya. Batas-batas sisa bangunan memiliki ukuran 14,9 meter x 4,8 meter.

Bangunan terletak pada cekungan di atas bukit sehingga dari kejauhan tidak terlihat adanya bangunan tersebut karena dikelilingi oleh benteng dari tanah. Sisa bangunan yang ada berupa dinding di beberapa sisi bangunan. Menurut sumber bahwa bangunan ini dahulunya dipakai sebagai tempat menyimpan senjata dan dinamit untuk kebutuhan tambang terutama di Lintidu, Paleleh. (Hasanuddin, 2014:73-74).

Untuk menuju ke gudang amunisi kita menaiki anak tangga yang terbuat dari plesteran semen. Gudang amunisi

berbentuk segi empat dengan panjang 16meter dan lebar 5 meter yang tertinggal hanya dinding bangunan yang terbuat dari beton dengan tinggi 3 meter. Pada bagian tengah bangunan terdapat parit dengan lebar 70 cm. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar 1987,bersamaan didirinya tambang emas dan rumah belanda yang berada di desa Lintidu. Lahan ini sekarang dimiliki oleh keluarga Udin Binol.



Foto 9. Puing-puing bangunan bekas gudang senjata
doc.bpcbgorontalo/2017

4.9 Bekas Gudang Amunisi

Sisa-sisa bangunan yang diduga sebagai tempat menyimpan amunisi berada di bagian yang datar dekat dengan pantai berjarak kurang lebih 100 meter dari bekas gudang amunisi yang berada di atas bukit. Letak bangunan berada pada Lintang Utara $01^{\circ}03'0,42''$ dan Bujur Timur $121^{\circ}57'42,16''$ dan UTM X 384477.3557011997, Y 116088.7589756078, dengan ketinggian 4 mdpl.

Bangunan berbentuk segi empat berdinding beton dengan sebuah pintu serta tidak memiliki atap. Ukuran bangunan adalah 3 meter x 3 meter. Kondisi sisa bangunan tidak terawat, di sekelilingnya ditumbuhi oleh semak belukar. Penempatan bangunan yang jauh dari gudang senjata dan rumah penjaga tersebut diduga untuk menghindari apabila terjadi ledakan amunisi karena amunisi yang memang mudah meledak.



Foto 10. Puing-puing bangunan bekas gudang amunisi
doc.bpcbgorontalo/2017

4.10 Rumah Belanda/ Controleur

Bangunan terletak di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah pada posisi Lintang Utara 01°04'44,70" dan Bujur Timur 121°55'43,60" dan UTM X 380813.79937650065, Y 119292.25665456487, dengan ketinggian 102 mdpl.

Bangunan terletak di lereng perbukitan dengan kondisi terbelah sehingga semak belukar tumbuh sampai ke dinding dalam rumah. Menurut sumber bahwa bangunan ini dulunya merupakan rumah tinggal Dr. H. Siber sebagai gezaghebber di Buol.

Rangka atap terbuat dari baja dengan bahan atap seng, atap berbentuk pelana kuda. Dinding bangunan tersusun atas material beton bertulang besi dengan luas bangunan 21.8 meter x 11.7 meter. Kerangka atap berupa besi beratap seng. Bangunan ditopang oleh tiang penyangga/umpak beton berjumlah 59 buah setinggi 1,5 meter. Bagian-bagian bangunan berupa teras dengan ukuran 2.6 meter x 10.6 meter, jumlah kamar sebanyak 6 buah, dilengkapi dengan pintu berjumlah 3 buah dan jendela sebanyak 6 buah, dengan arah hadap bangunan timur laut – barat daya.

Secara historis bahwa pada tahun 1890, Patra

Tarungku menggantikan Turungku yang bergelar Ta Meeraji sebagai madika. Patra Tarungku menandatangani kontrak dengan pemerintah Belanda pada tanggal 13 Desember 1890. Sejak ditemukannya emas di Lintidu, Paleleh telah menarik perhatian khusus Pemerintah Belanda untuk ikut mengatur tambang-tambang emas di Buol. Pada tahun 1896, Pemerintah Belanda menandatangani Dr. H. Siber sebagai gezaghebber di Buol. Awal kedatangan Siber mendapat kecaman dan penolakan dari rakyat Buol. Setiap malam kediamannya mendapatkan gangguan teror dari penduduk, karena tidak tahan atas gangguan tersebut akhirnya Siber pindah ke Paleleh. (Hasanuddin, 2014:60).

Siber menempati bangunan yang berada di lereng bukit tersebut sekaligus dipergunakan sebagai kantor gezaghebber. Letak bangunan memang tidak jauh dari lokasi pertambangan emas di Lintidu yang mulai dieksplorasi oleh Siber sejak 1897, bahkan Siber sendiri menjadi direktur "Mijnbouw-Maatscappij Bwool" (perusahaan tambang Belanda) di Paleleh. Oleh karena pada tahun 1929 perusahaan mengalami penurunan produksi, maka pada tahun 1930, perusahaan Mijnbouw-Maatscappij Bwool di Lintidu Paleleh dilelang. Seorang pribumi bernama Hi. Saleh memenangkan lelang perusahaan tersebut sebesar f. 440. (Hasanuddin, 2014:84-85).



Foto 11. Rumah Belanda/ Controleur
doc.bpcbgorontalo/2017

4.11 Struktur Dugaan Rumah Belanda

Bangunan terletak di Dusun 3, Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara astronomi letak bangunan berada pada Lintang Utara 01°03'19,50" dan Bujur Timur 121°56'45,70" dan UTM X 382732.38990376587, Y 116675.25397146924, dengan ketinggian 47 mdpl.

Bekas bangunan terletak di sebuah kebun milik Alm. Tolang dengan ahli waris Tumang di lereng perbukitan. Dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit jalan kaki dari jalan raya Buol untuk sampai di bekas bangunan. Bangunan dengan kondisi tersisa tiang penyangga/umpak serta sebidang dinding bagian belakang sisi sebelah timur. Umpak berjumlah 27 buah dengan tinggi rata-rata 1,5 meter. Tidak terdapat sumber yang jelas dari aspek historis bangunan, tetapi melihat ciri-ciri dari sisa bangunan yang ada bahwa bangunan merupakan tinggalan Kolonial



Foto 11. Struktur dugaan rumah Belanda
doc.bpcbgorontalo/2017

5. Penutup

Berdasarkan hasil Inventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Buol, data temuan tinggalan budaya yang ditemukan memiliki keragaman bentuk serta periodisasinya. Dari beberapa tinggalan budaya yang terdata di lapangan terdapat 10 dugaan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Cagar Budaya. Selain itu dugaan cagar budaya yang telah diinventarisasi dapat dikategorikan sebagai Struktur Cagar Budaya yang meliputi Makam dan Tugu, maupun Bangunan Cagar Budaya yang meliputi Bangunan Tempat Tinggal.

Bentuk peninggalan budaya kebendawian inilah yang menjadi salah satu informasi untuk mengungkap berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik dengan cara melakukan rekonstruksi budaya, rekonstruksi cara-cara hidup dan menggambarkan proses budaya. Perolehan informasi tersebut bisa tercapai dengan memperhatikan kaidah umum dalam melakukan pendekatan 3 (tiga) tujuan arkeologi sebagai dasar dalam menguraikan aktivitas manusia di masa lalu dengan melihat bentuk bangunan pemujaan/ritual, penguburan,

dan monumen. Bahkan hasil karya budaya tersebut mampu menjelaskan sistem dan proses tradisi dalam periode-periode tertentu di masa itu, sehingga untuk pencapaian aspek-aspek penting dalam Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2011 mengenai penilaian, perlindungan, penetapan, dan aspek pemanfaatan serta pengelolaan Cagar Budaya dapat terpenuhi.

Perolehan data yang terhimpun melalui pencatatan, pengukuran, penggambaran, pemotretan (data viktorial) hingga dalam tahap pengidentifikasian cagar budaya beserta lingkungannya melalui perolehan data lapangan dan tahap pengolahan data melalui analisa perekaman data lapangan, penelusuran reverensi berupa buku, makalah, dan wawancara. Dari hasil pengolahan data tersebut, telah diidentifikasi beberapa temuan yang diindikasikan sebagai cagar budaya yang kemudian akan didaftarkan kedalam cagar budaya yang dilindungi dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian kelayakannya sebagai cagar budaya seperti yang diatur dalam Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2011, pasal 31 ayat (1) dan (2); (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya”

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, 2016. Kabupaten Buol Dalam Angka 2015. BPS Kabupaten Buol.
- Hasanuddin, 2014. Sejarah Sosial Politik Kerajaan Buol (1828-1942). Yogyakarta: Kepel Press.
- Samad, A. Rahim, 2000. Sejarah Buol Jilid 1 dan 2. Palu: Perum PNRI.
- Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol, 2010. Laporan Pendataan/ Inventaris Benda Cagar Budaya/Situs BCB di Kabupaten Buol. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol.
- Soedarmadji, Tjoek, 1983. Mengenal Buol Tolitoli. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Tolitoli.
- Undang Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- <http://www.pa-buol.go.id/artikel-715-gambaran-umum-kabupaten-buol.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Buol

PASCAPROSESUALISME/PASCAMODERNISME?; Sebuah Kilas Balik Perdebatan Lama

Oleh. Nur Ihsan

Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Email: ihsan.patunru@gmail.com

I/

Tulisan ini hendak menjelaskan kepada khalayak ihwal dampak perkembangan alam pikir pascamodernisme terhadap disiplin ilmu arkeologi dan bagaimana pro-kontra yang berkembang dikalangan arkeolog atas infiltrasi kritik pascamodern dalam arkeologi. Tentunya, tulisan ini tidak perlu berlama-lama dengan menjelaskan posisi arkeologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang juga mengalami dampak perkembangan pascamodernisme. Kepada pembaca yang sampai saat ini tidak mengetahui apa itu arkeologi dan posisinya dalam percabangan ilmu pengetahuan, dengan meminjam kata-kata Shanks, 'lebih baik berhenti membaca tulisan ini dan mengambil kesimpulan bahwa yang akan dibahas selanjutnya adalah hal yang kontroversial' (2009: 133).

Uraian tentang dampaknya dalam pemikiran arkeologi adalah sebuah konsekuensi dari kenyataan bahwa pemikiran arkeologi tidak berkembang dalam ruang yang vakum (Johnson 2000: 167). Pemikiran dalam arkeologi berkembang di tengah-tengah arus pemikiran intelektual dalam ilmu-ilmu humaniora pada khususnya dan konteks sosiopolitik dalam masyarakat pada umumnya. Dalam pada itu, istilah pascamodern telah umum digunakan selama kurang lebih empat dekade, dan pada tahun 1980'an, mulai menjadi topik pembicaraan yang hangat didiskusikan di berbagai media (Ward 2010:1). Oleh karena itu, tentunya menarik untuk mencoba melihat pengaruh pascamodernisme dalam pemikiran arkeologi karena pada tahun 1980'an, arkeologi tengah mengalami semacam—jika dilihat dari perspektif revolusi ilmu pengetahuan ala Kuhn—periode 'anomali'.

Guna menguraikan implikasi pascamodernisme dalam arkeologi, tulisan ini akan menguraikan terlebih dahulu sejarah perkembangan pemikiran arkeologi hingga pada titik dimana arkeologi mesti berhadapan dengan kritik pascamodern. Selanjutnya, akan diuraikan latar belakang perkembangan dan beberapa ide-ide penting pascamodernisme yang relevan dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu-ilmu humaniora. Dari uraian tersebut, kita akan mencoba melihat bagaimana pemikiran pascamodernisme mempengaruhi perkembangan pemikiran arkeologi. Dalam tulisan ini, kritik pascamodernisme dibatasi dalam cakupannya sebagai sebuah kritik terhadap ilmu pengetahuan, bukan dalam pengertiannya yang begitu luas dan radikal yang menjangkau hampir semua sendi kehidupan.

II/

Karena sidang pembaca yang belum mengetahui apa arkeologi dan di mana posisi arkeologi dalam percabangan ilmu pengetahuan masih terus membaca, untuk membantu mereka, maka akan dijelaskan sekelumit tentang arkeologi. Bagi pembaca yang telah mengerti dengan baik arkeologi, dipersilahkan untuk mengabaikan bagian ini.

Secara terminologis, arkeologi berakar dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu: arkhaios dan logos. Arkhaios berarti kuna, tua, atau yang lampau. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, secara sederhana kita memahami arkeologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang masa lampau. Membedakan diri dengan sejarah, arkeologi merekonstruksi masa lampau lewat pembacaan terhadap kebudayaan materi (artefak) yang tersisa. Masa lampau pun ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para arkeolog. Ada yang membatasi masa lampau pada masa ketika belum ditemukan tulisan, atau dengan kata lain masa prasejarah. Ada pula yang menerjemahkan masa lampau sebagai masa yang baru saja lewat. Mengadaptasi pendapat Dark (1995), pada saat tulisan ini sedang dibaca oleh sidang pembaca yang budiman, maka makalah ini pun telah menjadi tinggalan arkeologi. Schiffer (1976) kemudian mendefinisikan arkeologi sebagai 'disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan kebudayaan materi dalam ruang dan waktu apapun'. Berangkat dari uraian definisi tersebut, maka arkeologi bisa berkembang menjadi kajian tentang kebudayaan materi yang berasal dari ruang-waktu apapun sehingga arkeologi semakin sulit menentukan batas-batas kajiannya dalam dunia ilmu-ilmu humaniora. Hal tersebut senada dengan pendapat Magetsari (2003) yang menyatakan bahwa 'kajian terhadap kebudayaan materi bisa mencairkan batas-batas disiplin ilmu'.

Kebudayaan materi atau artefak dalam arkeologi bisa dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu: ideofak, sosiofak, teknofak, dan fitur. Ideofak adalah artefak yang merepresentasikan ideologi angkitan kelompok masyarakat tertentu. Sosiofak mencerminkan aspek sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Adapun aspek teknologis dalam sebuah masyarakat tercermin dari temuan teknofaknya. Sedangkan fitur (feature) adalah kebudayaan materi yang sifatnya statis dan melekat dengan konteksnya, misalnya, bentang alam hasil rekayasa manusia. Demikianlah tinjauan ontologis arkeologi.

Pada tataran epistemologis, arkeologi menemukan

signifikansinya sebagai disiplin ilmu pada penerapan metode ekskavasi. Metode ekskavasi atau penggalian merupakan metode pemerolehan data berupa tinggalan aktivitas manusia yang terdeposit dalam tanah. Metode ini tidak ditemukan pada disiplin ilmu lainnya meskipun sama-sama berada dalam lingkup masa lampau seperti sejarah, maupun kajian tentang manusia seperti antropologi dan sosiologi. Meskipun signifikan, ekskavasi tidak senantiasa dilakukan dalam penelitian arkeologi. Hal tersebut amat bergantung dengan tema, lokasi, dan kemampuan arkeolog (baca: kecukupan dana) dalam melaksanakan penelitian. Ada banyak pilihan metode lain yang bisa diterapkan dan menjamin perolehan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian.

Kehadiran arkeologi setidaknya menghilangkan ketakutan bahwa ketika kita memandang kemasa lalu, yang ditemukan adalah hamparan ruang kosong yang tidak bisa membantu dalam menjelaskan siapa kita. Arkeologi setidaknya telah menyediakan hamparan pengetahuan/interpretasi tentang masa lalu manusia, tidak hanya yang tertulis, tapi sampai kepada masa ketika manusia memanfaatkan batu sebagai pisau untuk menguliti binatang hasil buruan. Hamparan pengetahuan/interpretasi tentang masa lalu tersebut bisa menjadi cermin dalam memahami siapa kita dan membantu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Secara spesifik, arkeologi menetapkan tujuannya sebagaimana uraian Lewis R. Binford, yaitu: 1) rekonstruksi sejarah budaya, 2) rekonstruksi cara-cara hidup, 3) penggambaran proses budaya (1972: 104).

Dalam percabangan ilmu pengetahuan, arkeologi ditempatkan dalam kelompok ilmu-ilmu humaniora atau ilmu budaya (kultuurwissenschaft). Dalam rumpun ilmu budaya, kajian terhadap masa lalu membuatnya bisa dilekatkan sebagai bagian dari sejarah seperti yang berkembang dalam tradisi Eropa kontinental. Arkeologi karena perhatiannya terhadap kebudayaan, juga seringkali dianggap sebagai ‘anak tiri’ antropologi (Hudson 1984: 33). Namun, dalam perkembangannya, kompetensi dalam membaca kebudayaan materi bisa mempengaruhi disiplin ilmu lain untuk mencoba menengok kebudayaan materi sebagai salah satu sumber yang terpercaya dalam upaya menjawab permasalahan penelitiannya. Pengaruh arkeologi tersebut dipandang sebagai akar bagi lahirnya Kajian Kebudayaan Materi (Material Culture Studies) sebagai sebuah bidang kajian multidisipliner (multidisciplinary studies) (periksa Woodward 2007: 3). Lebih dari itu, arkeologi mampu menunjukkan kelebihan yang tidak dimiliki bidang ilmu lain, seperti: perumusan teori kebudayaan materi, mengamati perubahan struktural jangka panjang, peran masa lalu terhadap pembentukan identitas masyarakat modern, karakter spasial dan temporal relasi sosial, dan seterusnya (Thomas dan Tilley 1992: 107).

/III/

Dalam kacamata David L. Clarke sebagaimana diuraikan oleh Trigger (2006), arkeologi telah melewati dua fase perkembangan. Fase pertama adalah fase sebelum tahun 1960’an dan fase kedua adalah fase setelah tahun 1960’an. Meskipun pendapat Clarke adalah periodisasi yang kurang begitu adekuat karena tidak mengakomodasi perkembangan kontemporer dalam pemikiran arkeologi. Namun, periodisasi tersebut digunakan disini sebagai kerangka untuk menyederhanakan uraian perkembangan pemikiran arkeologi sebelum dampak perkembangan pemikiran pascamodernisme mulai terasa dalam arkeologi.

Beberapa orang yang menulis tentang sejarah perkembangan arkeologi menekankan bahwa periode sebelum tahun 1960’an adalah masa ‘tidur panjang’ pemikiran arkeologi, karena jarang ada diskusi yang secara eksplisit membahas tentang teori (baca Johnson 2000: 15). Fase sebelum tahun 1960’an juga disebut sebagai fase sejarah budaya. Webster (2009: 11) merangkum beberapa istilah yang umum digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan fase sejarah budaya, antara lain: sebagai sebuah periode atau tahapan dalam arkeologi evolusi (Wiley dan Sablof 1980), gerakan pemikiran, kecenderungan interpretasi (Trigger 1989), perspektif (Preucell dan Hodder 1996), atau sebagai sebuah bentuk adaptasi intelektual terhadap kondisi sosiopolitik tertentu (Trigger 1989, 1978; Patterson 1986).

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, beberapa konsep-konsep dasar yang berpengaruh dan mewarnai perkembangan ilmu arkeologi hingga dewasa ini, diletakkan dan dimatangkan dalam fase sejarah budaya (Webster 2009: 20). Beberapa prinsip analitis dasar warisan sejarah budaya, seperti: gaya, popularitas, dan stratigrafi (Gamble 2008: 59) masih tetap diajarkan kepada calon-calon arkeolog baru sebagai sebuah pengetahuan fundamental dalam arkeologi. Selain itu, unit-unit klasifikasi artefak—atribut, artefak, himpunan artefak, budaya—adalah sistem klasifikasi yang bersandar pada metafisika esensial yang merupakan bagian dari asumsi dasar pendekatan sejarah budaya (Webster 2009: 20), masih digunakan sampai sekarang meskipun telah mengalami beberapa pengembangan. Trigger (1989:205) berkesimpulan bahwa sejarah budaya masih merupakan pendekatan penelitian arkeologi yang relevan dan menarik di negara-negara atau wilayah yang baru lepas dari masa kolonial, yang membutuhkan pengetahuan tentang akar-akar kebudayaan mereka. Dengan beberapa pemutakhiran metode, pendekatan sejarah budaya amat membantu dalam perumusan identitas dan kesatuan bangsa.

Di balik manfaat tersebut, ada beberapa kelemahan mendasar terkait pendekatan sejarah budaya. Arkeologi sebelum tahun 1960 diidentifikasi sebagai masa ketika arkeologi masih terkurung dalam tradisi penelitian yang berbeda-beda. Para arkeolog masih mengalami idiosinkrasi, kebanyakan menjalankan penelitian menurut standar yang ditetapkan sendiri, baik itu bentuk deskripsi,

interpretasi, dan penjelasannya. Fase ini ditandai dengan penerapan penalaran induktif-eksplanatif, yaitu upaya merumuskan kesimpulan penelitian secara eksplanatif dengan mengobservasi dan mengumpulkan sebanyak mungkin data tanpa menggunakan asumsi teoritis.

Bertolak dari kelemahan-kelemahan tersebut, pada tahun 1960'an, beberapa arkeolog mulai bereaksi dan mencetuskan sebuah gerakan pembaruan. Gerakan tersebut menggemakan jargon besar 'wemustbemorescientificandmoreanthropological' (Johnson 2000: 20). Gerakan tersebut dipicu oleh Lewis R. Binford lewat artikelnya yang berjudul 'Archaeology as Anthropology' bertahun 1962, dan lalu dibahas secara ekstensif dalam bunga rampainya yang terbit tahun 1967 bertajuk 'A New Perspective in Archaeology' (Watson 2009: 29). Dalam buku tersebut, Binford mengajak para arkeolog untuk menegaskan status disipliner arkeologi dengan penggunaan metode ilmiah sebagaimana yang berkembang dalam ilmu-ilmu alam. Penekanan pada model penalaran hipotetico-deductive-nomological untuk menjelaskan proses budaya di masa lalu membuat fase perkembangan ini disebut fase arkeologi prosesual.

Antusiasme terhadap apa yang dicanangkan oleh Binford membuat beberapa ahli menganggap pemikiran Binford sebagai pemikiran yang menandai terjadinya 'pergeseran paradigma' dalam arkeologi. Disebut demikian karena pemikiran tersebut menandai sebuah keputusan yang radikal dengan pendekatan dan metodologi yang diterapkan dalam fase arkeologi sejarah budaya (periksa Peurcel 2006: 95). Beberapa teori yang sebelumnya umum digunakan dalam antropologi, seperti: teori sistem, teori-teori ekologi, teori-teori evolusi budaya, digunakan pula sebagai kerangka penyusunan hipotesa dalam penelitian arkeologi. Lebih lanjut, untuk menangani dan menjelaskan temuan-temuan arkeologis, arkeolog mulai memperkenalkan dan menerapkan pendekatan kuantitatif—utamanya statistik—dan pendekatan spasial yang banyak dirangkul dari geografi.

Dibawah bendera paradigma prosesual, arkeologi semakin memantapkan kedekatannya dengan antropologi dalam upayanya merekonstruksi kehidupan sosial dan proses budaya masyarakat masa lampau. Konsepsi tentang masyarakat dalam pandangan arkeologi prosesual dapat dirangkul sebagai berikut:

- Masyarakat pada dasarnya terdiri dari seperangkat tingkah laku yang berpola;
- Kebudayaan materi dan tinggalan kebudayaan materi merupakan cerminan dari pola tingkah laku yang ada dalam masyarakat atau merupakan hasil dari adaptasi lingkungan sehingga bisa dipelajari secara ilmiah;
- Masyarakat adalah cerminan adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial dan alam;
- Karena itu, menjelaskan proses sosial berarti fokus pada pranata-pranata dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan adaptasi lingkungan: sumber daya, subsistensi, strategi ekonomi, pertukaran dan perdagangan, dan teknologi;

- Ketertarikan yang besar terhadap generalisasi lintas budaya (cross-cultural generalisation) sebagaimana yang nampak dalam klasifikasi masyarakat dan skema evolusi budaya.

(Shanks dan Hodder 1997: 4)

Arkeologi prosesual juga telah berhasil memicu lahirnya beragam subdisiplin baru dalam arkeologi. Beberapa diantaranya, seperti: paleoetnobotani, bioarkeologi, arkeogenetik, arkeoastronomi, geoarkeologi, dan arkeologi ruang. Dalam sub-sub kajian tersebut, metode-metode dari ilmu-ilmu alam digunakan dalam membangun inferensi terkait rekonstruksi kebudayaan dimasa lampau dan menjelaskan proses-proses perubahan budaya. Pada beberapa universitas di luar negeri seperti Inggris dan Australia, kedekatan arkeologi dengan ilmu-ilmu alam membuat arkeologi ditempatkan dalam fakultas yang sama dengan ilmu-ilmu alam lainnya.

Perkembangan yang memantapkan kematangan dan memaparkan paradigma prosesual sebagai paradigma utama yang belum tergantikan terus berlangsung. Hingga kemudian, pada awal tahun 1980'an, kemapanan tersebut mesti berhadapan dengan gelombang kritik dari arkeolog muda yang pemikirannya sedikit banyak beririsan dengan alam pikir pascamodernisme. Gelombang kritik tersebut, karena ketidakpuasannya terhadap paradigma prosesual, seringkali dinamai aliran pascaprosesual. Sebagai bekal awal untuk memahami peririsan tersebut, uraian pada bagian berikutnya berisi selang pandang pascamodernisme dan beberapa pokok-pokok pikiran yang berkembang didalamnya.

/IV/

Philip Smith (2001:214) mengajukan beberapa definisi dasar yang cukup membantu untuk memahami pascamodernisme. Menurut Smith, pascamodernisme itu sendiri setidaknya memiliki dua dimensi, pertama, merujuk pada sebuah gaya estetika dan artistik yang menolak semua aturan-aturan estetika dan artistik modern; kedua, merujuk pada sebuah posisi teoritik dan filosofis yang lahir dari pascastrukturalisme. Pascamodernitas merujuk pada sebuah tahap perkembangan sosial yang dianggap telah melampaui kondisi modernitas. Pascamodernisasi merujuk pada proses perubahan sosial yang menggerakkan transisi dari modernitas ke pascamodernitas. Lebih lanjut, Norman K. Denzin (2005:581-2) menyatakan bahwa istilah pascamodern dan pascamodernisme adalah istilah yang merujuk pada empat kondisi sekaligus. Pertama, istilah tersebut menggambarkan rentetan momen historis yang terjadi sejak Perang Dunia II hingga sekarang. Kedua, pascamodern merujuk pada wujud multinasional dari kapitalisme-lanjut yang telah memperkenalkan logika kultural baru dan bentuk representasi dan komunikasi baru ke dalam sistem kultural dan ekonomi dunia. Ketiga, menggambarkan sebuah 'gerakan dalam seni visual, arsitektur, sinema, musik populer, dan teori sosial yang bergerak melawan formasi-formasi modernis dan

realis klasik. Keempat, istilah tersebut merujuk pada sebuah bentuk penulisan dan teorisasi dunia sosial yang antifondasional, pascapositivis, interpretif, dan kritis. Kita akan membatasi definisi pascamodernisme sebagai dimensi kedua dalam pandangan Smith, dan dimensi keempat dalam pandangan Denzin.

Sebagai sebuah perkembangan filosofis, pascamodernisme lebih tepat digambarkan sebagai sebuah bentuk skeptisisme yang berakar sampai ke tradisi filsafat Yunani klasik (Sim 2005). Friedrich Nietzsche tercatat sebagai salah satu figur yang kembali mendengungkan corak pemikiran tersebut pada awal abad ke-20. Nietzsche mengajak untuk 'merevaluasi semua nilai' (Sim 2005) melalui pemikirannya yang sering dilabeli nihilistik. Pascamodernisme mulai ramai dibicarakan setelah François Lyotard menyampaikan pidatonya yang berjudul 'The Postmodern Condition: A Report on Knowledge' pada tahun 1984 atas permintaan Dewan Universitas Quebec Kanada. Fokus pidato tersebut adalah menjelaskan tentang perubahan-perubahan drastis yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akhir abad XX ini. Pemikiran dan pengamatan Lyotard tentang perubahan kebudayaan dari modern ke pascamodern menimbulkan implikasi penting bagi pemahaman tentang ilmu pengetahuan (Lubis 2011: 135; periksa pula Sim 2005: 3).

Pascamodernisme tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Jacques Derrida yang melakukan pembangkangan radikal terhadap strukturalisme dan kemudian melahirkan pascastrukturalisme. Landasan teoritis dari kebanyakan pemikir pascamodern dapat ditemukan dalam analisis sosial dan budaya dengan pendekatan pascastrukturalis dan analisis tersebut terus didengungkan dalam praktek budaya pascamodern (Jordan dan Weedon 1997: 18). Selain Derrida, tersebut pula beberapa nama yang dianggap sebagai 'guru' pascamodernisme, antara lain: Michel Foucault, Julia Kristeva, Roland Barthes, Paul Feyerabend, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jean Baudrillard (Sim 2005).

Bersama-sama, pemikiran pascastrukturalisme dan pascamodernisme menawarkan sebuah cara baru dalam memandang dunia (Sim 2005; Ward 2010). Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi dan reduksi terhadap kedalaman dan keluasan pemikiran pascamodernisme dan pascastrukturalisme, penulis mencoba merangkum pokok-pokok pemikiran pascamodernisme dan pascastrukturalisme, sebagai berikut:

- Penolakan terhadap metanarasi (narasi besar).

Pokok pikiran ini terutama berakar dalam pemikiran Jean-François Lyotard yang memandang bahwa kehidupan kita terlalu didominasi oleh beragam metanarasi yang dipengaruhi oleh aliran besar filsafat seperti Kantianisme, Hegelianisme, dan Marxisme yang melihat bahwa sejarah itu bergerak maju (progresif), bahwa pengetahuan bisa membebaskan kita, dan bahwa semua pengetahuan memiliki akar yang sama (Buttler 2002: 13). Lambat-lambun, metanarasi tersebut ternyata menjadi rezim yang

totaliter dan kemudian telah menunjukkan kegagalannya masing-masing. Lyotard berpandangan bahwa saatnya kita memberi ruang bagi kehadiran minoritas yang selama ini terpinggirkan.

- Tidak ada apa pun diluar teks.

Poin ini disarikan dari buku *Of Grammatology* yang ditulis oleh Jacques Derrida (periksa O'Donnell 2009: 145). Pemikiran tersebut berkonsekuensi ganda bahwa (1) segala sesuatu itu ditulis, dan dengan demikian (2) segala sesuatu tersebut melewati proses pembacaan (Hodder 1991: 68).

- Matinya pengarang.

Poin ini dapat ditemukan dalam pemikiran dua tokoh posmodernisme yaitu Roland Barthes dan Michel Foucault (Buttler 2002: 23). Matinya pengarang berarti tidak adanya otoritas tunggal penafsir yang berhak menentukan benar salahnya sebuah penafsiran terhadap teks.

- Pembebasan manusia dari 'belenggu' struktur.

Dalam pandangan strukturalis, segala sesuatu memiliki struktur yang mengaturnya. Individu dalam hal ini manusia tidak bisa terlepas dari struktur tersebut. Dekonstruksi terhadap strukturalisme telah membebaskan manusia dari belenggu struktur tersebut sehingga individualitas—agensi—dikembalikan sebagai salah satu faktor penting yang menentukan. Selain Derrida, nama lain yang mengemukakan poin ini ialah Anthony Giddens dan Pierre Bourdieu.

- Serangan terhadap objektivitas ilmu pengetahuan.

Kaum pascamodernis utamanya mengkritik ilmu pengetahuan (Science) yang mengklaim bahwa (1) mereka bisa mendeskripsi, menganalisis secara objektif dan jujur, dan (2) bahwa penelitian ilmiah bisa berlaku universal, terlepas dari pengaruh kebudayaan lokal, dan (3) tanpa tendensi politis yang mungkin mempengaruhi penemuan mereka.

/V/

Pada awal tahun 1980'an, kemapanan yang terjadi dalam arkeologi dibawah paradigma prosedural menghadapi gelombang kritik dari beberapa kelompok arkeolog. Gelombang kritik ini dipicu oleh ketidakpuasan yang merasa bahwa apa yang dilakukan arkeolog prosedural menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang tidak memadai lagi. Pada arkeolog yang merasa tidak puas tersebut kemudian mengorganisir serangkaian seminar dalam rentang waktu 1979-1980 dan difinalkan dalam sebuah konferensi di Universitas Cambridge pada tahun 1980 bertema Simbolisme dan Strukturalisme dalam Arkeologi. Hasil konferensi tersebut kemudian dimatangkan dan dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul 'Structural and Symbolic Archaeology', terbit pada tahun 1982. Seminar yang dimotori oleh Ian Hodder dan beberapa mahasiswanya kemudian merumuskan dan menawarkan arah pemikiran baru dalam arkeologi. Beberapa poin dalam pemikiran pascaprosedural, di antaranya:

- Menolak pandangan yang memandang kebudayaan

sebagai sistem atau struktur.

- Mengetengahkan peran individu dalam membentuk kebudayaan (baca: agensi). Individu terbebas dari ‘belunggu’ sistem.
- Membatasi laku penelitian arkeologi pada tahapan interpretasi dan menolak eksplanasi yang deterministik.
- Menolak generalisasi lintas budaya yang berpeluang melahirkan hukum-hukum kebudayaan. Kebudayaan adalah fenomena partikular dan berkaitan erat dengan konteks.
- Mengajukan hermeneutika sebagai metode interpretasi.
- Memandang kebudayaan materi sebagai teks.
- Membuka peluang bagi multivokalitas interpretasi terhadap kebudayaan materi.

Dalam paradigma pascaprosesual, kebudayaan materi bukan sekedar cerminan dari perilaku manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan alam. Lebih jauh, kebudayaan materi sesungguhnya merupakan benda buatan seorang individu yang melaluinya, individu tersebut hendak menyampaikan sesuatu. Apa yang hendak disampaikan oleh individu tersebut dicerap pascaprosesualis sebagai makna. Dalam pada itu, yang harus dilakukan oleh arkeologi adalah berupaya menangkap makna tersebut (Hodder dan Hutson 2003). Individu bukanlah pihak yang pasif dalam menciptakan kebudayaan materi, melainkan turut aktif dalam menanamkan makna kedalam kebudayaan materi. Keaktifan individu dalam mencipta dan menanamkan makna berimplikasi bahwa sistem atau struktur tidak mendeterminasi gerak cipta individu dalam berkebudayaan.

Perhatian yang lebih mengutamakan penggalian makna dalam kebudayaan materi mengantarkan arkeologi pada pandangan bahwa tidak ada penafsiran yang tunggal terhadap kebudayaan materi (Hodder, 1991). Tindakan menafsir selalu berkaitan erat dengan subjektivitas penafsir dan konteks kebudayaan materi. Subjektivitas penafsir—dalam hal ini arkeolog—selalu terlibat dalam tindakannya menafsirkan sebuah kebudayaan materi. Subjektivitas dalam hal ini berkaitan dengan latar belakang sosial budaya penafsir dan kepentingan yang mungkin terkandung dalam penafsirannya. Dengan demikian, objektivitas dalam penelitian arkeologi secara otomatis tertolak.

Pada titik lain, konteks dari sebuah kebudayaan materi sangat penting dan menentukan hasil penafsiran. Setiap kebudayaan materi terkait dengan konteks dimana ia berada. Sehingga ide tentang lahirnya hukum-hukum general yang bisa menjelaskan fenomena kebudayaan materi secara universal menjadi tidak relevan. Kebudayaan materi adalah fenomena partikular yang tidak mungkin digeneralisasi karena masing-masing terikat dengan konteksnya. Implikasi metodologisnya ialah bahwa pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam tidak tepat untuk diterapkan dalam mengkaji kebudayaan materi. Sebagai alternatif metode, pascaprosesualisme menawarkan hermeneutika untuk digunakan dalam mengkaji kebudayaan materi (Hodder dan Hutson 2003).

Guna membuka peluang selebar-lebarnya terhadap penggalian makna, maka kebudayaan materi kemudian ditempatkan sebagai sebuah teks. Hal tersebut berimplikasi ganda yaitu: (1) teks tersebut harus ditulis dan (2) teks tersebut harus dibaca. Implikasi pertama sebenarnya berkaitan erat dengan peran individu dalam menorehkan makna. Sementara implikasi kedua berkaitan erat dengan tindakan menafsirkan teks tersebut. Lebih lanjut, ketika kebudayaan materi diperlakukan sebagai teks, maka tidak ada otoritas tunggal yang bisa menentukan tafsir yang paling benar. Dalam hal ini, pascaprosesualisme menyepakati ide tentang ‘matinya pengarang’ yang kerap diasosiasikan dengan dua pemikir, yaitu: Roland Barthes dan Michel Foucault.

Kritikan yang dilancarkan oleh pascaprosesualis membuat perubahan yang cukup berarti dalam perkembangan arkeologi setelah sepanjang dekade 1980’an hingga sekarang. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan ialah lahirnya bidang-bidang kajian baru dalam arkeologi yang mengupas masalah-masalah yang selama ini terabaikan atau tidak pernah terpikirkan, seperti: tubuh, gender, masyarakat pribumi, kondisi pascakolonial, dan seksualitas. Beberapa bidang kajian tersebut, antara lain:

Gender Archaeology. merupakan bidang kajian yang tampil sebagai reaksi terhadap pandangan arkeologi yang cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan sebatas sebagai perbedaan jenis kelamin, sistem pemerolehan makanan, dan perbedaan tingkat kematian antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat. Tak dapat dipungkiri, aspek gender memang absen dalam kajian arkeologi dan seringkali kesimpulan penelitian arkeologi bernada phaluseristik. Agenda yang coba diusung dari arkeologi gender ialah mencoba melacak jejak-jejak segregasi gender pada masyarakat kuna untuk dijadikan bahan dalam mengelaborasi tema-tema sosial seperti ketidakadilan gender, identitas, etnisitas, dan perbedaan ras (Preucel 2006: 100).

Indigenous Archaeology. Arkeologi acap kali berurusan dengan kebudayaan materi dimanamasyarakat pendukungnya masih hidup. Dalam penelitian tersebut, arkeolog tidak pernah melibatkan masyarakat pribumi. Bidang kajian ini berupaya mengetengahkan kembali suara-suara dari masyarakat pribumi pemilik kebudayaan agar menjadi bagian inheren dari penarikan kesimpulan penelitian arkeologi. Dalam perkembangannya, masyarakat pribumi bahkan dilibatkan dalam semua tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah penelitian, penentuan teori dan pendekatan yang digunakan, hingga ke penarikan kesimpulan. Masyarakat pribumi juga dilibatkan sebagai peneliti setelah melewati serangkaian proses diskusi guna menyamakan atau setidaknya mengurangi gegar pengetahuan yang terjadi antara arkeolog dengan masyarakat. Dan tidak hanya sampai disitu. Masyarakat pribumi juga dilibatkan dalam penentuan apakah sebuah situs layak dikelola untuk publikasi kepada masyarakat yang lebih luas atau tidak. Dan jika mereka memandang

layak, maka mereka juga dilibatkan dalam perumusan manajemen pengelolaannya. Hal lain yang turut menjadi perhatian dari kajian tersebut adalah upaya advokasi agar warisan budaya yang 'dirampas' oleh peneliti terdahulu untuk dipamerkan di museum, dikembalikan ke 'pemilik sahnya' (McNiven dan Russel 2009).

Postcolonial Archaeology. Disadari baik bahwa arkeologi dan antropologi merupakan produk dari kekuasaan kolonial (Preucel 2006: 131). Atas kesadaran tersebut, dalam arkeologi berkembang pula kajian Arkeologi Pascakolonial. Kajian ini mengkaji secara mendalam bagaimana penggambaran masyarakat pribumi oleh kaum kolonial utamanya di Amerika, India, Australia, Afrika, dan Kanada. Persentuhan arkeologi dengan kajian pascakolonial diarahkan pada beberapa tema, diantaranya: kritik terhadap tradisi pemikiran kolonial, penulisan sejarah yang menengahkan perspektif masyarakat pribumi dan pengalaman subaltern, strategi restitusi dan dekolonisasi (Lyndon dan Rizvi 2012: 23).

/VI/

Menarik benang merah yang mengaitkan pascaprosesualisme dalam arkeologi dengan pascamodernisme bukanlah hal yang tanpa persoalan. John Bintliff (1991) misalnya, menyoroti pascaprosesualisme dalam arkeologi sebagai bentuk intrusi pemikiran pascamodernis ke dalam arkeologi. Menurutnya, pascaprosesualis telah mengimpor keseluruhan spektrum pemikiran pascamodernis tanpa terlebih dahulu melakukan pembacaan kritis (Bintliff 1991: 276). Ia menyesalkan pascaprosesualis yang mengadopsi perspektif anti-positivis dan melihatnya sebagai sebuah kemunduran, degradasi ke alam prailmiah, prapencerahan, prarasional, pra-Renaissans (Bintliff 1991: 277). Baginya, pascaprosesualisme dan pascamodernisme adalah dua sisi mata uang.

Tulisan tersebut ditanggapi langsung oleh dua arkeolog muda yang berperan penting dalam pelaksanaan konferensi TAG, Julian Thomas dan Christopher Tilley (1992). Keduanya melihat pascamodernisme lebih sebagai kritikan yang memuat ketidakpuasan terhadap proyek-proyek modernisme, bukan sebagai sebuah gerakan intelektual yang padu (Thomas dan Tilley 1992: 106). Karena itu, anggapan bahwa pemikiran prosual dipengaruhi oleh pemikiran pascamodernisme adalah hal yang salah kaprah karena keduanya berpondasi di wilayah yang berbeda. Mereka menambahkan bahwa apa yang Bintliff lakukan ialah hanyalah menghimpun beberapa kecenderungan pemikiran dalam arkeologi di bawah label pascamodern, lalu menggunakan kritik terhadap pascamodernisme untuk mengkritik semua kecenderungan pemikiran tersebut (1992: 107). Thomas dan Tilley menolak simplifikasi yang menyamakan pascamodernisme dengan pascaprosesualisme.

Mengatasi perdebatan tersebut, kita bisa mengidentifikasi

beberapa titik persinggungan atau peririsan antara pascamodernisme dan pascaprosesualisme. Sementara, pascamodernisme mempertanyakan dan mulai meragukan positivisme sebagai satu-satunya patokan rasionalitas, pascaprosesualisme merongrong kemapanan positivisme dalam arkeologi. Berbeda dengan prosesualisme yang mendorong positivisme ke dalam arkeologi sebagai satu-satunya jalan untuk menjelaskan masa lalu, pascaprosesualisme membuka ruang bagi penerapan berbagai pendekatan dalam mengkaji masa lalu seperti: pendekatan struktural/semiotik; pendekatan hermeneutik; pendekatan pascastruktural; pendekatan teori kritis; pendekatan Marxis; dan pendekatan feminis (Tilley 2000). Selain itu, pascamodernisme mengajak ilmuwan untuk mendengarkan 'yang liyan', memberikan tempat pada mininarasi dalam diskursus ilmu pengetahuan, pascaprosesualisme mengajak arkeolog untuk melibatkan dan mendengarkan suara para 'pemilik kebudayaan' dalam penelitian arkeologi.

Dari uraian di atas, pascaprosesualisme dan pascamodernisme memang mengusung spirit gerakan yang sama, (1) merongrong keangkuhan positivisme, (2) membuka keran untuk bagi penerapan beragam pendekatan dalam penelitian ilmiah, (3) tuntutan untuk mendengarkan 'yang liyan', (4) merayakan multiplisitas penafsiran. Akan tetapi, menyatakan bahwa pascaprosesualisme adalah keturunan langsung pascaprosesualisme adalah kesimpulan yang terburu-buru dan terlalu sederhana (Thomas 2000; Shanks 2009). Bagi Johnson (2000: 166), pascaprosesualisme dalam arkeologi hanyalah bagian kecil dari keseluruhan perubahan besar yang sedang terjadi dalam dunia ilmu sosial humaniora pada era tahun 1980'an dan 1990'an.

BAHAN BACAAN

- Bentley, R.A., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). 2009. *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira.
- Binford, Lewis. 1972. *An Archaeological Perspective*, New York: Seminar Press.
- Bintliff, John L. 1991. Post-modernism, Rhetoric and Scholasticism at TAG: The Current State of British Archaeological Theory. *Antiquity* Vol. 65, Hal 274-8.
- Butler, Christopher 2002 *Postmodernism; A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Dark, K. R. 1995. *Theoretical Archaeology*. New York: Cornell University Press.
- Denzin, Norman K. 2005. Postmodernism. dalam George Ritzer (Ed.). *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage Publications.
- Gamble, Clive. 2008. *Archaeology: The Basics*. Ed.2. London: Routledge.

- Hodder, Ian. 1991. Post-modernism, Post-structuralism, and Post-processual Archaeology. dalam Ian Hodder (Ed.). *The Meanings of Things; Material Culture and Symbolic Expression*. New York: Harper Collins Academic. hal 64-78.
- Hodder, Ian., Scott Hutson. 2003. *Reading The Past; Current Approaches to Interpretation in Archaeology*. Ed. 3. Cambridge University Press.
- Hudson, Luanne B. 1984. Modern Material Culture Studies; Anthropology As Archaeology. *American Behavioral Scientist Journal* Vol. 28, hal. 31-39.
- Johnson, Mathew.. 2000. *Archaeological Theory: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Jordan, Glenn. Chris Weedon. 1997. *Cultural Politics; Class, Race, Gender and The Postmodern World*. Oxford: Blackwell.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2011. *Teori dan Konsep-Konsep Penting Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer*. Jakarta: Dept. Filsafat FIB-UI.
- Lyndon, Jane., Uzma Z. Rizvi. 2012. Introduction: Postcolonialism and Archaeology. dalam Jane Lyndon dan Uzma Z. Rizvi (Ed.). *Handbook of Postcolonial Archaeology*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Lyndon, Jane., Uzma Z. Rizvi (Ed.) 2012. *Handbook of Postcolonial Archaeology*. California: Left Coast Press.
- Magetsari, Noerhadi. 2003. *Paradigma Baru Ilmu Arkeologi (Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia)*. Tidak dipublikasikan.
- McNiven, Ian J., Lynette Russel. 2009. Toward a Postcolonial Archaeology of Indigenous Australia. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira. Hal. 423-443.
- O'Donnell, Kevin. 2009. *Sejarah Ide-Ide*. Yogyakarta: Kanisius.
- Patterson, Thomas C. 1986. *The Last Sixty Yers: Toward a Social History of Americanist Archaeology in The United States*. *American Anthropologist* Vol. 88. Hal. 7-26.
- Preucel, Robert., Ian Hodder (eds.). 1996. *Contemporary Archaeology in Theory*. Oxford: Blackwell.
- Preucel, Robert W. 2006. *Archaeological Semiotics*. Victoria: Blackwell Publishing.
- Ritzer, George. (Ed.) 2005. *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage Publications.
- Schiffer, Michael Brian. 1976. *Behavioral Archaeology*. New York: Academic Press.
- Shanks, Michael., Ian Hodder. 1997. *Processual, Postprocessual and Interpretive Archaeology*. dalam Ian Hodder, Michael Shanks, dkk. (Ed.), *Interpreting Archaeology; Finding Meaning in The Past*. London: Routledge. hal 3-28.
- Shanks, Michael. 2009. *Postprocessual Archaeology and After*. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Hal. 133-144. Plymouth: Altamira.
- Sim, Stuart. 2005. *Postmodernism and Philosophy*. dalam Stuart Sim (Ed.). *The Routledge Companion to Postmodernism*. London: Routledge.
- Sim, Stuart (Ed.). 2005. *The Routledge Companion to Postmodernism*. London: Routledge.
- Smith, Philip. 2001. *Cultural Theory; An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Thomas, Julian. (Ed.). 2000. *Interpretive Archaeology; A Reader*. Leichester: Leichester University Press.
- Thomas, Julian., Christopher Tilley. 1992. TAG and 'post-modernism': a reply to John Bintliff. *Antiquity* Vol. 66. Hal 106-14. Taylor and Francis Online.
- Tilley, Christopher. 1993. Introduction: Interpretation and a Poetics of The Past. dalam Christopher Tilley (Ed.). *Interpretative Archaeology*. London: Berg.
2000. *Materialism and An Archaeology of Dissonance*. dalam Thomas, Julian. (Ed.). *Interpretive Archaeology; A Reader*. Leichester: Leichester University Press. Hal. 71-80.
- Trigger, Bruce G. 1978. *Time and traditions: Essays in archaeological interpretation*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
1989. *A History of Archaeological Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
2006. *A History of Archaeological Thought*. Ed.2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ward, Glenn. 2010. *Understand Postmodernism (Teach Yourself)*. London: Hodder & Stoughton.
- Webster, Gary S. 2009. *Culture History: A Culture-Historical Approach*. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira. Hal. 11-27.
- Wiley, Gordon R., Jeremy A. Sabloff. 1980. *A History of American archaeology*. Ed. 2. San Francisco: Freeman
- Woodward, Ian. 2007. *Understanding Material Culture*. London: Sage.



Kegiatan Focus Group Discussion Kawasan Megalitik Lore Lindu



Kegiatan Pameran dan Dialog Kebudayaan Gorontalo





DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



KUNJUNGI website kami

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/>



KebudayaanIndonesia



@budayasaya



budayasaya@gmail.com



@budayasaya



budayasaya

